

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2025.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 357);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

7.4 Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

- 7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 - Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 - 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.3 Transfer
 - 7.5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 7.5.1.5 Pembiayaan
 - 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.4 Aset lainnya
 - 7.5.3.5 Kewajiban
 - 7.5.3.6 Ekuitas
 - 7.5.4 Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan-LO
 - 7.5.4.2 Beban-LO
 - 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- 7.5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
- 7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.
- 7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
 - 7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas
 - 7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02
- 7.7 Penutup**

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

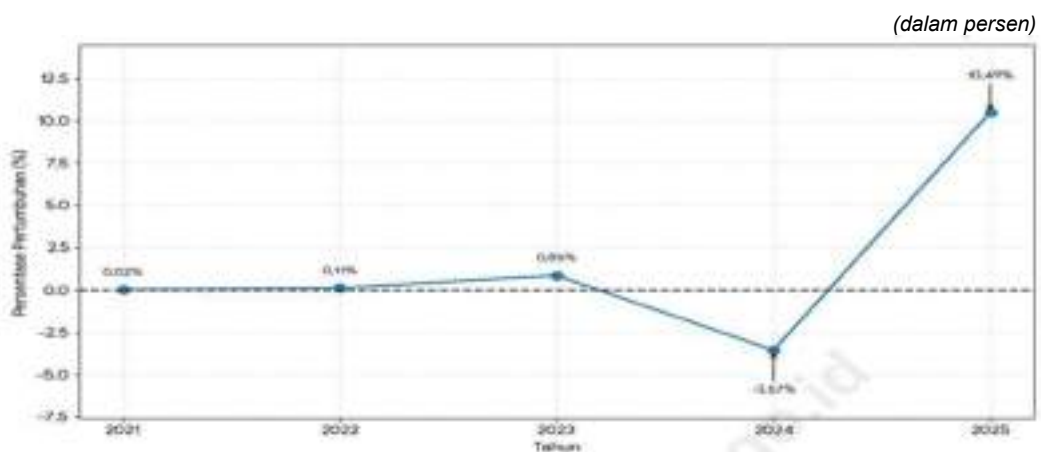
Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenteram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya atau kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Perekonomian Kabupaten Natuna selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun ditutup dengan pertumbuhan positif yang signifikan. Berdasarkan harga konstan, PDRB sempat mengalami kontraksi pada tahun 2024 ke angka 14.258,64 miliar rupiah, sebelum akhirnya melonjak tajam menjadi 15.754,76 miliar rupiah pada tahun 2025. Dinamika ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi yang kuat di akhir periode pengamatan.

Konsumsi rumah tangga muncul sebagai penopang utama stabilitas ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun. Nilainya terus merangkak naik hingga mencapai 5.507,26 miliar rupiah pada tahun 2025 (harga berlaku), menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Sektor ini menjadi bantalan krusial yang meredam dampak fluktuasi tajam pada komponen pengeluaran lainnya yang lebih volatil.

Sementara itu, ekspor neto tetap menjadi kontributor terbesar bagi struktur ekonomi Natuna, meskipun kinerjanya sangat dinamis. Pada tahun 2025, nilai ekspor neto kembali menguat ke angka 12.503,29 miliar rupiah setelah sempat menurun di tahun sebelumnya. Dominasi angka ekspor ini menegaskan ketergantungan ekonomi wilayah Natuna pada perdagangan luar daerah dan pasar global sebagai penggerak utama pendapatan regional.

Gambar 7.2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 di Kabupaten Natuna, 2021–2025



**Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2021–2025**

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.571,67	2.789,30	3.013,40	3.094,54	3.155,53
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	14.613,86	17.578,94	16.352,30	15.232,60	16.749,16
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	171,80	178,45	184,39	195,35	200,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	17,37	18,02	19,16	21,06	22,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,28	1,34	1,40	1,35	1,33
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.624,56	1.685,34	1.824,59	1.849,86	1.885,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	747,51	813,64	890,22	992,28	1.077,26
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	128,16	155,40	167,46	161,92	166,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	105,92	111,92	117,97	130,13	132,92
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	157,75	165,13	168,97	170,58	147,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	30,20	31,92	33,16	34,59	35,75
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	147,07	155,65	166,99	181,23	188,23
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	421,26	441,37	423,21	473,69	486,83
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	45,65	47,79	49,11	51,70	55,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	71,38	75,40	77,93	83,48	92,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	14,68	15,76	16,91	18,26	19,64
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		20.870,16	24.265,43	23.507,24	22.692,67	24.416,56
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		6.285,25	6.716,39	7.187,08	7.494,09	7.701,62

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

**Tabel 7.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2021–2025**

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.711,79	1.768,01	1.838,69	1.860,38	1.803,10
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	10.486,60	10.385,84	10.362,92	9.728,94	11.297,79
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	115,98	117,37	117,40	120,96	120,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	11,55	11,91	12,65	13,45	14,00
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,06	1,10	1,13	1,13	1,14
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.064,91	1.070,33	1.113,38	1.122,33	1.061,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	456,69	478,21	496,47	525,96	559,30
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	79,36	88,67	92,86	90,78	92,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	72,09	74,78	77,37	79,69	81,27
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	140,38	146,32	146,44	146,46	126,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and</i>	21,08	21,43	22,04	22,55	23,10

Lapangan Usaha/ Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Insurance Activities					
L	Real Estat/Real Estate Activities	110,52	114,41	118,10	126,17	126,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	289,00	296,07	298,23	327,07	348,57
P	Jasa Pendidikan/Education	25,92	26,73	26,89	28,07	29,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	48,62	50,37	50,89	53,64	57,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	9,82	10,17	10,63	11,04	11,36
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		14.645,40	14.661,76	14.786,10	14.258,64	15.754,76
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		4.177,8	4.294,8	4.442,9	4.550,4	4.477,2

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2021–2025

(dalam persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	12,32	11,49	12,82	13,64	12,92
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	70,02	72,44	69,56	67,13	68,60
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,82	0,74	0,78	0,86	0,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,08	0,07	0,08	0,09	0,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage Waste Management, and Remediation Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/Construction	7,78	6,95	7,76	8,15	7,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,58	3,35	3,79	4,37	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,61	0,64	0,71	0,71	0,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,51	0,46	0,50	0,57	0,54
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,76	0,68	0,72	0,75	0,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,70	0,64	0,71	0,80	0,77
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	~0	~0	~0	~0	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,02	1,82	1,80	2,09	1,99
P	Jasa Pendidikan/Education	0,22	0,20	0,21	0,23	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,34	0,31	0,33	0,37	0,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		30,12	27,68	30,57	33,02	31,54

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2021–2025

(dalam persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,63	3,28	4,00	1,18	-3,08
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,02	-0,96	-0,22	-6,12	16,13
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,14	1,20	0,02	3,04	-0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,39	3,17	6,16	6,34	4,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,43	3,32	3,43	0,05	0,14
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-4,52	0,51	4,02	0,80	-5,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1,83	4,71	3,82	5,94	6,34
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,12	11,74	4,72	-2,24	2,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,31	3,72	3,46	3,01	1,98
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,42	4,23	0,08	0,01	-13,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,48	1,67	2,82	2,33	2,41
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,50	3,52	3,22	6,83	-0,05
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,19	8,23	1,99	-1,13	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-1,58	2,45	0,73	9,67	6,57
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,46	3,11	0,61	4,38	5,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,01	3,61	1,02	5,40	6,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,31	3,60	4,46	3,86	2,93
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,02	0,11	0,85	-3,57	10,49
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		0,12	2,80	3,45	2,42	-1,61

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2021–2025

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	4.071,54	4.383,31	4.861,29	5.306,18	5.507,26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	12,82	13,11	14,82	16,14	17,17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.949,05	1.969,88	2.065,63	2.091,72	1.931,25
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.421,21	3.722,58	4.036,86	4.466,71	4.446,49
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	36,58	211,42	13,26	17,24	11,10
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	11.378,96	13.965,12	12.515,37	10.794,68	12.503,29
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	20.870,16	24.265,43	23.507,24	22.692,67	24.416,56

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2021–2025

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	2.671,24	2.790,76	2.897,64	3.011,79	3.030,54
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	7,76	7,86	8,56	9,12	9,61
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.152,53	1.162,18	1.167,13	1.173,30	1.107,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.103,87	2.173,41	2.241,65	2.445,87	2.399,37
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	17,86	99,15	6,21	7,42	2,25
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	8.692,15	8.428,40	8.464,91	7.611,14	9.205,80
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	14.645,40	14.661,76	14.786,10	14.258,64	15.754,76

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

1. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada pertengahan tahun 2025 tercatat sebanyak 84,91 ribu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 43,31 ribu jiwa, sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang berjumlah 41,60 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan distribusi penduduk yang cukup seimbang dengan proporsi laki-laki sebesar 51,01 persen dari total populasi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2025 yaitu 0,04 ribu jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 0,25 ribu jiwa/km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 0,01 ribu jiwa/km².

Dilihat dari komposisi kelompok umur, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk usia muda. Kelompok umur 15–19 tahun merupakan yang terbanyak dengan total 8,09 ribu jiwa, diikuti oleh kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 7,90 ribu jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia 70–74 tahun yang hanya sebesar 1,41 ribu jiwa. Rasio Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2025 adalah 48,70. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 sampai 49 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Usia non produktif terdiri atas usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia yang dianggap tidak produktif lagi (65+ tahun).

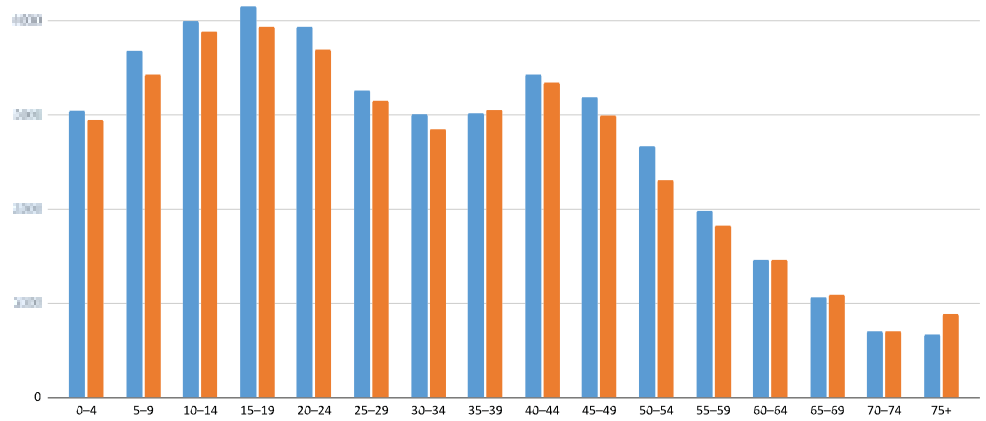
b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,78 persen, yang menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan angka tahun 2024 sebesar 72,85 persen.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Mengenai kondisi pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Natuna pada tahun 2025 berada pada level 3,98 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan TPT tahun 2024 yang sebesar 3,89 persen.

Gambar 7.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Tahun 2025



Tabel 7.2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan District	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) Population (thousand people)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Midai	3,44	-1,38
Suak Midai	1,79	-0,27
Bunguran Barat	7,85	-0,45
Bunguran Utara	4,09	-2,65
Pulau Laut	2,36	0,08
Pulai Tiga	3,93	0,81
Bunguran Batubi	3,92	-0,71
Pulau Tiga Barat	2,36	1,07
Pulau Seluan	0,85	...1
Bunguran Timur	29,38	1,37

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) <i>Population (thousand people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2025 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Bunguran Timur Laut	5,81	1,05
Bunguran Tengah	3,81	0,03
Bunguran Selatan	3,58	1,37
Serasan	5,25	-0,22
Subi	2,31	-5,45
Serasan Timur	3,34	0,17
Pulau Panjang	0,86	...2
Natuna	84,91	0,60

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.8 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk (ribu jiwa per km2) <i>Population Density (thousand people per sq.km)</i>
(1)	(2)	(3)
Midai	4,05	0,25
Suak Midai	2,10	0,14
Bunguran Barat	9,25	0,03
Bunguran Utara	4,82	0,01
Pulau Laut	2,78	0,06
Pulai Tiga	4,63	0,09
Bunguran Batubi	4,61	0,02
Pulau Tiga Barat	2,78	0,14
Pulau Seluan	1,00	0,12
Bunguran Timur	34,60	0,20
Bunguran Timur Laut	6,84	0,02
Bunguran Tengah	4,49	0,04
Bunguran Selatan	4,21	0,02
Serasan	6,19	0,12
Subi	2,72	0,02
Serasan Timur	3,93	0,11
Pulau Panjang	1,01	0,11
Natuna	100,00	0,04

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(2)
Midai	100,88
Suak Midai	101,24
Bunguran Barat	104,64
Bunguran Utara	106,30
Pulau Laut	109,88
Pulai Tiga	107,93
Bunguran Batubi	106,71
Pulau Tiga Barat	103,01
Pulau Seluan	100,95

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(2)
Bunguran Timur	102,13
Bunguran Timur Laut	108,47
Bunguran Tengah	106,17
Bunguran Selatan	109,06
Serasan	102,86
Subi	94,93
Serasan Timur	106,30
Pulau Panjang	106,49
Natuna	104,12

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	3.05	2.95	6.00
5–9	3.69	3.43	7.12
10–14	4.01	3.89	7.90
15–19	4.15	3.94	8.09
20–24	3.94	3.70	7.65
25–29	3.26	3.16	6.42
30–34	3.01	2.86	5.87
35–39	3.02	3.06	6.07
40–44	3.43	3.34	6.77
45–49	3.19	2.99	6.18
50–54	2.67	2.31	4.98
55–59	1.98	1.82	3.81
60–64	1.47	1.47	2.94
65–69	1.07	1.09	2.15
70–74	0.70	0.71	1.41
75+	0.67	0.88	1.55
Natuna	43.31	41.60	84.91

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

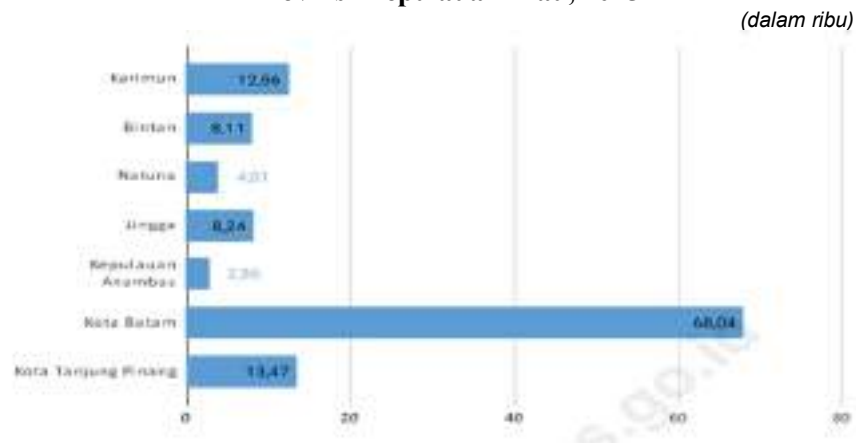
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Programme (UNDP). IPM sendiri bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga dimensi dasar yang membentuk IPM terdiri atas Umur Panjang dan Hidup Sehat yang dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Pengetahuan yang dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Standar Hidup Layak yang dapat dilihat dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan mencapai 2.183,29 ribu jiwa, dan meningkat menjadi 2.213,46 ribu jiwa pada tahun

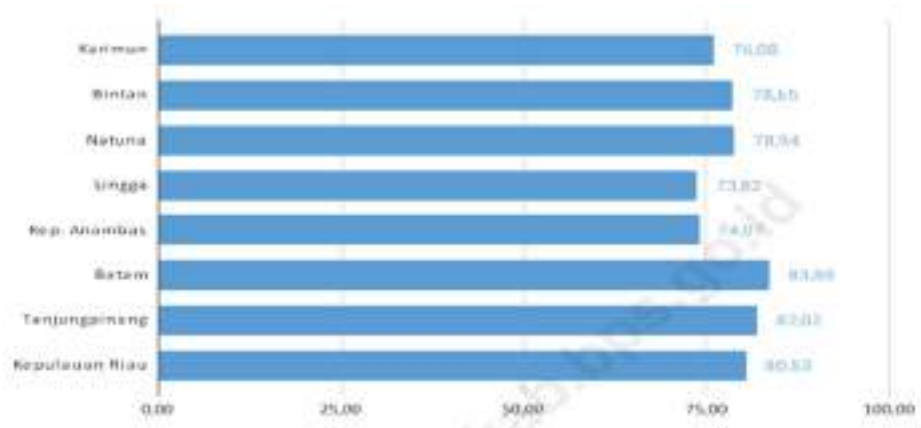
2026. Kota Batam menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk tertinggi yang mencapai sekitar 58,5% dari total populasi provinsi. Di sisi lain, Kabupaten Natuna merupakan wilayah dengan penduduk terendah kedua setelah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan jumlah penduduk sebanyak 86,76 ribu jiwa pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2021–2025. Peningkatan ini sejalan dengan kemajuan di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2025, Kota Batam mencatatkan IPM tertinggi sebesar 83,80, sedangkan Kabupaten Lingga memiliki IPM terendah yaitu 73,82. Kabupaten Natuna sendiri berhasil menempati peringkat ketiga di provinsi ini dengan nilai IPM sebesar 78,94 yang masuk dalam kategori status “Tinggi”. Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Natuna terus menunjukkan tren positif, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 78,94 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2024 yang berada di level 78,60 dan tahun 2023 di angka 78,23. Kenaikan yang stabil sejak tahun 2020 mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Gambar 7.2.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2025



Gambar 7.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2025



Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

Tabel 7.2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2022–2026

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
<i>Kabupaten/Regency</i>					
Karimun	257,80	260,60	263,34	266,01	268,59
Bintan	163,56	165,89	168,19	170,46	172,66
Natuna	83,43	84,56	85,66	86,76	87,83
Lingga	100,03	101,03	102,01	102,95	103,88
Kepulauan Anambas	48,44	49,09	49,73	50,36	50,98
<i>Kota/Municipality</i>					
Batam	1.215,14	1.236,01	1.256,61	1.276,93	1.296,96
Tanjung Pinang	229,54	232,20	234,84	237,43	239,96
Kepulauan Riau	2.089,89	2.121,48	2.152,63	2.183,29	2.213,46

Sumber: BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2026

2. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pengukuran kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

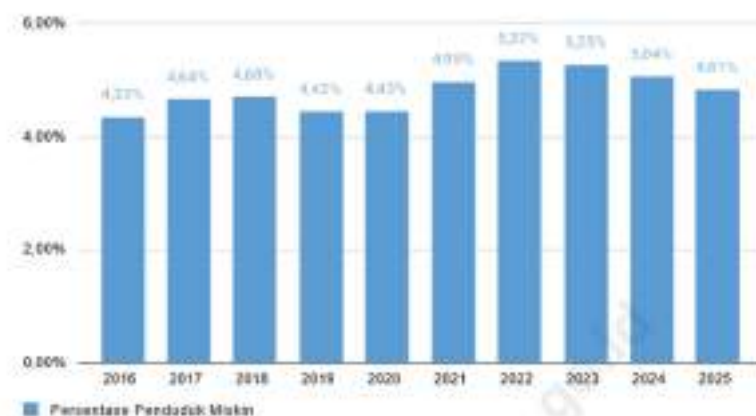
Seiring dengan kemajuan IPM, tingkat kemiskinan di Natuna juga mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 4,81%. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 4,01 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,17 ribu jiwa (5,04%). Meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp555.293 per kapita per bulan, penurunan persentase penduduk miskin ini menunjukkan adanya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dinamika biaya hidup. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 7.2.12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Percentage Penduduk Miskin di Kabupaten Natuna, 2016–2025

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Number of Poor People (thousand people)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	302.043	3,25	4,33

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Number of Poor People (thousand people)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	332.248	3,53	4,64
2018	362.519	3,60	4,68
2019	378.573	3,43	4,42
2020	408.164	3,47	4,43
2021	420.503	3,98	4,95
2022	449.302	4,32	5,32
2023	480.103	4,30	5,25
2024	501.927	4,17	5,04
2025	555.293	4,01	4,81

Gambar 7.2.5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Natuna Tahun 2016-2025



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Angka Kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,81%, menandakan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini lumayan sangat baik.

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Penerimaan Daerah dalam struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) dana perimbangan;

- 2) dana otonomi khusus;
 - 3) dana keistimewaan; dan
 - 4) dana Desa.
- b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan serangkaian langkah, strategi, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola serta meningkatkan sumber pendapatan yang tersedia bagi daerah tersebut. Kebijakan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kebijakan ini haruslah didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik daerah, serta harus diimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah menjadi sumber keuangan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam peningkatan pendapatan daerah dari beberapa sumber bukan hanya dari Pendapatan Daerah (PAD) tetapi ditambah dari dana transfer pemerintah pusat seperti Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID) dan Hibah. Sedangkan dana transfer pemerintah provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Tanah serta Pajak Rokok. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pendapatan yang realistis berdasarkan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan

untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan up dating data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam peningkatan pendapatan daerah dari beberapa sumber bukan hanya dari Pendapatan Daerah (PAD) tetapi ditambah dari dana transfer pemerintah pusat seperti Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal dan Hibah. Sedangkan dana transfer pemerintah provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Tanah serta Pajak Rokok. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pendapatan yang realistis berdasarkan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

1) Analisis Potensi Pendapatan:

Pemerintah daerah telah melakukan analisis terhadap potensi pendapatan pajak dan retribusi. Ini meliputi identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk dikenakan pajak atau retribusi, serta penilaian terhadap tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Analisis Potensi Pendapatan juga dilakukan dengan cara

memperbaiki data potensi perpajakan dengan melakukan *updating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)

2) Revisi Peraturan Perpajakan dan Retribusi.

Pemerintah daerah telah merevisi peraturan perpajakan dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tarif retribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak dengan inflasi atau perkembangan ekonomi, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan.

3) Penyuluhan dan Sosialisasi

Telah melakukan kampanye penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu serta konsekuensinya bagi pembangunan daerah. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang manfaat yang mereka dapatkan dari pembayaran pajak dan retribusi dalam penyediaan layanan publik melalui berbagai chanel promosi seperti media online dan media offline seperti memasang baliho. Selain itu juga dilakukan peningkatan SDM pengelola pajak dengan memberi pengetahuan tentang pemeriksaan pajak.

4) Peningkatan Administrasi Pajak dan Retribusi

Dalam usaha meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Ini meliputi penerapan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pajak dan retribusi serta pembayaran pajak dengan mekanisme memperbanyak *channel* pembayaran secara non tunai.

5) Penegakan Hukum

Akan dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi secara tegas dapat menjadi deteren bagi pelaku yang ingin menghindari kewajiban perpajakan bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam mendeteksi, menindak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi.

6) Kemitraan dengan Pihak Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah daerah akan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan atau perusahaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pembayaran pajak dan retribusi.

7) Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkat PAD adalah dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pajak. Adapun sarana yang telah disiapkan

taping box yang diperoleh dari Bank Riau Kepri sebagai sarana untuk wajib pajak melakukan perekaman transaksi penjualan.

b. Kebijakan Eksternal

1) Perubahan Kebijakan Pusat.

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan dalam bentuk perubahan kebijakan perpajakan yang menguntungkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam peningkatan alokasi bagi hasil pajak, pemberian insentif fiskal, atau penyesuaian regulasi perpajakan yang mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

2) Pengembangan Kerjasama Antar Daerah.

Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi. Kerjasama antar daerah meliputi koordinasi dengan dilakukan pertukaran informasi.

3) Kemitraan dengan Sektor Swasta.

Pemerintah daerah telah melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi. Seperti bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih efisien dan mudah diakses oleh Masyarakat berbasis elektronik.

4) Pendidikan dan Sosialisasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi telah dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa. Disamping itu juga dilakukan dengan Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP-K) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang juga memberikan dukungan dalam bentuk kampanye nasional yang meningkatkan kesadaran pajak serta pertukaran data.

5) Peningkatan Literasi Keuangan.

Peningkatan literasi keuangan di masyarakat juga turut membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah daerah telah menyelenggarakan program-program literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan melalui sosialisasi kepada ASN maupun masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah.
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak.
- c. Melakukan pemuktahiran data wajib pajak PBB-P2 serta melakukan perbaikan ketetapan atas fasilitas umum Pemerintah Daerah

- d. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat.
- e. Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- f. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- g. Percepatan penyerapan anggaran khusus kegiatan earmarked seperti DAK Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, dan DAU yang sudah ditentukan peruntukannya.
- h. Penandaan belanja daerah untuk kemiskinan ekstrem dan stunting dalam upaya untuk mendapatkan Dana Insentif Tahun Berjalan.
- i. Koordinasi penyaluran Kurang Bayar DBH dari secara TDF atau Non Tunai untuk disalurkan ke daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kewajiban regulatif, serta kebutuhan pembangunan yang mendesak. Pemerintah Kabupaten Natuna menempatkan belanja daerah bukan hanya sebagai instrumen pengeluaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan belanja diarahkan agar memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, baik dari sisi masukan, keluaran, maupun hasil yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan program perangkat daerah.

Secara lebih spesifik, kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk: (1) mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, (2) memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik, (3) memberikan stimulan bagi masyarakat maupun swasta agar berperan aktif dalam pembangunan, (4) mendukung kegiatan strategis yang memberi dampak luas bagi masyarakat, serta (5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Selain itu, belanja daerah juga ditetapkan pada kegiatan yang dapat memberikan timbal balik dalam bentuk pendapatan bagi pemerintah daerah (*cost recovery*), sehingga menciptakan siklus fiskal yang lebih berkelanjutan.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 pada akhirnya diprioritaskan untuk membiayai tiga kelompok belanja utama.

1. Prioritas pertama adalah pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) dan belanja mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Belanja wajib meliputi antara lain belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH), belanja pengawasan minimal 0,75 persen, belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja gaji dan tunjangan, belanja bagi hasil pajak, belanja bantuan kepada masyarakat, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja mengikat mencakup belanja pegawai, belanja JKN, belanja DAK/BOS, dan belanja operasional kantor yang bersifat rutin.
2. Prioritas kedua diarahkan untuk mendukung program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Alokasi belanja pada prioritas ini bersumber dari dana transfer yang bersifat wajib, seperti DAU Pendidikan, DAU Kesehatan, Insentif Fiskal, dan DAU Kelurahan.

Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga memastikan ketercapaian janji pembangunan kepala daerah.

3. Selanjutnya, prioritas ketiga adalah penggunaan belanja daerah untuk membayar kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga. Alokasi ini penting untuk menjaga kepercayaan, kredibilitas, serta kesinambungan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan.

Tujuan dan sasaran belanja mengacu ke pencapaian visi dan misi kepala daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Natuna adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”. Melaksanakan visi tersebut maka belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kabupaten Natuna. Karena Kabupaten Natuna secara geografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pariwisata, pertanian, perindustrian dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Natuna.

- 2) Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau, perbatasan, membangun beberapa sentra ekonomi antar kawasan dalam satu/inter Kabupaten Natuna guna mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir, karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat dan tidak merata. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, Pelabuhan, mendorong dan memfasilitasi untuk pengadaan Kapal/Ferry Ro Ro yang mengangkut orang dan barang-barang hasil produk masyarakat secara reguler yang menghubungkan akses transportasi antar pulau atau antar beberapa kawasan sentra ekonomi menuju akses dan pembangunan air bersih, listrik, peningkatan kualitas dan akselerasi akses telekomunikasi yang memadai, ketersediaan jaringan/signal yang standar dan mencukupi, yang dapat menjangkau desa terpencil seluruh Wilayah Kabupaten Natuna.

- 3) Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa beradaptasi, melakukan perbandingan dan bersaing dalam hal peningkatan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak

hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini yang tidak kalah pentingnya adalah agar SDM di Kabupaten Natuna memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter serta mampu bersaing.

4) Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas pegawai, penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi. Pemanfaatan teknologi informasi ini dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat karena secara geografis Kabupaten Natuna adalah daerah kepulauan.

5) Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai keagamaan, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Nilai

keagamaan dan budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Natuna tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Natuna menjadi modal tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih

penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun 2025 kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e) Penghematan belanja;
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan; dan / atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindaklanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2025 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2025.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2025 tergolong sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan yang dianggarkan sebesar

Rp1.087.894.043.594,00 dan terealisasi sebesar Rp 949.796.897.567,13 atau 87,31% dibandingkan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.309.442.057.434,61 dan terealisasi sebesar Rp972.909.236.075,86 atau 74,30%. Pada tahun 2025 terjadi penurunan Pendapatan sebesar Rp(23.112.338.508,73) atau sebesar (2,38)% berbanding tahun sebelumnya.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2025, dianggarkan sebesar Rp 1.091.928.300.594,00 terealisasi sebesar Rp948.189.379.679,76 atau sebesar 86,83% dibandingkan dengan belanja pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.473.414.715.900,00 terealisasi sebesar Rp1.132.775.011.078,58 atau sebesar 76,88%. Pada tahun 2025 terjadi penurunan Belanja sebesar Rp(184.585.631.398,82) atau sebesar (16,29)% berbanding tahun sebelumnya. Rendahnya penyerapan realisasi belanja tahun 2025 diakibatkan tidak tercapainya target pendapatan sehingga banyak tagihan belanja tidak terbayarkan sampai 31 Desember 2025.

Rendahnya penyerapan tidak terlalu berpengaruh terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam laporan evaluasi RKPD Tahun 2025. Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

- Kontribusi PDRB sub Sektor Perikanan mempunyai target 9,99% dengan realisasi 31,84 dengan katagori sangat tinggi.
- Usia Harapan Hidup (UHH) target 74,51 Tahun dengan realisasi 74,77 Tahun dengan katagori sangat tinggi.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) target 13,95 Tahun, dengan realisasi 13,94 tahun dengan katagori sangat tinggi.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) target 9,54 Tahun dengan realisasi 9,25 tahun dengan katagori sangat tinggi.

Indikator kinerja utama lainnya belum bisa disajikan dalam laporan keuangan ini dikarenakan pada saat terbitnya laporan keuangan ini laporan evaluasi Triwulan IV 2025 masih dalam proses penyusunan.

2. Capaian atas Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah selama tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 7.2.12 Tabel Capaian Atas Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025 (s.d. 31 Desember 2025)**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
I	Aspek Geografi dan Demografi						
1	Indeks Risiko Bencana (IRBi)	Indeks	112,4	110,36	140,34	127,17	Sangat Tinggi
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	60,4	60,4			
3	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) (A Indeks)	Indeks	76,46	79,53			
4	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	70	70,07			

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
5	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	680,39	680,39	99,87	14,68	Sangat Rendah
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	77,66	0,19	0,18		
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	(%)	15,57	15,21			
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	92,72	92,96	92,92	99,96	Sangat Tinggi
9	Kapasitas air baku (m3/detik)	m3/detik	0,18				
10	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	0	10,35			
11	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Kumulatif)	%	-	6,57			
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,54	0,25			
13	Persentase potensi konflik terselesaikan	%	100	100			
14	Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)	%	71	71,07			
15	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Tahunan)	%	-	10,35			
16	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,29	0,42	0,43	102,38	Sangat Tinggi
17	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	60,51	62,43			
18	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	179,76	195,22	179,76	92,08	Sangat Tinggi
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,805	0,762	0,805		
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,2	9,32	9,25	99,25	Sangat Tinggi
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	18,5	15,39	14,03	99,93	Sangat Tinggi
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,94	13,95	13,94	99,93	Sangat Tinggi
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,89	4,03	3,98		
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,21	65,47	65,21		
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64	64,25	64		
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Migas	%	-3,57	1,5			
10	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	-5,3	2,2			
11	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (<i>age specific fertility rate / ASFR 15 - 19</i>)	Angka	26,8	25,5			
12	Kontribusi PDRB Kabupaten Natuna terhadap Provinsi	%	6,44	7,27			
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,6	79,53			
14	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persentase	3,7	3,6			
15	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	12,12	14,05			
16	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,04	4,9	4,81		
17	Jumlah Kematian Ibu (per kasus kelahiran hidup)	Angka	2	2	3	150	Sangat Tinggi
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	20,38	0,06	0,06		
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	82,21	85,88	82,21		
20	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100	100	99,13	99,13	Sangat Tinggi
21	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Indeks	1,48	1,5			
22	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses Internet	%	62,5	65,5	70		
23	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	69,3	70,4	75,03		
24	Indeks Gini	Indeks	0,285	0,284	0,263		
25	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	59,83	61,33	66,93		
26	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)	%	25,58	25,84			
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,38	74,51	74,51	100	Sangat Tinggi
28	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	46,76	49,66	54,75		

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
29	Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	0	1,1			
30	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,89	0,94			
31	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	52,56	55,06	60,11	109,17	Sangat Tinggi
32	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	54,95	34,96			
33	PDRB Perkapita dengan Migas	%	268,37	298,7			
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	17,59	18,03			
35	PDRB Perkapita Tanpa Migas	%	87,48	89,23			
36	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun (%)	%	80,21	100	86,51		
37	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	(%)	65,4	65,9			
38	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tanpa Migas	%	2,42	3,12			
39	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	86/141	7	180	2571,43	Sangat Tinggi
40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	59,03	60,42			
41	Persentase Desa Mandiri	%	7,14	15,71	15,71		
42	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	(%)	67,13	70,2			
43	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota (%)	%	60,34	61,36			
44	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	9,67	10,14	31,84	314	Sangat Tinggi
III Aspek Daya Saing Daerah							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,86	0,9			
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,57	0,57			
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,3	2,46			
4	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,12	0,13			
IV Aspek Pelayanan Umum							
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,94	3,04			
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,61	3,62	3,68	101,66	Sangat Tinggi
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	88,22	88,55			
4	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77,4	78	71,54	91,72	Sangat Tinggi
5	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	86,01	86,01	86,01		
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,24	3,32	3,24		
V Indikator Kinerja Kunci (IKK)							
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
AA 1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun)	Angka	99,87	99,91	92,85	92,93	Sangat Tinggi
2	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	Angka	10,38	11,02	0,38	3,45	Sangat Rendah
3	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (13-15 Tahun)	Angka	98,67	98,89	98,44	99,54	Sangat Tinggi
4	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	Angka	86,51	89,48	59,02	65,96	Rendah
5	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,18	71,68	65,93		
6	Iklim Keamanan SD	Nilai	70,8	71,7	70,79		
7	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persentase	56,89	67,55	67,76		
8	Iklim Kebinekaan SD	%	67,32	70,6	66,2		
9	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	73,59	71,57	55,35		
10	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	55,4	57,9	55,39		
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	55,39	57,79	54		
12	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persentase	27,14	48,06	27,14		

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
AB	1.02. Urusan Kesehatan						
1	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	88,72	100	82,14	82,14	Tinggi
2	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,43	100	88,68	88,68	Tinggi
3	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	96,65	100	85	85	Tinggi
4	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	84	100	58,58	58,58	Rendah
5	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	97,87	100	99,17	99,17	Tinggi
6	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96,42	100	84,09	84,09	Tinggi
7	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	96,42	100	95,05	95,05	Tinggi
8	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	34,39	100	44,48	44,48	Sangat Rendah
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	82,32	100	84,43	84,43	Tinggi
10	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	95,52	100	76,82	76,82	Tinggi
11	Jumlah Kematian Ibu	Angka	2	2	3	150	Sangat Tinggi
12	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85,66	100	90,02	90,02	Tinggi
13	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	98,09	100	89,43	89,43	Tinggi
AC	1.03. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	%	9,84	9,84	9,84		
2	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	65,23	55,76	69,5	124,64	Sangat Tinggi
3	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	84,96	84,96			
4	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Dokumen	6	1	0		
5	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	%	42,58	42,58	42,93	100,82	Sangat Tinggi
6	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	83,06	83,06			
7	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan	%	20,93	20,93			
8	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan	%	68,38	68,38	67,31		
9	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	%	50	50	50	100	Sangat Tinggi
10	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	47,83	60,06	47,83	79,64	Tinggi
11	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	53,24	53,78	59,94	111,45	Sangat Tinggi
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	67,45	67,98			
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persentase	76	77			
14	Persentase Kemantapan Jalan	Persentase	52,44	53	59,94	113,09	Sangat Tinggi
15	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persentase	60,7	62,6			
AD	1.04. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Pemukiman Layak Huni	Rasio	0,24	0,24	0,19	79,17	Tinggi

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92	92	92,92	101	Sangat Tinggi
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	65	65	65	100	Sangat Tinggi
4	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	92	92	50	54,35	Rendah
AE 1.05. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	%	30	35,5			
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	60	65	0	0	Sangat Rendah
5	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	95	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	75	75	70	93,33	Sangat Tinggi
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	80	80	100	Sangat Tinggi
AF 1.06. Urusan Sosial							
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	70,9	70,9	68,56	96,7	Sangat Tinggi
2	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	0	0	60	100	Sangat Tinggi
7	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	70,9	70,9	68,56	96,7	Sangat Tinggi
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
11	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
12	Persentase anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
13	Persentase penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Keluarga	3.545	3.545	4.737		
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
AG 2.07. Urusan Tenaga Kerja							

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
1.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	2,33	2,33	2,47	106,01	Sangat Tinggi
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	0	0			
3.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0		
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	33,33	33,33	44,83	134,5	Sangat Tinggi
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,29	1,29	1,26	97,6	Sangat Tinggi
AH 2.08. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	73,04	73,04			
2	Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	%	100	100			
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	8,89	8,89			
AI 2.09. Urusan Pangan							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	14,29	30			
2	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	5,12	4,6			
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	16,7	14,7			
4	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/Kapita/Hari	2.447	2.400			
5	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari	2.754	2.100			
AJ 2.10. Urusan Pertanahan							
1	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	%	19,97	19,97			
2	Persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusiyang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	0	0		
3	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	80	80	0		
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0		
5	Persentase luas tanah bersertifikat	%	87	87	98		
6	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	%	0	0	0		
AK 2.11. Urusan Lingkungan Hidup							
1	Persentase Penanganan Sampah	%	35,5	35,5	31,65	89,15	Tinggi
2	Persentase Luas Area RTH	%	0	80	24,92	31,15	Sangat Rendah
3	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	45	45	35,25	78,33	Tinggi
4	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	0	0	0	100	Sangat Tinggi
5	Luas Lahan Konservasi	Ha	0	3,1	3,1	100	Sangat Tinggi
6	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	%	73,65	73,88	74,76	101,19	Sangat Tinggi
7	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	%	0	20,33	23,72	116,67	Sangat Tinggi
8	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	%	70,32	70,32	70,1	99,69	Sangat Tinggi
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
AL 2.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85	86	77,11	89,66	Tinggi
2	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	99,43	99,43	Sangat Tinggi
3	Persentase akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	82	83	79,97	96,35	Sangat Tinggi

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
4	Persentase penyajian Data Kependudukan	%	80	80	90	112,5	Sangat Tinggi
5	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	80	80	96,59	120,74	Sangat Tinggi
6	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	85	85	8,6	10,12	Rendah
7	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	80	85	100	117,65	Sangat Tinggi
AM 2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	2,86	2,86	2,86	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	24,45	24,45	24,45	100	Sangat Tinggi
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	42,87	42,87	42,87	100	Sangat Tinggi
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	2	2	2	100	Sangat Tinggi
AN 2.15. Urusan Perhubungan							
1.	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik	%	84,85	84,85	84,85	100	Sangat Tinggi
2.	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	75,02	75,02	75,02	100	Sangat Tinggi
AO 2.16. Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	0	60	60	100	Sangat Tinggi
AP 2.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	13,29	13,62			
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	29,51	29,51			
3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	11,7	11,73			
4	Persentase Koperasi yang di berikan Fasilitas Pelatihan	Persentase	25,73	25,73			
5	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	67,14	67,75			
AQ 2.18. Urusan Penanaman Modal							
1	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	101,52	101,52	Sangat Tinggi
2	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persentase	67,33	67,33	110,58	164,24	Sangat Tinggi
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0	5	143,64	2872,8	Sangat Tinggi
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	98,46	98,46	100	101,56	Sangat Tinggi
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	Sangat Tinggi
AR 2.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	14,88	15	13,49		
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	-	5			
3	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	-	5	9,68		
AS 2.22. Urusan Kebudayaan							
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	98,43	99,02	31,91		
AT 2.23. Urusan Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	85,38	85,5			
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74,48	75			
AU 2.24. Urusan Kearsipan							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	31,68	32			
3 Urusan Pemerintahan Pilihan							
AV 3.25. Urusan Kelautan dan Perikanan							

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
1	Persentase produksi perikanan tangkap	%	100	96,1	101,78	105,91	Sangat Tinggi
2	Persentase produksi perikanan budidaya	%	100	96,1	87,57	91,12	Sangat Tinggi
AW 3.26. Urusan Pariwisata							
1.	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang)	Persentase	31,14	31,14	71,18	228,58	Sangat Tinggi
2.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0	0	0	0	Rendah
3.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	18,52	18,52	17,58	94,92	Sangat Tinggi
3.27 3.27. Urusan Pertanian							
1.	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0,09	0,1			
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	0,52	0,52			
AY 3.30. Urusan Perdagangan							
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	60,21	61,25			
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	66,67	66,85			
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	Persentase	17,19	17,3			
4	Nilai Ekspor Barang	Persentase	0,68	0,68			
5	Persentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya	Persentase	36	36			
6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persentase	33,33	33,76			
AZ 3.31. Urusan Perindustrian							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	Persentase	14,24	14,3			
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persentase	70	75			
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Persentase	54,54	55,02			
BA 3.32. Urusan Transmigrasi							
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	33,32	33,32			
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
BB 4.01. Sekretariat Daerah							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,45	3,45	3,54	102,61	Sangat Tinggi
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10,34	10,34	4,39	42,46	Sangat Rendah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	13	15	22,31	148,73	Sangat Tinggi
4	Nilai LPPD	Nilai	3,3178	3,32	2,91	87,65	Tinggi
5	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	%	36	41	81,44	198,63	Sangat Tinggi
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,6	3,6	65,22	1811,67	Sangat Tinggi
7	Nilai LAKIP	Nilai	73,48	74,5	74,31	99,74	Sangat Tinggi
8	Indek akses keuangan daerah (IKAD)	Indeks			4,27	100	Sangat Tinggi
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
BC 5.01. Perencanaan							
1.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	0	87,5	83,33		
BD 5.02. Keuangan							
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	73,9	90,05			
2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	6,92	6,98			

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian 2025	Persentase Capaian Kinerja 2025 (%)	Status Kinerja
							P-RKPD 2025
3	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	33,8	33,75			
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	3,83	-0,026			
BE 5.03. Kepegawaian							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	46,13	50	79,2		
BF 5.04. Penelitian dan Pengembangan							
1	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0	0,71	0,76		
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	0	55	0		
6 Unsur Pengawasan							
BG 6.01. Inspektorat Daerah							
1	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3		
2	Maturitas penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	2		

Sumber : rancangan awal dokumen evaluasi RKPD TW. IV 2025

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pemantauan arus kas, manajemen investasi, pengelolaan hutang, pengelolaan risiko, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga melibatkan pengambilan keputusan terkait alokasi dana antara berbagai kebutuhan dan peluang, serta evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kemudian dilakukan pertanggungjawaban dengan memperhatikan aspek-aspek yaitu pemerintah daerah memastikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan transparan demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2020. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah. Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP dan Dak Non Fisik BOP Puskesmas yang langsung dikelola oleh Puskesmas serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing Sekolah Negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Pendapatan sebesar Rp1.087.894.043.594,00 dengan realisasi sebesar Rp949.796.897.567,13 atau 87,31%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp972.909.236.075,86, artinya realisasi Pendapatan tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp(23.112.338.508,73) atau sebesar (2,38)% dari realisasi Pendapatan tahun lalu. Pada tahun 2025 terdapat Penurunan anggaran pendapatan sebesar

Rp(92.105.956.406,00) dari yang dianggarkan semula pada APBD murni sebesar Rp1.180.000.000.000,00 menjadi Rp1.087.894.043.594,00 pada Perubahan APBD. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan alokasi dana transfer Pemerintah Pusat DAK Fisik dan DAU yang telah diatur peruntukannya.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.091.928.300.594,00 dengan realisasi sebesar Rp948.189.379.679,76 atau sebesar 86,84 % dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Belanja pada tahun 2024 sebesar Rp1.012.786.328.678,58 terjadi penurunan sebesar Rp(184.585.631.398,82) atau sebesar (16,29)% dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(158.071.931.406,00) dari yang dianggarkan semula di APBD murni Rp1.250.000.232.000,00 menjadi Rp Rp1.091.928.300.594,00 di Perubahan APBD. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari perubahan alokasi transfer pemerintah pusat. Rincian Realisasi belanja tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan	1.087.894.043.594,00	949.796.897.567,13	87,31	972.909.236.075,86
2	Belanja Daerah	1.091.928.300.594,00	948.189.379.679,76	86,84	1.132.775.011.078,58
	a. Belanja Operasi	786.569.356.592,00	707.186.118.581,96	89,91	834.092.842.507,02
	b. Belanja Modal	187.056.527.112,00	125.945.572.742,93	67,33	178.028.354.654,56
	c. Belanja Tidak Terduga	1.466.005.490,00	854.213.763,87	58,27	665.131.517,00
	d. Belanja Transfer	116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,75	119.988.682.400,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel 7.3.2 di bawah ini:

**Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.02.01.	Dinas Kesehatan	41.168.258.034,00	40.963.048.436,89	99,50	32.752.695.332,02
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.500.000,00	15.250.000,00	67,77	17.400.131,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	169.046.000,00	112,69	126.439.500,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	55.000.000,00	34.732.000,00	63,14	33.264.000,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00	0,00	0,00	116.964.101,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	12.000.000,00	20.350.000,00	169,58	7.260.000,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	342.111.500,00	327.654.000,00	95,77	158.025.230,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.046.024.174.060,00	908.266.817.130,24	86,83	939.697.187.781,84
Jumlah		1.087.894.043.594,00	949.796.897.567,13	87,31	972.909.236.075,86

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel 7.3.3 di bawah ini:

**Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	244.568.492.386,00	217.888.957.282,00	89,09	208.039.509.282,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	234.212.703.009,00	205.416.683.671,12	87,71	215.513.951.923,75

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.979.214.540,00	54.112.960.599,73	62,94	78.107.210.218,73
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	38.070.168.590,00	28.071.440.213,00	73,74	43.507.353.436,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.855.405.630,00	16.642.062.700,00	98,73	18.240.013.921,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.380.122.120,00	7.666.148.163,00	67,36	8.760.024.285,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.064.465.304,00	5.593.648.755,00	92,24	7.122.914.649,00
1.06.01.	Dinas Sosial	6.316.054.010,00	5.293.991.450,00	83,82	7.089.175.066,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.437.776.348,00	5.202.458.648,00	95,67	5.879.327.587,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.494.079.270,00	8.417.818.551,00	88,66	9.355.767.750,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.212.610.070,00	13.359.627.155,00	94,00	13.053.308.407,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	12.556.832.800,00	11.050.120.911,55	88,00	11.998.380.212,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.702.454.600,00	3.560.273.359,00	96,16	4.692.118.382,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.556.263.630,00	7.230.278.229,00	95,69	8.439.841.952,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	17.662.276.880,00	12.412.023.550,00	70,27	16.585.431.544,52
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.672.466.960,00	9.482.125.843,84	64,63	16.484.019.960,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.721.551.090,00	6.522.143.835,00	97,03	9.670.339.146,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.235.915.880,00	7.592.083.296,65	92,18	11.035.413.325,18
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.295.271.970,00	4.974.446.665,00	93,94	9.605.853.477,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	7.215.757.458,00	7.076.276.556,00	98,07	15.196.580.794,65
3.26.01.	Dinas Pariwisata	6.993.246.190,00	6.779.976.264,00	96,95	11.572.188.559,99
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	9.083.390.080,00	7.663.548.619,00	84,37	10.330.538.011,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	51.590.529.099,00	42.270.011.084,00	81,93	60.993.912.028,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	36.437.531.120,00	30.971.038.417,58	85,00	37.871.105.639,00
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.622.443.800,00	7.967.217.918,00	92,40	11.083.445.402,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	18.753.878.440,00	16.987.525.409,00	90,58	144.209.176.750,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.711.834.310,00	6.318.239.619,00	94,14	9.049.681.784,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.355.021.010,00	4.126.900.337,00	94,76	6.080.264.053,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	13.099.257.340,00	12.596.729.406,00	96,16	15.740.619.335,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	9.186.119.692,00	8.758.662.495,00	95,35	11.362.913.235,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.491.528.740,00	5.300.067.302,00	96,51	6.200.620.506,76
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2.862.347.200,00	2.815.446.170,00	98,36	5.145.910.024,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	2.962.490.050,00	2.873.918.589,00	97,01	4.894.445.683,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	4.026.342.098,00	3.933.215.275,00	97,69	6.136.131.889,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	4.546.475.049,00	4.359.125.192,00	95,88	6.330.940.869,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	3.578.275.150,00	3.453.127.130,00	96,50	5.238.624.636,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	2.169.900.520,00	2.022.418.681,00	93,20	2.899.383.951,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.257.597.810,00	2.206.576.822,00	97,74	2.670.532.056,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.179.143.700,00	3.023.620.379,42	95,11	4.802.186.016,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.196.754.820,00	2.098.971.241,00	95,55	3.055.784.519,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	2.242.204.370,00	2.186.041.738,00	97,50	4.346.300.952,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	2.194.005.230,00	2.156.572.761,00	98,29	4.135.006.003,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.689.272.481,00	2.560.521.868,00	95,21	3.842.930.291,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.469.912.850,00	2.352.440.185,00	95,24	3.226.564.218,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	2.206.646.020,00	2.179.710.212,00	98,78	2.659.526.533,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	1.933.326.930,00	1.809.478.546,00	93,59	3.011.942.491,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.042.532.550,00	6.649.496.500,00	94,42	27.507.800.325,00
Jumlah		975.091.889.194,00	833.985.905.088,76	85,53	1.012.786.328.678,58

Terhadap besaran anggaran dan realisasi Belanja per SKPD sesuai tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.599.625.135,00	187.685.854.400,00	93,56	186.107.638.844,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	213.877.314.128,00	188.508.402.916,17	88,14	181.913.323.458,61
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.884.921.608,00	14.318.833.068,15	75,82	16.694.075.356,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.677.888.244,00	11.308.127.586,00	67,80	16.987.406.554,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.217.105.630,00	16.003.762.700,00	98,68	17.767.803.921,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.894.595.120,00	7.644.898.163,00	96,83	8.145.725.535,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.908.548.304,00	5.437.731.755,00	92,03	6.813.149.359,00
1.06.01.	Dinas Sosial	6.279.554.010,00	5.281.004.450,00	84,09	7.046.775.066,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.106.443.934,00	4.871.126.234,00	95,39	5.816.663.587,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.336.984.270,00	8.260.723.551,00	88,47	9.355.767.750,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.123.411.346,00	12.727.968.431,00	96,98	12.887.706.407,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	8.579.827.000,00	8.225.048.425,00	95,86	10.038.222.212,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.591.851.587,00	3.449.670.346,00	96,04	4.692.118.382,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.312.497.589,00	6.986.645.188,00	95,54	8.236.557.952,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	9.906.384.836,00	8.687.722.222,00	87,69	10.189.596.778,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.376.346.960,00	7.562.785.843,84	61,10	12.735.482.328,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.059.918.084,00	5.860.510.829,00	96,70	6.796.117.904,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.191.517.396,00	5.613.684.814,00	90,66	9.136.594.544,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.971.253.970,00	4.680.964.110,00	94,16	5.506.050.977,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	7.202.099.348,00	7.062.780.506,00	98,06	14.580.260.145,65
3.26.01.	Dinas Pariwisata	5.863.611.490,00	5.650.341.564,00	96,36	10.115.527.445,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	8.580.380.988,00	7.410.539.527,00	86,36	10.023.903.011,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	49.692.870.682,00	41.735.014.584,00	83,98	59.784.342.528,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	31.446.686.548,00	26.718.786.847,00	84,96	37.481.209.100,00
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.609.943.800,00	7.957.227.918,00	92,41	10.645.095.402,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.880.115.190,00	15.732.495.380,00	93,20	21.163.616.466,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.711.834.310,00	6.318.239.619,00	94,13	8.811.231.784,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.310.271.010,00	4.082.150.337,00	94,70	5.747.264.053,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	12.677.875.340,00	12.200.862.706,00	96,23	14.937.499.335,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	9.029.969.692,00	8.602.512.495,00	95,26	10.780.130.360,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.152.228.740,00	4.960.767.302,00	96,28	6.135.180.506,76
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2.862.347.200,00	2.815.446.170,00	98,36	4.872.819.024,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	2.962.490.050,00	2.873.918.589,00	97,01	4.726.785.683,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	4.026.342.098,00	3.933.215.275,00	97,68	6.055.231.889,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	4.491.475.049,00	4.304.125.192,00	95,82	6.210.693.869,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	3.578.275.150,00	3.453.127.130,00	96,50	5.044.534.636,00

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	2.109.460.520,00	1.961.978.681,00	93,00	2.830.133.951,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.232.436.810,00	2.181.415.822,00	97,71	2.660.632.056,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.989.932.975,00	2.834.409.654,80	94,79	4.423.734.016,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.146.619.820,00	2.048.836.241,00	95,44	2.956.534.519,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	2.242.204.370,00	2.186.041.738,00	97,49	4.221.800.952,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	2.194.005.230,00	2.156.572.761,00	98,29	4.033.276.003,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.649.272.481,00	2.520.521.868,00	95,14	3.779.730.291,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.372.412.850,00	2.254.940.185,00	95,04	3.201.724.218,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	1.682.346.220,00	1.655.410.412,00	98,39	2.449.961.533,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	1.933.326.930,00	1.809.478.546,00	93,59	2.835.692.491,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.042.532.550,00	6.649.496.500,00	94,41	26.717.520.325,00
Jumlah		786.569.356.592,00	707.186.118.581,96	89,91	834.092.842.507,02

Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.968.867.251,00	30.203.102.882,00	68,69	21.931.870.438,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	20.335.388.881,00	16.908.280.754,95	83,15	33.600.628.465,14
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.094.292.932,00	39.794.127.531,58	59,31	61.413.134.862,73
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.392.280.346,00	16.763.312.627,00	78,36	26.519.946.882,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	638.300.000,00	638.300.000,00	100,00	472.210.000,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.485.527.000,00	21.250.000,00	0,61	614.298.750,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.917.000,00	155.917.000,00	100,00	309.765.290,00
1.06.01.	Dinas Sosial	36.500.000,00	12.987.000,00	35,58	42.400.000,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	331.332.414,00	331.332.414,00	100,00	62.664.000,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	157.095.000,00	157.095.000,00	100,00	0,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.089.198.724,00	631.658.724,00	57,99	165.602.000,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	3.977.005.800,00	2.825.072.486,55	71,04	1.960.158.000,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.603.013,00	110.603.013,00	100,00	0,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243.766.041,00	243.633.041,00	99,95	203.284.000,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	7.755.892.044,00	3.724.301.328,00	48,02	6.395.834.766,52
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.296.120.000,00	1.919.340.000,00	83,59	3.748.537.632,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	661.633.006,00	661.633.006,00	100,00	2.874.221.242,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.044.398.484,00	1.978.398.482,65	96,77	1.898.818.781,18
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.018.000,00	293.482.555,00	90,58	4.099.802.500,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	13.658.110,00	13.496.050,00	98,81	616.320.649,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	1.129.634.700,00	1.129.634.700,00	100,00	1.456.661.114,99
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	503.009.092,00	253.009.092,00	50,30	306.635.000,00
4.01.03.	Sekretariat Daerah	1.897.658.417,00	534.996.500,00	28,19	1.209.569.500,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	4.990.844.572,00	4.252.251.570,58	85,20	389.896.539,00
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.500.000,00	9.990.000,00	79,92	438.350.000,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	407.757.760,00	400.553.760,00	98,23	2.391.746.367,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	238.450.000,00

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	44.750.000,00	44.750.000,00	100,00	333.000.000,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	421.382.000,00	395.866.700,00	93,94	803.120.000,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	156.150.000,00	156.150.000,00	100,00	582.782.875,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	339.300.000,00	339.300.000,00	100,00	65.440.000,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	273.091.000,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	167.660.000,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	80.900.000,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	120.247.000,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	194.090.000,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	60.440.000,00	60.440.000,00	100,00	69.250.000,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	25.161.000,00	25.161.000,00	100,00	9.900.000,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	189.210.725,00	189.210.724,62	100,00	378.452.000,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	50.135.000,00	50.135.000,00	100,00	99.250.000,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	0,00	0,00	0,00	124.500.000,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	0,00	0,00	0,00	101.730.000,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	63.200.000,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00	24.840.000,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	524.299.800,00	524.299.800,00	100,00	209.565.000,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	0,00	0,00	0,00	176.250.000,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	790.280.000,00
Jumlah		187.056.527.112,00	125.945.572.742,93	67,33	178.028.354.654,56

**Tabel 7.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.466.005.490,00	854.213.763,87	58,27	665.131.517,00
Jumlah		1.466.005.490,00	854.213.763,87	58,27	665.131.517,00

**Tabel 7.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,75	119.988.682.400,00
Jumlah		116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,75	119.988.682.400,00

Dalam rangka pengelolaan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan pemenuhan Belanja wajib (*mandatory spending*) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan belanja *mandatory spending* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana pada sejumlah program atau kegiatan tertentu yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan yang mengikat. Pemenuhan Belanja wajib diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah diwajibkan untuk menganggarkan belanja bidang pendidikan minimal 20% dari total APBD. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan Belanja bidang pendidikan sebesar Rp244.897.466.830,00 atau sebesar 22,43% dari total APBD. Belanja bidang pendidikan dianggarkan pada SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta beberapa SKPD lainnya melaksanakan pekerjaan Program kegiatan yang menunjang fungsi pendidikan.

2. Pemenuhan Belanja Wajib Transfer ke Desa
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran bagi hasil pendapatan ke desa minimal 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta 10% dari pendapatan Dana Transfer dan Dana Perimbangan di luar DAK. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp5.082.902.400,00 atau sebesar 10% dari anggaran pajak dan retribusi daerah dan telah direalisasikan 100%. Sedangkan untuk bagi hasil data transfer dana perimbangan di luar DAK telah dianggarkan Rp 59.495.800.000,00 atau sebesar 10% dari alokasi pendapatan transfer di luar Dana DAK yang ditetapkan dalam rincian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
3. Pemenuhan Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp150.835.742.211,00 atau sebesar 15,47% dari total APBD setelah dikurangi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke desa. Belanja infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40% sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, persentase tersebut wajib dipenuhi paling lambat tahun anggaran 2027.
4. Belanja Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja Pengawasan sebesar Rp13.096.873.570,00 atau sebesar 1,20% dari total APBD.
5. Belanja Pengendalian Inflasi
Pemerintah kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja pengendalian inflasi sebesar Rp53.505.557.942,00.
6. Belanja Stunting
Pemerintah Kabuapten Natuna telah menggarkan belanja stunting sebesar Rp39.762.238.975,00,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah, disebabkan beberapa permasalahan:
 1. Kualitas SDM rendah
Petugas pajak/retribusi kurang memahami regulasi, teknologi, atau teknik intensifikasi pajak.
 2. Sistem administrasi dan data belum optimal
Basis data wajib pajak/retribusi tidak akurat, tumpang tindih, atau tidak terbaharui.
 3. Kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum
Rendahnya sanksi atau kontrol terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
 4. Inovasi dan digitalisasi terbatas
Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-tax, e-retribusi, atau sistem terpadu masih minim.
 5. Koordinasi antar perangkat daerah kurang efektif

Koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Dinas Perhubungan tidak sejalan dalam pendataan objek pajak.

6. Minimnya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 215.699.128.200,00 atau 64,86% dari yang dianggarkan Rp332.553.146.412,00. Penyebab utamanya adalah pada proses penganggaran telah memasukkan estimasi kurang bayar tahun sebelumnya atas DBH tersebut. Pemerintah tidak mempunyai alat tagih atas penyaluran kurang bayar tersebut. Pemerintah pusat akan menyalurkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 89,33% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp149.063.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp133.151.042.118,00. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DAK Fisik adalah adanya selisih antara pagu dengan data kontrak yang disampaikan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 21 Juli 2024, selain itu juga kendala penyerapan terkait lokasi pekerjaan dalam lingkup hutan lindung sehingga mengakibatkan pekerjaan yang sudah berkontrak tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.

Realisasi Belanja hanya terserap 86,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.091.928.300.594,00 terserap sebesar Rp948.189.379.679,76. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh banyaknya tagihan belanja pemerintah daerah yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 dikarenakan keterbatasan likuiditas kas Pemerintah Daerah. Penyebab keterbatasan likuiditas kas akibat tidak tercapainya target pendapatan. Salah satunya adalah tidak disalurkannya kurang bayar sesuai PMK 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dan PMK 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan pemantauan atas transaksi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dengan menempatkan beberapa orang petugas, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
2. Melakukan peningkatan terhadap SDM dibidang pendapatan khususnya pemeriksa atas pajak daerah.
3. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
4. Menetapkan prioritas yang jelas dalam alokasi anggaran dengan titik fokus pada program-program atau kegiatan yang dianggap paling penting dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi, dan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi perubahan atau masalah yang memerlukan tindakan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala dan terstruktur terhadap pencapaian target dan kinerja anggaran.

6. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
7. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan memfasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pemerintah daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah, serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

- 1) Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah (Kasda)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum

disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21, PPN dan Pajak lainnya, uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyeter seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan. Pencatatan pendapatan-LRA telah dapat dilakukan disaat uang telah berada di tangan Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan bagian dari BUD dalam entitas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

b. Kas Dana BOS

Kas Dana Bos mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, kas dana bergulir.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupat Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya presentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun Pajak yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dapat dipilah dalam beberapa kualifikasi terdiri dari:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - c. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Lainnya....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan dapat menjadi harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna ketika pelaksanaannya dapat menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya, wajib pajak dan retribusi yang telah bangkrut, meninggal sedangkan ahli waris tidak mampu membayar hutangnya dan sebagainya.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang yang telah dihapus bukukan
Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. harga pembelian;
 - b. biaya pengangkutan;

- c. biaya penanganan;
 - d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan adalah potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa sedangkan bonus pembelian berupa barang yang serupa diperlakukan sebagai perolehan lainnya. Sehingga biaya perolehan yang disajikan merupakan harga pembelian ditambah biaya-biaya (pengangkutan penanganan, biaya lain-lain) dikurangi potongan-potongan (harga, rabat, dan lainnya yang serupa).
2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
 3. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Dalam mencatat persediaan, Pemerintah Daerah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2024, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari beban persediaan adalah:

1. pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai beban pemeliharaan;
2. penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya yang dicatat sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya;
3. penyerahan barang persediaan dalam rangka pemberian hibah yang dicatat sebagai beban hibah;
4. penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai beban bantuan sosial; dan
5. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan apabila:

- 1) kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- 2) kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (material) dan perlengkapan (suplesi).

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian dan pengukuran aset tetap adalah:

1) Biaya Perolehan/Nilai Wajar Pada Saat Perolehan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara

kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai beban dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku untuk pengadaan baru maupun biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Nilai satuan minimum untuk peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bangunan gedung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk jenis aset tetap yang lain nilai minimumnya Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai aset tetap.

3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi.
2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

4) Biaya Perolehan Aset Tetap Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

5) Biaya Perolehan Aset Tetap Swakelola

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi antara lain:

- a) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Langkah dan prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan dalam daftar rincian barang;
- 2) mengelompokkan aset tetap dalam artian aset individual atau berkelompok;
- 3) menetapkan nilai wajar aset tetap, dalam hal ini dapat digunakan harga perolehan;
- 4) menetapkan nilai yang dapat disusutkan;
- 5) menghitung penyusutan, secara umum menggunakan metode garis lurus karena unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan ingin dilakukan semudah mungkin sehingga penyusutan lebih logis dan proporsional;
- 6) mencatat penyusutan ke dalam jurnal;
- 7) menyajikan penyusutan pada akun akumulasi penyusutan (neraca) dan beban penyusutan-LO;
- 8) mengungkapkan penyusutan dalam CaLK.

Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah untuk:

- 1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- 2) mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) peralatan dan mesin;
- 2) gedung dan bangunan;
- 3) jalan, irigasi, dan jaringan;
- 4) aset tetap renovasi; dan
- 5) aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) aset tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
- 2) aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasionalkan dan direklasifikasi ke jenis aset tetap yang bersangkutan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan;
- 4) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya;

- 5) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, dan
- 6) aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya direklasifikasi ke aset lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka aset tetap tersebut dapat dihapusbukukan. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan untuk dihapuskan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasi kembali ke aset tetap, dan disusutkan sesuai sisa umur manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan, dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu, yaitu nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:

- 1) daya pakai; dan
- 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

- 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; dan atau
- 2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan atau
- 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	02	09		Alat Persenjataan	

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	10
1	3	02	13	02	Produksi	10
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03	Alat sar	2
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas meliputi:

- 1) renovasi,
- 2) restorasi atau *overhaul*.

Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat. Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap. Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan

kondisi aset tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap. Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Bupati Natuna atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati Natuna.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang disahkan oleh Pengguna Barang, dan selanjutnya menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh PPK SKPD. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan pengurang pos aset tetap di Neraca. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai dasar penyusunan Neraca Restatement Pemerintah Kabupaten Natuna per 1 Januari 2015. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan aset tetap dan pengurang nilai ekuitas pada neraca, serta diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan. Dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada periode sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

Perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dinilai ulang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat adalah selisih antara masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan masa manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember 2006.
- 2) Nilai penyusutan dihitung dengan masa manfaat sejak tahun 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan sisa masa manfaat dikalikan dengan nilai aset.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi/Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.

- a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
- a. Pengukuran Pada Saat Perolehan
Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
 - 1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal
 - (a) Pembelian
ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.
Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - (b) Pertukaran
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - (c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam aspek pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud maka kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

3) Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Sementara, pengeluaran atau biaya yang telah dibebankan sebagai beban operasional tidak dapat diakui kembali sebagai aset.

4) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5) Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat.

Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a) Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b) Amortisasi untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut

- Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.
- c) Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas
- Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- 6) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.
 - b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

1. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 2. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. Pengukuran Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan Diterima di Muka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
 5. Pengukuran Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 6. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- 4) Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
 - b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

- 1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan:

- Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dan pengembalian secara kas dilakukan pada periode sebelumnya, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Apabila pengembalian kas terjadi pada tahun penyusunan Laporan Keuangan, maka koreksi tidak dilakukan pada akun periode sebelumnya melainkan dilakukan pada akun pendapatan tahun berjalan.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan tambahan pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.
- 3) Bagan Akun Standar yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan menggunakan konsep

pemetaan/*Mapping* dari akun basis kas ke akun basis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Mapping* akun yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tabel berikut ini:

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
1	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel			7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO
2	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya			7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
3	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya			7.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
4	4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling			7.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
5	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)			7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
6	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron			7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO
7	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain			7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO
8	4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker			7.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
9	4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri			7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
10	4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain			7.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
11	4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit			7.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit-LO
12	4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil			7.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
13	4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa			7.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
14	4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat			7.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat-LO
15	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya			7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
16	4.1.01.15.01.0001	PBBP2			7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO
17	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak			7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
18	4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru			7.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
19	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran			7.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO
20	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain			7.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
21	4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri			7.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
22	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel			7.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO
23	4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel			7.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
24	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran			7.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
25	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa			7.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
26	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB			7.1.01.20.01.0001	Opsen PKB-LO
27	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB			7.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB-LO
28	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas			7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
29	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO
30	4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			7.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
31	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan			7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
32	4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan			7.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
33	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir			7.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
34	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			7.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
35	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah			7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
		(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
36	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD			7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO
37	4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD			7.1.04.03.02.0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
38	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah			7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
39	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara			7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
40	4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP			7.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
41	4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas			7.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO
42	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah			7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
43	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
44	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
45	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
46	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya			7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
47	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron			7.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO
48	4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil			7.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
49	4.1.04.12.14.0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa			7.1.04.12.14.0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
50	4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya			7.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
51	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2			7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
52	4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru			7.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
53	4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran			7.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
54	4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel			7.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
55	4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran			7.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
56	4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa			7.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
57	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB			7.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO
58	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa			7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
59	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS			7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO
60	4.1.04.15.11.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD			7.1.04.15.11.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD-LO
61	4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat			7.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
62	4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi			7.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi-LO
63	4.1.04.15.16.0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			7.1.04.15.16.0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-LO
64	4.1.04.15.16.0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			7.1.04.15.16.0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
65	4.1.04.15.17.0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			7.1.04.15.17.0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
66	4.1.04.15.17.0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			7.1.04.15.17.0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
67	4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			7.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat-LO
68	4.1.04.15.34.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			7.1.04.15.34.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO
69	4.1.04.15.43.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			7.1.04.15.43.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
70	4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			7.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
71	4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			7.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
72	4.1.04.15.64.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar			7.1.04.15.64.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
73	4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten			7.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten-LO
74	4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya			7.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya-LO
75	4.1.04.15.65.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya			7.1.04.15.65.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
76	4.1.04.15.66.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			7.1.04.15.66.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
77	4.1.04.15.66.0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			7.1.04.15.66.0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
78	4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor			7.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
79	4.1.04.15.67.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya			7.1.04.15.67.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
80	4.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD			7.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD-LO
81	4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			7.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
82	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	2.1.06.13.10.0004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa		
83	4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya			7.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO
84	4.2.01.07.01.0001	DBH PBB			7.2.01.07.01.0001	DBH PBB-LO
85	4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21			7.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO
86	4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN			7.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO
87	4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			7.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO
88	4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi			7.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi-LO
89	4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi			7.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi-LO
90	4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent			7.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-LO
91	4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty			7.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO
92	4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			7.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO
93	4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan			7.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan-LO
94	4.2.01.08.01.0001	DAU			7.2.01.08.01.0001	DAU-LO
95	4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan			7.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
96	4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			7.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
97	4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			7.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO
98	4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan			7.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO
99	4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			7.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
100	4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler			7.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
101	4.2.01.09.01.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan			7.2.01.09.01.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO
102	4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			7.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
103	4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD			7.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO
104	4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD			7.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO
105	4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			7.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
106	4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB			7.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO
107	4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			7.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO
108	4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan			7.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO
109	4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian			7.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO
110	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor			7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
111	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
112	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
113	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan			7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
114	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok			7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
115	4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
116	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS
117	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK			8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK
118	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
119	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
120	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
121	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
122	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
123	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
124	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS
125	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK			8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK
126	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
127	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
128	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS
129	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK
130	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
131	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
132	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
133	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
134	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
135	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
136	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
137	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
138	5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS			8.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
139	5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK			8.1.01.02.02.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
140	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
141	5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK			8.1.01.02.03.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
142	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
143	5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK			8.1.01.02.04.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
144	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
145	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK			8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
146	5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan			8.1.01.02.06.0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
147	5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			8.1.01.02.06.0067	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
148	5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.02.06.0069	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
149	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD			8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD
150	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD			8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
151	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD			8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
152	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD			8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD
153	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD			8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
154	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD			8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
155	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD			8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
156	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
157	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD			8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD
158	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
159	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD			8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
160	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD			8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
161	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD			8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
162	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD			8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
163	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD			8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
164	5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH			8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
165	5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH			8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
166	5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH			8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
167	5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH			8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
168	5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
169	5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH			8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
170	5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH			8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
171	5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH			8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
172	5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH			8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
173	5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel			8.1.01.05.10.0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
174	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD			8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
175	5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH			8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
176	5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD			8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
177	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi		
178	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		
179	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas		
180	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku		
181	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman		
182	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas		
183	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		
184	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan		
185	5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian		
186	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya		
187	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		
188	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover		
189	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		
190	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		
191	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
192	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		
193	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		
194	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		
195	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas		
196	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga		
197	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata		
198	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
199	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.1.12.01.04.0001	Obat		
200	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		
201	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		
202	5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya		
203	5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
204	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.1.12.01.07.0001	Natura		
205	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.1.12.01.07.0002	Pakan		
206	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya		
207	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat
208	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
209	5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan			8.1.02.01.01.0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
210	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
211	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
212	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
213	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
214	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
215	5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
216	5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik			8.1.02.01.01.0069	Beban Pakaian Teknik
217	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja			8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
218	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah			8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah
219	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional			8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional
220	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga			8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga
221	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka			8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka
222	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
223	5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan			8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
224	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
225	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
226	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
227	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
228	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan			8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan
229	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
230	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
231	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
232	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
233	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
234	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
235	5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
236	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana			8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
237	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
238	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
239	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
240	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
241	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
242	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
243	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
244	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan
245	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir
246	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			8.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
247	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
248	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
249	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
250	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
251	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
252	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
253	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
254	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			8.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
255	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi			8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi
256	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah
257	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			8.1.02.02.01.0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah
258	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
259	5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal			8.1.02.02.01.0057	Beban Jasa Operator Kapal
260	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon			8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon
261	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air			8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air
262	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik
263	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
264	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan			8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
265	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman			8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman
266	5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya			8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya
267	5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan			8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan
268	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
269	5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
270	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
271	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
272	5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			8.1.02.02.01.0082	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
273	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
274	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3
275	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3
276	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
277	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
278	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
279	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			8.1.02.02.02.0009	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
280	5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan			8.1.02.02.02.0012	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan
281	5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan			8.1.02.02.02.0013	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan
282	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
283	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
284	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
285	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
286	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
287	5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang			8.1.02.02.04.0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
288	5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
289	5.1.02.02.04.0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain			8.1.02.02.04.0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
290	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
291	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
292	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel			8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel
293	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
294	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
295	5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.02.04.0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
296	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
297	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang			8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang
298	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
299	5.1.02.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool			8.1.02.02.05.0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
300	5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II			8.1.02.02.05.0039	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II
301	5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama			8.1.02.02.05.0042	Beban Sewa Asrama
302	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel			8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel
303	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
304	5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual			8.1.02.02.07.0013	Beban Sewa Audio Visual
305	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik			8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik
306	5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
307	5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
308	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			8.1.02.02.09.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
309	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
310	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
311	5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
312	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen			8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
313	5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata- Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata			8.1.02.02.10.0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata- Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
314	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
315	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi			8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi
316	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis
317	5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan			8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan
318	5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir			8.1.02.02.15.0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
319	5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman			8.1.02.03.01.0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
320	5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya			8.1.02.03.02.0034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
321	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
322	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
323	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
324	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
325	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
326	5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
327	5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus			8.1.02.03.02.0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
328	5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis			8.1.02.03.02.0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
329	5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			8.1.02.03.02.0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
330	5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			8.1.02.03.02.0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
331	5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah			8.1.02.03.02.0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
332	5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			8.1.02.03.02.0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
333	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
334	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
335	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
336	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
337	5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
338	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum			8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
339	5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya			8.1.02.03.02.0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
340	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
341	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
342	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
343	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
344	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
345	5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman			8.1.02.03.02.0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
346	5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			8.1.02.03.02.0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
347	5.1.02.03.02.0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			8.1.02.03.02.0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
348	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
349	5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi			8.1.02.03.03.0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
350	5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			8.1.02.03.03.0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
351	5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
352	5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
353	5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			8.1.02.03.03.0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
354	5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan			8.1.02.03.03.0016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
355	5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-			8.1.02.03.03.0017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
		Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum				Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
356	5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			8.1.02.03.03.0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
357	5.1.02.03.03.0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan			8.1.02.03.03.0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
358	5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
359	5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			8.1.02.03.03.0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
360	5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
361	5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			8.1.02.03.03.0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
362	5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.03.03.0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
363	5.1.02.03.03.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai			8.1.02.03.03.0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
364	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
365	5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
366	5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain			8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
367	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
368	5.1.02.03.05.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			8.1.02.03.05.0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
369	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
370	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
371	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
372	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
373	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi			8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
374	5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa			8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa
375	5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain			8.1.02.05.01.0008	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain
376	5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain			8.1.02.05.01.0009	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain
377	5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
378	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu			8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu
379	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
380	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
381	5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler			8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler
382	5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler			8.1.02.89.02.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler
383	5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja			8.1.02.89.02.0002	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja
384	5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler			8.1.02.89.03.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
385	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD			8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD
386	5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD			8.1.04.02.01.0001	Beban Subsidi kepada BUMD
387	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
388	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
389	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
390	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
391	5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
392	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
393	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta			8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
394	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
395	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
396	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
397	5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		
398	5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.3.01.01.01.0007	Tanah Persil Lainnya		
399	5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam		
400	5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.3.01.01.03.0019	Lapangan Lainnya		
401	5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.3.02.01.01.0003	Excavator		
402	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
403	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang		
404	5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus		
405	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		
406	5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
407	5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)		
408	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		
409	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		
410	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.3.02.05.02.0001	Mebel		
411	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih		
412	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin		
413	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur		
414	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
415	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran		
416	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat		
417	5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat		
418	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat		
419	5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat		
420	5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
421	5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
422	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat		
423	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		
424	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film		
425	5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak		
426	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone		
427	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum		
428	5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi		
429	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya		
430	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya		
431	5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi		
432	5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain		
433	5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian		
434	5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga		
435	5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.3.02.08.03.0015	Alat Peraga PAUD/TK		
436	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan		
437	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.3.02.10.01.0002	Personal Computer		
438	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya		
439	5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe		
440	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer		
441	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan		
442	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya		
443	5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.3.02.11.02.0002	Elektronik/Electric		
444	5.2.02.15.01.0002	Belanja Modal Suara	1.3.02.15.01.0002	Suara		
445	5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
446	5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan		
447	5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
448	5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		
449	5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		
450	5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		
451	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum		
452	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		
453	5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang		
454	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan		
455	5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
456	5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
457	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
458	5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga		
459	5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
460	5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
461	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum		
462	5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir		
463	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.3.03.01.01.0036	Taman		
464	5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
465	5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	1.3.03.01.02.0008	Flat/Rumah Susun		
466	5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.3.03.02.01.0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya		
467	5.2.03.03.01.0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	1.3.03.03.01.0002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai		
468	5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1.3.03.03.01.0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya		
469	5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi		
470	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.3.03.04.01.0004	Pagar		
471	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten		
472	5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa		
473	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya		
474	5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.3.04.01.02.0013	Jembatan Lainnya		
475	5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.3.04.02.02.0004	Saluran Pembuang Pasang Surut		
476	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
477	5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
478	5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
479	5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor		
480	5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.3.04.02.07.0006	Bangunan Air Kotor Lainnya		
481	5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
482	5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah		
483	5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	1.3.04.03.09.0004	Instalasi Pengaman Lainnya		
484	5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.3.04.04.01.0005	Jaringan Air Minum Lainnya		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Rekening	Nama Rekening
485	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya		
486	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		
487	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.3.05.02.01.0001	Alat Musik		
488	5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya		
489	5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		
490	5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		
491	5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		
492	5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		
493	5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.5.03.01.01.0002	Lisensi dan Franchise		
494	5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.5.03.01.01.0005	Software		
495	5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga			8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga
496	5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
497	5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
498	5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa			8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
499	5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	2.1.06.13.10.0004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa		

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	949.796.897.567,13	972.909.236.075,86

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025. Anggaran pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp1.087.894.043.594,00 dengan realisasi sebesar Rp949.796.897.567,13 atau sebesar 87,31% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp(23.112.338.508,73) atau sebesar (2,38)%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	123.341.230.757,00	109.812.491.029,13	88,03	67.726.908.953,86	42.085.582.075,27	62,14
2	Pendapatan Transfer	957.121.699.412,00	833.157.736.901,00	87,04	897.655.424.883,00	(64.497.687.982,00)	(7,19)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.431.113.425,00	6.826.669.637,00	91,86	7.526.902.239,00	(700.232.602,00)	(9,30)
Jumlah		1.087.894.043.594,00	949.796.897.567,13	87,31	972.909.236.075,86	(23.112.338.508,73)	(2,38)

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp109.812.491.029,13. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.085.582.075,27 atau 62,14%. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	67.135.486.000,00	59.975.027.423,00	89,33	27.007.756.522,38	32.967.270.900,62	122,07
2	Retribusi Daerah	34.438.756.109,00	34.641.594.142,00	100,59	1.657.755.749,00	32.983.838.393,00	1.989,67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.601.371.891,00	6.601.371.891,00	100,00	5.387.416.960,00	1.213.954.931,00	22,53

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Lain-lain PAD yang Sah	15.165.616.757,00	8.594.497.573,13	56,67	33.673.979.722,48	(25.079.482.149,35)	(74,48)
Jumlah		123.341.230.757,00	109.812.491.029,13	89,03	67.726.908.953,86	42.085.582.075,27	(62,08)

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 penyajian pajak daerah Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengikuti nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sebagian besar pajak daerah diklasifikasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah mulai menggunakan nomenklatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) efektif pada tahun anggaran 2025.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp59.975.027.423,00 atau sebesar 89,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp67.135.486.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024, realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.967.270.900,62 atau sebesar (122,07)%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	812.018.382,00	(812.018.382,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.690.423.509,00	(2.690.423.509,00)	(100,00)
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	41.784.700,00	(41.784.700,00)	(100,00)
4	Pajak Permainan Billar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	(1.155.000,00)	(100,00)
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	95.216.000,00	95,21	102.607.000,00	(7.391.000,00)	(7,20)
7	Pajak Reklame Kain	6.000.000,00	23.977.500,00	399,62	31.884.250,00	(7.906.750,00)	(24,80)
8	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	1.277.500,00	63,87	1.277.500,00	0,00	0,00
9	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	(1.883.000,00)	(100,00)
10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	6.887.728.615,00	(6.887.728.615,00)	(100,00)
11	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
12	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	70.036.960,00	233,45	0,00	70.036.960,00	100,00
13	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	20.517.872,00	41,03	40.750.580,00	(20.232.708,00)	(49,65)
14	Pajak Pasir Kuarsa	48.506.375.000,00	41.801.765.000,00	86,17	14.280.175.000,00	27.521.590.000,00	192,73
15	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	218.400,00	0,72	38.375.538,00	(38.157.138,00)	(99,43)
16	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	111.996.102,00	37,33	378.331.866,00	(266.335.764,00)	(70,40)
17	PBBP2	1.400.000.000,00	1.226.322.721,00	87,59	1.302.445.231,38	(76.122.510,38)	(5,84)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
18	BPHTB-Pemindahan Hak	450.000.000,00	440.499.482,00	97,88	317.925.875,00	122.573.607,00	38,55
19	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	266.783.058,00	266,78	77.290.476,00	189.492.582,00	245,17
20	PBJT-Restoran	1.200.000.000,00	1.690.932.632,00	140,91	0,00	1.690.932.632,00	100,00
21	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	6.250.000.000,00	6.483.357.528,00	103,73	0,00	6.483.357.528,00	100,00
22	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	3.061.111.000,00	5.686.307.875,00	185,75	0,00	5.686.307.875,00	100,00
23	PBJT-Hotel	200.000.000,00	230.690.622,00	115,34	0,00	230.690.622,00	100,00
24	PBJT-Permainan Ketangkasan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	5.000.000,00	2.790.000,00	55,80	0,00	2.790.000,00	100,00
26	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	500.000,00	245.000,00	49,00	0,00	245.000,00	100,00
27	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	40.000.000,00	38.932.000,00	97,33	0,00	38.932.000,00	100,00
28	Opsen PKB	4.000.000.000,00	1.294.988.171,00	32,37	0,00	1.294.988.171,00	100,00
29	Opsen BBNKB	1.400.000.000,00	488.173.000,00	34,86	0,00	488.173.000,00	100,00
Jumlah		67.135.486.000,00	59.975.027.423,00	89,33	27.007.756.522,38	32.967.270.900,62	122,07

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Anggaran dan realisasi pajak hotel pada tahun 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp812.018.382,00. Pada tahun 2025, Pajak hotel telah disajikan ke dalam PBJT-Hotel. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Anggaran dan realisasi Pajak Restoran pada tahun 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.690.423.509,00. Pada tahun 2025, Pajak Restoran telah disajikan ke dalam PBJT-Restoran. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, dan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*). Pada tahun 2025 Anggaran dan realisasi Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp44.439.700,00. Pada tahun 2025 Pajak Hiburan telah disajikan ke dalam PBJT-Hiburan. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Reklame Melekat/Stiker, dan Pajak Reklame Berjalan. Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp100.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp95.216.000,00 atau sebesar 95,21%. Anggaran Pajak Reklame Kain Rp6.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp23.977.500,00, atau sebesar 399,62%. Anggaran Pajak Reklame Melekat/Sticker sebesar Rp2.000.000,00, dengan realisasi Rp1.277.500,00 atau sebesar 63,86%. Anggaran untuk Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp0,00.

Secara keseluruhan Anggaran pendapatan pajak reklame pada tahun 2025 sebesar Rp110.500.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp120.471.000,00 atau sebesar 109,02% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak reklame dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(17.180.750,00) atau sebesar (12,48)%. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak reklame kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha dan kurang insentifnya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri, dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Pada tahun 2025 anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 sebesar Rp6.887.728.615,00. Pada tahun 2025, Pajak Penerangan Jalan telah disajikan ke dalam PBJT-Penerangan Jalan. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

f) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Anggaran pendapatan pajak air tanah pada tahun 2025 sebesar Rp0,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak air tanah mengalami penurunan sebesar Rp(200.000,00) dibandingkan tahun 2024 atau sebesar (100)%. Salah satu faktor penyebab menurunnya pajak air tanah dikarenakan potensi pajak yang relatif kecil, serta masih bersifat konsumsi pribadi maupun rumah tangga.

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Granit/Andesit, Pajak Pasir dan Kerikil, Pajak Pasir Kuarsa, Pajak Tanah Liat, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya. Pajak Granit/Andesit dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp70.036.960,00, atau sebesar 233,45%. Pajak Pasir dan Kerikil dianggarkan Rp50.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp20.517.872,00 atau 41,03%. Pajak Pasir Kuarsa dianggarkan Rp48.506.375.000,00, dengan realisasi Rp41.801.765.000,00, atau 86,17%. Pajak Tanah Liat dianggarkan Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp218.400,00 atau 0,72%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dianggarkan Rp300.000.000,00, dengan realisasi Rp111.996.102,00 atau sebesar 37,33%.

Secara keseluruhan anggaran pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2025 sebesar Rp48.916.375.000,00, dengan realisasi sebesar Rp42.004.534.334,00 atau sebesar 85,87% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp27.266.901.350,00 atau sebesar 185,02%. Faktor penyebab meningkatnya pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu harga jual pasir kuarsa sudah stabil sehingga Wajib Pajak telah melakukan kegiatan ekspor, serta penyelesaian piutang pajak pasir kuarsa tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2025 sebesar Rp1.400.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.226.322.721,00 atau sebesar 87,59% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar Rp(76.122.510,38) dibandingkan tahun 2024 atau sebesar (5,84)%. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena belum optimalnya penagihan pajak daerah disebabkan letak geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dan jarak tempuh relatif lama dan jauh.

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak, dan BPHTB-Pemberian Hak Baru. BPHTB-Pemindahan Hak dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp440.499.482,00 atau sebesar 97,88%. BPHTB-Pemberian Hak Baru dianggarkan Rp100.000.000,00, dengan realisasi Rp266.783.058,00 atau sebesar 266,78%.

Secara keseluruhan Anggaran Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp550.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp707.282.540,00 atau sebesar 128,59% dari anggaran yang ditetapkan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp312.066.189,00 atau sebesar 78,96%. Faktor penyebab meningkatnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena banyak masyarakat

mengurus sertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang mewajibkan penyelesaian BHTB sebelum pengambilan sertifikat di BPN.

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Berdasarkan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan.

Sedangkan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan sistem *official assessment* yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Secara umum menurunnya Pajak Daerah disebabkan kurangnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

j) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari Pajak Makanan dan Minuman, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Perhotelan, dan Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan. Anggaran Pajak Makanan dan Minuman tahun 2025 sebesar Rp1.200.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp1.690.932.632,00 atau sebesar 140,91%. Anggaran Pajak Tenaga Listrik sebesar Rp9.311.111.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp12.169.665.403,00 atau sebesar 130,70%. Anggaran Pajak Jasa Perhotelan sebesar Rp200.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp230.690.622,00 atau sebesar 115,34% dan untuk anggaran Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp47.500.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp41.967.000,00 atau sebesar 88,35%.

Secara keseluruhan Anggaran Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun 2025 sebesar Rp10.758.611.000,00, dengan realisasi sebesar Rp14.133.255.657,00 atau sebesar 131,36% dari anggaran yang ditetapkan.

Kenaikan realisasi Pajak BPJT restoran dan BPJT Jasa Perhotelan disebabkan perbaikan sistem pemungutan pajak dengan penggunaan tapping box /sistem digital transaksi. Sedangkan kenaikan realisasi pajak tenaga listrik disebabkan naiknya konsumsi penggunaan listrik.

k) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri dari Opsen PKB dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp4.000.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp1.294.988.171,00 atau sebesar 32,37%. Rendahnya realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat membayar Pajak.

j) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.400.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp488.173.000,00 atau

sebesar 34,86%. Rendahnya realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikarenakan rendahnya transaksi balik nama kendaraan, dan kesadaran masyarakat masih rendah untuk balik nama kendaraan bermotor sehingga banyak kendaraan di Kabupaten Natuna yang masih terdaftar di Provinsi lain.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp34.641.594.142,00 atau sebesar 100,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp34.438.756.109,00. Dibandingkan dengan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024, pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.983.838.393,00 atau sebesar 1.989,67%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah per SKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	33.737.144.609,00	34.034.162.142,00	100,88	1.198.448.148,00	32.835.713.994,00	2.739,85
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.500.000,00	15.250.000,00	67,77	17.400.000,00	(2.150.000,00)	(12,36)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	40.400.000,00	0,00	0,00	40.400.000,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	169.046.000,00	112,69	126.439.500,00	42.606.500,00	33,70
5	Dinas Perhubungan	55.000.000,00	34.732.000,00	63,14	33.264.000,00	1.468.000,00	4,41
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00	0,00	0,00	116.964.101,00	(116.964.101,00)	(100,00)
7	Dinas Perikanan	12.000.000,00	20.350.000,00	169,58	7.260.000,00	13.090.000,00	180,30
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	342.111.500,00	327.654.000,00	95,77	157.980.000,00	169.674.000,00	107,40
JUMLAH		34.438.756.109,00	34.641.594.142,00	100,59	1.657.755.749,00	32.983.838.393,00	1.989,67

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.737.144.609,00	34.034.162.142,00	100,88	1.198.448.148,00	32.835.713.994,00	2.739,85
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	169.046.000,00	112,69	126.439.500,00	42.606.500,00	33,70
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	137.030.000,00	(137.030.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.500.000,00	15.250.000,00	67,77	17.400.000,00	(2.150.000,00)	(12,36)
5	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	312.111.500,00	292.304.000,00	93,65	0,00	292.304.000,00	100
6	Retribusi Tempat Pelelangan	12.000.000,00	20.350.000,00	169,58	7.260.000,00	13.090.000,00	180,30
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	35.350.000,00	117,83	20.950.000,00	14.400.000,00	68,74
8	Retribusi Penyeberangan di Air	55.000.000,00	34.732.000,00	63,14	33.264.000,00	1.468.000,00	4,41
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	40.400.000,00	0,00	0,00	40.400.000,00	100
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	120.000.000,00	0,00	0,00	116.964.101,00	(116.964.101,00)	(100,00)
Jumlah		34.438.756.109,00	34.641.594.142,00	100,59	1.657.755.749,00	32.983.838.393,00	1.989,67

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp33.737.144.609,00, dengan realisasi sebesar Rp34.034.162.142,00 atau sebesar 100,88% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp32.835.713.994,00 dibandingkan tahun 2024 atau sebesar 2.739,85%. Retribusi Pelayanan Kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat realisasi tersebut pada Dinas Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan meningkatnya objek retribusi berupa pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas yang dikenakan biaya/tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran Pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada tahun 2025 sebesar Rp150.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp169.046.000,00 atau sebesar 112,69% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan sebesar Rp42.606.500,00, dibandingkan tahun 2024 atau sebesar 33,70%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu faktor meningkatnya pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan bertambahnya masyarakat yang menggunakan jasa pengambilan sampah yang dikenakan retribusi, masyarakat lebih memilih membayar kepada petugas daripada membuang langsung ket empat sampah.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2025 Rp0,00 atau tidak dianggarkan, sedangkan realisasi retribusi pelayanan pasar di tahun 2024 sebesar Rp137.030.000,00 atau sebesar (100,00)%. Retribusi Pelayanan Pasar secara teknis dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Tidak dianggarkan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2025 dikarenakan terjadi salah penggunaan kode akun saat proses penyusunan APBD tahun 2025. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2025 sebesar Rp22.500.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp15.250.000,00 atau sebesar 67,77% dari anggaran. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(2.150.000,00) atau sebesar (12,36)%. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

e) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Anggaran Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada tahun 2025 sebesar Rp312.111.500,00. Sedangkan realisasinya Sebesar Rp292.304.000 atau sebesar 93,65%. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan hasil dari Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

f) Retribusi Tempat Pelelangan

Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan pada tahun 2025 sebesar Rp12.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp20.350.000,00 atau sebesar 169,58% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.090.000,00 atau sebesar 180,30%. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

g) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00, sedangkan realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir di tahun 2025 sebesar Rp35.350.000,00 atau sebesar 117,83%. Dibandingkan dengan tahun 2024, Retribusi tempat Khusus Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp14.400.000,00 atau sebesar 68,74%. Retribusi Pelayanan Pasar secara teknis dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

h) Retribusi Penyeberangan di Air

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyeberangan di air pada tahun 2025 sebesar Rp55.000.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp34.732.000,00 atau sebesar 63,14% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.468.000,00 atau sebesar 4,41%. Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air dikelola oleh Dinas Perhubungan.

i) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Anggaran Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada tahun 2025 tidak dianggarkan, sedangkan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sebesar Rp40.400.000,00 atau sebesar 0,00%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah umumnya dikelola Rumah Sakit Umum Daerah.

j) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2025 sebesar Rp120.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(116.964.101,00) atau sebesar (100,00)%. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp6.601.371.891,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan deviden bagian Pemerintah Kabupaten Natuna atas penyertaan modal ke Bank Riau Kepri Syariah. Deviden tersebut merupakan hasil dari investasi jangka panjang pemerintah daerah pada Bank Riau Kepri Syariah sejumlah Rp36.038.100.000,00 atau sebesar 2,98% yang dicatat dengan metode biaya.

Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	6.601.371.891,00	6.601.371.891,00	100,00	5.387.416.960,00	1.213.954.931,00	22,53
Jumlah		6.601.371.891,00	6.601.371.891,00	100,00	5.387.416.960,00	1.213.954.931,00	22,53

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp8.594.497.573,13 atau sebesar 56,67% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibanding tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(25.079.482.149,35) atau sebesar (74,48)%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.079.316.280,00	(1.079.316.280,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	105.000.000,00	51.709.000,00	49,24	187.679.500,00	(135.970.500,00)	(72,45)
3	Jasa Giro	500.000.000,00	476.092.143,67	95,21	1.431.168.107,26	(955.075.963,59)	(66,73)
4	Pendapatan Bunga	198.050.309,00	29.926.990,54	15,11	1.306.195.871,41	(1.276.268.880,87)	(97,71)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.592.005.966,00	6.216.166.772,84	49,36	2.919.120.832,79	3.297.045.940,05	112,95
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	45.810.551,29	458,10	1.668.043.384,00	(1.622.232.832,71)	(97,25)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.038.000,00	158.220.577,00	78,31	52.648.954,00	105.571.623,00	200,52
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.456.522.482,00	1.476.070.319,90	101,34	159.538.290,00	1.316.532.029,90	825,21
10	Pendapatan BLUD	0,00	61.816.657,89	0,00	24.663.344.945,02	(24.601.528.287,13)	(99,75)
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	76.684.560,00	76,68	206.923.558,00	(130.238.998,00)	(62,94)
Jumlah		15.165.616.757,00	8.594.497.573,13	56,67	33.673.979.722,48	(25.079.482.149,35)	(74,48)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2025 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya sebesar Rp0,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.079.316.280,00 atau sebesar (100,00)%. Tidak dianggarkan pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dikarenakan Pemerintah Daerah tidak bisa menghitung berapa hasil *appraisal*/penilaian dari aset tetap dalam kondisi rusak berat yang akan dilakukan lelang oleh Kantor KPKNL. Penilaian atas aset tetap rusak berat yang akan dijual dilakukan pada tahun berjalan. Selain itu juga belum ada kepastian apakah aset tersebut akan terjual saat dilakukan pelelangan. Ada pun rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	900.680.000,00	(900.680.000,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	61.009.180,00	(61.009.180,00)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	0,00	0,00	117.627.100,00	(117.627.100,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.079.316.280,00	(1.079.316.280,00)	(100,00)

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp51.709.000,00 atau sebesar 49,24% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(135.970.500,00) atau sebesar (72,45)%. Adapun rincian pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Sewa BMD	5.000.000,00	11.603.000,00	232,06	81.680.000,00	(70.077.000,00)	(85,79)
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	40.106.000,00	40,10	105.999.500,00	(65.893.500,00)	(62,16)
Jumlah		105.000.000,00	51.709.000,00	49,24	187.679.500,00	(135.970.500,00)	(72,45)

c) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran Penerimaan Jasa Giro pada tahun 2025 sebesar Rp500.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp476.092.143,67 atau sebesar 95,21% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Penerimaan Jasa Giro mengalami penurunan sebesar Rp(955.075.963,59) atau sebesar (66,73)%. Adapun rincian Penerimaan Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Penerimaan Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00	413.053.843,00	82,61	988.144.586,00	(575.090.743,00)	(58,20)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	37.104.778,67	0,00	67.892.950,67	(30.788.172,00)	(45,35)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	357.662.472,59	(357.662.472,59)	(100,00)
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	100,00
5	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.933.214,00	0,00	17.468.098,00	8.465.116,00	48,46
Jumlah		500.000.000,00	476.092.143,67	95,21	1.431.168.107,26	(955.075.963,59)	(66,73)

d) Pendapatan Bunga

Anggaran Pendapatan Bunga pada tahun 2025 sebesar Rp198.050.309,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp29.926.990,54 atau sebesar 15,11% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Bunga dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.276.268.880,87) atau sebesar (97,71)%. Pendapatan Bunga pada tahun 2025 merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility*

(TDF) sebesar Rp29.857.822,00 dan sisanya sebesar Rp69.168,54 merupakan pendapatan bunga atas penempatan penerimaan Opsen PKB dan BBNKB pada Bank Rakyat Indonesia. Penurunan nilai realisasi pendapatan bunga dikarenakan Pemerintah Daerah tidak melakukan penempatan uang dalam bentuk deposito selama tahun 2025.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp12.592.005.966,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp6.216.166.772,84 atau sebesar 49,36% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.297.045.940,05 atau sebesar 112,95%. Adapun rincian penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.092.005.966,00	6.216.166.772,84	51,40	2.919.120.832,79	3.297.045.940,05	112,95
Jumlah		12.592.005.966,00	6.216.166.772,84	51,40	2.919.120.832,79	3.297.045.940,05	112,95

f) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Anggaran Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar Rp100,00%.

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp45.810.551,29 atau sebesar 458,10% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2024 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan sebesar Rp(1.622.232.832,71) atau sebesar (97,25)%. Penurunan ini disebabkan banyak pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh rekanan tidak diselesaikan sesuai kontrak perjanjian.

h) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp202.038.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp158.220.577,00 atau sebesar 78,31% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(105.571.623,00) atau sebesar (200,52)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	462.607,00	462.607,00	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	5.334.636,00	5.334.636,00	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	76.731,00	76.731,00	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	186.190,00	9,30	109.535,00	76.655,00	69,98
5	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	188.001.500,00	125.683.300,00	66,85	56.635,00	125.626.665,00	221.818,07

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000,00	22.780.297,00	379,67	45.934.395,00	(23.154.098,00)	(50,41)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00	1.262.256,00	126,22	674.415,00	587.841,00	87,16
8	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.036.500,00	6.542.934,00	129,91	0,00	6.542.934,00	100,00
9	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	1.765.600,00	0,00	0,00	1.765.600,00	100,00
Jumlah		202.038.000,00	158.220.577,00	78,31	52.648.954,00	105.571.623,00	200,52

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel dan realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel pada tahun 2025 sebesar 0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp462.607,00. Pada tahun 2025, Pendapatan Denda Pajak Hotel telah disajikan ke dalam Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pendapatan Denda Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran pada tahun 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp22.251. Pendapatan Denda Pajak Restoran telah disajikan ke dalam Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hiburan dan realisasi Pendapatan Denda Pajak Hiburan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp76.731,00. Pendapatan Denda Pajak Hiburan telah disajikan ke dalam Pendapatan Denda PBJT-Hiburan. Penyajian ini sesuai nomenklatur kode rekening terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Rincian Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	69.131,00	(69.131,00)	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
3	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	400,00	(400,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	76.731,00	(76.731,00)	(100,00)

4) Pendapatan Denda Pajak Reklame

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame pada tahun 2025 sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp186.190,00 atau sebesar 9,30% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar Rp76.655,00 atau sebesar 69,98%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel 7.5.14 Pendapatan Denda Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	186.190,00	9,30	83.210,00	102.980,00	123,76
2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	26.325,00	(26.325,00)	(100,00)
		2.000.000,00	186.190,00	9,30	109.535,00	76.655,00	69,98

5) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2025 sebesar Rp188.001.500,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp125.683.300,00, terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp48.290,00, Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa Sebesar Rp125.605.000,00 dan Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp30.010,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami peningkatan sebesar Rp125.626.665,00 atau sebesar 221.818,07%.

6) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025 sebesar Rp6.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp22.780.297,00 atau sebesar 379,67% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan sebesar Rp(23.154.098,00) atau sebesar (50,41)%.

7) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.262.256,00 atau sebesar 126,22% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp587.841,00 atau sebesar 87,16% Rincian Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut.

Tabel 7.5.15 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	1.262.256,00	0,00	674.415,00	587.841,00	87,16
Jumlah		1.000.000,00	1.262.256,00	126,22	674.415,00	587.841,00	87,16

i) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun 2025 sebesar Rp5.036.500,00, sedangkan realisasinya Sebesar Rp6.542.934,00 atau sebesar Rp129,91%. Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa (PBJT) sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	5.000.000,00	6.266.046,00	125,32	0,00	6.266.046,00	100,00
2	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	1.500,00	173.028,00	11.535,20	0,00	173.028,00	100,00
3	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
5	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	103.660,00	0,00	0,00	103.660,00	100,00
Jumlah		5.036.500,00	6.542.934,00	129,91	0,00	6.542.934,00	100,00

j) Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Anggaran Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.765.600,00 atau sebesar 100,00% dari tahun 2024.

k) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2025 sebesar Rp1.456.522.482,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.476.070.319,90 atau sebesar 101,34% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2024, Pendapatan dari Pengembalian mengalami kenaikan sebesar Rp1.476.070.319,90 atau sebesar 925,21%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.507.371,52	0,00	0,00	1.507.371,52	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	14,00	(14,00)	(100,00)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	50.000.000,00	5.661.718,84	11,32	11236777,00	(5.575.058,16)	(49,61)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS						
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	294.000,50	0,00	0,00	294.000,50	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	2500,00	(2.500,00)	(100,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	806312,00	(806.312,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	(138.000.000,00)	(100,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.394.187.982,00	1.394.187.982,00	100,00	0,00	1.394.187.982,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.334.500,00	12.334.500,00	100,00	4.851,00	12.329.649,00	254.167,16
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	9.487.836,00	(9.487.836,00)	(100,00)
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	521.441,00	0,00	0,00	521.441,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	4.972.684,00	0,00	0,00	4.972.684,00	0,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	17.075.922,00	0,00	0,00	17.075.922,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	13.222.000,00	0,00	0,00	13.222.000,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	9.135.000,00	0,00	0,00	9.135.000,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	10.569.150,04	0,00	0,00	10.569.150,04	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00
Jumlah		1.456.522.482,00	1.476.070.319,90	101,34	159.538.290,00	1.316.532.029,90	825,21

l) Pendapatan BLUD

Anggaran Pendapatan BLUD pada tahun 2025 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya sebesar Rp61.816.657,89 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2024 Pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp(24.601.528.287,13) atau sebesar (99,75)%. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa diatas 1 (satu) tahun pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD.

m) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp76.684.560,00 atau sebesar 76,68%. Dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir mengalami penurunan sebesar Rp(130.238.998,00) atau (62,94)%. Realisasi sebesar Rp76.684.560,00 terdiri dari penyetoran dana Bergulir UMKM yang telah dialihkan penagihan ke KPKNL Rp24.590.115,00, penyetoran Dana Bergulir UMKM yang dikelola Bank Riau Kepri Syariah Ranai Rp42.650.000,00, dan penyetoran Dana Bergulir Perikanan yang dikelola oleh Bank Riau Kepri Syariah Ranai Rp9.444.445,00.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp833.157.736.901,00 atau sebesar 87,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp957.121.699.412,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Transfer

mengalami penurunan sebesar Rp(64.497.687.982,00) atau sebesar (7,19)%. Penurunan Pendapatan Transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2025 yang akan direalisasikan penyalurannya di tahun 2025. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat	837.520.447.412,00	711.138.943.782,00	84,91	772.847.670.239,00	(61.708.726.457,00)	(7,98)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	66.179.476.000,00	65.469.682.594,00	98,92	60.067.570.000,00	5.402.112.594,00	8,99
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.421.776.000,00	56.549.110.525,00	105,85	64.740.184.644,00	(8.191.074.119,00)	(12,65)
Jumlah		957.121.699.412,00	833.157.736.901,00	87,04	897.655.424.883,00	(64.497.687.982,00)	(7,19)

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan tahun 2025 sebesar Rp711.138.943.782,00 atau sebesar 84,91% dari yang dianggarkan Rp837.520.447.412,00. Dibandingkan tahun 2024, Dana Perimbangan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(61.708.726.457,00) atau sebesar (7,98)%. Penurunan pendapatan transfer terjadi karena adanya kurang bayar Tahun 2024, yang belum disalurkan pada Tahun 2025 sesuai dengan PMK Nomor 89 Tahun 2024. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	191.349.122.000,00	116.953.745.200,00	61,12	88.080.772.910,00	28.872.972.290,00	32,78
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	141.204.024.412,00	98.745.383.000,00	69,93	124.038.209.000,00	(25.292.826.000,00)	(20,39)
3	Dana Alokasi Umum	408.285.020.000,00	406.043.734.973,00	99,45	427.577.646.211,00	(21.533.911.238,00)	(5,04)
4	Dana Alokasi Khusus	96.682.281.000,00	89.396.080.609,00	92,46	133.151.042.118,00	(43.754.961.509,00)	(32,86)
Jumlah		837.520.447.412,00	711.138.943.782,00	84,91	772.847.670.239,00	(61.708.726.457,00)	(7,98)

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rp116.953.745.200,00 atau sebesar 61,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp191.349.122.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp28.872.972.290,00 atau sebesar 32,78%, dibanding realisasi tahun 2024 Rp88.080.772.910,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH PBB	164.862.924.000,00	96.697.242.700,00	58,65	73.689.516.000,00	23.007.726.700,00	31,22
2	DBH PPh Pasal 21	25.285.297.000,00	19.295.029.300,00	76,31	13.664.344.000,00	5.630.685.300,00	41,21
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	1.181.127.000,00	939.982.200,00	79,58	716.590.000,00	223.392.200,00	31,17
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.774.000,00	21.491.000,00	108,68	10.322.910,00	11.168.090,00	108,19
Jumlah		191.349.122.000,00	116.953.745.200,00	61,12	88.080.772.910,00	28.872.972.290,00	32,78

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Rp98.745.383.000,00 atau sebesar 69,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.204.024.412,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 Realisasi Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami penurunan sebesar Rp(25.292.826.000,00) atau sebesar (20,39)%, dibanding realisasi tahun 2024 Rp124.038.209.000,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebagai berikut:

Tabel 7.5.21 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
DBH SDA Minyak Bumi	86.694.611.412,00	16.364.979.000,00	18,88	31.039.101.000,00	(14.674.122.000,00)	(47,28)
DBH SDA Gas Bumi	46.550.163.000,00	75.720.621.000,00	162,66	85.076.816.000,00	(9.356.195.000,00)	(11,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	475.609.200,00	532.438.000,00	111,95	14.578.000,00	517.860.000,00	3.552,34
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	151.458.800,00	660.382.000,00	436,01	635.047.000,00	25.335.000,00	3,99
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	71.734.000,00	64.156.000,00	89,44	12.219.000,00	51.937.000,00	425,05
DBH SDA Perikanan	7.260.448.000,00	5.402.807.000,00	74,41	7.260.448.000,00	(1.857.641.000,00)	(25,59)
Jumlah	141.204.024.412,00	98.745.383.000,00	69,93	124.038.209.000,00	(25.292.826.000,00)	(20,39)

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2025 sebesar Rp408.285.020.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp406.043.734.973,00 atau sebesar 99,45%. Dibandingkan dengan tahun 2024, Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp(21.533.911.238,00) atau sebesar (5,04)%, di mana penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2024 sebesar Rp427.577.646.211,00. Realisasi Dana Alokasi Umum dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Alokasi Umum – Block Grant	332.626.205.000,00	331.634.580.469,00	99,70	328.763.204.000,00	2.871.376.469,00	0,87
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.241.884.000,00	11.992.223.504,00	90,56	6.265.809.211,00	5.726.414.293,00	91,39
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	39.948.786.000,00	39.948.786.000,00	100,00	28.514.202.000,00	11.434.584.000,00	40,10
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.068.145.000,00	21.068.145.000,00	100,00	26.444.493.000,00	(5.376.348.000,00)	(20,33)
6	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	36.189.938.000,00	(36.189.938.000,00)	(100,00)
Jumlah		408.285.020.000,00	406.043.734.973,00	99,45	427.577.646.211,00	(21.533.911.238,00)	(5,04)

7.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun 2025 sebesar Rp96.682.281.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp89.396.080.609,00 atau sebesar 92,46%. Dibandingkan dengan tahun 2024, Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp(43.754.961.509,00) atau sebesar (32,86)%, di mana penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2024 sebesar Rp133.151.042.118,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Alokasi Khusus – Fisik	20.936.453.000,00	18.847.792.362,00	90,02	73.848.309.559,00	(55.000.517.197,00)	(74,48)
2	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	75.745.828.000,00	70.548.288.247,00	93,14	59.302.732.559,00	11.245.555.688,00	18,96
Jumlah		96.682.281.000,00	89.396.080.609,00	92,46	133.151.042.118,00	(43.754.961.509,00)	(32,86)

1. Dana Alokasi Khusus - Fisik

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 sebesar Rp20.936.453.000,00, sedangkan realisasinya adalah Rp18.847.792.362,00 atau sebesar 90,02% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan Rp(55.000.517.197,00) atau sebesar (74,48)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	899.922.000,00	899.467.488,00	99,95	563.797.250,00	335.670.238,00	59,54
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	311.892.000,00	311.834.250,00	99,98	3.143.237.709,00	(2.831.403.459,00)	(90,08)
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12.090.000.000,00	10.093.283.571,00	83,48	20.108.717.354,00	(10.015.433.783,00)	(49,81)
4	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	454.900.000,00	417.422.622,00	91,76	0,00	417.422.622,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.156.444.000,00	1.140.386.199,00	98,61	0,00	1.140.386.199,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.023.295.000,00	5.985.398.232,00	99,37	0,00	5.985.398.232,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.344.098.943,00	(2.344.098.943,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.956.418.000,00	(3.956.418.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.733.322.465,00	(4.733.322.465,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.047.276.321,00	(1.047.276.321,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	30.202.110.858,00	(30.202.110.858,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.477.790.000,00	(1.477.790.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	2.243.749.999,00	(2.243.749.999,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	1.657.542.093,00	(1.657.542.093,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.370.248.567,00	(2.370.248.567,00)	(100,00)
Jumlah		20.936.453.000,00	18.847.792.362,00	90,02	73.848.309.559,00	(55.000.517.197,00)	(74,48)

2. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus-Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp75.745.828.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.548.288.247,00 atau sebesar 93,14% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2024, Dana Alokasi Khusus-Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp11.245.555.688,00 atau sebesar 18,96%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.241.090.000,00	14.991.326.772,00	98,36	15.188.441.810,00	(197.115.038,00)	(1,30)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	663.750.000,00	663.750.000,00	100,00	685.000.000,00	(21.250.000,00)	(3,10)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.764.871.000,00	36.775.926.200,00	100,03	20.685.055.000,00	16.090.871.200,00	77,79
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	571.750.000,00	455.000.000,00	79,58	1.717.500.000,00	(1.262.500.000,00)	(73,51)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.620.576.000,00	1.611.996.600,00	99,47	1.558.896.000,00	53.100.600,00	3,41
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD - Reguler	2.186.328.000,00	2.120.502.622,00	96,99	2.264.801.090,00	(144.298.468,00)	(6,37)
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	299.780.000,00	299.480.000,00	99,90	310.110.000,00	(10.630.000,00)	(3,43)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.278.089.000,00	6.425.037.588,00	88,28	2.642.453.189,00	3.782.584.399,00	143,15
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	996.911.300,00	(996.911.300,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	459.438.750,00	(459.438.750,00)	(100,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	408.226.905,00	80,73	413.866.900,00	(5.639.995,00)	(1,36)
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.305.722.481,00	(1.305.722.481,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	314.365.080,00	(314.365.080,00)	(100,00)
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.046.542.000,00	2.353.387.200,00	77,25	2.373.230.890,00	(19.843.690,00)	(0,84)
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.400.772.000,00	4.277.064.360,00	57,79	8.386.940.069,00	(4.109.875.709,00)	(49,00)
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	81.870.000,00	81.870.000,00	100,00	0,00	81.870.000,00	100,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	54.720.000,00	54.720.000,00	100,00	0,00	54.720.000,00	100,00
Jumlah		75.745.828.000,00	70.548.288.247,00	93,14	59.302.732.559,00	11.245.555.688,00	18,96

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2025 sebesar Rp66.179.476.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.469.682.594,00 atau sebesar 98,93% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2024, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.402.112.594,00 atau sebesar 8,99%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.26 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Insentif Fiskal	13.921.767.000,00	13.909.893.000,00	99,91	5.699.849.000,00	8.210.044.000,00	144,04
2	Dana Desa	52.257.709.000,00	51.559.789.594,00	98,66	54.367.721.000,00	(2.807.931.406,00)	(5,16)
Jumlah		66.179.476.000,00	65.469.682.594,00	98,93	60.067.570.000,00	5.402.112.594,00	8,99

7.5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Kinerja tersebut bisa berupa perbaikan atau pencapaian di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan dasar, atau dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Anggaran Insentif Fiskal tahun 2025 Rp66.179.476.000,00, dengan realisasi sebesar Rp65.469.682.594,00 atau sebesar 99,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, insentif fiskal mengalami kenaikan sebesar

Rp8.210.044.000,00 atau sebesar 144,04% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.699.849.000,00. Insentif Fiskal tahun 2025 merupakan Insentif Fiskal atas Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

7.5.1.1.2.2 Dana Desa

Anggaran Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp52.257.709.000,00 dengan realisasi sebesar Rp51.559.789.594,00 atau sebesar 98,66% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2024 Dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp(2.807.931.406,00) atau sebesar (5,16)%.

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 sebesar Rp53.421.776.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.549.110.525,00 atau sebesar 105,85% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2024 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(8.191.074.119,00) sebesar (12,65)%.

Tabel 7.5.27 Rincian Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.059.776.000,00	56.211.110.525,00	105,93	64.180.184.644,00	(7.969.074.119,00)	(12,42)
2	Bantuan Keuangan	362.000.000,00	338.000.000,00	93,37	560.000.000,00	(222.000.000,00)	(39,64)
	Jumlah	53.421.776.000,00	56.549.110.525,00	105,85	64.740.184.644,00	(8.191.074.119,00)	(12,65)

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 sebesar Rp53.059.776.000,00 dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp56.211.110.525,00 atau sebesar 105,93% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar Rp(7.969.074.119,00) atau sebesar (12,42)%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.480.254.000,00	6.751.853.780,00	123,20	12.289.648.220,00	(5.537.794.440,00)	(45,06)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.004.702.000,00	5.645.727.156,00	112,80	9.315.715.032,00	(3.669.987.876,00)	(39,40)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.861.163.000,00	31.504.207.589,00	98,87	31.861.163.376,00	(356.955.787,00)	(1,12)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	47.960.000,00	1.185.371.828,00	2.471,58	47.960.592,00	1.137.411.236,00	2.371,55
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.665.697.000,00	11.123.950.172,00	104,29	10.665.697.424,00	458.252.748,00	4,30
	Jumlah	53.059.776.000,00	56.211.110.525,00	105,93	64.180.184.644,00	(7.969.074.119,00)	(12,42)

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp338.000.000,00 atau sebesar 93,37% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp(222.000.000,00) atau sebesar (39,64)%. Bantuan Keuangan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka bantuan

operasional untuk Posyandu dan RT/RW yang ada di wilayah kelurahan sebagaimana petunjuk teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp6.826.669.637,00 atau sebesar 91,86% dari yang dianggarkan Rp7.431.113.425,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp(700.232.602,00) atau sebesar 9,30%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	636.000.000,00	(636.000.000,00)	(100,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.431.113.425,00	6.826.669.637,00	91,86	6.890.902.239,00	(64.232.602,00)	(0,93)
Jumlah		7.431.113.425,00	6.826.669.637,00	91,86	7.526.902.239,00	(700.232.602,00)	(9,30)

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari yang dianggarkan 0,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan Hibah mengalami penurunan Rp636.000.000,00 atau (100,00)%.

7.5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 sebesar Rp6.826.669.637,00 atau sebesar 91,86% dari yang dianggarkan Rp7.431.113.425,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang pada tahun 2024 masuk ke lain-lain PAD yang sah. Rincian Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Nama FKTP	Pendapatan
1	Puskesmas Ranai	1.929.415.516,00
2	Puskesmas Bunguran Tengah	350.600.068,00
3	Puskesmas Tanjung	377.135.783,00
4	Puskesmas Kelarik	423.825.527,00
5	Puskesmas Batubi Jaya	242.217.279,00
6	Puskesmas Pulau Laut	253.231.722,00
7	Puskesmas Pulau Tiga	363.504.884,00
8	Puskesmas Pulau Tiga Barat	186.232.729,00
9	Puskesmas Serasan	570.104.475,00
10	Puskesmas Serasan Timur	370.162.773,00

No	Nama FKTP	Pendapatan
11	Puskesmas Subi	308.500.671,00
12	Puskesmas Midai	469.253.851,00
13	Puskesmas Sedanau	676.732.805,00
14	Puskesmas Bunguran Selatan	243.927.659,00
15	Puskesmas Suak Midai	61.823.895,00
Total		6.826.669.637,00

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	833.985.905.088,76	1.012.786.328.678,58

Realisasi Belanja tahun 2025 sebesar Rp833.985.905.088,76 atau 85,53% dari anggaran Belanja sebesar Rp975.091.889.194,00. Dibandingkan tahun 2024 realisasi Belanja mengalami penurunan sebesar Rp(178.800.423.589,82) atau sebesar (17,65)%. Rincian Realisasi Belanja per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	244.568.492.386,00	217.888.957.282,00	89,09	208.039.509.282,00	9.849.448.000,00	4,73
2	Dinas Kesehatan	234.212.703.009,00	205.416.683.671,12	87,71	215.513.951.923,75	(10.097.268.252,63)	(4,69)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.979.214.540,00	54.112.960.599,73	62,94	78.107.210.218,73	(23.994.249.619,00)	(30,72)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	38.070.168.590,00	28.071.440.213,00	73,74	43.507.353.436,00	(15.435.913.223,00)	(35,48)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.855.405.630,00	16.642.062.700,00	98,73	18.240.013.921,00	(1.597.951.221,00)	(8,76)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.380.122.120,00	7.666.148.163,00	67,36	8.760.024.285,00	(1.093.876.122,00)	(12,49)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.064.465.304,00	5.593.648.755,00	92,24	7.122.914.649,00	(1.529.265.894,00)	(21,47)
8	Dinas Sosial	6.316.054.010,00	5.293.991.450,00	83,82	7.089.175.066,00	(1.795.183.616,00)	(25,32)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.437.776.348,00	5.202.458.648,00	95,67	5.879.327.587,00	(676.868.939,00)	(11,51)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.494.079.270,00	8.417.818.551,00	88,66	9.355.767.750,00	(937.949.199,00)	(10,03)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.212.610.070,00	13.359.627.155,00	94,00	13.053.308.407,00	306.318.748,00	2,35
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.556.832.800,00	11.050.120.911,55	88,00	11.998.380.212,00	(948.259.300,45)	(7,90)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.702.454.600,00	3.560.273.359,00	96,16	4.692.118.382,00	(1.131.845.023,00)	(24,12)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.556.263.630,00	7.230.278.229,00	95,69	8.439.841.952,00	(1.209.563.723,00)	(14,33)
15	Dinas Perhubungan	17.662.276.880,00	12.412.023.550,00	70,27	16.585.431.544,52	(4.173.407.994,52)	(25,16)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.672.466.960,00	9.482.125.843,84	64,63	16.484.019.960,00	(7.001.894.116,16)	(42,48)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.721.551.090,00	6.522.143.835,00	97,03	9.670.339.146,00	(3.148.195.311,00)	(32,56)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.235.915.880,00	7.592.083.296,65	92,18	11.035.413.325,18	(3.443.330.028,53)	(31,20)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.295.271.970,00	4.974.446.665,00	93,94	9.605.853.477,00	(4.631.406.812,00)	(48,21)
20	Dinas Perikanan	7.215.757.458,00	7.076.276.556,00	98,07	15.196.580.794,65	(8.120.304.238,65)	(53,44)
21	Dinas Pariwisata	6.993.246.190,00	6.779.976.264,00	96,95	11.572.188.559,99	(4.792.212.295,99)	(41,41)
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.083.390.080,00	7.663.548.619,00	84,37	10.330.538.011,00	(2.666.989.392,00)	(25,82)
23	Sekretariat Daerah	51.590.529.099,00	42.270.011.084,00	81,93	60.993.912.028,00	(18.723.900.944,00)	(30,70)
24	Sekretariat DPRD	36.437.531.120,00	30.971.038.417,58	85,00	37.871.105.639,00	(6.900.067.221,42)	(18,22)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.622.443.800,00	7.967.217.918,00	92,40	11.083.445.402,00	(3.116.227.484,00)	(28,12)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	18.753.878.440,00	16.987.262.903,87	90,58	24.220.494.350,00	(7.233.231.446,13)	(29,86)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.711.834.310,00	6.318.239.619,00	94,14	9.049.681.784,00	(2.731.442.165,00)	(30,18)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.355.021.010,00	4.126.900.337,00	94,76	6.080.264.053,00	(1.953.363.716,00)	(32,13)
29	Inspektorat Daerah	13.099.257.340,00	12.596.729.406,00	96,16	15.740.619.335,00	(3.143.889.929,00)	(19,97)
30	Kecamatan Bunguran Timur	9.186.119.692,00	8.758.662.495,00	95,35	11.362.913.235,00	(2.604.250.740,00)	(22,92)
31	Kecamatan Bunguran Barat	5.491.528.740,00	5.300.067.302,00	96,51	6.200.620.506,76	(900.553.204,76)	(14,52)
32	Kecamatan Bunguran Utara	2.862.347.200,00	2.815.446.170,00	98,36	5.145.910.024,00	(2.330.463.854,00)	(45,29)
33	Kecamatan Pulau Laut	2.962.490.050,00	2.873.918.589,00	97,01	4.894.445.683,00	(2.020.527.094,00)	(41,28)
34	Kecamatan Midai	4.026.342.098,00	3.933.215.275,00	97,69	6.136.131.889,00	(2.202.916.614,00)	(35,90)
35	Kecamatan Serasan	4.546.475.049,00	4.359.125.192,00	95,88	6.330.940.869,00	(1.971.815.677,00)	(31,15)
36	Kecamatan Subi	3.578.275.150,00	3.453.127.130,00	96,50	5.238.624.636,00	(1.785.497.506,00)	(34,08)
37	Kecamatan Pulau Tiga	2.169.900.520,00	2.022.418.681,00	93,20	2.899.383.951,00	(876.965.270,00)	(30,25)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2.257.597.810,00	2.206.576.822,00	97,74	2.670.532.056,00	(463.955.234,00)	(17,37)
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.179.143.700,00	3.023.620.379,42	95,11	4.802.186.016,00	(1.778.565.636,58)	(37,04)
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2.196.754.820,00	2.098.971.241,00	95,55	3.055.784.519,00	(956.813.278,00)	(31,31)
41	Kecamatan Serasan Timur	2.242.204.370,00	2.186.041.738,00	97,50	4.346.300.952,00	(2.160.259.214,00)	(49,70)
42	Kecamatan Suak Midai	2.194.005.230,00	2.156.572.761,00	98,29	4.135.006.003,00	(1.978.433.242,00)	(47,85)
43	Kecamatan Bunguran Batubi	2.689.272.481,00	2.560.521.868,00	95,21	3.842.930.291,00	(1.282.408.423,00)	(33,37)
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.469.912.850,00	2.352.440.185,00	95,24	3.226.564.218,00	(874.124.033,00)	(27,09)
45	Kecamatan Pulau Panjang	2.206.646.020,00	2.179.710.212,00	98,78	2.659.526.533,00	(479.816.321,00)	(18,04)
46	Kecamatan Pulau Seluan	1.933.326.930,00	1.809.478.546,00	93,59	3.011.942.491,00	(1.202.463.945,00)	(39,92)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.042.532.550,00	6.649.496.500,00	94,42	27.507.800.325,00	(20.858.303.825,00)	(75,83)
JUMLAH		975.091.889.194,00	833.985.905.088,76	85,53	1.012.786.328.678,58	(178.800.423.589,82)	(17,65)

Rincian Realisasi Belanja sebesar Rp833.985.905.088,76 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Operasi	786.569.356.592,00	707.186.118.581,96	89,90	834.092.842.507,02	(126.906.723.925,06)	(15,21)
2.	Belanja Modal	187.056.527.112,00	125.945.572.742,93	67,33	178.028.354.654,56	(52.082.781.911,63)	(29,26)
3.	Belanja Tidak Terduga	1.466.005.490,00	854.213.763,87	58,26	665.131.517,00	189.082.246,87	28,43
Jumlah		975.091.889.194,00	833.985.905.088,76	85,53	1.012.786.328.678,58	(178.800.423.589,82)	(17,65)

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp707.186.118.581,96 atau sebesar 89,90% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp786.569.356.592,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp(126.906.723.925,06) atau sebesar (15,21)%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Pegawai	457.175.169.923,00	449.927.819.282,00	98,41	480.835.325.471,00	(30.907.506.189,00)	(6,43)
2.	Belanja Barang dan Jasa	305.666.776.852,00	243.169.874.604,96	79,55	308.495.704.962,37	(65.325.830.357,41)	(21,18)
3.	Belanja Subsidi	600.000.000,00	29.375.000,00	4,89	0,00	29.375.000,00	100,00
4.	Belanja Hibah	21.307.909.817,00	12.699.809.695,00	59,60	37.206.697.484,00	(24.506.887.789,00)	(65,87)
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.819.500.000,00	1.359.240.000,00	74,70	7.555.114.589,65	(6.195.874.589,65)	(82,01)
Jumlah		786.569.356.592,00	707.186.118.581,96	89,90	834.092.842.507,02	(126.906.723.925,06)	(15,21)

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp449.927.819.282,00 atau sebesar 98,41% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp(30.907.506.189,00) atau sebesar (6,43)%. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	159.082.471.036,00	155.883.439.263,00	97,99	150.048.698.079,00	5.834.741.184,00	3,89
2	Dinas Kesehatan	95.867.062.287,00	94.593.212.909,00	98,67	99.487.207.233,00	(4.893.994.324,00)	(4,92)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.261.091.450,00	8.069.239.323,00	97,68	9.616.210.375,00	(1.546.971.052,00)	(16,09)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.932.275.519,00	2.926.243.753,00	99,79	3.434.896.802,00	(508.653.049,00)	(14,81)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	10.256.619.836,00	10.105.439.353,00	98,53	11.265.990.132,00	(1.160.550.779,00)	(10,30)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.435.788.030,00	5.407.366.192,00	99,48	5.377.656.997,00	29.709.195,00	0,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.154.270.148,00	4.054.598.464,00	97,60	4.682.311.776,00	(627.713.312,00)	(13,41)
8	Dinas Sosial	3.121.195.564,00	2.992.340.680,00	95,87	3.419.418.591,00	(427.077.911,00)	(12,49)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.297.007.346,00	4.264.230.092,00	99,24	4.685.156.273,00	(420.926.181,00)	(8,98)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.221.256.370,00	3.204.378.836,00	99,48	3.944.376.897,00	(739.998.061,00)	(18,76)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.726.523.021,00	9.532.707.230,00	98,01	10.801.282.253,00	(1.268.575.023,00)	(11,74)
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.097.054.339,00	3.087.252.355,00	99,68	3.884.662.550,00	(797.410.195,00)	(20,53)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.106.408,00	2.612.580.303,00	99,26	3.376.269.129,00	(763.688.826,00)	(22,62)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.647.359.495,00	3.646.145.662,00	99,97	4.743.103.430,00	(1.096.957.768,00)	(23,13)
15	Dinas Perhubungan	3.417.696.645,00	3.368.540.068,00	98,56	4.137.352.871,00	(768.812.803,00)	(18,58)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.057.591.141,00	3.048.217.993,00	99,69	3.591.407.192,00	(543.189.199,00)	(15,12)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.838.668.885,00	4.758.320.729,00	98,34	5.287.666.789,00	(529.346.060,00)	(10,01)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.890.197.325,00	3.816.527.048,00	98,11	4.778.112.807,00	(961.585.759,00)	(20,12)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.468.715.864,00	3.397.593.643,00	97,95	3.937.882.660,00	(540.289.017,00)	(13,72)
20	Dinas Perikanan	5.633.776.739,00	5.587.084.352,00	99,17	6.414.775.681,00	(827.691.329,00)	(12,90)
21	Dinas Pariwisata	4.271.425.544,00	4.234.845.543,00	99,14	4.984.065.134,00	(749.219.591,00)	(15,03)
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.807.554.900,00	4.748.400.838,00	98,77	5.541.485.259,00	(793.084.421,00)	(14,31)
23	Sekretariat Daerah	20.120.347.570,00	19.923.369.115,00	99,02	22.106.000.679,00	(2.182.631.564,00)	(9,87)
24	Sekretariat DPRD	13.785.348.197,00	13.710.866.998,00	99,46	14.563.776.561,00	(852.909.563,00)	(5,86)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.692.654.459,00	5.639.152.686,00	99,06	6.753.497.567,00	(1.114.344.881,00)	(16,50)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.934.160.044,00	8.762.615.149,00	98,08	10.997.412.220,00	(2.234.797.071,00)	(20,32)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.367.683.808,00	5.309.693.467,00	98,92	6.384.125.929,00	(1.074.432.462,00)	(16,83)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.393.038.913,00	3.322.312.005,00	97,92	4.227.233.158,00	(904.921.153,00)	(21,41)
29	Inspektorat Daerah	9.586.790.362,00	9.544.637.110,00	99,56	10.961.464.244,00	(1.416.827.134,00)	(12,93)
30	Kecamatan Bunguran Timur	5.888.251.349,00	5.663.887.230,00	96,19	6.534.339.107,00	(870.451.877,00)	(13,32)
31	Kecamatan Bunguran Barat	3.356.314.902,00	3.288.012.157,00	97,96	3.981.184.450,00	(693.172.293,00)	(17,41)
32	Kecamatan Bunguran Utara	2.093.571.328,00	2.085.594.251,00	99,62	2.433.106.064,00	(347.511.813,00)	(14,28)
33	Kecamatan Pulau Laut	2.027.487.354,00	1.994.273.072,00	98,36	2.280.665.399,00	(286.392.327,00)	(12,56)
34	Kecamatan Midai	2.625.576.018,00	2.592.724.345,00	98,75	3.035.680.367,00	(442.956.022,00)	(14,59)
35	Kecamatan Serasan	2.984.859.345,00	2.948.365.049,00	98,78	3.341.675.286,00	(393.310.237,00)	(11,77)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
36	Kecamatan Subi	2.417.410.352,00	2.396.117.351,00	99,12	2.663.122.841,00	(267.005.490,00)	(10,03)
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.552.789.256,00	1.542.500.557,00	99,34	1.860.891.948,00	(318.391.391,00)	(17,11)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	1.882.379.310,00	1.873.723.673,00	99,54	2.005.653.041,00	(131.929.368,00)	(6,58)
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1.992.696.652,00	1.884.905.656,00	94,59	2.418.467.508,00	(533.561.852,00)	(22,06)
40	Kecamatan Bunguran Selatan	1.559.687.138,00	1.532.861.240,00	98,28	1.800.405.504,00	(267.544.264,00)	(14,86)
41	Kecamatan Serasan Timur	1.563.131.036,00	1.553.674.327,00	99,40	1.746.287.048,00	(192.612.721,00)	(11,03)
42	Kecamatan Suak Midai	1.625.174.961,00	1.603.804.591,00	98,69	2.067.522.396,00	(463.717.805,00)	(22,43)
43	Kecamatan Bunguran Batubi	1.743.631.075,00	1.731.362.865,00	99,30	2.037.008.741,00	(305.645.876,00)	(15,00)
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.729.899.580,00	1.676.685.481,00	96,92	2.035.381.688,00	(358.696.207,00)	(17,62)
45	Kecamatan Pulau Panjang	1.367.357.051,00	1.345.379.717,00	98,39	1.568.049.533,00	(222.669.816,00)	(14,20)
46	Kecamatan Pulau Seluan	1.309.947.430,00	1.226.807.253,00	93,65	1.595.937.684,00	(369.130.431,00)	(23,13)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.457.274.541,00	3.435.789.308,00	99,38	3.996.447.598,00	(560.658.290,00)	(14,03)
Jumlah		457.175.169.923,00	449.927.819.282,00	98,41	480.835.325.471,00	(30.907.506.189,00)	(6,43)

Rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp449.927.819.282,00, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	265.021.703.373,00	260.827.400.784,00	98,42	247.770.005.724,00	13.057.395.060,00	5,27
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	182.642.917.043,00	179.880.045.565,00	98,49	181.344.273.792,00	(1.464.228.227,00)	(0,81)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	42.879.354.599,00	(42.879.354.599,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.312.623.500,00	7.291.693.426,00	99,71	7.509.937.692,00	(218.244.266,00)	(2,91)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.295.977.864,00	1.293.959.507,00	99,84	402.771.664,00	891.187.843,00	221,26
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.948.143,00	601.200.000,00	99,88	554.000.000,00	47.200.000,00	8,52
7	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00	33.520.000,00	11,17	374.982.000,00	(341.462.000,00)	(91,06)
Jumlah		457.175.169.923,00	449.927.819.282,00	98,41	480.835.325.471,00	(30.907.506.189,00)	(6,43)

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang yang harus dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 Rp260.827.400.784,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp265.021.703.373,00, atau sebesar 98,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp13.057.395.060,00 atau sebesar 5,27%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penerimaan pegawai ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	144.489.960.788,00	143.349.362.689,00	99,21	143.870.771.838,00	(521.409.149,00)	(0,36)
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	49.324.082.902,00	49.131.275.368,00	99,60	36.036.813.400,00	13.094.461.968,00	36,34
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.662.846.200,00	13.621.003.954,00	99,69	13.721.123.708,00	(100.119.754,00)	(0,73)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.868.505.217,00	3.788.997.207,00	97,94	2.796.597.356,00	992.399.851,00	35,49
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.889.729.806,00	4.882.390.000,00	99,84	5.239.283.000,00	(356.893.000,00)	(6,81)
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.599.474.000,00	9.573.887.000,00	99,73	9.222.693.000,00	351.194.000,00	3,81
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	(1.095.000,00)	(100,00)
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.106.061.000,00	2.089.943.956,00	99,23	2.171.565.000,00	(81.621.044,00)	(3,76)
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.935.018.074,00	2.924.609.074,00	99,64	2.126.595.000,00	798.014.074,00	37,53
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.133.976.100,00	8.108.577.720,00	99,68	8.337.714.600,00	(229.136.880,00)	(2,75)
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.947.796.700,00	2.901.603.860,00	98,43	2.112.645.839,00	788.958.021,00	37,34
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.863.463.468,00	5.616.402.247,00	95,78	6.520.572.587,00	(904.170.340,00)	(13,87)
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	459.294.900,00	66.340.478,00	14,44	30.501.665,00	35.838.813,00	117,50
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.351.481,00	1.935.527,00	57,75	1.988.470,00	(52.943,00)	(2,66)
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.018.037,00	890.889,00	87,51	769.077,00	121.812,00	15,84
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.378.778.709,00	10.563.859.573,00	85,33	12.212.748.293,00	(1.648.888.720,00)	(13,50)
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.643.003.435,00	2.610.370.892,00	98,76	1.885.664.515,00	724.706.377,00	38,43
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	305.822.445,00	294.150.476,00	96,18	295.665.272,00	(1.514.796,00)	(0,51)
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	145.192.496,00	104.666.316,00	72,08	74.550.911,00	30.115.405,00	40,40
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	886.000.678,00	882.454.992,00	99,59	887.023.906,00	(4.568.914,00)	(0,52)
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	315.938.893,00	314.678.566,00	99,60	223.623.287,00	91.055.279,00	40,72
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	62.388.044,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah		265.021.703.373,00	260.827.400.784,00	98,41	247.770.005.724,00	13.057.395.060,00	5,27

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah anggaran yang dialokasikan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 Rp179.880.045.565,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp182.642.917.043,00 atau sebesar 98,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Tambahan Penghasilan ASN mengalami penurunan sebesar Rp(1.464.228.227,00) atau sebesar 0,81%. Penurunan ini terjadi karena adanya rasionalisasi/penurunan besaran TPP ASN untuk setiap kelas jabatannya sebesar 35,00% dibanding tahun 2024. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagai berikut:

Tabel 7.5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	40.658.720.166,00	39.694.105.791,00	97,62	53.880.077.360,00	(14.185.971.569,00)	(26,33)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.135.681.677,00	3.107.966.270,00	99,11	2.921.270.542,00	186.695.728,00	6,39
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.925.856.158,00	2.860.709.402,00	97,77	3.998.398.416,00	(1.137.689.014,00)	(28,45)
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	754.931.292,00	751.132.322,00	99,49	814.609.052,00	(63.476.730,00)	(7,79)
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.955.987.477,00	3.827.596.249,00	96,75	5.340.783.668,00	(1.513.187.419,00)	(28,33)
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	817.106.477,00	811.776.428,00	99,34	799.677.889,00	12.098.539,00	1,51

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.596.039.841,00	2.556.067.856,00	98,46	2.890.792.269,00	(334.724.413,00)	(11,58)
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	38.625.000,00	26.658.000,00	69,01	37.015.522,00	(10.357.522,00)	(27,98)
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	76.380.371.770,00	75.274.292.870,00	98,55	102.511.830.677,00	(27.237.537.807,00)	(26,57)
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.087.712.418,00	8.029.161.226,00	99,27	8.149.818.397,00	(120.657.171,00)	(1,48)
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	41.928.571,00	41.900.000,00	99,93	0,00	41.900.000,00	100,00
12	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.764.871.000,00	36.775.926.200,00	100,03	0,00	36.775.926.200,00	100,00
13	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.620.576.000,00	1.611.996.600,00	99,47	0,00	1.611.996.600,00	100,00
14	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	571.750.000,00	455.000.000,00	79,58	0,00	455.000.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.209.261.196,00	3.990.091.351,00	94,79	0,00	3.990.091.351,00	100,00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	83.498.000,00	65.665.000,00	78,64	9.450.000,00	56.215.000,00	594,87
Jumlah		182.642.917.043,00	179.880.045.565,00	98,49	181.353.723.792,00	(1.473.678.227,00)	(0,81)

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah anggaran yang dialokasikan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban tugas tambahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00, atau sebesar 0,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar Rp42.879.354.599,00 atau sebesar (100,00)%. Penurunan ini terjadi karena perubahan kodefikasi Bagan Akun Standar Belanja yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiksi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, bahwa Belanja TPG PNSD, Belanja TKG PNSD, Belanja Tamsil Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan masuk ke dalam objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, namun dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka belanja Belanja TPG PNSD, Belanja TKG PNSD, Belanja Tamsil Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN masuk dalam objek belanja tambahan penghasilan ASN pada jenis belanja pegawai, dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa

Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan masuk kedalam belanja jasa pada jenis belanja barang dan jasa.

Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	21.625.233.036,00	21.625.233.036,00	(100,00)
2	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.568.127.600,00	1.568.127.600,00	(100,00)
3	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.711.000.000,00	1.711.000.000,00	(100,00)
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	4.135.073.121,00	4.135.073.121,00	(100,00)
5	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	12.872.123.842,00	12.872.123.842,00	(100,00)
6	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	50.252.000,00	50.252.000,00	(100,00)
7	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	108.500.000,00	108.500.000,00	(100,00)
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	(100,00)
9	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	691.445.000,00	691.445.000,00	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	42.879.354.599,00	42.879.354.599,00	(100,00)

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah Kompensasi terhadap Pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk uang yang harus dibayarkan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 Rp7.291.693.426,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.312.623.500,00, atau sebesar 99,71%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar Rp(218.244.266,00) atau sebesar (2,91)%. Penurunan ini terjadi karena untuk pimpinan DPRD telah dilakukan pengadaan kendaraan dinas sehingga tidak dibayarkan lagi tunjangan transportasi, serta penurunan juga terjadi karena tahun 2025 merupakan tahun pertama atas anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD terpilih dan belum berhak mendapatkan uang jasa pengabdian. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Uang Representasi DPRD	452.424.000,00	451.290.000,00	99,74	449.820.000,00	1.470.000,00	0,33
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.034.000,00	54.521.600,00	95,59	58.514.000,00	(3.992.400,00)	(6,82)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.050.000,00	76.851.600,00	99,74	75.475.800,00	1.375.800,00	1,82
4	Belanja Uang Paket DPRD	38.803.000,00	38.682.000,00	99,68	38.535.000,00	147.000,00	0,38
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	656.013.000,00	654.370.486,00	99,74	652.238.998,00	2.131.488,00	0,33
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	64.317.000,00	64.127.700,00	99,70	51.734.550,00	12.393.150,00	23,96
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000,00	4.293.450,00	85,86	5.572.350,00	(1.278.900,00)	(22,95)
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.216.500,00	2.520.000.000,00	99,99	2.520.000.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	110.544.000,00	109.926.226,00	99,44	57.464.526,00	52.461.700,00	91,29
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	39.934.000,00	39.716.892,00	99,45	39.748.108,00	(31.216,00)	(0,08)
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	938.000,00	928.368,00	98,97	924.840,00	3.528,00	0,38
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.802.000,00	2.785.104,00	99,39	2.774.520,00	10.584,00	0,38
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	100.494.000,00	100.200.000,00	99,70	91.850.000,00	8.350.000,00	9,09
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.762.054.000,00	2.754.000.000,00	99,70	2.875.500.000,00	(121.500.000,00)	(4,23)
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	169.785.000,00	(169.785.000,00)	(100,00)
Jumlah		7.312.623.500,00	7.291.693.426,00	99,71	7.509.937.692,00	(218.244.266,00)	(2,91)

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah Kompensasi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk uang yang harus dibayarkan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 Rp1.293.959.507,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.295.977.864,00, atau sebesar 99,84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami peningkatan sebesar Rp891.187.843,00 atau sebesar 221,26%. Peningkatan ini terjadi karena tidak tercapainya target pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga berdampak naiknya insentif pemungutan pajak untuk Kepala Daerah. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.778.000,00	50.700.000,00	99,84	54.600.000,00	(3.900.000,00)	(7,14)
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.853.000,00	5.844.000,00	99,84	7.644.000,00	(1.800.000,00)	(23,55)
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.401.000,00	91.260.000,00	99,84	98.280.000,00	(7.020.000,00)	(7,14)
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.151.000,00	5.141.820,00	99,82	7.531.680,00	(2.389.860,00)	(31,73)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	903.000,00	897.051,00	99,34	210.149,00	686.902,00	326,86
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.060,00	35,33	1.000,00	60,00	6,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.876.150,00	5.458.080,00	92,88	5.503.680,00	(45.600,00)	(0,83)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	118.000,00	112.320,00	95,18	112.320,00	0,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	343.000,00	336.960,00	98,23	336.960,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.135.551.714,00	1.134.208.216,00	99,88	228.551.875,00	905.656.341,00	396,26
Jumlah		1.295.977.864,00	1.293.959.507,00	99,84	402.771.664,00	891.187.843,00	221,26

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah uang yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang jabatan sebagai Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2025 Rp601.200.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp601.948.143,00, atau sebesar 99,87%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar Rp47.200.000,00 atau sebesar 8,52%. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagai berikut:

**Tabel 7.5.41 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.191.000,00	201.600.000,00	99,70	180.600.000,00	21.000.000,00	11,63
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.757.143,00	399.600.000,00	99,96	373.400.000,00	26.200.000,00	7,02
Jumlah		601.948.143,00	601.200.000,00	99,87	554.000.000,00	47.200.000,00	8,52

7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD adalah belanja pegawai yang berasal dari SKPD/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk tahun 2025 hanya ada 1 (satu) BLUD yaitu RSUD Kabupaten Natuna. Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 Rp33.520.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00, atau sebesar 11,17%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar Rp(341.462.000,00) atau sebesar (91,06)%.

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp243.169.874.604,96 atau sebesar 79,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp305.666.776.852,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp(65.325.830.357,41) atau sebesar (21,18)%. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.376.933.032,00	28.250.373.549,00	77,66	32.975.723.342,00	(4.725.349.793,00)	(14,33)
2	Dinas Kesehatan	117.910.251.841,00	93.815.190.007,17	79,56	82.426.116.225,61	11.389.073.781,56	13,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.348.924.216,00	3.469.057.592,15	54,64	4.829.671.445,00	(1.360.613.852,85)	(28,17)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.513.800.298,00	3.181.112.262,00	90,53	4.748.134.120,00	(1.567.021.858,00)	(33,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	5.960.485.794,00	5.898.323.347,00	98,96	6.501.813.789,00	(603.490.442,00)	(9,28)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.458.807.090,00	2.237.531.971,00	91,00	2.768.068.538,00	(530.536.567,00)	(19,17)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.754.278.156,00	1.383.133.291,00	78,84	2.130.837.583,00	(747.704.292,00)	(35,09)
8	Dinas Sosial	1.338.858.446,00	929.423.770,00	69,42	1.916.856.475,00	(987.432.705,00)	(51,51)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	809.436.588,00	606.896.142,00	74,98	1.131.507.314,00	(524.611.172,00)	(46,36)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.985.727.900,00	4.926.354.713,00	82,30	5.411.390.853,00	(485.036.140,00)	(8,96)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.396.888.325,00	3.195.261.201,00	94,06	2.086.424.154,00	1.108.837.047,00	53,15
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.482.772.661,00	5.137.796.070,00	93,71	6.153.559.662,00	(1.015.763.592,00)	(16,51)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	959.745.179,00	837.090.043,00	87,22	1.315.849.253,00	(478.759.210,00)	(36,38)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.665.138.094,00	3.340.499.526,00	91,14	3.493.454.522,00	(152.954.996,00)	(4,38)
15	Dinas Perhubungan	6.488.688.191,00	5.319.182.154,00	81,98	5.619.743.907,00	(300.561.753,00)	(5,35)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.909.255.819,00	4.474.567.850,84	50,22	9.144.075.136,00	(4.669.507.285,16)	(51,07)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.221.249.199,00	1.102.190.100,00	90,25	1.508.451.115,00	(406.261.015,00)	(26,93)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.819.288.571,00	1.440.126.266,00	79,16	4.358.481.737,00	(2.918.355.471,00)	(66,96)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.502.538.106,00	1.283.370.467,00	85,41	1.568.168.317,00	(284.797.850,00)	(18,16)
20	Dinas Perikanan	1.568.322.609,00	1.475.696.154,00	94,09	2.776.458.875,00	(1.300.762.721,00)	(46,85)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Dinas Pariwisata	1.592.185.946,00	1.415.496.021,00	88,90	5.131.462.311,00	(3.715.966.290,00)	(72,42)
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.172.826.088,00	2.632.763.689,00	82,98	4.482.417.752,00	(1.849.654.063,00)	(41,26)
23	Sekretariat Daerah	29.572.523.112,00	21.811.645.469,00	73,76	33.683.110.145,00	(11.871.464.676,00)	(35,24)
24	Sekretariat DPRD	17.661.338.351,00	13.007.919.849,00	73,65	22.917.432.539,00	(9.909.512.690,00)	(43,24)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.917.289.341,00	2.318.075.232,00	79,46	3.891.597.835,00	(1.573.522.603,00)	(40,43)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.945.955.146,00	6.969.880.231,00	87,72	10.166.204.246,00	(3.196.324.015,00)	(31,44)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.344.150.502,00	1.008.546.152,00	75,03	2.427.105.855,00	(1.418.559.703,00)	(58,45)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	917.232.097,00	759.838.332,00	82,84	1.520.030.895,00	(760.192.563,00)	(50,01)
29	Inspektorat Daerah	3.091.084.978,00	2.656.225.596,00	85,93	3.976.035.091,00	(1.319.809.495,00)	(33,19)
30	Kecamatan Bunguran Timur	3.141.718.343,00	2.938.625.265,00	93,54	4.245.791.253,00	(1.307.165.988,00)	(30,79)
31	Kecamatan Bunguran Barat	1.795.913.838,00	1.672.755.145,00	93,14	2.153.996.056,76	(481.240.911,76)	(22,34)
32	Kecamatan Bunguran Utara	768.775.872,00	729.851.919,00	94,94	2.439.712.960,00	(1.709.861.041,00)	(70,08)
33	Kecamatan Pulau Laut	935.002.696,00	879.645.517,00	94,08	2.446.120.284,00	(1.566.474.767,00)	(64,04)
34	Kecamatan Midai	1.400.766.080,00	1.340.490.930,00	95,70	3.019.551.522,00	(1.679.060.592,00)	(55,61)
35	Kecamatan Serasan	1.506.615.704,00	1.355.760.143,00	89,99	2.869.018.583,00	(1.513.258.440,00)	(52,74)
36	Kecamatan Subi	1.160.864.798,00	1.057.009.779,00	91,05	2.381.411.795,00	(1.324.402.016,00)	(55,61)
37	Kecamatan Pulau Tiga	556.671.264,00	419.478.124,00	75,35	969.242.003,00	(549.763.879,00)	(56,72)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	350.057.500,00	307.692.149,00	87,90	654.979.015,00	(347.286.866,00)	(53,02)
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	997.236.323,00	949.503.998,80	95,21	2.005.266.508,00	(1.055.762.509,20)	(52,65)
40	Kecamatan Bunguran Selatan	586.932.682,00	515.975.001,00	87,91	1.156.129.015,00	(640.154.014,00)	(55,37)
41	Kecamatan Serasan Timur	679.073.334,00	632.367.411,00	93,12	2.475.513.904,00	(1.843.146.493,00)	(74,46)
42	Kecamatan Suak Midai	568.830.269,00	552.768.170,00	97,18	1.965.753.607,00	(1.412.985.437,00)	(71,88)
43	Kecamatan Bunguran Batubi	905.641.406,00	789.159.003,00	87,14	1.742.721.550,00	(953.562.547,00)	(54,72)
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	642.513.270,00	578.254.704,00	90,00	1.166.342.530,00	(588.087.826,00)	(50,42)
45	Kecamatan Pulau Panjang	314.989.169,00	310.030.695,00	98,43	881.912.000,00	(571.881.305,00)	(64,85)
46	Kecamatan Pulau Seluan	623.379.500,00	582.671.293,00	93,47	1.239.754.807,00	(657.083.514,00)	(53,00)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.045.819.128,00	2.674.268.311,00	87,80	3.622.304.538,00	(948.036.227,00)	(26,17)
Jumlah		305.666.776.852,00	243.169.874.604,96	79,55	308.495.704.962,37	(65.325.830.357,41)	(21,18)

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp243.169.874.604,96 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Barang	61.074.944.058,00	43.691.290.918,80	71,53	61.597.470.790,00	(17.906.179.871,20)	(29,07)
2	Belanja Jasa	143.425.793.493,00	119.422.253.210,27	83,26	129.608.413.532,00	(10.186.160.321,73)	(7,86)
3	Belanja Pemeliharaan	15.564.239.425,00	10.163.093.160,14	65,29	10.603.214.368,76	(440.121.208,62)	(4,15)
4	Belanja Perjalanan Dinas	33.669.617.696,00	24.429.651.053,00	72,55	64.347.111.233,00	(39.917.460.180,00)	(62,03)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.488.515.288,00	5.625.556.691,00	86,70	5.743.142.292,00	(117.585.601,00)	(2,05)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	11.086.786.363,00	(11.086.786.363,00)	(100,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	11.304.640.230,00	10.245.963.275,00	90,63	79.600.000,00	10.166.363.275,00	12.771,81
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.139.026.662,00	29.592.066.296,75	86,68	25.429.966.383,61	4.162.099.913,14	16,37
Jumlah		305.666.776.852,00	243.169.874.604,96	79,55	308.495.704.962,37	(65.325.830.357,41)	(21,18)

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp43.691.290.918,80 atau sebesar 71,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.074.944.058,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp(17.906.179.871,20) atau sebesar (29,07)%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

Tabel 7.5.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	185.591.852,00	24.875.000,00	13,40	546.764.213,00	(521.889.213,00)	(95,45)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	364.680.000,00	214.668.100,00	58,86	96.425.800,00	118.242.300,00	122,63
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.131.551.977,00	4.525.694.645,00	73,80	6.613.602.143,00	(2.087.907.498,00)	(31,57)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	210.467.000,00	54.023.000,00	25,66	11.663.100,00	42.359.900,00	363,20
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	49.865.800,00	(34.880.800,00)	(69,95)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	76.990.000,00	47.485.000,00	61,67	50.425.000,00	(2.940.000,00)	(5,83)
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.316.960.222,00	1.444.322.629,00	62,33	2.457.794.146,00	(1.013.471.517,00)	(41,24)
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.271.213.309,00	961.915.281,00	75,66	1.625.535.535,00	(663.620.254,00)	(40,82)
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	33.470.000,00	29.330.000,00	87,63	0,00	29.330.000,00	100,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	139.647.970,00	99.669.820,00	71,37	290.419.500,00	(190.749.680,00)	(65,68)
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.479.768.003,00	2.155.536.355,00	86,92	3.221.535.848,00	(1.065.999.493,00)	(33,09)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.018.780.120,00	836.477.140,00	82,10	1.299.129.458,00	(462.652.318,00)	(35,61)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.534.595.080,00	3.622.601.733,00	79,88	5.637.659.025,00	(2.015.057.292,00)	(35,74)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	472.490.084,00	384.613.630,00	81,40	993.857.900,00	(609.244.270,00)	(61,30)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.598.800,00	3.598.800,00	100,00	15.892.000,00	(12.293.200,00)	(77,35)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	376.018.675,00	330.746.774,00	87,96	405.514.014,00	(74.767.240,00)	(18,44)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	265.682.319,00	250.258.064,00	94,19	537.197.700,00	(286.939.636,00)	(53,41)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.011.386.886,00	700.975.655,00	69,30	703.260.910,00	(2.285.255,00)	(0,32)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	787.203.100,00	744.291.686,00	94,54	614.342.500,00	129.949.186,00	21,15
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	56.430.000,00	39.980.000,00	70,84	331.078.308,00	(291.098.308,00)	(87,92)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	97.440.000,00	76.637.000,00	78,65	284.635.000,00	(207.998.000,00)	(73,08)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.340.500,00	87.078.490,00	75,49	881.237.150,00	(794.158.660,00)	(90,12)
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.945.115.737,00	4.183.500.076,00	70,36	1.855.337.247,00	2.328.162.829,00	125,48
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.798.096.624,00	6.573.457.293,80	47,64	5.136.664.997,00	1.436.792.296,80	27,97
25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.516.966.400,00	2.382.665.920,00	94,66	419.532.625,00	1.963.133.295,00	467,93
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	71.000.000,00	50.000.000,00	70,42	312.810.000,00	(262.810.000,00)	(84,02)
27	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	258.449.445,00	258.449.445,00	100,00	0,00	258.449.445,00	100,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	46.676.600,00	36.524.600,00	78,25	9.745.500,00	26.779.100,00	274,78
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	6.071.000,00	6.071.000,00	100,00	52.116.000,00	(46.045.000,00)	(88,35)
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	47.091.000,00	32.854.000,00	69,76	1.873.000,00	30.981.000,00	1.654,08
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.291.012.464,00	2.995.611.421,00	91,02	4.842.483.300,00	(1.846.871.879,00)	(38,14)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.387.344.493,00	4.444.336.561,00	82,49	10.758.312.130,00	(6.313.975.569,00)	(58,69)
33	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.540.000,00	0,00	0,00	183.520.000,00	(183.520.000,00)	(100,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	8.500.800,00	8.332.000,00	98,01	374.262.873,00	(365.930.873,00)	(97,77)
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.376.866.280,00	1.088.684.500,00	79,06	1.211.987.425,00	(123.302.925,00)	(10,17)
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.322.155.018,00	3.340.504.010,00	77,28	5.897.079.378,00	(2.556.575.368,00)	(43,35)
38	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	22.461.405,00	(22.461.405,00)	(100,00)
39	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	41.700.000,00	0,00	0,00	85.950.000,00	(85.950.000,00)	(100,00)
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.624.000,00	8.624.000,00	100,00	94.000.000,00	(85.376.000,00)	(90,83)
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	217.606.000,00	(193.106.000,00)	(88,74)
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	797.804.300,00	738.689.800,00	92,59	435.805.000,00	302.884.800,00	69,50
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	(56.800.000,00)	(100,00)
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.624.000,00	8.624.000,00	100,00	0,00	8.624.000,00	100,00
45	Belanja Pakaian Teknik	32.010.000,00	32.010.000,00	100,00	0,00	32.010.000,00	100,00
46	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	42.360.000,00	42.360.000,00	100,00	229.456.000,00	(187.096.000,00)	(81,54)
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	242.990.000,00	242.133.980,00	99,64	1.165.589.000,00	(923.455.020,00)	(79,23)
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	46.732.000,00	44.522.500,00	95,27	70.605.860,00	(26.083.360,00)	(36,94)
49	Belanja Pakaian Olahraga	370.208.000,00	327.953.000,00	88,58	603.890.000,00	(275.937.000,00)	(45,69)
50	Belanja Pakaian Paskibraka	174.120.000,00	171.119.010,00	98,27	821.728.000,00	(650.608.990,00)	(79,18)
51	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.800.000,00	0,00	0,00	61.745.000,00	(61.745.000,00)	(100,00)
52	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I),Home Use]	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)	(100,00)
53	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	(7.125.000,00)	(100,00)
54	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		61.074.944.058,00	43.691.290.918,80	71,54	61.597.470.790,00	(17.906.179.871,20)	(29,07)

Secara garis besar belanja barang mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum dibayarkan sampai per 31 Desember 2025. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 sebesar Rp129.608.413.532,00 atau sebesar 79,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp163.271.795.213,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Jasa mengalami penurunan sebesar Rp(22.436.049.570,00) atau sebesar (14,76)%. Rincian Belanja Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	790.480.000,00	598.945.750,00	75,76	0,00	598.945.750,00	100,00
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	51.080.000,00	47.705.000,00	93,39	0,00	47.705.000,00	100,00
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.693.904.137,00	2.045.800.000,00	75,94	3.750.955.000,00	(1.705.155.000,00)	(45,46)
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.998.260.000,00	1.559.715.000,00	78,05	3.069.820.000,00	(1.510.105.000,00)	(49,19)
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.400.000,00	6.400.000,00	41,55	1.800.000,00	4.600.000,00	255,56
6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.699.771.978,00	1.650.490.000,00	97,10	1.336.220.000,00	314.270.000,00	23,52
7	Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00	2.400.000,00	40,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(20,00)
8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.650.000,00	2.900.000,00	51,32	9.950.000,00	(7.050.000,00)	(70,85)
9	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	(16.400.000,00)	(100,00)
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.750.000,00	4.000.000,00	84,21	109.800.000,00	(105.800.000,00)	(96,36)
11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	894.600.000,00	894.600.000,00	100,00	298.200.000,00	596.400.000,00	200,00
12	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.577.850.000,00	2.845.500.000,00	79,53	3.974.783.000,00	(1.129.283.000,00)	(28,41)
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.731.193.600,00	11.381.473.852,00	82,88	11.927.403.152,00	(545.929.300,00)	(4,58)
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	917.000.000,00	849.800.000,00	92,67	1.080.900.000,00	(231.100.000,00)	(21,38)
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	404.600.000,00	378.000.000,00	93,42	453.900.000,00	(75.900.000,00)	(16,72)
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	54.720.000,00	54.720.000,00	100,00	25.100.000,00	29.620.000,00	118,01
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	601.120.000,00	296.070.000,00	49,25	366.380.000,00	(70.310.000,00)	(19,19)
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.023.036.617,00	24.210.175.369,00	96,75	28.394.832.269,00	(4.184.656.900,00)	(14,74)
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.250.330.810,00	13.758.191.498,00	79,75	17.628.600.000,00	(3.870.408.502,00)	(21,96)
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.555.041.849,00	844.791.000,00	54,32	1.127.576.250,00	(282.785.250,00)	(25,08)
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.360.820.880,00	3.826.576.000,00	87,74	2.476.757.500,00	1.349.818.500,00	54,50
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	813.823.000,00	695.586.000,00	85,47	595.150.000,00	100.436.000,00	16,88
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	911.973.200,00	843.361.000,00	92,47	849.200.000,00	(5.839.000,00)	(0,69)
26	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	82.539.000,00	73.985.850,00	89,63	99.000.000,00	(25.014.150,00)	(25,27)
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	134.200.000,00	113.800.000,00	84,79	127.400.000,00	(13.600.000,00)	(10,68)
28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	89.500.000,00	58.900.000,00	65,81	125.220.000,00	(66.320.000,00)	(52,96)
29	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	975.700.000,00	751.500.000,00	77,02	1.237.300.000,00	(485.800.000,00)	(39,26)
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	255.474.942,00	252.923.142,00	99,00	1.500.000,00	251.423.142,00	16.761,54
31	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	55.680.000,00	23.060.000,00	41,41	38.825.800,00	(15.765.800,00)	(40,61)
32	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
33	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	323.762.703,00	280.220.208,00	86,55	465.782.000,00	(185.561.792,00)	(39,84)
34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	372.450.000,00	272.143.000,00	73,06	1.785.305.000,00	(1.513.162.000,00)	(84,76)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
35	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	42.259.000,00	28.210.370,00	66,75	37.951.000,00	(9.740.630,00)	(25,67)
36	Belanja Jasa Kalibrasi	442.032.500,00	278.018.487,00	62,89	49.656.500,00	228.361.987,00	459,88
37	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	807.121.000,00	742.521.000,00	91,99	1.025.900.000,00	(283.379.000,00)	(27,62)
38	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	20.000.000,00	13.110.000,00	65,55	13.089.112,00	20.888,00	0,16
40	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.494.798.830,00	2.237.410.900,00	49,77	9.443.075.000,00	(7.205.664.100,00)	(76,31)
41	Belanja Jasa Operator Kapal	1.171.100.000,00	921.000.000,00	78,64	813.500.000,00	107.500.000,00	13,21
42	Belanja Tagihan Telepon	208.083.356,00	137.954.604,00	66,29	139.101.504,00	(1.146.900,00)	(0,82)
43	Belanja Tagihan Air	1.177.879.736,00	830.518.418,00	70,50	720.084.850,00	110.433.568,00	15,34
44	Belanja Tagihan Listrik	7.532.832.930,00	6.569.102.960,00	87,20	6.944.622.422,00	(375.519.462,00)	(5,41)
45	Belanja Langgananan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.090.000,00	16.985.000,00	73,55	166.105.000,00	(149.120.000,00)	(89,77)
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	6.376.468.787,00	3.728.080.293,00	58,46	1.429.777.094,00	2.298.303.199,00	160,75
47	Belanja Paket/Pengiriman	505.000.045,00	316.833.045,00	62,73	456.256.015,00	(139.422.970,00)	(30,56)
48	Belanja Penambahan Daya	3.000.000,00	2.136.800,00	71,22	0,00	2.136.800,00	100,00
49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00	100,00
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	594.400.019,00	316.238.093,00	53,20	477.033.025,00	(160.794.932,00)	(33,71)
51	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.033.668.692,00	913.450.144,00	88,36	1.447.051.533,00	(533.601.389,00)	(36,88)
52	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.649.888.626,00	8.970.519.043,00	84,23	0,00	8.970.519.043,00	100,00
53	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	52.368.000,00	31.889.750,00	60,89	0,00	31.889.750,00	100,00
54	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	0,00	44.000.000,00	100,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.469.161.760,00	1.464.322.720,00	99,67	1.168.027.536,00	296.295.184,00	25,37
56	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	13.894.687.200,00	13.886.366.000,00	99,94	11.211.428.500,00	2.674.937.500,00	23,86
57	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.011.212.000,00	951.196.500,00	94,06	916.291.600,00	34.904.900,00	3,81
58	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.396.821.091,00	1.747.046.112,00	72,89	2.127.123.793,00	(380.077.681,00)	(17,87)
59	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	310.235.454,00	187.268.185,40	60,36	128.862.063,00	58.406.122,40	45,32
60	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	299.737.320,00	180.166.183,87	60,10	142.768.344,00	37.397.839,87	26,19
61	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	47.200.000,00	43.393.736,00	91,93	49.460.000,00	(6.066.264,00)	(12,26)
62	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	113.870.000,00	18.810.000,00	16,51	0,00	18.810.000,00	100,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	36.305.200,00	12.698.400,00	34,97	0,00	12.698.400,00	100,00
64	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	(104.000.000,00)	(100,00)
65	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	(49.400.000,00)	(100,00)
66	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.000.000,00	1.500.000,00	10,00	0,00	1.500.000,00	100,00
67	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.540.000,00	15.540.000,00	100,00	179.355.000,00	(163.815.000,00)	(91,34)
68	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	135.657.000,00	106.467.200,00	78,48	293.880.000,00	(187.412.800,00)	(63,77)
69	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.114.280,00	14.700.000,00	81,15	21.300.000,00	(6.600.000,00)	(30,99)
70	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
71	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	63.288.000,00	53.511.000,00	84,55	175.625.000,00	(122.114.000,00)	(69,53)
72	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
73	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	36.000.000,00	(4.500.000,00)	(12,50)
74	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.514.765.000,00	1.240.850.000,00	81,91	969.494.000,00	271.356.000,00	27,99
75	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
76	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
77	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	22.000.000,00	100,00
78	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	(2.260.000,00)	(100,00)
79	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	678.169.084,00	519.291.502,00	76,57	1.480.573.434,00	(961.281.932,00)	(64,93)
80	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	180.000.000,00	132.917.500,00	73,84	168.750.000,00	(35.832.500,00)	(21,23)
81	Belanja Sewa Mebel	345.000,00	345.000,00	100,00	0,00	345.000,00	100,00
82	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.000.000,00	12.000.000,00	92,30	85.140.000,00	(73.140.000,00)	(85,91)
83	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	3.500.000,00	17,50	144.000.000,00	(140.500.000,00)	(97,57)
84	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	14.125.000,00	9.871.878,00	69,88	8.703.411,00	1.168.467,00	13,43
85	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
87	Belanja Sewa Suara	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	497.553.000,00	496.458.000,00	99,77	654.180.000,00	(157.722.000,00)	(24,11)
89	Belanja Sewa Bangunan Gudang	282.000.000,00	282.000.000,00	100,00	276.000.000,00	6.000.000,00	2,17
90	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	181.582.000,00	138.532.000,00	76,29	254.020.000,00	(115.488.000,00)	(45,46)
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00	100,00
93	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
94	Belanja Sewa Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
95	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	32.000.000,00	25.000.000,00	78,12	0,00	25.000.000,00	100,00
96	Belanja Sewa Asrama	531.386.000,00	529.886.000,00	99,71	532.240.000,00	(2.354.000,00)	(0,44)
97	Belanja Sewa Hotel	356.531.310,00	280.439.560,00	78,65	324.027.000,00	(43.587.440,00)	(13,45)
98	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
99	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	442.817.000,00	431.617.000,00	97,47	342.021.000,00	89.596.000,00	26,20
100	Belanja Sewa Audio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	44.500.000,00	(34.500.000,00)	(77,53)
101	Belanja Sewa Alat Musik	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	64.300.000,00	(18.300.000,00)	(28,46)
102	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	34.706.370,00	(34.706.370,00)	(100,00)
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	265.000.000,00	223.083.650,00	84,18	50.000.000,00	173.083.650,00	346,17
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	406.522.050,00	59.773.500,00	14,70	0,00	59.773.500,00	100,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	242.569.410,00	242.569.410,00	100,00	0,00	242.569.410,00	100,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.697.400,00	(13.697.400,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
108	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	24.947.250,00	24.947.250,00	100,00	0,00	24.947.250,00	100,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	180.470.840,00	106.470.840,00	58,99	114.638.940,00	(8.168.100,00)	(7,13)
110	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	0,00	0,00	114.492.750,00	(114.492.750,00)	(100,00)
111	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.591.982.358,00	298.501.200,00	18,75	0,00	298.501.200,00	100,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	149.339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	18.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
114	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	130.000.000,00	122.500.000,00	94,23	140.000.000,00	(17.500.000,00)	(12,50)
115	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	199.403.000,00	(199.403.000,00)	(100,00)
116	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	199.411.500,00	199.411.500,00	100,00	0,00	199.411.500,00	100,00
117	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	447.222.000,00	332.285.000,00	74,29	1.267.103.000,00	(934.818.000,00)	(73,78)
118	Belanja Sosialisasi	64.635.807,00	64.635.807,00	100,00	111.144.000,00	(46.508.193,00)	(41,84)
119	Belanja Bimbingan Teknis	26.485.942,00	23.454.000,00	88,55	857.634.365,00	(834.180.365,00)	(97,27)
120	Belanja Diklat Kepemimpinan	5.000.000,00	4.715.000,00	94,30	5.500.000,00	(785.000,00)	(14,27)
121	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	7.500.000,00	28.500.000,00	380,00
122	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		143.425.793.493,00	119.422.253.210,27	83,26	129.608.413.532,00	(10.186.160.321,73)	(7,86)

Secara garis besar Belanja Jasa mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum dibayarkan sampai per 31 Desember 2025. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp10.163.093.160,14 atau sebesar 65,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.564.239.425,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp(440.121.208,62) atau sebesar (4,15)%. Rincian Belanja pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	36.000.000,00	11.137.500,00	30,93	10.500.000,00	637.500,00	6,07
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.889.042,00	(29.889.042,00)	(100,00)
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	35.300.000,00	(35.300.000,00)	(100,00)
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	27.500.000,00	15.592.000,00	56,69	13.496.000,00	2.096.000,00	15,53

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.059.070.334,00	775.920.245,00	73,26	923.554.101,00	(147.633.856,00)	(15,99)
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	595.658.000,00	402.604.300,00	67,58	505.516.600,00	(102.912.300,00)	(20,36)
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.150.000,00	37.148.000,00	99,99	22.862.342,00	14.285.658,00	62,49
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.117.800,00	16.037.800,00	66,49	20.415.000,00	(4.377.200,00)	(21,44)
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	13.430.000,00	(8.330.000,00)	(62,03)
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	529.646.907,00	373.236.781,00	70,46	437.495.500,00	(64.258.719,00)	(14,69)
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	37.100.000,00	20.637.000,00	55,62	10.140.000,00	10.497.000,00	103,52
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	7.200.000,00	7.120.000,00	98,88	0,00	7.120.000,00	100,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	46.800.000,00	37.450.000,00	80,02	6.000.000,00	31.450.000,00	524,17
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	23.020.000,00	20.001.000,00	86,88	18.665.000,00	1.336.000,00	7,16
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	221.443.000,00	81.125.000,00	36,63	0,00	81.125.000,00	100,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	69.630.000,00	57.102.000,00	82,00	128.332.000,00	(71.230.000,00)	(55,50)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	904.010.400,00	638.864.332,00	70,67	1.469.790.420,00	(830.926.088,00)	(56,53)
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	83.431.000,00	83.431.000,00	100,00	103.789.000,00	(20.358.000,00)	(19,61)
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	574.218.774,00	388.380.290,00	67,63	301.308.450,00	87.071.840,00	28,90
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.101.195,00	6.680.000,00	73,39	104.703.206,00	(98.023.206,00)	(93,62)
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	64.715.351,00	64.620.000,00	99,85	20.000.000,00	44.620.000,00	223,10
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.260.544.000,00	764.998.088,00	60,68	107.073.375,00	657.924.713,00	614,46
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	93.793.000,00	93.672.481,00	99,87	0,00	93.672.481,00	100,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	78.494.500,00	55.488.500,00	70,69	77.018.030,00	(21.529.530,00)	(27,95)
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	1.750.000,00	29,16	0,00	1.750.000,00	100,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	76.996.000,00	60.617.700,00	78,72	71.665.000,00	(11.047.300,00)	(15,42)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	25.000.000,00	19.910.000,00	79,64	199.916.000,00	(180.006.000,00)	(90,04)
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	42.850.000,00	42.424.250,00	99,00	28.327.000,00	14.097.250,00	49,77
32	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	16.430.000,00	16.430.000,00	100,00	36.735.450,00	(20.305.450,00)	(55,27)
33	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
34	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.273.384.130,00	722.319.730,00	56,72	539.340.470,00	182.979.260,00	33,93
35	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	48.980.000,00	48.980.000,00	100,00	0,00	48.980.000,00	100,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.981.340.652,00	2.227.446.157,80	55,94	2.292.211.711,76	(64.765.553,96)	(2,83)
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	536.453.000,00	341.556.000,00	63,66	188.885.000,00	152.671.000,00	80,83
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	772.854.180,00	766.689.180,00	99,20	257.249.695,00	509.439.485,00	198,03
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	124.811.286,00	124.811.286,00	100,00	824.589.475,00	(699.778.189,00)	(84,86)
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	254.147.622,00	254.147.622,00	100,00	11.048.600,00	243.099.022,00	2.200,27
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	124.537.489,00	92.037.489,00	73,90	0,00	92.037.489,00	100,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	87.000.000,00	50.000.000,00	57,47	0,00	50.000.000,00	100,00
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	15.000.000,00	14.950.000,00	99,66	14.850.000,00	100.000,00	0,67
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	45.234.134,00	45.234.134,00	100,00	0,00	45.234.134,00	100,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	299.948.100,00	49.948.100,00	16,65	49.948.600,00	(500,00)	(0,00)
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	179.121.421,00	178.615.114,00	99,71	0,00	178.615.114,00	100,00
47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	4.577.000,00	4.577.000,00	100,00	0,00	4.577.000,00	100,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	206.338.219,00	206.338.217,84	99,99	12.468.630,00	193.869.587,84	1.554,86
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	213.579.175,00	213.579.174,35	99,99	290.846.000,00	(77.266.825,65)	(26,57)
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	170.727.303,00	43.347.993,00	25,39	121.212.444,00	(77.864.451,00)	(64,24)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
52	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	0,00	0,00	28.980.000,00	(28.980.000,00)	(100,00)
53	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	36.231.940,00	36.223.000,00	99,97	64.992.000,00	(28.769.000,00)	(44,27)
54	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(100,00)
55	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	330.552.301,00	298.728.471,15	90,37	470.989.557,00	(172.261.085,85)	(36,57)
56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	170.172.000,00	170.172.000,00	100,00	0,00	170.172.000,00	100,00
57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	460.000.000,00	0,00	0,00	439.490.000,00	(439.490.000,00)	(100,00)
58	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	4.000.000,00	3.602.500,00	90,06	38.000.000,00	(34.397.500,00)	(90,52)
59	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	184.929.512,00	165.312.024,00	89,39	225.392.570,00	(60.080.546,00)	(26,66)
61	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.999.700,00	6.999.700,00	100,00	3.498.100,00	3.501.600,00	100,10
Jumlah		15.564.239.425,00	10.163.093.160,14	65,30	10.603.214.368,76	(440.121.208,62)	(4,15)

Secara garis besar Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum dibayarkan sampai per 31 Desember 2025. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp24.429.651.053,00 atau sebesar 72,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.669.617.696,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp(39.917.460.180,00) atau sebesar (62,03)%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.827.985.859,00	11.394.836.165,00	67,71	40.895.578.410,00	(29.500.742.245,00)	(72,14)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.646.362.837,00	12.914.862.888,00	77,58	22.185.102.823,00	(9.270.239.935,00)	(41,79)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	195.269.000,00	119.952.000,00	61,42	1.197.680.000,00	(1.077.728.000,00)	(89,98)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	68.750.000,00	(68.750.000,00)	(100,00)
Jumlah		33.669.617.696,00	24.429.651.053,00	72,56	64.347.111.233,00	(39.917.460.180,00)	(62,03)

Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025 yang mewajibkan dilakukan rasionalisasi belanja perjalanan dinas sebesar 50% dari anggaran semula.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp5.625.556.691,00 atau sebesar 86,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.488.515.288,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp(117.585.601,00) atau sebesar (2,05)%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	751.230.000,00	454.430.000,00	60,49	1.215.113.018,00	(760.683.018,00)	(62,60)
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	63.000.000,00	3.000.000,00	4,76	0,00	3.000.000,00	100,00
3	Belanja Beasiswa	319.210.288,00	306.615.432,00	96,05	220.200.000,00	86.415.432,00	39,24
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.864.000.000,00	1.798.600.000,00	96,49	1.661.400.000,00	137.200.000,00	8,26
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	858.400.000,00	826.200.000,00	96,24	774.300.000,00	51.900.000,00	6,70
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	35.000.000,00	(14.000.000,00)	(40,00)
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	93.875.000,00	69.825.000,00	74,38	135.000.000,00	(65.175.000,00)	(48,28)
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.772.800.000,00	1.608.886.259,00	90,75	1.189.429.148,00	419.457.111,00	35,27
9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	745.000.000,00	537.000.000,00	72,08	512.700.126,00	24.299.874,00	4,74
Jumlah		6.488.515.288,00	5.625.556.691,00	86,70	5.743.142.292,00	(117.585.601,00)	(2,05)

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah tingkat SD dan SMP yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah. Selain itu juga realisasi belanja BOS juga diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk belanja BOS yang jumlah siswanya dibawah 60 (enam puluh) orang berdasarkan data dapodik. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami penurunan sebesar Rp11.086.786.363,00 atau sebesar (100,00)%. Penyebab turunnya belanja barang dan Jasa BOS disebabkan perubahan kodefikasi bagan akun standar belanja berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, yang mana belanja barang dan jasa BOS masuk ke Belanja Barang dan Jasa BOSP.

7. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD dan TK yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 sebesar Rp10.245.963.275,00 atau sebesar 90,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.304.640.230,00. Belanja Barang dan Jasa BOSP merupakan belanja yang bersumber dari BOS, BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja yang diterima selama tahun 2025. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	10.027.740.430,00	8.899.796.475,00	88,75	0,00	8.899.796.475,00	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	443.584.400,00	499.974.400,00	112,71	0,00	499.974.400,00	100,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	598.513.400,00	611.390.400,00	102,15	0,00	611.390.400,00	100,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)
5	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	204.802.000,00	204.802.000,00	100,00	0,00	204.802.000,00	100,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	34.600.000,00	(34.600.000,00)	(100,00)
Jumlah		11.304.640.230,00	10.245.963.275,00	100,00	79.600.000,00	10.166.363.275,00	12.771,81

8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD adalah belanja barang dan jasa yang berasal dari SKPD/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk tahun 2025 hanya ada 1 (satu) BLUD yaitu RSUD Kabupaten Natuna. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp29.592.066.296,75 dari yang dianggarkan sebesar Rp34.139.026.662,00, atau sebesar 86,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp4.162.099.913,14 atau sebesar 16,37%.

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 sebesar Rp29.375.000,00 atau sebesar 4,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Subsidi mengalami kenaikan 100,00%. Realisasi belanja subsidi merupakan pemberian subsidi margin bunga atas pinjaman pelaku UMKM yang merupakan program Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang dikelola oleh Bank Riau Kepri Syariah.

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 sebesar Rp12.699.809.695,00 atau sebesar 59,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.307.909.817,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp(24.506.887.789,00) atau sebesar (65,87)%. Penurunan belanja hibah disebabkan karena banyak tagihan dari belanja hibah tidak dibayarkan sampai 31 Desember 2025, dan telah dicatat sebagai utang belanja dalam akun neraca Pemerintah Daerah. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 7.5.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	18.570.000.000,00	(18.570.000.000,00)	(100,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.179.383.350,00	575.962.499,00	48,83	1.309.943.273,00	(733.980.774,00)	(56,03)
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.436.489.009,00	3.450.052.201,00	53,60	1.562.637.693,00	1.887.414.508,00	120,78
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.393.848.000,00	1.320.763.240,00	94,75	4.625.218.394,00	(3.304.455.154,00)	(71,44)
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.461.929.077,00	4.664.809.072,00	49,30	7.038.843.359,00	(2.374.034.287,00)	(33,73)
7	Belanja Hibah Bara+794:814ng kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.135.191.500,00	990.181.802,00	87,22	2.623.154.500,00	(1.632.972.698,00)	(62,25)
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.061.630.000,00	1.058.602.000,00	99,71	494.100.000,00	564.502.000,00	114,25
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	454.032.076,00	(454.032.076,00)	(100,00)
10	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00	539.438.881,00	100,00	528.768.189,00	10.670.692,00	2,02
Jumlah		21.307.909.817,00	12.699.809.695,00	59,60	37.206.697.484,00	(24.506.887.789,00)	(65,87)

Adapun realisasi belanja hibah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.51 Rincian Realisasi Belanja Hibah per SKPD*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.140.221.067,00	3.552.041.588,00	69,10	3.083.217.423,00	468.824.165,00	15,21
2	Dinas kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.274.905.942,00	2.780.536.153,00	65,04	2.248.193.536,00	532.342.617,00	23,68
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.231.812.427,00	5.200.771.571,00	50,83	8.348.786.632,00	(3.148.015.061,00)	(37,71)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	130.000.000,00	129.990.002,00	99,99	0,00	129.990.002,00	100,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	432.500.000,00	(432.500.000,00)	(100,00)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	409.500.000,00	40.000.000,00	9,77	0,00	40.000.000,00	100,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	482.031.500,00	357.031.500,00	74,07	0,00	357.031.500,00	100,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.995.231.704,00	(3.995.231.704,00)	(100,00)
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	539.438.881,00	539.438.881,00	100,00	19.098.768.189,00	(18.559.329.308,00)	(97,18)
JUMLAH		21.307.909.817,00	12.699.809.695,00	59,60	37.206.697.484,00	(24.506.887.789,00)	(65,87)

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp1.359.240.000,00 atau sebesar 74,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.819.500.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp(6.195.874.589,65) atau sebesar (82,01)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.52 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	575.100.000,00	194.600.000,00	33,83	455.589.000,00	(260.989.000,00)	(57,29)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	556.100.000,00	(556.100.000,00)	(100,00)
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.244.400.000,00	1.164.640.000,00	93,59	1.154.400.000,00	10.240.000,00	0,89
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.389.025.589,65	(5.389.025.589,65)	(100,00)
Jumlah		1.819.500.000,00	1.359.240.000,00	74,70	7.555.114.589,65	(6.195.874.589,65)	(82,01)

Adapun realisasi belanja bantuan sosial tahun 2025 terdapat pada SKPD Dinas Sosial.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp125.945.572.742,93 atau sebesar 67,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp187.056.527.112,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp(52.082.781.911,63) atau sebesar (29,26)% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Tanah	2.448.368.634,00	1.574.518.532,65	64,30	1.449.980.299,18	124.538.233,47	8,59
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.556.090.755,00	30.201.275.780,59	72,67	54.296.918.498,52	(24.095.642.717,93)	(44,38)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.335.996.972,00	39.599.766.399,64	66,73	36.218.407.340,13	3.381.359.059,51	9,34
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.873.273.701,00	51.438.785.930,05	62,82	84.811.150.755,73	(33.372.364.825,68)	(39,35)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.428.317.050,00	2.717.356.100,00	190,24	1.117.419.129,00	1.599.936.971,00	143,18
6	Belanja Modal Aset Lainnya	414.480.000,00	413.870.000,00	99,85	134.478.632,00	279.391.368,00	207,76
Jumlah		187.056.527.112,00	125.945.572.742,93	67,33	178.028.354.654,56	(52.082.781.911,63)	(29,26)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp1.449.980.299,18 atau sebesar 27,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.284.662.100,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 Belanja Modal Tanah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp(1.577.774.085,82) atau sebesar (52,11)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	231.000.000,00	177.000.000,00	76,62	0,00	177.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	116.850.100,00	67.000.000,00	57,33	0,00	67.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.015.439,00	(5.015.439,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	951.943.000,00	(951.943.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Tanah untuk Makam	919.816.700,00	149.816.700,00	16,28	0,00	149.816.700,00	100,00
6	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.180.701.834,00	1.180.701.832,65	99,99	493.021.860,18	687.679.972,47	139,48
Jumlah		2.448.368.634,00	1.574.518.532,65	64,31	1.449.980.299,18	124.538.233,47	8,59

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	231.000.000,00	177.000.000,00	76,62	0,00	177.000.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.850.100,00	67.000.000,00	57,34	5.015.439,00	61.984.561,00	1.235,88
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	919.816.700,00	149.816.700,00	16,29	0,00	149.816.700,00	100,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.180.701.834,00	1.180.701.832,65	100,00	1.444.964.860,18	(264.263.027,53)	(18,29)
Jumlah		2.448.368.634,00	1.574.518.532,65	64,31	1.449.980.299,18	124.538.233,47	8,59

Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah disebabkan masih terdapat tagihan belanja tanah yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp30.201.275.780,59 atau sebesar 72,68% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.556.090.755,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp(24.095.642.717,93) atau sebesar (44,38)%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Excavator	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00	0,00	1.300.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.829.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	(20.900.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	(4.100.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	796.000.000,00	(796.000.000,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	293.550.000,00	0,00	0,00	116.633.250,00	(116.633.250,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.824.830.000,00	2.786.640.000,00	98,64	106.120.000,00	2.680.520.000,00	2.525,93
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	471.300.000,00	471.300.000,00	100,00	2.877.200.000,00	(2.405.900.000,00)	(83,62)
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.000.000,00	0,00	0,00	1.471.939.620,00	(1.471.939.620,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	646.700.000,00	(646.700.000,00)	(100,00)
13	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.199.500.000,00	3.104.174.710,00	97,02	1.237.861.983,00	1.866.312.727,00	150,77
14	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.273.997.154,00	(4.273.997.154,00)	(100,00)
15	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	188.000.000,00	(186.340.000,00)	(99,12)
16	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	60.845.649,00	(60.845.649,00)	(100,00)
17	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.000.000.000,00	965.000.000,00	96,50	1.199.200.778,00	(234.200.778,00)	(19,53)
18	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00	100,00
19	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	176.480.000,00	176.480.000,00	100,00	110.920.000,00	65.560.000,00	59,11
20	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.030.298.000,00	960.448.000,00	93,22	345.555.000,00	614.893.000,00	177,94
21	Belanja Modal Mebel	4.606.055.750,00	2.601.036.010,00	56,46	2.610.663.756,00	(9.627.746,00)	(0,37)
22	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	(1.040.000,00)	(100,00)
23	Belanja Modal Alat Pembersih	83.100.000,00	64.000.000,00	77,01	3.500.000,00	60.500.000,00	1.728,57
24	Belanja Modal Alat Pendingin	1.157.792.000,00	1.039.015.462,00	89,74	1.338.196.087,00	(299.180.625,00)	(22,36)
25	Belanja Modal Alat Dapur	91.500.000,00	79.800.000,00	87,21	32.588.000,00	47.212.000,00	144,88
26	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.050.037.944,00	2.328.937.642,59	76,35	1.528.136.892,00	800.800.750,59	52,40
27	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.353.727.000,00	24.411.000,00	1,80	578.425.500,00	(554.014.500,00)	(95,78)
28	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	211.875.000,00	144.875.000,00	68,37	185.770.000,00	(40.895.000,00)	(22,01)
29	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	197.600.000,00	78.860.000,00	39,90	80.350.000,00	(1.490.000,00)	(1,85)
30	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	97.340.000,00	97.340.000,00	100,00	363.230.000,00	(265.890.000,00)	(73,20)
31	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	260.830.000,00	260.830.000,00	100,00	239.640.000,00	21.190.000,00	8,84
32	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	15.300.000,00	14.700.000,00	96,08
33	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	319.518.500,00	319.518.490,00	99,99	0,00	319.518.490,00	100,00
34	Belanja Modal Lemari Arsip Pejabat	298.698.110,00	263.136.050,00	88,09	107.115.000,00	156.021.050,00	145,66
35	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	249.195.000,00	149.345.000,00	59,93	66.150.000,00	83.195.000,00	125,77
36	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.257.855.380,00	1.136.515.000,00	90,35	2.531.965.290,00	(1.395.450.290,00)	(55,11)
37	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.000.000,00	10.850.000,00	90,41	111.840.000,00	(100.990.000,00)	(90,30)
38	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.400.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00	(54.850.000,00)	(100,00)
40	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33	231.636.000,00	(216.636.000,00)	(93,52)
41	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	119.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	218.795.960,00	121.433.320,00	55,50	5.907.913.156,00	(5.786.479.836,00)	(97,94)
45	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	169.100.000,00	19.095.000,00	11,29	2.998.000,00	16.097.000,00	536,92
46	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	(2.875.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	921.526.450,00	(921.526.450,00)	(100,00)
49	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	1.781.664.696,00	(1.781.664.696,00)	(100,00)
50	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	3.242.501,00	(3.242.501,00)	(100,00)
51	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	3.383.379.693,00	(3.383.379.693,00)	(100,00)
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.500.000.000,00	1.932.700.000,00	77,30	0,00	1.932.700.000,00	100,00
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	998.524.722,00	118.263.750,00	11,84	999.900.000,00	(881.636.250,00)	(88,17)
54	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00	1.800.000,00	13.320.000,00	740,00
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	199.900.000,00	199.900.000,00	100,00	179.790.000,00	20.110.000,00	11,19
56	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	89.900.000,00	89.900.000,00	100,00	0,00	89.900.000,00	100,00
57	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	89.800.000,00	89.800.000,00	100,00	0,00	89.800.000,00	100,00
58	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	855.000.000,00	854.545.488,00	99,94	6.675.000,00	847.870.488,00	12.702,18
59	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
60	Belanja Modal Komputer Jaringan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	100,00
61	Belanja Modal Personal Computer	2.350.636.780,00	2.005.910.500,00	85,33	5.602.803.501,00	(3.596.893.001,00)	(64,20)
62	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	733.079.095,00	671.594.037,00	91,61	1.297.730.780,00	(626.136.743,00)	(48,25)
63	Belanja Modal Peralatan Mainframe	16.335.000,00	16.335.000,00	100,00	0,00	16.335.000,00	100,00
64	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	752.635.000,00	493.805.500,00	65,61	1.057.658.800,00	(563.853.300,00)	(53,31)
65	Belanja Modal Peralatan Jaringan	41.650.000,00	11.250.000,00	27,01	694.916.400,00	(683.666.400,00)	(98,38)
66	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	258.930.000,00	180.710.000,00	69,79	520.893.000,00	(340.183.000,00)	(65,31)
67	Belanja Modal Elektronik/Electric	154.630.000,00	60.130.000,00	38,88	71.806.000,00	(11.676.000,00)	(16,26)
68	Belanja Modal Elektrik	0,00	0,00	0,00	96.940.000,00	(96.940.000,00)	(100,00)
69	Belanja Modal Suara	42.300.000,00	42.300.000,00	100,00	11.500.000,00	30.800.000,00	267,83
70	Belanja Modal Heat Generating Equipment	0,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00	(3.200.000.000,00)	(100,00)
71	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	512.757.050,00	512.757.050,00	100,00	455.651.832,52	57.105.217,48	12,53
72	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	192.066.744,00	0,00	0,00	29.930.000,00	(29.930.000,00)	(100,00)
73	Belanja Modal Peralatan Permainan	29.920.000,00	29.920.000,00	100,00	33.000.000,00	(3.080.000,00)	(9,33)
74	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.426.840.880,00	(3.426.840.880,00)	(100,00)
75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.789.727.620,00	3.177.641.149,00	83,84	0,00	3.177.641.149,00	100,00
76	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	41.070.500,00	23.847.700,00	58,06	0,00	23.847.700,00	100,00
77	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	113.469.600,00	103.538.600,00	91,24	0,00	103.538.600,00	100,00
78	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00	65.000.000,00	100,00
79	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00	923.606.322,00	92,36	949.112.850,00	(25.506.528,00)	(2,69)
Jumlah		41.556.090.755,00	30.201.275.780,59	72,68	54.296.918.498,52	(24.095.642.717,93)	(44,38)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.57 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.791.144.720,00	8.338.167.097,00	77,27	6.369.060.080,00	1.969.107.017,00	30,92
2	Dinas Kesehatan	11.445.502.957,00	9.109.227.082,00	79,59	27.148.074.968,00	(18.038.847.886,00)	(66,45)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	449.740.000,00	143.500.000,00	31,91	526.038.600,00	(382.538.600,00)	(72,72)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	1.156.275.000,00	(1.156.275.000,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	638.300.000,00	638.300.000,00	100,00	472.210.000,00	166.090.000,00	35,17
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.485.527.000,00	21.250.000,00	0,61	614.298.750,00	(593.048.750,00)	(96,54)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.917.000,00	155.917.000,00	100,00	309.765.290,00	(153.848.290,00)	(49,67)
8	Dinas Sosial	36.500.000,00	12.987.000,00	35,58	42.400.000,00	(29.413.000,00)	(69,37)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	145.600.000,00	145.600.000,00	100,00	48.900.000,00	96.700.000,00	197,75
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.750.000,00	57.750.000,00	100,00	0,00	57.750.000,00	100,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.200.000,00	254.700.000,00	93,92	165.602.000,00	89.098.000,00	53,80
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.771.865.000,00	1.685.865.000,00	95,15	1.021.620.000,00	664.245.000,00	65,02
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.603.013,00	110.603.013,00	100,00	0,00	110.603.013,00	100,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.500.000,00	99.367.000,00	99,87	203.284.000,00	(103.917.000,00)	(51,12)
15	Dinas Perhubungan	894.943.794,00	702.877.040,00	78,54	671.051.832,52	31.825.207,48	4,74
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.996.120.000,00	1.619.470.000,00	81,13	3.717.159.000,00	(2.097.689.000,00)	(56,43)
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	263.950.000,00	13.950.000,00	5,29	306.635.000,00	(292.685.000,00)	(95,45)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.330.000,00	155.330.000,00	100,00	1.688.570.000,00	(1.533.240.000,00)	(90,80)
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	453.853.921,00	(323.853.921,00)	(71,36)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.403.000,00	249.867.555,00	97,83	143.384.500,00	106.483.055,00	74,26
21	Dinas Perikanan	13.658.110,00	13.496.050,00	98,81	578.560.649,00	(565.064.599,00)	(97,67)
22	Dinas Pariwisata	45.900.000,00	45.900.000,00	100,00	349.799.994,00	(303.899.994,00)	(86,88)
23	Sekretariat Daerah	1.605.658.417,00	534.996.500,00	33,32	1.154.569.500,00	(619.573.000,00)	(53,66)
24	Sekretariat DPRD	4.544.409.944,00	3.805.816.943,59	83,75	389.896.539,00	3.415.920.404,59	876,11
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.500.000,00	9.990.000,00	79,92	438.350.000,00	(428.360.000,00)	(97,72)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	364.950.000,00	357.746.000,00	98,03	1.421.561.000,00	(1.063.815.000,00)	(74,83)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	238.450.000,00	(238.450.000,00)	(100,00)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	44.750.000,00	44.750.000,00	100,00	333.000.000,00	(288.250.000,00)	(86,56)
29	Inspektorat Daerah	421.382.000,00	395.866.700,00	93,94	803.120.000,00	(407.253.300,00)	(50,71)
30	Kecamatan Bunguran Timur	156.150.000,00	156.150.000,00	100,00	582.782.875,00	(426.632.875,00)	(73,21)
31	Kecamatan Bunguran Barat	339.300.000,00	339.300.000,00	100,00	65.440.000,00	273.860.000,00	418,49
32	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	273.091.000,00	(273.091.000,00)	(100,00)

No.	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
33	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	167.660.000,00	(167.660.000,00)	(100,00)
34	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	80.900.000,00	(80.900.000,00)	(100,00)
35	Kecamatan Serasan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	120.247.000,00	(65.247.000,00)	(54,26)
36	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	194.090.000,00	(194.090.000,00)	(100,00)
37	Kecamatan Pulau Tiga	60.440.000,00	60.440.000,00	100,00	69.250.000,00	(8.810.000,00)	(12,72)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	25.161.000,00	25.161.000,00	100,00	9.900.000,00	15.261.000,00	154,15
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	378.452.000,00	(378.452.000,00)	(100,00)
40	Kecamatan Bunguran Selatan	50.135.000,00	50.135.000,00	100,00	99.250.000,00	(49.115.000,00)	(49,49)
41	Kecamatan Serasan Timur	0,00	0,00	0,00	124.500.000,00	(124.500.000,00)	(100,00)
42	Kecamatan Suak Midai	0,00	0,00	0,00	101.730.000,00	(101.730.000,00)	(100,00)
43	Kecamatan Bunguran Batubi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	63.200.000,00	(23.200.000,00)	(36,71)
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00	24.840.000,00	72.660.000,00	292,51
45	Kecamatan Pulau Panjang	524.299.800,00	524.299.800,00	100,00	209.565.000,00	314.734.800,00	150,18
46	Kecamatan Pulau Seluan	0,00	0,00	0,00	176.250.000,00	(176.250.000,00)	(100,00)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	790.280.000,00	(790.280.000,00)	(100,00)
Jumlah		41.556.090.755,00	30.201.275.780,59	72,68	54.296.918.498,52	(24.095.642.717,93)	(44,38)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp59.335.996.972,00 atau sebesar 66,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.599.766.399,64. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp3.381.359.059,51 atau sebesar 9,34 %. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.727.856.043,00	4.240.748.553,00	54,87	6.438.921.080,00	(2.198.172.527,00)	(34,14)
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	223.263.398,00	223.263.397,07	99,99	0,00	223.263.397,07	100,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.618.151.548,00	6.527.803.096,95	85,68	4.929.240.192,14	1.598.562.904,81	32,43
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	175.171.650,00	13.405.280,00	7,65	0,00	13.405.280,00	100,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	395.955.800,00	184.556.500,00	46,61	32.809.000,00	151.747.500,00	462,52
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.036.525.163,00	13.520.448.898,00	58,69	9.285.265.085,00	4.235.183.813,00	45,61
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	78.210.000,00	12.210.000,00	15,61	201.869.926,00	(189.659.926,00)	(93,95)
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	4.325.683.225,00	(4.325.683.225,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.064.768.800,00	1.197.499.838,00	29,46	3.426.067.076,00	(2.228.567.238,00)	(65,05)
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.232.807.948,00	1.141.335.058,00	92,58	0,00	1.141.335.058,00	100,00
11	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.083.734.700,00	1.083.734.700,00	100,00	1.106.861.120,99	(23.126.420,99)	(2,09)
12	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.056.471.927,00	845.172.626,62	79,99	326.125.230,00	519.047.396,62	159,16
13	Belanja Modal Taman	983.730.100,00	276.731.392,00	28,13	0,00	276.731.392,00	100,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	721.396.800,00	598.339.000,00	82,94	2.058.474.339,00	(1.460.135.339,00)	(70,93)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
15	Belanja Modal Asrama	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.339.580.125,00	5.339.580.125,00	100,00	99.900.000,00	5.239.680.125,00	5.244,93
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	29.309.550,00	0,00	0,00	595.965.149,00	(595.965.149,00)	(100,00)
18	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	44.500.000,00	44.265.690,00	99,47	0,00	44.265.690,00	100,00
19	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	196.744.000,00	196.744.000,00	100,00	0,00	196.744.000,00	100,00
20	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	587.696.650,00	587.696.650,00	100,00	0,00	587.696.650,00	100,00
21	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	144.266.041,00	144.266.041,00	100,00	0,00	144.266.041,00	100,00
22	Belanja Modal Pagar	4.395.856.729,00	3.421.965.554,00	77,84	3.391.225.917,00	30.739.637,00	0,91
Jumlah		59.335.996.972,00	39.599.766.399,64	66,74	36.218.407.340,13	3.381.359.059,51	9,34

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.59 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.279.185.434,00	17.361.939.668,00	59,30	13.474.029.087,00	3.887.910.581,00	28,85
2	Dinas Kesehatan	7.894.133.192,00	6.803.784.740,95	86,19	4.929.240.192,14	1.874.544.548,81	38,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.886.140.828,00	4.388.065.546,00	55,64	4.321.530.030,00	66.535.516,00	1,54
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.753.709.132,00	5.753.474.822,00	100,00	2.226.023.225,00	3.527.451.597,00	158,46
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	185.732.414,00	185.732.414,00	100,00	13.764.000,00	171.968.414,00	1.249,41
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.345.000,00	99.345.000,00	100,00	0,00	99.345.000,00	100,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	795.140.800,00	795.083.000,00	99,99	638.638.000,00	156.445.000,00	24,50
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	144.266.041,00	144.266.041,00	100,00	0,00	144.266.041,00	100,00
9	Dinas Perhubungan	4.064.768.800,00	1.197.499.838,00	29,46	3.426.067.076,00	(2.228.567.238,00)	(65,05)
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	239.059.092,00	239.059.092,00	100,00	0,00	239.059.092,00	100,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	506.303.006,00	506.303.006,00	100,00	1.185.651.242,00	(679.348.236,00)	(57,30)
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	653.696.650,00	587.696.650,00	89,90	0,00	587.696.650,00	100,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.500.000,00	11.500.000,00	53,49	3.956.418.000,00	(3.944.918.000,00)	(99,71)
14	Dinas Pariwisata	1.083.734.700,00	1.083.734.700,00	100,00	1.106.861.120,99	(23.126.420,99)	(2,09)
15	Sekretariat Daerah	287.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	Sekretariat DPRD	223.263.398,00	223.263.397,07	100,00	0,00	223.263.397,07	100,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	29.807.760,00	29.807.760,00	100,00	940.185.367,00	(910.377.607,00)	(96,83)
18	Kecamatan Bunguran Timur Laut	189.210.725,00	189.210.724,62	100,00	0,00	189.210.724,62	100,00
Jumlah		59.335.996.972,00	39.599.766.399,64	66,74	36.218.407.340,13	3.381.359.059,51	9,34

Rendahnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp81.873.273.701,00 dengan realisasi sebesar Rp51.438.785.930,05 atau sebesar 62,83%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp(33.372.364.825,68) atau sebesar (39,35)%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.60 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	21.770.071.940,00	14.536.811.939,87	66,77	41.412.166.082,58	(26.875.354.142,71)	(64,90)
2	Belanja Modal Jalan Desa	405.751.584,00	236.173.584,00	58,20	15.845.250,00	220.328.334,00	1.390,50
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	28.236.562.959,00	17.839.930.305,53	63,18	19.095.598.294,08	(1.255.667.988,55)	(6,58)
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	137.312.227,00	0,00	0,00	11.900.000,00	(11.900.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	852.197.538,00	0,00	0,00	315.732.725,92	(315.732.725,92)	(100,00)
6	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.577.669.105,00	684.373.486,10	43,37	1.066.527.921,15	(382.154.435,05)	(35,83)
7	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	8.735.241.299,00	4.638.160.479,00	53,09	9.785.501.050,00	(5.147.340.571,00)	(52,60)
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	229.314.687,00	(229.314.687,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	353.518.727,00	341.863.727,00	96,70	17.293.800,00	324.569.927,00	1.876,80
11	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	125.299.020,00	116.192.580,00	92,73	116.394.060,00	(201.480,00)	(0,17)
12	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	99.790.950,00	99.790.950,00	100,00	299.922.000,00	(200.131.050,00)	(66,73)
13	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.022.648.713,00	2.923.828.924,00	96,73	4.010.383.194,00	(1.086.554.270,00)	(27,09)
14	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	445.945.627,00	340.455.297,00	76,34	625.029.045,00	(284.573.748,00)	(45,53)
15	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	470.000.000,00	469.996.200,00	99,99	0,00	469.996.200,00	100,00
16	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.400.000.000,00	344.124.486,55	24,58	299.900.000,00	44.224.486,55	14,75
17	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	983.176.446,00	(983.176.446,00)	(100,00)
18	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	9.967.864.947,00	6.610.314.856,00	66,31	4.157.853.642,00	2.452.461.214,00	58,98
19	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	353.719.615,00	114.344.665,00	32,32	0,00	114.344.665,00	100,00
20	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.769.679.450,00	2.142.424.450,00	56,83	2.368.612.558,00	(226.188.108,00)	(9,55)
Jumlah		81.873.273.701,00	51.438.785.930,05	62,83	84.811.150.755,73	(33.372.364.825,68)	(39,35)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.61 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.376.335.047,00	1.720.755.017,00	72,41	1.003.022.142,00	717.732.875,00	71,56
2	Dinas Kesehatan	894.272.732,00	894.268.932,00	100,00	1.511.313.305,00	(617.044.373,00)	(40,83)

No	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.641.562.004,00	35.195.561.985,58	60,02	56.560.550.793,73	(21.364.988.808,15)	(37,77)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.718.754.514,00	10.860.021.105,00	73,78	23.137.648.657,00	(12.277.627.552,00)	(53,06)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	817.998.724,00	376.958.724,00	46,08	0,00	376.958.724,00	100,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000,00	344.124.486,55	24,58	299.900.000,00	44.224.486,55	14,75
7	Dinas Perhubungan	2.796.179.450,00	1.823.924.450,00	65,23	2.298.715.858,00	(474.791.408,00)	(20,65)
8	Sekretariat DPRD	223.171.230,00	223.171.229,92	100,00	0,00	223.171.229,92	100,00
9	Sekretariat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
JUMLAH		81.873.273.701,00	51.438.785.930,05	62,83	84.811.150.755,73	(33.372.364.825,68)	(39,35)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.428.317.050,00 dengan realisasi sebesar Rp2.717.356.100,00 atau sebesar 190,25%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.599.936.971,00 atau sebesar 143,18%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Buku Umum	24.115.000,00	9.115.000,00	37,79	19.811.600,00	(10.696.600,00)	(53,99)
2	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000,00	80.000.000,00	88,88	0,00	80.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	532.640.000,00	532.640.000,00	100,00	0,00	532.640.000,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Ikan Budidaya	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	(37.760.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.024.847.529,00	(1.024.847.529,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	420.741.950,00	1.929.158.000,00	458,51	0,00	1.929.158.000,00	100,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	120.345.100,00	59.240.100,00	49,22	0,00	59.240.100,00	100,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	80.497.000,00	77.225.000,00	95,93	0,00	77.225.000,00	100,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	29.978.000,00	29.978.000,00	100,00	0,00	29.978.000,00	100,00
JUMLAH		1.428.317.050,00	2.717.356.100,00	190,25	1.117.419.129,00	1.599.936.971,00	143,18

Realisasi belanja aset tetap lainnya mengalami pelampauan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.289.039.050,00 atau 47,44% dari anggaran yang ditetapkan. Pelampauan belanja tersebut berasal dari belanja bantuan operasional sekolah. Penyebab terjadinya pelampauan belanja karena penyusunan RKA perubahan, serta DPPA tahun 2025 tidak menggunakan data RKAS terakhir sekolah. RKAS disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang mengamankan penggunaan dana BOS minimal 10% untuk pengadaan buku yang masuk ke dalam belanja aset tetap lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, seluruh sekolah telah melakukan perubahan RKAS untuk menganggarkan belanja buku minimal 10%. Tetapi perubahan RKAS tersebut tidak dikonsolidasi menjadi RKA Perubahan Kegiatan dana BOSP dan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025, sehingga menyebabkan anggaran yang tersedia lebih kecil dari realisasi belanja tahun 2025.

Adapun realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.291.202.050,00	2.605.241.100,00	201,77	1.044.659.129,00	1.560.581.971,00	149,39
2	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	(37.760.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00	80.000.000,00	100,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.115.000,00	32.115.000,00	68,16	0,00	32.115.000,00	100,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH		1.428.317.050,00	2.717.356.100,00	190,25	1.117.419.129,00	1.599.936.971,00	143,18

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada tahun 2025 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp413.870.000,00 atau sebesar 99,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp414.480.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp279.391.368,00 atau 207,76%. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.5.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	313.000.000,00	312.870.000,00	99,95	73.378.632,00	239.491.368,00	326,38
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	101.480.000,00	101.000.000,00	99,52	61.100.000,00	39.900.000,00	65,30
Jumlah		414.480.000,00	413.870.000,00	99,85	134.478.632,00	134.478.632,00	207,76

Adapun realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	(41.100.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	101.480.000,00	101.000.000,00	99,53	12.000.000,00	89.000.000,00	741,67
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	299.870.000,00	99,96	31.378.632,00	268.491.368,00	855,65
4	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	30.000.000,00	(17.000.000,00)	(56,67)
JUMLAH		414.480.000,00	413.870.000,00	99,85	134.478.632,00	279.391.368,00	207,76

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2025 realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp854.213.763,87 atau sebesar 58,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.466.005.490,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp189.082.246,87 atau sebesar 28,43% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp665.131.517,00. Kenaikan ini terjadi disebabkan karena banyaknya kondisi darurat yang membebankan Belanja Tidak Terduga. Adapun rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga
(dalam rupiah)

No	Dinas Pelaksana BTT	Peruntukan/ Tujuan Penggunaan BTT	Realisasi	Kategori BTT
1	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	144.808.703,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bansos Tidak terencana Bantuan Terdampak Cuaca Ekstrem (perbaikan rumah dan atap rumah)	83.293.000,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bansos Tidak terencana Bantuan Terdampak Kebakaran Rumah	155.000.000,00	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana(perbaikan jembatan)	469.612.060,87	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengembalian bantuan keuangan yang bersifat khusus	1.500.000,00	Pengembalian Bantuan Keuangan
Jumlah			854.213.763,87	

Dari tabel di atas, penggunaan belanja tidak terduga dijabarkan sebagai berikut:

- Pemberian bantuan sosial tidak terencana (bantuan berobat) sebesar Rp144.808.703,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- Pemberian bantuan perbaikan rumah dan atap rumah korban Cuaca Ekstrem sebesar Rp83.293.000,00 dan pemberian bantuan sosial tidak terencana bantuan Kebakaran Rumah Rp155.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- Pemberian bantuan sosial tidak terencana perbaikan jembatan sebesar Rp469.612.060,87
- Pengembalian SILPA atas Bantuan keuangan yang bersifat khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan dapat segera disetorkan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut di atas paling Lambat Tanggal 15 Juli 2025 ke rekening Nomor 103.01.00310 atas nama Kas Daerah Provinsi Kepri Bank Riau Kepri Syariah, dan selanjutnya menyampaikan Bukti Setor/Slip Setoran Pengembalian Bantuan Keuangan Ke RKUD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.500.000,00.

7.5.1.3 Transfer

Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	114.203.474.591,00	119.988.682.400,00

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp114.203.474.591,00 atau sebesar 97,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp116.836.411.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.67 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tranfer Bagi Hasil Pendapatan	5.082.902.400,00	4.462.550.900,00	87,79	2.716.448.500,00	1.746.102.400,00	64,28
2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	111.753.509.000,00	109.740.923.691,00	98,19	117.272.233.900,00	(7.531.310.209,00)	(6,42)
Jumlah		116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,74	119.988.682.400,00	(5.785.207.809,00)	(4,82)

7.5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp4.462.550.900,00 atau sebesar 87,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.082.902.400,00. Transfer bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah untuk dibagi hasilkan kepada Pemerintah Desa. Rincian Belanja bagi hasil pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.707.765.400,00	4.317.830.800,00	91,71	2.353.880.000,00	1.963.950.800,00	83,43
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	375.137.000,00	144.720.100,00	38,57	362.568.500,00	(217.848.400,00)	(60,08)
JUMLAH		5.082.902.400,00	4.462.550.900,00	87,79	2.716.448.500,00	1.746.102.400,00	64,28

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Besar/kecilnya realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah akan berdampak pada Belanja Bagi Hasil yang akan diterima oleh desa. Ini disebabkan terdapat kewajiban sebesar 10% atas pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7.5.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp109.740.923.691,00, atau sebesar 98,20% dari yang dianggarkan. Belanja Bantuan Keuangan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	59.495.800.000,00	58.181.134.097,00	97,79	62.904.512.900,00	(4.723.378.803,00)	(7,51)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	0,00	0,00	54.367.721.000,00	(54.367.721.000,00)	(100,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.257.709.000,00	51.559.789.594,00	98,66	0,00	51.559.789.594,00	100,00
JUMLAH		111.753.509.000,00	109.740.923.691,00	98,20	117.272.233.900,00	(7.531.310.209,00)	(6,42)

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp109.740.923.691,00 terdiri dari:

- Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa Rp58.181.134.097,00 merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 10% Dana Perimbangan selain DAK. Transfer ADD dibagikan untuk 70 (tujuh puluh) desa yang ada di Kabupaten Natuna.
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp51.559.789.594,00 merupakan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening kas desa. Penetapan alokasi per desa ditetapkan

oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Daerah mencatat belanja bantuan keuangan sebesar pendapatan dana desa yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.

7.5.1.4 Surplus/Defisit LRA

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LRA	1.607.517.887,37	(159.865.775.002,72)

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.607.517.887,37 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Surplus/Defisit LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan	1.087.894.043.594,00	949.796.897.567,13	87,31	972.909.236.075,86	(23.112.338.508,73)	(2,38)
2.	Belanja	975.091.889.194,00	833.985.905.088,76	85,53	1.012.786.328.678,58	(178.800.423.589,82)	(17,65)
3.	Belanja Transfer	116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,75	119.988.682.400,00	(5.785.207.809,00)	(4,82)
	Surplus (Defisit)	(4.034.257.000,00)	1.607.517.887,37	(39,85)	(159.865.775.002,72)	(161.473.292.890,09)	(101,01)

7.5.1.5 Pembiayaan

7.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4.106.891.698,67 atau sebesar 101,80 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.034.257.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.71 Penggunaan SiLPA

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Penggunaan SiLPA	4.034.257.000,00	4.106.891.698,67	101,80	163.972.666.701,39	(159.865.775.002,72)	(97,50)

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.106.891.698,67 atau 101,80% dari anggaran sebesar Rp4.034.257.000,00. Realisasi SiLPA tahun anggaran 2025 merupakan silpa akhir tahun 2024 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah Rp305.302.268,40, Kas di Bendahara Penerimaan Rp8.640.688,00, Kas di BLUD Rp72.514.764,79, Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp265.175.582,81, Kas Lainnya Rp75.838.251,67, Kas Dana BOSP-SD dan SMP Rp246.730.471,00, Kas Dana BOSP-PAUD Rp8.682.032,00, Kas Dana BOSP-Kesetaraan Rp300.000,00, dan Kas Dana BOK Puskesmas Rp3.123.707.640,00.

7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
SiLPA	5.714.409.586,04	4.106.891.698,67

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.714.409.586,04 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.087.894.043.594,00	949.796.897.567,13	87,31	972.909.236.075,86	(23.112.338.508,73)	(2,38)
2	Belanja	975.091.889.194,00	833.985.905.088,76	85,53	1.012.786.328.678,58	(178.800.423.589,82)	(17,65)
3	Transfer	116.836.411.400,00	114.203.474.591,00	97,75	119.988.682.400,00	(5.785.207.809,00)	(4,82)
4	Surplus (Defisit)	(4.034.257.000,00)	1.607.517.887,37	(39,85)	(159.865.775.002,72)	161.473.292.890,09	(101,01)
5	Pembiayaan Netto	4.034.257.000,00	4.106.891.698,67	101,80	163.972.666.701,39	(159.865.775.002,72)	(97,50)
SILPA		0,00	5.714.409.586,04	100,00	4.106.891.698,67	1.607.517.887,37	39,14

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.714.409.586,04, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.73 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah Kas
1	Kas di Kas Daerah	1.533.034.626,30
2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.746.258,00
3	Kas di BLUD	1.640.097.292,93
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	292.830.123,81
5	Kas Lainnya	119.652.691,00
6	Kas Dana BOSP	254.098.419,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.864.950.175,00
Jumlah		5.714.409.586,04

Terdapat perbedaan antara Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 dengan saldo kas dan setara kas di Neraca sebesar Rp45.481.977,00 yang merupakan utang PFK dana BOS yang berada pada kas Lainnya.

7.5.2. LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2025 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		4.106.891.698,67	163.972.658.465,39

Nilai SAL awal sebesar Rp4.106.891.698,67 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2024. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2025.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		4.106.891.698,67	163.972.666.701,39

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025 adalah seluruh SAL akhir tahun 2024. Jumlah Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp4.106.891.698,67 yang merupakan realisasi dari SiLPA tahun 2025. Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi atas realisasi SiLPA.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		5.714.409.586,04	4.106.891.698,67

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2025 sebesar Rp5.714.409.586,04

7.5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		5.714.409.586,04	4.106.891.698,67

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2025 sebesar Rp5.714.409.586,04.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	49.215.642.622,82	78.807.065.983,31

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.215.642.622,82 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas dan Setara Kas	5.759.891.563,04	4.110.100.555,67
Piutang	74.489.268.824,82	101.880.783.239,95
Penyisihan Piutang	(54.317.002.165,88)	(53.173.918.293,61)
Beban Dibayar Dimuka	694.227.639,59	765.591.570,63
Persediaan	22.589.256.761,25	25.224.508.910,67
Jumlah	49.215.642.622,82	78.807.065.983,31

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.759.891.563,04	4.110.100.555,67

Nilai saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.759.891.563,04 merupakan saldo di Kas di Kas Daerah ditambah Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Kas Daerah	1.533.034.626,30	305.302.268,40
Kas di BLUD	1.640.097.292,93	72.514.764,79
Kas di Bendahara Penerimaan	9.746.258,00	8.640.688,00
Kas Dana BOSP	254.098.419,00	255.712.503,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	292.830.123,81	265.175.582,81
Kas Dana BOK Puskesmas	1.864.950.175,00	3.123.707.640,00
Kas Lainnya	165.134.668,00	79.047.108,67
Jumlah	5.759.891.563,04	4.110.100.555,67

Kas dan Bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.759.891.563,04 terdiri dari:

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.533.034.626,30	305.302.268,40

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar secara pembukuan adalah Rp1.533.034.626,30, sedangkan kas di rekening bank terdiri dari:

Tabel 7.5.74 Rincian Saldo Rekening Koran Kas di Kas Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025
	Bank Riau Kepri Syariah KCP Ranai Natuna	
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	1.450.862.427,30
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	26.005.350,00
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		1.476.867.777,30

Terdapat selisih sebesar Rp56.166.849,00, antar saldo pembukuan kasda dan saldo yang terdapat pada rekening koran yang merupakan kejadian *subsequent event*. *Subsequent event* adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca (tanggal akhir periode pelaporan) yang dapat mempengaruhi saldo tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan (audited) diterbitkan. Kejadian *subsequent event* yang terjadi untuk akun kas di kas daerah berupa pengembalian sisa dana Uang Persediaan yang STS diterbitkan per tanggal 31 Desember tahun 2025, tetapi baru disetor/masuk ke rekening kasda melewati tanggal 31 Desember 2025, terdiri dari pengembalian sisa UP Kecamatan Bunguran Timur Rp46.550.349,00, pengembalian sisa pelimpahan UP Kelurahan Ranai Kota Rp9.444.500,00, dan pengembalian sisa UP Kecamatan Bunguran Tengah Rp172.000,00.

7.5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2026 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	9.746.258,00	8.640.688,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.746.258,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo atas penerimaan pajak daerah pada bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp951.258,00, dan penerimaan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Rp8.795.000,00 yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo kas Rp951.258,00 pada bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan pendapatan atas PBJT- Restoran Rp850.600,00, Pendapatan denda PBJT- Restoran Rp8.558,00, Opsen PKB Rp89.400, dan Pendapatan denda Opsen PKB Rp2.700,00.

7.5.3.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di BLUD	1.640.097.292,93	72.514.764,79

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 secara pembukuan sebesar Rp1.640.097.292,93 yang merupakan saldo kas yang berada pada BLUD RSUD Kabupaten Natuna. Sedangkan saldo kas yang dicatat pada rekening koran BLUD Rp1.643.854.523,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Rincian Kas di Rekening Koran BLUD RSUD Kabupaten Natuna*(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	141.625.574,22
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 1090077332211)	0,00
Kas di Rekening Bank Syariah Indonesia (No. Rek 1209200787)	1.502.228.949,71
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	1.643.854.523,93

Terdapat perbedaan sejumlah Rp3.757.231,00 antara saldo pembukuan dengan saldo di rekening bank yang merupakan kejadian *subsequent event* yaitu peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca (tanggal akhir periode pelaporan) yang dapat mempengaruhi saldo tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan (*audited*) diterbitkan. Perbedaan sejumlah Rp3.757.231,00 merupakan selisih antara kekurangan posting oleh Bank sejumlah Rp4.844.231,00, dan kelebihan posting biaya *payroll* belanja pegawai oleh Bank Rp1.087.000,00 yang telah dikembalikan pada tahun 2026.

7.5.3.1.4 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	254.098.419,00	255.712.503,00

Saldo Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 sebesar Rp254.098.419,00. Saldo Dana BOSP tahun 2025 terdiri dari saldo Dana BOS SD dan SMP, saldo BOP PAUD, dan saldo BOP Kesetaraan. Perhitungan Saldo Dana BOSP sebagai berikut:

Tabel 7.5.76 Perhitungan Posisi Kas Dana BOSP Pada Dinas Pendidikan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Pengembalian Dana Tahun Berjalan Ke Kasda	Saldo 31 Desember 2025
1	Dana BOS SD & SMP	246.730.471,00	15.655.076.772,00	15.648.259.824,00	0,00	253.547.419,00
2	Dana BOP PAUD	8.682.032,00	2.150.502.622,00	2.142.917.240,00	15.716.414,00	551.000,00
3	Dana BOP Kesetaraan	300.000,00	299.480.000,00	299.780.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		255.712.503,00	18.105.059.394,00	18.090.957.064,00	15.716.414,00	254.098.419,00

Pada tahun 2025 terdapat penyetoran Dana BOP PAUD dari rekening sekolah ke rekening kasda sebesar Rp15.716.414,00 yang dengan rincian TK Negeri 002 Bunguran Timur Rp1.869.164,00, TK Negeri 002 Bunguran Timur Laut Rp625.950,00, KB Restu Bunda Rp6.240.000,00, dan TK Setia Rp6.981.300,00. Atas pengembalian ini sudah dicatat sebagai kas di kasda.

Dana BOS yang disajikan dalam Kas Dana BOS SD dan SMP adalah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berstatus sekolah negeri.

Tabel 7.5.77 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS SD dan SMP*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo akhir		
					Saldo Akhir	Saldo Bank	Saldo Tunai
1	Dana BOS SD	99.259.754,00	10.624.397.489,00	10.645.455.341,00	78.201.902,00	75.377,00	78.126.525,00
2	Dana BOS SMP	147.470.717,00	5.030.679.283,00	5.002.804.483,00	175.345.517,00	79.581.619,00	95.763.898,00
Jumlah		246.730.471,00	15.655.076.772,00	15.648.259.824,00	253.547.419,00	79.656.996,00	173.890.423,00

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SD dan SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo di Bank	Saldo Tunai
1	11002363	SD NEGERI 001 SABANG BARAT	Midai	0,00	0,00	0,00
2	11001175	SD NEGERI 002 AIR PUTIH	Midai	15.243,00	0,00	15.243,00
3	11001185	SD NEGERI 003 SABANG BARAT	Midai	0,00	0,00	0,00
4	11001196	SD NEGERI 004 GUNUNG SEBELAT	Midai	0,00	0,00	0,00
5	11001161	SD NEGERI 001 SEDANAU	Bunguran Barat	75.000,00	10.000,00	65.000,00
6	11001173	SD NEGERI 002 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
7	11001314	SD NEGERI 003 SEDANAU	Bunguran Barat	500.300,00	300,00	500.000,00
8	11001332	SD NEGERI 004 PIAN TENGAH	Bunguran Barat	5.193.000,00	0,00	5.193.000,00
9	11001341	SD NEGERI 005 SEDANAU	Bunguran Barat	45.000,00	0,00	45.000,00
10	11001347	SD NEGERI 006 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
11	11001353	SD NEGERI 007 SELAUT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
12	11001359	SD NEGERI 008 BINJAI	Bunguran Barat	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
13	11001375	SD NEGERI 009 MEKAR JAYA	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
14	11001380	SD NEGERI 010 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
15	11001160	SD NEGERI 001 RANAI	Bunguran Timur	175.000,00	0,00	175.000,00
16	11001172	SD NEGERI 002 RANAI	Bunguran Timur	471,00	0,00	471,00
17	11001190	SD NEGERI 003 SUNGAI ULU	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
18	11001308	SD NEGERI 004 RANAI	Bunguran Timur	3.389.960,00	0,00	3.389.960,00
19	11001326	SD NEGERI 005 SEPEMPANG	Bunguran Timur	10.190,00	0,00	10.190,00
20	11001350	SD NEGERI 006 BANDARSYAH	Bunguran Timur	21.252.990,00	51.730,00	21.201.260,00
21	11001357	SD NEGERI 007 RANAI DARAT	Bunguran Timur	4.402.350,00	0,00	4.402.350,00
22	11001368	SD NEGERI 008 BATU GAJAH	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
23	11001378	SD NEGERI 009 BANDARSYAH	Bunguran Timur	21.000,00	0,00	21.000,00
24	11001383	SD NEGERI 010 BATU GAJAH	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
25	11002764	SD NEGERI 011 RANAI	Bunguran Timur	7.089.000,00	0,00	7.089.000,00
26	69964075	SD NEGERI 012 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
27	70041098	SD NEGERI 013 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
28	11002364	SD NEGERI 001 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
29	11001165	SD NEGERI 002 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
30	11001191	SD NEGERI 003 TANJUNG BALAU	Serasan	0,00	0,00	0,00
31	11001197	SD NEGERI 004 JERMALIK	Serasan	0,00	0,00	0,00
32	11001311	SD NEGERI 005 PANGKALAN	Serasan	35.000,00	0,00	35.000,00
33	11001316	SD NEGERI 006 BATU BERIAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
34	11001328	SD NEGERI 007 HILIR	Serasan	0,00	0,00	0,00
35	11001162	SD NEGERI 001 SUBI	Subi	0,00	0,00	0,00
36	11002509	SD NEGERI 002 MELIAH	Subi	0,00	0,00	0,00
37	11001181	SD NEGERI 003 SUBI BESAR	Subi	23.900,00	0,00	23.900,00
38	11001186	SD NEGERI 001 PULAU PANJANG	Pulau Panjang	0,00	0,00	0,00
39	11001198	SD NEGERI 002 KERDAU	Pulau Panjang	50.000,00	0,00	50.000,00
40	11002358	SD NEGERI 001 KELARIK AIR MALI	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
41	11001168	SD NEGERI 002 KELARIK	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
42	11001178	SD NEGERI 003 KELARIK UTARA	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
43	11001302	SD NEGERI 004 TELUK BUTON	Bunguran Utara	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00
44	11001189	SD NEGERI 001 KELARIK BARAT / SELUAN	Pulau Seluan	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
45	11002448	SD NEGERI 001 AIR PAYANG	Pulau Laut	105.000,00	0,00	105.000,00
46	11001174	SD NEGERI 002 TANJUNG PALA	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
47	11001177	SD NEGERI 003 KADUR	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
48	11001192	SD NEGERI 001 TANJUNG BATANG	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
49	11001300	SD NEGERI 002 SEDEDAP	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
50	11001304	SD NEGERI 003 SABANG MAWANG	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
51	11001327	SD NEGERI 004 SERANTAS	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
52	11001182	SD NEGERI 001 TANJUNG	Bunguran Timur Laut	2.404.596,00	0,00	2.404.596,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo di Bank	Saldo Tunai
53	11001312	SD NEGERI 002 KELANGA	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
54	11001319	SD NEGERI 003 PENGADAH	Bunguran Timur Laut	25.000,00	0,00	25.000,00
55	11001335	SD NEGERI 004 CERUK	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
56	11001372	SD NEGERI 005 LIMAU MANIS	Bunguran Timur Laut	3.341.168,00	0,00	3.341.168,00
57	11001381	SD NEGERI 006 SELEMAM	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
58	11001382	SD NEGERI 007 SEBADAI HULU	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
59	11001360	SD NEGERI 001 HARAPAN JAYA	Bunguran Tengah	653.841,00	0,00	653.841,00
60	11001365	SD NEGERI 002 TAPAU	Bunguran Tengah	993,00	816,00	177,00
61	11001370	SD NEGERI 003 AIR LENGIT	Bunguran Tengah	300.000,00	0,00	300.000,00
62	11001195	SD NEGERI 001 CEMAGA	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
63	11001330	SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
64	11001345	SD NEGERI 003 CEMAGA UTARA	Bunguran Selatan	9.778.400,00	0,00	9.778.400,00
65	11001346	SD NEGERI 004 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
66	11001376	SD NEGERI 005 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
67	11001384	SD NEGERI 006 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
68	11001176	SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
69	11001303	SD NEGERI 002 AIR NUSA	Serasan Timur	120.000,00	0,00	120.000,00
70	11001325	SD NEGERI 003 PAYAK	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
71	69893603	SD NEGERI 004 AIR RINGAU	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
72	11001338	SD NEGERI 001 SEDANAU TIMUR	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
73	11001366	SD NEGERI 002 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
74	11001369	SD NEGERI 003 GUNUNG PUTRI	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
75	11001371	SD NEGERI 004 SEDARAT BARU	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
76	11001374	SD NEGERI 005 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	120.000,00	0,00	120.000,00
77	11001183	SD NEGERI 001 PULAU TIGA	Pulau Tiga Barat	12.839.000,00	12.531,00	12.826.469,00
78	11001321	SD NEGERI 002 SELADING	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
79	11001358	SD NEGERI 003 SETUMUK	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
80	11001167	SD NEGERI 001 BATU BELANAK	Suak Midai	396.500,00	0,00	396.500,00
81	11001305	SD NEGERI 002 GUNUNG JAMBAT	Suak Midai	195.000,00	0,00	195.000,00
Jumlah				78.201.902,00	75.377,00	78.126.525,00

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SMP Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo di Bank	Saldo Tunai
1	11000324	SMP NEGERI 1 MIDAI	Midai	0,00	0,00	0,00
2	11000318	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	7.610.000,00	7.609.800,00	200,00
3	11002503	SMP NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
4	69980325	SMP NEGERI 3 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
5	11000317	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	115.989.900,00	71.970.673,00	44.019.227,00
6	11002054	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
7	11002498	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
8	11000325	SMP NEGERI 1 SERASAN	Serasan	36.000,00	0,00	36.000,00
9	69978814	SMP NEGERI 2 SERASAN	Serasan	12.089.500,00	0,00	12.089.500,00
10	69978813	SMP NEGERI 3 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
11	11002057	SMP NEGERI 1 PULAU PANJANG	Subi	0,00	0,00	0,00
12	11001399	SMP NEGERI 1 SUBI	Subi	9.543.600,00	245,00	9.543.355,00
13	11001396	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	901,00	901,00	0,00
14	69978868	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
15	11002508	SMP NEGERI 1 PULAU SELUAN	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
16	11001398	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
17	11001405	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
18	11001403	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	20.306.400,00	0,00	20.306.400,00
19	11002055	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo di Bank	Saldo Tunai
20	11000329	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	Bunguran Tengah	278.216,00	0,00	278.216,00
21	11001404	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
22	69978815	SMP NEGERI 2 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	8.166.000,00	0,00	8.166.000,00
23	11002053	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
24	11000328	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	Bunguran Batubi	75.000,00	0,00	75.000,00
25	11001402	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
Jumlah				175.345.517,00	79.581.619,00	95.763.898,00

Selama tahun anggaran 2025 dana BOP PAUD langsung ditransfer oleh Pemerintah pusat ke rekening sekolah. Belanja BOP PAUD diterima oleh sekolah Negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri sisa kas yang dicatat sebagai bagian dari Kas Dana BOSP, sedangkan untuk sekolah swasta belanja dicatat sebagai Belanja Hibah sebesar pendapatan yang diterima oleh setiap sekolah. Rincian Saldo dana BOP PAUD per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Rincian Kas BOP PAUD per Sekolah

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah
1	TK NEGERI 001 BUNGURAN BARAT	69870157	Kec. Bunguran Barat	0,00
2	TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT	11002724	Kec. Bunguran Barat	0,00
3	TK NEGERI BUNGURAN BATUBI	11002726	Kec. Bunguran Batubi	0,00
4	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	69870178	Kec. Bunguran Selatan	0,00
5	TK NEGERI BUNGURAN TENGAH	11002758	Kec. Bunguran Tengah	0,00
6	SKB NATUNA	P9970341	Kec. Bunguran Timur	0,00
7	TK NEGERI 001 PEMBINA BUNGURAN TIMUR	11002738	Kec. Bunguran Timur	341.000,00
8	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR	69934196	Kec. Bunguran Timur	0,00
9	TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	11003237	Kec. Bunguran Timur	210.000,00
10	TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR	11003229	Kec. Bunguran Timur	0,00
11	TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR LAUT (BHAKTI LESTARI)	69870174	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
12	TK NEGERI 001 BUNGURAN TIMUR LAUT	11002757	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
13	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	69870173	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
14	TK AL-BANNA (TKN 003 BUNGURAN TIMUR LAUT)	69870172	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
15	TK NEGERI 002 BUNGURAN UTARA (HARAPAN BANGSA)	11002746	Kec. Bunguran Utara	0,00
16	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	11003233	Kec. Bunguran Utara	0,00
17	TK NEGERI MIDAI	11002451	Kec. Midai	0,00
18	TK NEGERI PULAU LAUT	11002750	Kec. Pulau Laut	0,00
19	TK NEGERI PULAU TIGA BARAT	11002752	Kec. Pulau Tiga Barat	0,00
20	TK NEGERI SERASAN	11002731	Kec. Serasan	0,00
21	TK NEGERI SERASAN TIMUR	11002760	Kec. Serasan Timur	0,00
22	TK NEGERI 002 SUBI (HARAPAN BUNDA)	11002749	Kec. Subi	0,00
23	TK NEGERI SUBI	11002747	Kec. Subi	0,00
Jumlah				551.000,00

Saldo BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 sejumlah Rp0,00. Perhitungan saldo BOP Kesetaraan sebagai berikut:

Tabel 7.5.81 Perhitungan Saldo Kas BOP Kesetaraan

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Per 31 Desember 2025
1	SKB NATUNA	P9970341	Bunguran Timur	300.000,00	299.480.000,00	299.780.000,00	0,00

7.5.3.1.5 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	292.830.123,81	265.175.582,81

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp292.830.123,81. Saldo pada Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Puskesmas Ranai	13.131.340,00
2	Puskesmas Tanjung	65.458.699,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	24.823.804,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	1.941.380,00
5	Puskesmas Kelarik	12.334.383,00
6	Puskesmas Sedanau	37.674.655,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	13.041.646,00
8	Puskesmas Pulau Laut	7.215.212,00
9	Puskesmas Midai	44.625.210,00
10	Puskesmas Serasan	9.527.204,03
11	Puskesmas Serasan Timur	14.660.428,00
12	Puskesmas Subi	4.859.561,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	19.268.666,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	15.359.576,00
15	Puskesmas Suak Midai	8.908.359,00
Jumlah		292.830.123,81

7.5.3.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.864.950.175,00	3.123.707.640,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo kas dari pengelolaan DAK Non Fisik BOK Puskesmas Tahun 2025 yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Puskesmas. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.864.950.175,00 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Puskesmas Ranai	601.899.766,00
2	Puskesmas Tanjung	80.367.302,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	55.503.973,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	48.164.414,00
5	Puskesmas Kelarik	186.418.174,00
6	Puskesmas Sedanau	206.774.839,00
7	Puskesmas Pulau Tiga	40.284.328,00
8	Puskesmas Pulau Laut	72.513.942,00
9	Puskesmas Midai	54.686.674,00
10	Puskesmas Serasan	134.726.453,00
11	Puskesmas Serasan Timur	118.081.271,00
12	Puskesmas Subi	59.826.706,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	51.991.138,00

No.	SKPD	Jumlah
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	74.456.195,00
15	Puskesmas Suak Midai	79.255.000,00
Jumlah		1.864.950.175,00

Terdapat perbedaan saldo antara pembukuan dan rekening koran dana BOK Puskesmas. Saldo rekening koran sebesar Rp1.866.311.159,00 sedangkan saldo pembukuan adalah Rp1.864.950.175,00. Jumlah perbedaan sebesar Rp1.360.984,00 merupakan jasa giro rekening BOK yang belum dipindahkan ke rekening kas umum daerah.

7.5.3.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Kas Lainnya	165.134.668,00	79.047.108,67

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp165.134.668,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.84 Daftar Saldo Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Kas Piutang Dana Bergulir	118.442.465,00
2	Saldo Jasa Giro Rekening Bosda	10.226,00
3	Saldo kas pengembalian sisa Dana Operasional UKSF yang belum masuk ke kasda	1.200.000,00
4	Saldo Utang PFK Dana BOS pada Sekolah	45481977
Jumlah		165.134.668,00

Saldo Kas Piutang Dana Bergulir merupakan saldo kas Pengembalian Piutang Dana Bergulir Rp118.442.465,00 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian Saldo Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2025 Sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No.	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	118.442.465,00
2	Perikanan	Dana Kredit Pengelolaan yg belum disalurkan	2-135-301-000 00117	0.00
Jumlah				118.442.465,00

Saldo Jasa giro dana Bosda adalah saldo jasa giro atas rekening yang menampung dana bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Daerah. Sampai 31 Desember 2025 masih terdapat saldo atas jasa giro rekening Bosda yang belum dipindahkan ke rekening kas umum daerah Rp10.226,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.86 Daftar Saldo Kas Lainnya – Jasa Giro Dana Bosda

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SD NEGERI 004 GUNUNG SEBELAT	1.173,00
2	SD NEGERI 010 SEDANAU	491,00
3	SMP NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	724,00
4	SD NEGERI 008 BATU GAJAH	215,00
5	SD NEGERI 005 PANGKALAN	879,00
6	SD NEGERI 001 PULAU PANJANG	596,00

No	Nama Sekolah	Jumlah
7	SD NEGERI 002 KERDAU	1.573,00
8	SMP NEGERI 1 PULAU PANJANG	1.319,00
9	SD NEGERI 004 TELUK BUTON	274,00
10	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	801,00
11	SD NEGERI 006 SELEMAM	528,00
12	SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH	293,00
13	SD NEGERI 006 CEMAGA SELATAN	334,00
14	SD NEGERI 002 GUNUNG JAMBAT	1.026,00
Jumlah		10.226,00

Saldo kas pengembalian sisa Dana Operasional UKSPF yang belum masuk ke kasda Rp1.200.000,00 adalah pengembalian sisa belanja operasional UKSPF Kecamatan Midai.

Tabel 7.5.87 Daftar Saldo Kas Lainnya – Utang PFK Dana BOS pada sekolah

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah
1	Bunguran Barat	SD Negeri 001 Sedanau	3.710.467,00
		SD Negeri 003 Sedanau	15.000,00
		SD Negeri 005 Sedanau	45.600,00
		SD Negeri 006 Sedanau	1.000,00
2	Bunguran Batubi	SD Negeri 001 Sedanau Timur	40.620,00
		SD Negeri 002 Batubi Jaya	172.280,00
3	Bunguran Tengah	SD Negeri 002 Tapau	421.179,00
4	Bunguran Timur	SD Negeri 001 Ranai	4.584.134,00
		SD Negeri 002 Ranai	4.245.656,00
		SD Negeri 011 Ranai	990.102,00
		SD Negeri 012 Ranai	12.720.572,00
		SMP Negeri 1 Bunguran Timur	2.843.429,00
5	Bunguran Timur Laut	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	34.200,00
6	Bunguran Utara	SD Negeri 003 Kelarik Utara	1.114.869,00
7	Midai	SD Negeri 002 Air Putih	395.009,00
8	Pulau Laut	SD Negeri 002 Tanjung Pala	6.850.792,00
		SD Negeri 003 Kadur	749.073,00
9	Pulau Seluan	SMP Negeri 1 Pulau Seluan	382.837,00
10	Pulau Tiga	SD Negeri 001 Tanjung Batang	173.960,00
11	Serasan	SD Negeri 006 Batu Berian	38.160,00
		SD Negeri 003 Tanjung Balau	6.000,00
		SMP Negeri 2 Serasan	59.928,00
12	Serasan Timur	SD Negeri 001 Arung Ayam	2.281.862,00
		SD Negeri 004 Air Ringau	3.605.194,00
13	Subi	SD Negeri 002 Meliah	54,00
Jumlah			45.481.977,00

Saldo Kas Lainnya Utang PFK Dana BOS pada Sekolah merupakan saldo atas Pemungutan PFK oleh bendahara sekolah yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2025.

Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah merupakan salah satu komponen penting dalam neraca yang akan menambah aset lancar yang merupakan hak pemerintah daerah untuk menagih dan mencatatnya.

Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	74.489.268.824,82	101.880.783.239,95

Piutang tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Tabel 7.5.88 Saldo Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Piutang Pajak Daerah	26.419.148.330,92	33.514.494.193,17
2	Piutang Retribusi Daerah	6.289.475.307,00	8.541.811.987,19
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.137.368.824,90	36.620.423.646,90
4	Piutang Transfer Antar Daerah	4.643.276.362,00	17.546.888.639,00
5	Piutang Lainnya	0,00	5.657.164.773,69
Jumlah		74.489.268.824,82	101.880.783.239,95

7.5.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>26.419.148.330,92</u>	<u>33.514.494.193,17</u>

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.419.148.330,92 merupakan nilai piutang pajak daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025		Saldo per 31 Desember 2025
			Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Pajak Reklame	45.648.000,00	1.264.000,00	833.000,00	0,00	46.079.000,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	9.098.125.000,00	0,00	9.098.125.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	24.248.695.756,00	2.957.706.319,00	292.170.490,00	947.095.693,00	25.967.135.892,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	122.025.437,17	5.716.424,00	5.259.398,25	0,00	122.482.462,92
5	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	283.450.976,00	0,00	0,00	283.450.976,00
Jumlah		33.514.494.193,17	3.248.137.719,00	9.396.387.888,25	947.095.693,00	26.419.148.330,92

- 1) Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp46.079.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.90 Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
2020	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00
2021	2.736.000,00	0,00	0,00	2.736.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Tahun	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
2024	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00
2025	0,00	120.902.000,00	119.638.000,00	1.264.000,00
Jumlah	45.648.000,00	120.902.000,00	120.471.000,00	46.079.000,00

- 2) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.
- 3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp25.967.135.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.91 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan**

(dalam rupiah)

Tahun pajak	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan				Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
		Ketetapan Tahun 2025	Pembayaran 2025 (Rp)	Relaksasi	Pembatalan	Pembetulan	
2010	729.930.898,00	0,00	3.835.326,00	10.312.488,00	4.427.345,00	0,00	711.355.739,00
2011	737.319.408,00	0,00	3.587.042,00	8.124.984,00	4.313.837,00	0,00	721.293.545,00
2012	755.858.037,00	0,00	3.759.375,00	8.244.448,00	4.428.554,00	0,00	739.425.660,00
2013	812.418.684,00	0,00	4.607.661,00	10.908.280,00	4.543.083,00	0,00	792.359.660,00
2014	788.527.734,00	0,00	3.988.190,00	9.362.818,00	4.503.714,00	572.760,00	770.100.252,00
2015	827.629.348,00	0,00	4.356.379,00	10.102.178,00	4.654.353,00	572.760,00	807.943.678,00
2016	816.939.247,00	0,00	4.848.860,00	10.247.954,00	3.454.419,00	572.760,00	797.815.254,00
2017	1.569.048.902,00	0,00	10.026.571,00	26.348.365,00	35.073.624,00	5.393.600,00	1.492.206.742,00
2018	1.815.905.077,00	0,00	11.074.993,00	30.484.474,00	34.479.801,00	5.393.600,00	1.734.472.209,00
2019	2.023.890.592,00	0,00	12.952.132,00	34.642.396,00	34.370.667,00	5.393.600,00	1.936.531.797,00
2020	2.335.308.733,00	0,00	17.695.493,00	43.030.427,00	31.108.185,00	5.393.600,00	2.238.081.028,00
2021	2.542.212.395,00	0,00	28.224.760,00	44.944.100,00	30.293.636,00	5.393.600,00	2.433.356.299,00
2022	2.714.177.116,00	0,00	35.597.569,00	52.174.587,00	82.228.915,00	5.393.600,00	2.538.782.445,00
2023	2.784.786.026,00	0,00	46.104.023,00	58.651.689,00	81.227.768,00	5.393.600,00	2.593.408.946,00
2024	2.994.743.559,00	0,00	101.512.116,00	109.312.079,00	81.623.045,00	0,00	2.702.296.319,00
2025	0,00	3.891.727.809,00	934.021.490,00	0,00	0,00	0,00	2.957.706.319,00
Jumlah	24.248.695.756,00	3.891.727.809,00	1.226.191.980,00	466.891.267,00	440.730.946,00	39.473.480,00	25.967.135.892,00

Terdapat selisih antara pembayaran 2025 dengan realisasi PBB-P2 dalam laporan realisasi anggaran sejumlah Rp130.741 yang merupakan kelebihan pembayaran PBB-P2 selama tahun 2025 yang dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Kemudian terdapat kebijakan relaksasi pembayaran PBB-P2 selama tahun 2025 yang mempengaruhi dari pengurangan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya sebesar Rp466.891.267,00 dan terdapat pembetulan dari ketetapan yang telah terbit tahun sebelumnya yang mempengaruhi pengurangan sebesar Rp39.473.480,00 serta pembatalan beberapa SPPT PBB-P2 dari tahun 2010 sampai dengan 2025 sebesar Rp440.730.946,00 terhadap objek pajak yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi data, objek pajak dimaksud merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang telah tercatat dalam database aset daerah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak yang terutang PBB-P2.

Atas kondisi tersebut dilakukan pembatalan SPPT dan penyesuaian pencatatan piutang PBB-P2 sebagai bagian dari penertiban administrasi perpajakan daerah serta untuk meningkatkan kewajaran penyajian nilai piutang pajak dalam laporan keuangan.

- 4) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp122.482.462,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.92 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*(dalam rupiah)*

Tahun	Saldo per 31 Desember 2024	Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran 2025	Saldo Akhir per 31 Desember 2025
2017	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
2018	40.644.236,76	0,00	5.075.737,50	35.568.499,26
2019	40.371.095,97	0,00	183.660,75	40.187.435,22
2020	31.638.294,18	0,00	0,00	31.638.294,18
2021	8.961.650,88	0,00	0,00	8.961.650,88
2022	101.220,00	0,00	0,00	101.220,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	707.739.565,00	702.023.141,00	5.716.424,00
Jumlah	122.025.437,17	707.739.565,00	707.282.539,25	122.482.462,92

- 5) Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp283.450.976,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.93 Rincian Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*(dalam rupiah)*

No.	Piutang PBJT	Saldo per 31 Desember 2024	Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran 2025	Saldo Akhir per 31 Desember 2025
1	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	9.771.886,00	0,00	9.771.886,00
2	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	273.679.090,00	0,00	273.679.090,00
Jumlah		0,00	283.450.976,00	0,00	283.450.976,00

7.5.1.1.3 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025
(Rp)
(16.723.503.544,33)

31 Desember 2024
(Rp)
(14.895.001.833,94)

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	1.264.000,00	0,00	2.736.000,00	42.079.000,00	46.079.000,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.320,00	0,00	1.368.000,00	42.079.000,00	43.453.320,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	1.257.680,00	0,00	1.368.000,00	0,00	2.625.680,00
2	Piutang PBB-P2	2.957.706.319,00	5.295.705.265,00	4.972.138.744,00	12.741.585.564,00	25.967.135.892,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	14.788.531,60	1.323.926.316,25	2.486.069.372,00	12.741.585.564,00	16.566.369.783,85
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.942.917.787,41	3.971.778.948,75	2.486.069.372,00	0,00	9.400.766.108,16
3	Piutang BPHTB	5.716.424,00	0,00	9.062.870,88	107.703.168,04	122.482.462,92
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	28.582,12	0,00	4.531.435,44	107.703.168,04	112.263.185,60

No	Uraian	Umur Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah (Rp)
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	5.687.841,88	0,00	4.531.435,44	0,00	10.219.277,32
4	Piutang PBJT-Hotel	273.679.090,00	0,00	0,00	0,00	273.679.090,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.368.395,45	0,00	0,00	0,00	1.368.395,45
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	272.310.694,55	0,00	0,00	0,00	272.310.694,55
5	Piutang PBJT-Restoran	9.771.886,00	0,00	0,00	0,00	9.771.886,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	48.859,43	0,00	0,00	0,00	48.859,43
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	9.723.026,57	0,00	0,00	0,00	9.723.026,57
	JUMLAH NRV	3.231.897.030,41	3.971.778.948,75	2.491.968.807,44	0,00	9.695.644.786,60
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	16.240.688,60	1.323.926.316,25	2.491.968.807,44	12.891.367.732,04	16.723.503.544,33

7.5.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi Daerah	(Rp)	(Rp)
	6.289.475.307,00	8.541.811.987,19

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.289.475.307,00, terdiri dari:

Tabel 7.5.95 Rincian Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025		Saldo per 31 Desember 2025
			Ketetapan baru (Piutang 2025)	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.534.723.905,00	6.237.173.956,00	8.415.672.154,00	82.908.400,00	6.273.317.307,00
2	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	16.158.000,00	0,00	0,00	16.158.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.538.082,19	0,00	4.538.082,19	0,00	0,00
	Jumlah	8.541.811.987,19	6.253.331.956,00	8.422.760.236,19	82.908.400,00	6.289.475.307,00

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.273.317.307,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.96 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan		Saldo per 31 Desember 2025
			Ketetapan baru (Piutang 2025)	Koreksi Pencatatan	Pembayaran	
1	Piutang BPJS Kesehatan	8.490.484.164,00	6.237.173.956,00	82.908.400,00	8.407.575.764,00	6.237.173.956,00
2	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	520.928,00	0,00	0,00	520.928,00	0,00
3	PT. Jasa Raharja	7.575.462,00	0,00	0,00	7.575.462,00	0,00
4	Piutang Perusda	31.649.078,00	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00
5	Piutang TNI AL	4.494.273,00	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00
	Jumlah	8.534.723.905,00	6.237.173.956,00	82.908.400,00	8.415.672.154,00	6.273.317.307,00

Koreksi Pencatatan Piutang BLUD sebesar Rp82.908.400,00 merupakan koreksi piutang BPJS kesehatan yang tidak diakui berdasarkan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

- 2) Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan, serta tempat usaha lainnya yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna di Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Saldo piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.158.000,00.

- 3) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro sampai dengan 31 Desember 2025 Rp0,00
- 4) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

7.5.1.1.5 Penyisihan Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp)	(Rp)
	(1.202.329.736,65)	(1.908.255.312,77)

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Retribusi tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang RETRIBUSI				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		0-1 BULAN	<1 S.D 3 BULAN	3 S.D 12 BULAN	> 12 BULAN	
1	Piutang BPJS Kesehatan	2.715.274.779,00	2.433.358.307,00	1.088.540.870,00	0,00	6.237.173.956,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	13.576.373,90	608.339.576,75	544.270.435,00	0,00	1.166.186.385,65
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.701.698.405,10	1.825.018.730,25	544.270.435,00	0,00	5.070.987.570,35
2	Piutang Perusda	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.562.000,00	5.124.000,00	8.472.000,00	0,00	16.158.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.810,00	1.281.000,00	4.236.000,00	0,00	5.529.810,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.549.190,00	3.843.000,00	4.236.000,00	0,00	10.628.190,00
	JUMLAH NRV	2.704.247.595,10	1.828.861.730,25	548.506.435,00	0,00	5.081.615.760,35
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	13.589.183,90	609.620.576,75	548.506.435,00	36.143.351,00	1.207.859.546,65

7.5.1.1.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	37.137.368.824,90	36.620.423.646,90

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.137.368.824,90, terdiri dari:

Tabel 7.5.98 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Piutang Lain-lain	Saldo per 31 Des 2024	Penambahan		Pembayaran Tahun 2025	Saldo per 31 Des 2025
			Koreksi	Piutang 2025		
1	Piutang Hasil Sewa BMD	325.720.000,00	306.600.000,00	306.600.000,00	11.603.000,00	927.317.000,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.030.538.896,90	0,00	0,00	79.151.822,00	35.951.387.074,90
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00
Jumlah		36.620.423.646,90	306.600.000,00	306.600.000,00	96.254.822,00	37.137.368.824,90

- 1) Piutang Hasil Sewa BMD merupakan piutang pendapatan sewa atas 57 unit rumah dinas yang berlokasi di Puak Kecamatan Bunguran Timur. Mekanisme pengelolaan rumah dinas diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah. Besaran biaya sewa rumah dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 311 Tahun 2022 tentang Tarif Pokok Sewa Rumah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Saldo piutang hasil sewa BMD per 31 Desember 2025 sebesar Rp927.317.000,00 merupakan piutang pendapatan sewa atas 57 Unit Rumah Dinas Pemda yang belum disetor tahun 2022 sebesar Rp75.500.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp238.617.000,00. Terdapat penambahan sebesar Rp613.200.000,00 merupakan koreksi kurang catat piutang tahun 2024 sebesar Rp306.600.000,00 dan penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp306.600.000,00 dan pembayaran selama tahun 2025 sebesar Rp11.603.000,00.
- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih dibayarkan diatas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 karena telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp5.500.000,00.
- 3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang Sky Aviation) merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT. Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2025 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00. Atas Piutang tersebut telah dilakukan pengalihan penagihan ke KPKNL Wilayah Kepri berdasarkan Surat Bupati Natuna Nomor 900/EKON/70 tanggal 2 Maret 2015 perihal penyerahan pengurusan piutang sisa dana subsidi penerbangan. Sampai saat ini proses penagihan masih dilakukan oleh KPKNL Wilayah Kepri.
- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang yang timbul dari pengelolaan dana bergulir yang dihentikan pelaksanaan programnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas

Perikanan. Program dana bergulir yang dihentikan dan dialihkan pencatatannya ke piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Pengurangan		Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	28.827.309.036,90	69.707.377,00	0,00	28.757.601.659,90
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	3.983.829.775,00	9.444.445,00	0,00	3.974.385.330,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	3.219.400.085,00	0,00	0,00	3.219.400.085,00
Jumlah		36.030.538.896,90	79.151.822,00	0,00	35.951.387.074,90

Sebagian Piutang dana bergulir Koperasi dan UMKM telah diserahkan penagihannya ke KPKNL Wilayah Kepri. Atas pengalihan penagihan tersebut, pada tahun 2025 KPKNL Wilayah Kepri berhasil menagih sebesar Rp27.057.377,00 yang telah diterima oleh Kas Daerah. Sedangkan pengembalian dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2025 sebesar Rp42.650.000,00 yang dananya masih terdapat pada rekening dana bergulir yang telah dicatat bagian dari Kas Lainnya.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM per wilayah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.100 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Saldo Per 31 Desember 2024	Pembayaran 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Melalui BRKS	Melalui KPKNL	
1	Bunguran Timur	10.553.905.982,00	6.400.000,00	6.701.817,00	10.540.804.165,00
2	Bunguran Timur Laut	1.493.118.181,00	14.500.000,00	0,00	1.478.618.181,00
3	Bunguran Tengah	305.039.259,00	0,00	0,00	305.039.259,00
4	Bunguran Utara	1.254.867.403,00	18.300.000,00	0,00	1.236.567.403,00
5	Bunguran Barat	5.606.727.854,00	3.000.000,00	20.355.560,00	5.583.372.294,00
6	Pulau Tiga	3.407.776.970,00	0,00	0,00	3.407.776.970,00
7	Serasan	1.914.233.600,00	0,00	0,00	1.914.233.600,00
8	Subi	519.260.512,00	0,00	0,00	519.260.512,00
9	Midai	870.236.463,00	0,00	0,00	870.236.463,00
10	Pulau Laut	676.466.558,90	0,00	0,00	676.466.558,90
11	Koperasi	2.170.726.254,00	0,00	0,00	2.170.726.254,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00	450.000,00	0,00	54.500.000,00
Jumlah		28.827.309.036,90	42.650.000,00	27.057.377,00	28.757.601.659,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003 per wilayah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.101 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan
Tahun 2002 dan 2003**

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Saldo Per 31 Desember 2024	Pembayaran Tahun 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
A	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002			
1	Bunguran Timur	863.403.755,00	0,00	863.403.755,00
2	Bunguran Barat	1.654.740.775,00	0,00	1.654.740.775,00
3	Serasan	678.000.020,00	0,00	678.000.020,00
4	Midai	444.074.110,00	9.444.445	434.629.665,00
5	Subi	197.500.000,00	0,00	197.500.000,00

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Saldo Per 31 Desember 2024	Pembayaran Tahun 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
6	Bunguran Utara	46.111.115,00	0,00	46.111.115,00
7	Pulau Laut	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah		3.983.829.775,00	9.444.445	3.974.385.330,00
B	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003			
1	Bunguran Timur	995.972.275,00	0,00	995.972.275,00
2	Bunguran Barat	718.703.715,00	0,00	718.703.715,00
3	Serasan	668.851.860,00	0,00	668.851.860,00
4	Midai	361.798.155,00	0,00	361.798.155,00
5	Subi	57.592.595,00	0,00	57.592.595,00
6	Bunguran Utara	219.629.630,00	0,00	219.629.630,00
7	Pulau Laut	196.851.855,00	0,00	196.851.855,00
Jumlah		3.219.400.085,00	0,00	3.219.400.085,00
Jumlah A + B		7.203.229.860,00	9.444.445	7.193.785.415,00

7.5.1.1.7 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(36.307.456.074,90)	(36.370.661.146,90)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lain-Lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Hasil Sewa BMD	306.600.000,00	545.217.000,00	75.500.000,00	0,00	927.317.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.533.000,00	136.304.250,00	37.750.000,00	0,00	175.587.250,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	305.067.000,00	408.912.750,00	37.750.000,00	0,00	751.729.750,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	305.067.000,00	408.912.750,00	37.750.000,00	0,00	751.729.750,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	1.533.000,00	136.304.250,00	37.750.000,00	258.664.750,00	434.252.000,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.103 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		< 1 THN	< 1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	28.757.601.659,90	28.757.601.659,90

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	28.757.601.659,90	28.757.601.659,90
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.974.385.330,00	3.974.385.330,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.974.385.330,00	3.974.385.330,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	0,00	0,00	0,00	3.219.400.085,00	3.219.400.085,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.219.400.085,00	3.219.400.085,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH NRV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH		0,00	0,00	0,00	35.951.387.074,90	35.951.387.074,90

7.5.1.1.8 Piutang Transfer Antar Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Antar Daerah	(Rp)	(Rp)
	4.643.276.362,00	17.546.888.639,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.643.276.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Piutang bagi hasil pajak	Saldo per 31 Des 2024	Penambahan	Pembayaran tahun 2025	Saldo per 31 Des 2025
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.894.244.469,00	356.608.449,00	4.894.244.469,00	356.608.449,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.791.027.327,00	225.437.528,00	4.791.027.327,00	225.437.528,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.844.014.610,00	4.042.674.194,00	7.844.014.610,00	4.042.674.194,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	17.602.233,00	18.556.191,00	17.602.233,00	18.556.191,00
Jumlah	17.546.888.639,00	4.643.276.362,00	17.546.888.639,00	4.643.276.362,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 merupakan kurang bayar bagi hasil dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2025 berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 258 Tahun 2026 tentang Besaran Tunda Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

7.5.1.1.9 Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	5.657.164.773,69

Piutang lainnya yang disajikan pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan dibayarkan dalam waktu

kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 karena pada tahun 2025 telah disetor ke Kas Daerah. Rincian Bagian Lancar dari tuntutan ganti kerugian daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.105 Rekapitulasi Bagian Lancar Piutang Tuntutan Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2024	Pembayaran Tahun 2025	Saldo per 31 Desember 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.236.548,00	30.236.548,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	32.807.874,81	32.807.874,81	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.824.138,00	20.824.138,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	85.584.724,82	85.584.724,82	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	910.000,00	910.000,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.484.832,00	3.484.832,00	0,00
8	Dinas Sosial	305.000,00	305.000,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.727.712,00	3.727.712,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.013.108,00	8.013.108,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	19.067.065,80	19.067.065,80	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.178.702,00	1.178.702,00	0,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	104.081.446,00	104.081.446,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.150.896,12	8.150.896,12	0,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.977.456,00	3.977.456,00	0,00
19	Dinas Perikanan	15.440.180,00	15.440.180,00	0,00
20	Dinas Pariwisata	16.503.600,00	16.503.600,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	71.512.707,00	71.512.707,00	0,00
22	Sekretariat DPRD	3.254.921.337,00	3.254.921.337,00	0,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.442.500,00	15.442.500,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87.002.200,00	87.002.200,00	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00
26	Inspektorat Daerah	8.686.056,14	8.686.056,14	0,00
27	Kecamatan Bunguran Timur	30.956.700,00	30.956.700,00	0,00
28	Kecamatan Bunguran Barat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
29	Kecamatan Bunguran Utara	200.381.200,00	200.381.200,00	0,00
30	Kecamatan Pulau Laut	135.283.750,00	135.283.750,00	0,00
31	Kecamatan Midai	141.326.600,00	141.326.600,00	0,00
32	Kecamatan Serasan	118.730.880,00	118.730.880,00	0,00
33	Kecamatan Subi	138.376.504,00	138.376.504,00	0,00
34	Kecamatan Bunguran Tengah	825.000,00	825.000,00	0,00
35	Kecamatan Bunguran Timur Laut	26.535.000,00	26.535.000,00	0,00
36	Kecamatan Bunguran Selatan	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00
37	Kecamatan Serasan Timur	445.265.400,00	445.265.400,00	0,00
38	Kecamatan Suak Midai	61.691.500,00	61.691.500,00	0,00
39	Kecamatan Bunguran Batubi	188.299.480,00	188.299.480,00	0,00
40	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
41	Kecamatan Pulau Seluan	237.614.228,00	237.614.228,00	0,00
42	Kecamatan Pulau Panjang	95.021.000,00	95.021.000,00	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.874.448,00	12.874.448,00	0,00
Jumlah		5.657.164.773,69	5.657.164.773,69	0,00

7.5.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	694.227.639,59	756.512.500,01

Pada akhir tahun 2025 terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp694.227.639,59 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	765.591.570,63
Penambahan tahun 2025	Rp	694.227.639,59
Jumlah	Rp	1.459.819.210,22
Pengurangan tahun 2025	Rp	765.591.570,63
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	694.227.639,59

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.106 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	3.595.890,41	0,00	3.595.890,41
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	140.681.676,81	124.439.347,18	140.681.676,81	124.439.347,18
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	52.322.920,88	47.637.128,53	52.322.920,88	47.637.128,53
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	314.699.016,40	313.831.289,62	314.699.016,40	313.831.289,62
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	244.181.967,21	186.338.797,81	244.181.967,21	186.338.797,81
6	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	13.705.989,33	18.385.186,04	13.705.989,33	18.385.186,04
Jumlah		765.591.570,63	694.227.639,59	765.591.570,63	694.227.639,59

Saldo akhir Beban Sewa Peralatan Jaringan sebesar Rp3.595.890,41 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa *CO-Location* Server pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp124.439.347,18 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.107 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.213.459,01
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.304.217,38
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.161.202,19
4	Dinas Perhubungan	5.928.961,75
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.931.506,85
6	Sekretariat Daerah	53.900.000,00
Jumlah		124.439.347,18

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang sebesar Rp47.637.128,53 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.108 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.189.041,10
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.622.950,82
3	Sekretariat Daerah	38.825.136,61
Jumlah		47.637.128,53

Saldo akhir Beban Sewa Asrama sebesar Rp313.831.289,62 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa Asrama Mahasiswa Natuna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo akhir Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebesar Rp186.338.797,81 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa rumah singgah bertempat di Batam yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat Kabupaten Natuna yang mendapat rujukan berobat ke Batam dan keperluan sosial lainnya yang tercatat pada Sekretariat Daerah.

Saldo akhir Beban Sewa Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp18.385.186,04 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa lisensi *Cpanel* pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.658.410,08 dan sewa lisensi *zoom meeting* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.726.775,96.

7.5.1.1.11 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>22.589.256.761,25</u>	<u>25.224.508.910,67</u>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada tahun 2025 terdiri dari Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Baku, Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Obat-Obatan-Obat, Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga, Natura dan Pakan-Natura, Natura dan Pakan-Pakan, Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Makanan dan

Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Teknik, Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Pelatihan Kerja, Pakaian Kerja Bengkel, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka, Komponen-Komponen Peralatan, Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan aset.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.589.256.761,25 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Rekapitulasi Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Persediaan APBD	25.224.508.910,67	71.431.700.536,05	74.066.952.685,47	22.589.256.761,25
Jumlah	25.224.508.910,67	71.431.700.536,05	74.066.952.685,47	22.589.256.761,25

Penambahan persediaan sebesar Rp71.431.700.536,05 terdiri dari:

Belanja Persediaan Tahun 2025	Rp	43.691.290.918,80
Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2025	Rp	9.280.846.212,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	42.412.500,00
Pendapatan Hibah-LO	Rp	2.265.523.354,27
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	Rp	5.423.484.090,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	4.798.127.428,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	305.271.292,00
Reklasifikasi dari Beban Hibah	Rp	3.425.922.950,98
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	210.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.844.930.050,00
Ekstrakomtabel		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	35.626.050,00
Intrakomtabel		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	8.500.000,00
Ekstrakomtabel		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	99.765.690,00
Jumlah	Rp	71.431.700.536,05

Pengurangan persediaan sebesar Rp74.066.952.685,47 terdiri dari:

Menjadi Beban	Rp	60.466.014.358,70
Pelunasan Utang Belanja Barang TA. 2024	Rp	12.396.443.861,80
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	20.749.592,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	Rp	24.762.494,00
Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas	Rp	75.000,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah	Rp	240.482.950,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	268.503.670,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	129.845.449,81
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	3.700.000,00
Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Rp	516.375.309,16
Jumlah	Rp	74.066.952.685,47

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan														Pengurangan												Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOSP	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Tanah	Reklas dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin Ekstrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin Intrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Ekstrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Pekunaan Utang Belanja TA. 2024	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Perlatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	Reklas antar Persediaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
66	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perengklapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.093.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.932.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.932.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendengng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.290.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.290.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Utlis 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.285.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.045.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
73	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancan-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancan-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancan-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancan-Peralatan Pemancan-Peralatan Antena MF/HF/V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancan-Peralatan Pemancan-Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.032.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.032.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Perawatan Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan														Pengurangan												Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Bang dan Jasa BOSP	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Tanah	Reklas dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin Ekstrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Perlatan dan Mesin Intrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Ekstrakontabel	Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Pekumanan Utang Belanja TA. 2024	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Perlatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	Reklas antar Persediaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya																												
87	Perlatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Lini Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Atas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat PeragaPratik Sekolah Bidang Studi Agama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi PKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Pratik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.576.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.576.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	Perlatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Perlatan dan Mesin-Komputer-Komputer-Unit-Komputer-Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Perlatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	Perlatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	Perlatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Perlatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	Perlatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Gedung dan Bangunan-Tugu Titi Kontrol-Pasir-Tugu Tenda Biosk-Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23.224.508.919,67	43.691.290.918,80	9.280.846.212,00	42.412.500,00	2.265.823.354,27	5.423.464.990,00	305.271.292,00	4.798.127.428,00	3.425.922.960,98	210.000.000,00	1.844.930.050,00	35.626.050,00	8.600.000,00	99.765.690,00	9.619.080.416,00	60.466.014.358,70	12.396.443.961,80	20.749.592,00	24.762.494,00	75.000,00	240.482.950,00	268.503.670,00	129.845.449,81	3.700.000,00	516.376.309,16	9.619.080.416,00	22.589.256.761,28	

Koreksi pencatatan yang menambah nilai persediaan sebesar Rp42.412.500,00 merupakan koreksi atas kurang catat Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan. Jumlah persediaan sebesar Rp22.589.256.761,25 per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 7.5.111 Daftar Saldo Persediaan

dalam rupiah)

Kode Rekening	Nama Persediaan	Saldo Akhir
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.519.000,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	14.579.100,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	92.766.500,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	61.648.450,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	465.000,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	55.460.585,69
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	108.806.800,30
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	40.999.166,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	320.397.386,67
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	4.965.500,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	4.455.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	33.153.650,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	3.113.400,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	41.497.800,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.620.000,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	800.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.899.920,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	16.414.571.457,94
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	189.271.451,20
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.401.591.939,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.156.236.929,39
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.585.836.725,06
1.1.12.01.07.0001	Natura	31.396.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	5.205.000,00
Jumlah		22.589.256.761,25

1. Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.519.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.112 Daftar Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.259.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.260.000,00
Jumlah		8.519.000,00

2. Bahan-Bahan Kimia

Saldo Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.579.100,00 berada pada:

Tabel 7.5.113 Daftar Saldo Bahan-Bahan Kimia*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	280.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.299.100,00
Jumlah		14.579.100,00

3. Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2025 sebesar Rp92.766.500,00 berada pada:

Tabel 7.5.114 Daftar Saldo Bahan Bakar dan Pelumas*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.500,00
2.	Dinas Kesehatan	88.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	48.650.000,00
4.	Puskesmas Serasan Timur	17.424.000,00
5.	Dinas Sosial	4.337.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.200.000,00
7.	Dinas Perikanan	4.616.000,00
8.	Sekretariat DPRD	9.355.000,00
9.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.240.000,00
10.	Kecamatan Serasan Timur	60.000,00
11.	Kecamatan Pulau Seluan	3.735.000,00
Jumlah		92.766.500,00

4. Bahan-Bahan Baku

Saldo Bahan-Bahan Baku per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.648.450,00 berada pada:

Tabel 7.5.115 Daftar Saldo Bahan-Bahan Baku*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.600.000,00
2.	Dinas Kesehatan	44.283.450,00
3.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	3.710.000,00
4.	Puskesmas Midai	5.565.000,00
5.	Puskesmas Bunguran Selatan	1.820.000,00
6.	Puskesmas Subi	3.670.000,00
Jumlah		61.648.450,00

5. Isi Tabung Gas

Saldo Isi Tabung Gas per 31 Desember 2025 sebesar Rp465.000,00 berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Bahan-Bahan Lainnya

Saldo Bahan-Bahan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.460.585,69 berada pada:

Tabel 7.5.116 Daftar Saldo Bahan-Bahan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.684.150,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	16.515.000,00
3.	Puskesmas Tanjung	1.850.459,69
4.	Puskesmas Kelarik	68.020,00
5.	Puskesmas Batubi Jaya	1.629.600,00
6.	Puskesmas Pulau Laut	1.941.840,00
7.	Puskesmas Pulau Tiga	23.280,00
8.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	6.649.500,00
9.	Puskesmas Serasan	1.221.036,00
10.	Puskesmas Subi	1.200.140,00
11.	Puskesmas Midai	1.743.672,00
12.	Puskesmas Sedanau	2.941.000,00
13.	Puskesmas Suak Midai	1.406.888,00
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.540.000,00
15.	Kecamatan Serasan Timur	46.000,00
Jumlah		55.460.585,69

7. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp108.806.800,30 berada pada:

Tabel 7.5.117 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.246.252,00
2.	Dinas Kesehatan	203.817,30
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	4.498.000,00
4.	Puskesmas Ranai	621.200,00
5.	Puskesmas Bunguran Tengah	655.000,00
6.	Puskesmas Serasan	92.000,00
7.	Puskesmas Serasan Timur	2.211.700,00
8.	Puskesmas Midai	315.000,00
9.	Dinas Sosial	1.299.500,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.112.886,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39.358.600,00
11.	Dinas Perikanan	2.803.445,00
12.	Inspektorat Daerah	2.189.400,00
13.	Kecamatan Suak Midai	200.000,00
Jumlah		108.806.800,30

8. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover per 31 Desember 2025 Sebesar Rp40.999.166,00 berada pada:

Tabel 7.5.118 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.712.560,00
2.	Dinas Kesehatan	2.499.720,00
3.	Puskesmas Bunguran Tengah	2.060.500,00
4.	Puskesmas Batubi Jaya	5.866.650,00
5.	Puskesmas Serasan	78.500,00
6.	Dinas Sosial	1.235.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	741.920,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.853.700,00
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	275.000,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.504.000,00
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	250.550,00
12.	Dinas Perikanan	1.331.400,00
13.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	739.260,00
14.	Inspektorat Daerah	2.829.406,00
15.	Kecamatan Pulau Laut	960.000,00
16.	Kecamatan Subi	210.000,00
17.	Kecamatan Serasan Timur	140.000,00
18.	Kecamatan Suak Midai	1.011.000,00
19.	Kecamatan Bunguran Batubi	700.000,00
Jumlah		40.999.166,00

9. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2025 sebesar Rp323.817.386,67 berada pada:

Tabel 7.5.119 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.099.840,00
2.	Dinas Kesehatan	3.550.779,82
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	50.101.400,00
4.	Puskesmas Ranai	3.640.007,00
5.	Puskesmas Tanjung	6.649.461,10
6.	Puskesmas Kelarik	5.260.917,20
7.	Puskesmas Batubi Jaya	6.603.778,30
8.	Puskesmas Pulau Laut	13.309.954,15
9.	Puskesmas Pulau Tiga	12.483.210,90
10.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	5.355.912,60
11.	Puskesmas Serasan	3.763.503,70
12.	Puskesmas Serasan Timur	6.779.391,00
13.	Puskesmas Subi	13.601.598,30
14.	Puskesmas Midai	3.112.585,30
15.	Puskesmas Sedanau	4.977.317,80
16.	Puskesmas Bunguran Selatan	1.535.995,00
17.	Puskesmas Suak Midai	5.192.788,50
18.	Dinas Sosial	1.005.000,00
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	978.590,00
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	128.929.776,00
21.	Dinas Perhubungan	580.580,00
22.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.165.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

No.	SKPD	Jumlah
23.	Dinas Perikanan	3.855.000,00
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00
25.	Kecamatan Bunguran Utara	3.740.000,00
26.	Kecamatan Pulau Laut	8.250.000,00
27.	Kecamatan Suak Midai	3.375.000,00
28.	Kecamatan Bunguran Batubi	7.500.000,00
Jumlah		320.397.386,67

10. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.965.500,00 berada pada:

Tabel 7.5.120 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.097.000,00
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.138.500,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	230.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.000,00
5.	Dinas Perikanan	750.000,00
6.	Kecamatan Bunguran Timur	850.000,00
7.	Kecamatan Pulau Seluan	600.000,00
Jumlah		4.965.500,00

11. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.455.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.121 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	655.000,00
2.	Puskesmas Bunguran Tengah	375.000,00
3.	Dinas Sosial	120.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.000,00
5.	Kecamatan Pulau Laut	1.400.000,00
6.	Kecamatan Serasan Timur	125.000,00
7.	Kecamatan Suak Midai	780.000,00
Jumlah		4.455.000,00

12. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.153.650,00 berada pada:

Tabel 7.5.122 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.009.050,00
2.	Puskesmas Serasan	79.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.065.600,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
Jumlah		33.153.650,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

13. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.113.400,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.497.800,00 berada pada:

Tabel 7.5.123 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.840.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	8.385.450,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.380.000,00
4.	Dinas Perikanan	1.204.350,00
5.	Kecamatan Bunguran Batubi	500.000,00
6.	Puskesmas Serasan	1.188.000,00
Jumlah		41.497.800,00

15. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.620.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

16. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2025 sebesar Rp800.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

17. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.899.920,00 berada pada:

Tabel 7.5.124 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.065.400,00
2.	Dinas Perikanan	834.520,00
Jumlah		1.899.920,00

18. Obat-Obatan-Obat

Saldo Obat-Obatan-Obat per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.414.571.457,94 berada pada:

Tabel 7.5.125 Daftar Saldo Obat-Obatan-Obat*(dalam rupiah)*

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.276.000,00
2.	Dinas Kesehatan	9.670.660.165,53
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	4.127.674.921,84
4.	Puskesmas Ranai	360.112.305,23
5.	Puskesmas Bunguran Tengah	156.752.975,43
6.	Puskesmas Tanjung	118.401.494,31
7.	Puskesmas Kelarik	131.848.150,81
8.	Puskesmas Batubi Jaya	95.693.881,46
9.	Puskesmas Pulau Laut	150.776.202,72
10.	Puskesmas Pulau Tiga	96.513.575,03
11.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	125.014.730,05
12.	Puskesmas Serasan	106.255.517,86
13.	Puskesmas Serasan Timur	240.668.091,48
14.	Puskesmas Subi	252.859.016,26
15.	Puskesmas Midai	373.383.512,83
16.	Puskesmas Sedanau	114.166.973,84
17.	Puskesmas Bunguran Selatan	144.947.492,85
18.	Puskesmas Suak Midai	146.566.450,41
Jumlah		16.414.571.457,94

19. Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya per 31 Desember 2025 Sebesar Rp189.271.451,20 berada pada:

Tabel 7.5.126 Daftar Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya*(dalam rupiah)*

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	9.600,00
2.	Puskesmas Ranai	3.143.163,00
3.	Puskesmas Bunguran Tengah	10.441.894,00
4.	Puskesmas Tanjung	8.410.256,00
5.	Puskesmas Kelarik	5.054.921,00
6.	Puskesmas Batubi Jaya	2.363.326,00
7.	Puskesmas Pulau Laut	10.117.146,00
8.	Puskesmas Pulau Tiga	14.874.099,00
9.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	1.280.710,00
10.	Puskesmas Serasan	1.151.416,00
11.	Puskesmas Serasan Timur	5.293.657,00
12.	Puskesmas Subi	2.400.686,00
13.	Puskesmas Midai	2.560.092,00
14.	Puskesmas Sedanau	5.384.862,20
15.	Puskesmas Bunguran Selatan	4.862.324,00
16.	Puskesmas Suak Midai	5.870.983,00
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.935.456,00
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.116.860,00
Jumlah		189.271.451,20

20. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.401.591.939,00 berada pada:

Tabel 7.5.127 Daftar Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	114.119.783,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	407.231.250,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.253.000,00
4.	Dinas Sosial	267.100.186,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	558.387.720,00
6.	Dinas Pariwisata	16.500.000,00
Jumlah		1.401.591.939,00

21. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.156.236.929,39 berada pada:

Tabel 7.5.128 Daftar Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.714.059,15
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	556.168.273,00
Jumlah		1.156.236.929,39

22. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.585.836.725,06 berada pada:

Tabel 7.5.129 Daftar Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.349.903.900,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	235.932.825,06
Jumlah		2.585.836.725,06

23. Natura dan Pakan-Natura

Saldo Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.396.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.130 Daftar Saldo Natura dan Pakan-Natura

(dalam rupiah)

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	25.186.000,00
2.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	2.070.000,00
3.	Puskesmas Subi	4.140.000,00
Jumlah		31.396.000,00

Persediaan ini merupakan persediaan bahan pokok makanan untuk pasien yang ada di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan.

24. Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

Saldo Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.205.000,00 berada pada Dinas Perikanan. Saldo Persediaan ini merupakan persediaan pakan ikan yang belum dibagikan ke kelompok pembudidaya.

Persediaan obat diatas tidak termasuk persediaan dalam kondisi rusak dan kadaluarsa/usang. Total Barang Persediaan kadaluarsa/rusak s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp19.572.601.401,86 merupakan persediaan yang masih menunggu proses pemusnahan. Untuk persediaan dalam keadaan rusak dan kadaluarsa/usang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.131 Daftar Persediaan Rusak, Kadaluarsa/Usang

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Saldo Awal						Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal Obat	Saldo Awal Setelah di Koreksi						Jumlah Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan 2025				Jumlah Penambahan	Penghapusan	Saldo Akhir
		Bahan Kimia	Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Natura			Bahan Kimia	Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Natura		Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	156.280.000,00	39.470.000,00	0,00	195.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.280.000,00	39.470.000,00	0,00	195.750.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.207.000,00	36.807.000,00	224.157.000,00	8.400.000,00
2.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	160.375.000,00	0,00	0,00	160.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.375.000,00	0,00	0,00	160.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.450.000,00	63.925.000,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	7.379.350,00	0,00	0,00	7.379.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379.350,00	0,00	0,00	7.379.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379.350,00
4.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.600,00	0,00	5.696.600,00	5.696.600,00	0,00
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207.626,00	0,00	0,00	19.207.626,00	0,00	19.207.626,00
6.	Instalasi Farmasi	0,00	16.883.854.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883.854.655,91	1.988.434.783,37	0,00	0,00	0,00	14.895.419.872,54	0,00	0,00	14.895.419.872,54	1.566.020.648,87	0,00	0,00	0,00	1.566.020.648,87	0,00	16.461.440.521,41
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	176.000.000,00	280.653.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.653.596,00	0,00	176.000.000,00	280.653.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.653.596,00	118.543.085,00	0,00	0,00	0,00	118.543.085,00	0,00	575.196.681,00
8.	Puskesmas Ranai	0,00	237.217.814,60	135.848,00	0,00	0,00	0,00	237.353.662,60	(122.694.620,46)	0,00	359.912.435,06	135.848,00	0,00	0,00	0,00	360.048.283,06	55.672.493,96	0,00	0,00	0,00	55.672.493,96	0,00	415.720.777,02
9.	Puskesmas Tanjung	0,00	70.783.966,57	43.000,00	0,00	0,00	216.000,00	71.042.966,57	(77.306.422,70)	0,00	148.090.389,27	43.000,00	0,00	0,00	216.000,00	148.349.389,27	9.485.383,46	0,00	0,00	0,00	9.485.383,46	0,00	157.834.772,73
10.	Puskesmas Bunguran Tengah	0,00	14.360.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360.417,57	(102.552.798,23)	0,00	116.913.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116.913.215,80	13.105.094,80	0,00	0,00	0,00	13.105.094,80	0,00	130.018.310,60
11.	Puskesmas Bunguran Selatan	0,00	37.217.603,80	85.872,00	0,00	0,00	0,00	37.303.475,80	(103.618.974,90)	0,00	140.836.578,70	85.872,00	0,00	0,00	0,00	140.922.450,70	7.352.526,52	0,00	0,00	0,00	7.352.526,52	0,00	148.274.977,22
12.	Puskesmas Kelarik	0,00	27.265.192,56	0,00	0,00	0,00	2.128.314,00	29.393.506,56	(98.005.621,12)	0,00	125.270.613,68	0,00	0,00	0,00	2.128.314,00	127.399.127,68	14.532.655,27	0,00	0,00	0,00	14.532.655,27	0,00	141.931.782,95
13.	Puskesmas Sedanau	0,00	59.636.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.636.196,08	(137.042.454,82)	0,00	196.678.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196.678.650,90	11.561.469,12	0,00	0,00	0,00	11.561.469,12	0,00	208.240.120,02
14.	Puskesmas Pulau Tiga	0,00	21.728.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728.353,35	(61.945.511,02)	0,00	83.673.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.673.864,37	6.018.568,00	0,00	0,00	0,00	6.018.568,00	0,00	89.692.432,37
15.	Puskesmas Pulau Laut	0,00	67.880.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880.347,15	(115.089.736,00)	0,00	182.970.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182.970.083,15	13.193.259,57	0,00	0,00	0,00	13.193.259,57	0,00	196.163.342,72
16.	Puskesmas Midai	0,00	68.465.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.465.019,99	(94.721.484,09)	0,00	163.186.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186.504,68	15.874.710,90	0,00	0,00	0,00	15.874.710,90	0,00	179.061.215,58
17.	Puskesmas Serasan	0,00	17.464.180,66	35.736,00	0,00	0,00	495.726,00	17.995.642,66	(42.424.739,66)	0,00	59.888.920,32	35.736,00	0,00	0,00	495.726,00	60.420.382,32	13.512.541,90	0,00	0,00	0,00	13.512.541,90	0,00	73.932.924,22
18.	Puskesmas Serasan Timur	0,00	27.166.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166.983,26	(179.212.630,30)	0,00	206.379.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206.379.613,56	38.022.446,81	0,00	0,00	0,00	38.022.446,81	0,00	244.402.060,37
19.	Puskesmas Subi	0,00	120.547.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.547.485,94	(100.530.004,14)	0,00	221.077.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221.077.490,08	14.090.904,58	0,00	0,00	0,00	14.090.904,58	0,00	235.168.394,66
20.	Puskesmas Batubi Jaya	0,00	15.217.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217.332,39	(42.336.789,87)	0,00	57.554.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554.122,26	17.942.867,30	0,00	0,00	0,00	17.942.867,30	0,00	75.496.989,56
21.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	0,00	43.427.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.427.377,29	(66.016.961,09)	0,00	109.444.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109.444.338,98	21.705.938,30	0,00	0,00	0,00	21.705.938,30	0,00	131.150.277,28
22.	Puskesmas Suak Midai	0,00	3.665.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.255,60	(0,00)	0,00	3.665.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.255,60	6.298.590,54	0,00	0,00	0,00	6.298.590,54	0,00	9.963.846,14
TOTAL		176.000.000,00	17.996.551.776,72	300.456,00	324.034.350,00	39.470.000,00	2.840.040,00	18.539.196.624,72	644.936.033,76	176.000.000,00	17.351.615.744,96	300.456,00	324.034.350,00	39.470.000,00	2.840.040,00	17.894.260.590,96	1.942.933.184,90	19.207.626,00	24.296.600,00	18.207.000,00	2.004.644.410,90	326.303.600,00	19.572.601.401,86

7.5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.

7.5.3.2.1 Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	50.050.246.717,00	57.477.323.037,00

Investasi permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.050.246.717,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.132 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2024	Penambahan Tahun 2025		Pengurangan Tahun 2025		Saldo per 31 Desember 2025
			Penyertaan Modal 2025	Koreksi Pencatatan	Kerugian Entitas	Koreksi Pencatatan	
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Sri Serindit Daerah Kab. Natuna	4.137.359.588,00	0,00	0,00	503.732.343,00	3.633.627.245,00	0,00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	36.038.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.038.100.000,00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Laines	9.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	5.301.297.261,00	0,00	670.264.646,00	1.459.415.190,00	0,00	4.512.146.717,00
Jumlah		54.976.756.849,00	0,00	670.264.646,00	1.963.147.533,00	3.633.627.245,00	50.050.246.717,00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.133 Metode Penilaian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Metode Penilaian
1	PERUMDA SRI SERINDIT	4.137.359.588,00	Metode Ekuitas
2	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	36.038.100.000,00	Metode Biaya
3	PT. RIAU AIR LINES	9.500.000.000,00	Metode Biaya
4	PERUMDA TIRTA NUSA	5.301.297.261,00	Metode Ekuitas
Jumlah		54.976.756.849,00	

(1) Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Pada tahun 2023 Perusahaan Daerah berubah bentuk dan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna. Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Perusahaan umum Daerah Sri Serindit adalah 100% dengan penyertaan modal sebesar dari awal berdiri Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sri Serindit

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
Total			39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas. Nilai yang disajikan sebagai investasi jangka panjang permanen Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna tahun 2025 (*unaudited*). Nilai invetasi Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.135 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna (Metode Ekuitas) Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2025	
Modal Disetor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Modal Donasi	4.117.862.437,00	4.117.862.437,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(1.980.502.849,00)	(5.614.130.094,00)	3.633.627.245,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(3.633.627.245,00)	(503.732.343,00)	(3.129.894.902,00)
Jumlah Ekuitas	503.732.343,00	0,00	503.732.343,00

(2) PT Bank Riau Kepri Syariah

Nilai investasi Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2025 Rp36.038.100.000,00. Rincian penyertaan modal Bank Riau Kepri Syariah sebagai berikut:

Tabel 7.5.136 Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2017	Dividen Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2022	Penyertaan Modal BMD	PT Bank Riau Kepri Syariah	2.100.000.000,00
Total			36.038.100.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%. Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah Pada Bank Riau Kepri Syariah Sejumlah Rp36.038.100.000,00 hanya sebesar 2.98% dari total nilai penyertaan modal seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sejumlah Rp1.209.260.700.000,00.

(3) PT. Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Riau Airlines sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.137 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. Pada tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.138 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	Perumda Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa tahun 2025 penurunan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp1.218.544.164,00 yang merupakan selisih antara kekurangan pencatatan nilai investasi tahun 2024

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rp670.264.646,00 yang berasal dari hibah pemerintah daerah ke PDAM Tirta Nusa Tahun 2024 Rp399.515.600,00 dan kelebihan pencatatan kerugian tahun 2024 yang menggunakan laporan keuangan unaudited Rp270.749.046,00 dan kerugian tahun 2025 sebesar Rp1.459.415.190,00. Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PDAM Tirta Nusa sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp4.512.146.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.139 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa (Metode Ekuitas)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2025	
Modal Disetor	18.326.337.005,00	18.326.337.005,00	0,00
Modal Donasi	6.517.347.600,00	6.517.347.600,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(17.422.786.851,00)	(18.872.122.698,00)	1.449.335.847,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(1.690.206.873,00)	(1.459.415.190,00)	(230.791.683,00)
Jumlah Ekuitas	5.730.690.881,00	4.512.146.717,00	1.218.544.164,00

7.5.3.3 Aset Tetap

Aset tetap yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset yang mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap	2.794.823.877.139,93	2.750.500.050.293,58

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.870.614.281.042,17
Penambahan tahun 2025	353.419.207.127,85
Jumlah	5.224.033.488.170,02
Pengurangan tahun 2025	132.989.630.845,58
Aset Tetap per 31 Desember 2025	5.091.043.857.324,44
Penyusutan s/d tahun 2025	(2.296.219.980.184,51)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.794.823.877.139,93

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap*(dalam rupiah)*

Jenis Aset	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Tanah	370.557.898.242,88	11.927.928.391,13	4.774.364.532,66	377.711.462.101,35
Peralatan dan Mesin	572.475.519.762,40	41.558.906.712,59	32.119.154.713,12	581.915.271.761,87
Gedung dan Bangunan	1.521.866.412.603,00	65.188.655.459,81	41.025.754.507,36	1.546.029.313.555,45
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.271.555.664.184,03	230.337.601.422,32	48.002.152.713,92	2.453.891.112.892,43
Aset Tetap Lainnya	72.246.390.690,12	2.937.770.500,00	744.583.200,00	74.439.577.990,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.912.395.559,74	1.468.344.642,00	6.323.621.178,52	57.057.119.023,22
Nilai Aset	4.870.614.281.042,17	353.419.207.127,85	132.989.630.845,58	5.091.043.857.324,44
Akumulasi Penyusutan	(2.120.114.230.748,59)	(192.791.106.247,55)	(16.685.356.811,63)	(2.296.219.980.184,51)
Nilai Buku	2.750.500.050.293,58	160.628.100.880,30	116.304.274.033,95	2.794.823.877.139,93

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebesar Rp377.711.462.101,35 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	370.557.898.242,88
Penambahan TA. 2025	Rp	11.927.928.391,13
Jumlah	Rp	382.485.826.634,01
Pengurangan TA. 2025	Rp	4.774.364.532,66
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2025	Rp	377.711.462.101,35

Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp377.711.462.101,35 tersebut terdiri dari 640 bidang tanah diantaranya 629 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 11 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 senilai Rp377.711.462.101,35 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.141 Rincian Aset Tetap Tanah*(dalam rupiah)*

Rincian	Saldo Akhir 2025
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	149.996.434.621,78
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	124.885.249.370,60
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rincian	Saldo Akhir 2025
Tanah Basah	964.652.600,00
Tanah Kering	6.644.051.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tanah Hutan	9.167.161.000,00
Tanah Lapangan Olahraga	11.904.302.060,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.383.246.000,00
Tanah untuk Jalan	12.216.151.500,00
Tanah untuk Bangunan Air	5.870.884.746,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	934.561.800,00
Tanah untuk Makam	2.671.752.469,01
Lapangan Lainnya	9.545.355.926,38
Jumlah	377.711.462.101,35

Aset Tetap berupa Tanah mengalami penambahan sebesar Rp11.927.928.391,13 dan pengurangan sebesar Rp4.774.364.532,66 dari tahun 2024 sebesar Rp370.557.898.242,88 menjadi Rp377.711.462.101,35. Penurunan nilai Aset Tanah tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 7.5.142 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tanah

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2024	PENAMBAHAN				PENGURANGAN					SALDO AKHIR
			REALISASI TAHUN BERJALAN	KOREKSI BELUM CATAT	PENDAPATAN HIBAH 2025	REKLAS DARI GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI SALDO AWAL	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	REKLAS KE			
									ASET TETAP KDP	Persediaan	ASET LAIN-LAIN	
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	149.597.431.763,30	0,00	0,00	0,00	399.002.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.996.434.621,78
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199.733.507,58
3	Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	117.845.923.370,60	177.000.000,00	7.841.733.000,00	1.962.914.000,00	0,00	300.000.000,00	177.000.000,00	49.839.000,00	210.000.000,00	2.205.482.000,00	124.885.249.370,60
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.878.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00
7	Tanah Persil Lainnya	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Basah	964.652.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.652.600,00
9	Tanah Kering	6.544.051.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.051.000,00
10	Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00
11	Tanah Hutan	9.167.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167.161.000,00
12	Tanah Lapangan Olahraga	12.124.327.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.025.000,00	11.904.302.060,00
13	Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.383.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383.246.000,00
15	Tanah untuk Jalan	12.216.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.151.500,00
16	Tanah untuk Bangunan Air	5.870.884.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.884.746,00
17	Tanah untuk Bangunan Jaringan	884.801.800,00	0,00	49.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.561.800,00
18	Tanah untuk Makam	2.886.252.469,01	149.816.700,00	0,00	0,00	0,00	0	149.816.700,00	0,00	0,00	214.500.000,00	2.671.752.469,01
19	Lapangan Lainnya	9.545.355.926,39	1.180.701.832,65	0,00	0,00	0,00	0,01	1.180.701.832,65	0,00	0,00	0,00	9.545.355.926,38
JUMLAH		370.557.898.242,88	1.574.518.532,65	7.991.493.000,00	1.962.914.000,00	399.002.858,48	300.000.000,01	1.574.518.532,65	49.839.000,00	210.000.000,00	2.640.007.000,00	377.711.462.101,35

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.927.928.391,13 pada tabel di atas terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025	Rp	1.574.518.532,65
Koreksi Ekuitas Aset Tanah Tahun Sebelumnya yang belum tercatat	Rp	7.991.493.000,00
Pendapatan Hibah-LO	Rp	1.962.914.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	399.002.858,48
Jumlah	Rp	11.927.928.391,13

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.574.518.532,65 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah atas pelunasan utang tahun 2024 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp177.000.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp67.000.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp149.816.700,00 dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.180.701.832,65. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna juga melakukan koreksi pencatatan atas Tanah tahun sebelumnya yang belum tercatat sebesar Rp7.991.493.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp55.908.000,00, Dinas Kesehatan Rp14.810.000,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp7.871.015.000,00, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Rp49.760.000,00. Koreksi pencatatan pada Dinas Kesehatan Rp14.810.000,00 merupakan Tanah Bangunan Puskesmas Pulau Tiga atas temuan Pemeriksaan BPK yang dicatat sebesar nilai jual objek pajak (NJOP).

Penambahan dari Pendapatan Hibah sebesar Rp1.962.914.000,00 yang berasal dari hibah Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan SK No.100.3.3.2.75 Tahun 2025. Aset Tetap Tanah juga mengalami penambahan dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp399.002.858,48.

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp4.774.364.532,66 terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Rp	300.000.000,01
Pelunasan Utang Tahun 2024	Rp	1.574.518.532,65
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	49.839.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	Rp	210.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	2.640.007.000,00
Jumlah	Rp	4.774.364.532,66

Pengurangan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 terdiri dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp300.000.000,01 atas koreksi lebih catat saldo awal aset tetap tanah Lapangan Lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta pada Sekretariat Daerah Tahun 2024. Pelunasan Utang Tahun 2024 sebesar Rp1.574.518.532,65 yang terdiri dari pelunasan utang belanja modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp177.000.000,00, pelunasan utang belanja modal Tanah Persil Lainnya sebesar Rp67.000.000,00, pelunasan utang belanja modal Tanah untuk Makam sebesar Rp149.816.700,00 dan pelunasan utang belanja modal Lapangan Lainnya sebesar Rp1.180.701.832,65. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rp49.839.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Jasa Penilaian atas pembatalan pembelian tanah Kantor Lurah. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Persediaan sebesar Rp210.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.640.007.000,00 merupakan hibah aset tetap tanah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Natuna berdasarkan SK No.100.3.3.2-222 Tahun 2025 yang masih dicatat di Aset Lain-lain karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Sekretariat Daerah.

Berikut adalah Aset Tetap Tanah yang berada pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 7.5.143 Rekapitulasi Aset Tanah per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.721.753.626,00
2	Dinas Kesehatan	6.273.443.725,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.803.028.846,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	167.868.649.436,99
5	Dinas Sosial	13.721.058.858,48
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	208.050.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.700.940.385,13
9	Dinas Lingkungan Hidup	14.563.645.114,87
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.962.914.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.357.491.850,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	119.753.800,00
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.547.522.400,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.902.988.700,00
15	Dinas Perikanan	360.971.000,00
16	Dinas Pariwisata	2.340.733.300,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.005.908.564,00
18	Sekretariat Daerah	32.611.653.149,26
19	Sekretariat DPRD	6.576.147.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.134.946.534,00
21	Kecamatan Bunguran Timur	3.695.245.000,00
22	Kecamatan Bunguran Barat	372.463.000,00
23	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
24	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
25	Kecamatan Midai	131.400.000,00
26	Kecamatan Serasan	110.220.000,00
27	Kecamatan Subi	280.200.000,00
28	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
29	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
30	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.281.348.304,00
31	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
32	Kecamatan Bunguran Batubi	135.525.000,00
33	Kecamatan Pulau Tiga Barat	236.859.900,00
34	Kecamatan Pulau Seluan	207.938.900,00
35	Kecamatan Pulau Panjang	585.938.900,00
Jumlah		377.711.462.101,35

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp581.915.271.761,87 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	572.475.519.762,40
Penambahan Tahun 2025	Rp	41.558.906.712,59
Jumlah	Rp	614.034.426.474,99
Pengurangan Tahun 2025	Rp	32.119.154.713,12
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	Rp	581.915.271.761,87

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

206

No.	Uraian	Saldo Awal	PENAMBAHAN										Antar Sub RO	PENGURANGAN													SALDO AKHIR
			Realisasi Belanja	Utang Tahun 2025	Koreksi pencatatan aset tetap tahun sebelumnya	Pendapatan Hibah-LO 2025	Reklasifikasi dari					Penghapusan		Pelunasan Utang 2024	Koreksi pencatatan aset tetap tahun sebelumnya	Reklasifikasi ke							Tagihan Jangka Panjang	Beban hibah	Antar Sub RO		
							Beban Barang dan Jasa BOSP	Persediaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya					Beban Barang dan Jasa BOSP	Persediaan	Peralatan dan Mesin Ekstrabudgetal	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset tetap lainnya	Aset Lain-lain					
208	Heat Generating Equipment	5.149.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.125.000,00		
209	Rambu, Tanda, Beraluar	7.842.377.293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842.377.293,88		
210	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	150.534.750,00	512.757.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.757.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.534.750,00		
211	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.809.809.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.809.798,00		
212	Peralatan Olahraga Atletik	103.208.320,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.208.320,00		
213	Peralatan Permainan	913.980.150,00	82.937.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	197.500.000,00	0,00	29.920.000,00	0,00	0,00	29.920.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.697.150,00		
214	Peralatan Sewan	51.675.340,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.875.340,00		
215	Peralatan Olahraga Lainnya	199.729.540,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.943.540,00		
Jumlah		872.476.519.762,40	30.201.278.780,88	4.226.280.361,00	0,01	5.529.391.400,94	3.750.000,00	268.603.670,00	1.200.687.500,00	12.056.000,00	116.952.000,00	7.556.567.875,00	1.538.383.636,50	15.943.222.566,50	208.280.000,00	18.680.000,00	35.626.000,00	1.844.930.000,00	714.692.210,00	974.982.431,00	196.427.400,00	9.820.765.479,00	46.464.500,00	1.087.600.000,00	7.556.567.875,00	981.913.271.761,81	

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terdiri dari:

Belanja Modal Tahun 2025	Rp	30.201.275.780,59
Utang Tahun 2025	Rp	4.226.290.361,00
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tahun sebelumnya	Rp	0,01
Pendapatan Hibah Tahun 2025	Rp	5.529.391.400,99
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	Rp	3.750.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	268.503.670,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	1.200.687.500,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	12.056.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	116.952.000,00
Jumlah	Rp	41.558.906.712,59

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 selain dari realisasi belanja juga terdapat penambahan dari utang belanja modal tahun 2025 sebesar Rp4.226.290.361,00 dan koreksi pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang belum tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp0,01 yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan yang tidak mempunyai nilai buku sehingga tidak mempengaruhi ekuitas. Selain itu terdapat pendapatan hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.529.391.400,99 yang terdiri dari hibah yang berasal dari bantuan revitalisasi dan Kemendikdasmen sebesar Rp4.186.959.625,99 , hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp330.442.176,00 pada Dinas Kesehatan, hibah dari BNPB sebesar Rp319.899.999,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp692.089.600,00. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp3.750.000,00 berasal dari Dana BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp268.503.670,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan, reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.200.687.500,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp643.037.500,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp335.150.000,00, Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp10.000.000,00,serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp212.500.000,00. reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp12.056.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp116.952.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. reklasifikasi antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terdiri dari:

Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.538.383.636,50
Pelunasan Utang Tahun 2024	Rp	15.943.222.956,59
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tahun sebelumnya	Rp	208.280.000,03
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOSP	Rp	18.680.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	Rp	35.626.050,00
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	Rp	1.844.930.050,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	714.592.210,00
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	974.982.431,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	186.427.400,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	Rp	9.520.765.479,00
Tagihan Jangka Panjang	Rp	45.464.500,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah	Rp	1.087.800.000,00
Jumlah	Rp	32.119.154.713,12

Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp1.538.383.636,50 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna dengan status kondisi aset rusak berat serta penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil inventarisasi. Pelunasan Utang Tahun 2024 sebesar Rp15.943.222.956,59 yang telah dibayarkan pada tahun anggaran 2025, koreksi pencatatan Aset Tetap Tahun sebelumnya sebesar Rp208.280.000,03 merupakan yang berasal dari koreksi atas pencatatan utang tahun 2024 yang tidak sesuai peruntukannya, reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp18.680.000,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp35.626.050,00, reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.844.930.050,00, reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp714.592.210,00 yang berasal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.030.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp695.562.210,00, kemudian reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp974.982.431,00 pada Dinas Kesehatan, reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp186.427.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp45.464.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta reklasifikasi ke Beban Hibah sebesar Rp1.087.800.000,00 yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke Polres Natuna sebesar Rp888.000.000,00 dan Dinas Pemuda dan Olahraga ke Organisasi Kepemudaan sebesar Rp199.800.000,00.

Sebesar Rp9.520.765.479,00 di reklasifikasi ke aset lain-lain merupakan hasil dari status kondisi aset rusak berat Barang Milik Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil inventarisasi. Reklasifikasi ke aset lain-lain dilakukan oleh SKPD sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan	Rp	682.632.520,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	477.025.028,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	38.980.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan		
4. Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Rp	532.720.200,00
Berencana		
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	301.400.000,00
6. Dinas Perhubungan	Rp	5.711.917.850,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	4.499.000,00
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp	150.915.448,00
Satu Pintu		
9. Dinas Perikanan	Rp	29.800.000,00
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Rp	41.585.583,00
Daya Manusia		
11. Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Rp	168.938.500,00
12. Inspektorat Daerah	Rp	29.670.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

13. Kecamatan Subi	Rp	853.230.750,00
14. Kecamatan Bunguran Tengah	Rp	27.775.000,00
15. Kecamatan Bunguran Timur Laut	Rp	37.587.000,00
16. Kecamatan Bunguran Selatan	Rp	16.164.500,00
17. Kecamatan Serasan Timur	Rp	415.924.100,00
	Rp	9.520.765.479,00

Adapun aset yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain dari dinas diatas adalah berupa aset sebagai berikut :

1. Pompa	Rp	5.580.000,00
2. Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	446.497.000,00
3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	994.642.000,00
4. Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	575.241.320,00
5. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp	94.236.000,00
6. Kendaraan Bermotor Khusus	Rp	294.800.000,00
7. Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rp	800.415.000,00
8. Perkakas Bengkel Listrik	Rp	24.750.000,00
9. Mesin Ketik	Rp	6.600.000,00
10. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp	31.865.000,00
11. Alat Kantor Lainnya	Rp	284.140.100,00
12. Mebel	Rp	10.960.000,00
13. Alat Pendingin	Rp	43.531.500,00
14. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	424.309.484,00
15. Meja Kerja Pejabat	Rp	3.830.200,00
16. Kursi Kerja Pejabat	Rp	55.888.444,00
17. Lemari dan Arsip Pejabat	Rp	18.440.000,00
18. Peralatan Studio Video dan Film	Rp	41.768.144,00
19. Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Rp	4.148.338.000,00
20. Alat Komunikasi Telephone	Rp	134.792.500,00
21. Sumber Tenaga	Rp	159.132.500,00
22. Personal Computer	Rp	807.037.787,00
23. Peralatan Mainframe	Rp	21.361.000,00
24. Peralatan Mini Computer	Rp	9.000.000,00
25. Peralatan Personal Computer	Rp	83.609.500,00
	Rp	9.520.765.479,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp581.915.271.761,87 yang berada pada:

Tabel 7.5.145 Rekapitulasi Peralatan dan Mesin Per SKPD*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.971.133.715,00
2	Dinas Kesehatan	255.639.635.386,45
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.698.184.703,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.887.980.300,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2.935.335.650,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.934.979.725,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.813.468.079,00
8	Dinas Sosial	1.546.539.165,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.975.078.810,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.590.622.160,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.774.713.982,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.193.387.743,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.347.655.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.691.055.410,00
15	Dinas Perhubungan	17.820.673.183,88
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.057.356.280,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.630.246.700,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.772.924.505,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.106.090.310,74
20	Dinas Perikanan	9.093.940.462,07
21	Dinas Pariwisata	4.604.375.861,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	8.400.767.961,00
23	Sekretariat Daerah	69.456.475.025,50
24	Sekretariat DPRD	17.136.813.453,06
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.446.730.189,17
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.270.483.933,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.150.544.865,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.331.655.100,00
29	Inspektorat Daerah	2.545.046.259,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	2.534.701.799,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	1.470.945.206,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	1.095.171.650,00
33	Kecamatan Pulau Laut	2.914.904.031,00
34	Kecamatan Midai	2.939.183.236,00
35	Kecamatan Serasan	1.574.294.565,00
36	Kecamatan Subi	1.160.601.659,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.180.758.468,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	577.832.548,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1.702.981.271,00
40	Kecamatan Bunguran Selatan	791.434.684,00
41	Kecamatan Serasan Timur	620.506.024,00
42	Kecamatan Suak Midai	373.934.000,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	785.488.000,00
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.275.632.500,00
45	Kecamatan Pulau Panjang	926.361.800,00
46	Kecamatan Pulau Seluan	359.933.105,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.806.712.799,00
Jumlah		581.915.271.761,87

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp581.915.271.761,87 termasuk aset yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) sebanyak 19.321 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.146 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Nilai Buku Nol (0) Masih digunakan Dalam Operasional Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2025	Nilai Buku	Jumlah Aset
1	Dinas Kesehatan	125.170.118.290,80	125.170.118.290,80	0,00	7.612
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.780.159.052,10	6.780.159.052,10	0,00	642
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.457.212.180,00	3.457.212.180,00	0,00	45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.555.972.339,00	2.555.972.339,00	0,00	172
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.411.400.560,00	4.411.400.560,00	0,00	365
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.317.482.235,00	50.317.482.235,00	0,00	7.912
7	Dinas Perhubungan	11.775.303.556,21	11.775.303.556,21	0,00	322
8	Dinas Perikanan	7.906.291.674,07	7.906.291.674,07	0,00	585
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.720.362.300,00	1.720.362.300,00	0,00	56
10	Dinas Sosial	681.537.165,00	681.537.165,00	0,00	88
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.352.033.200,00	3.352.033.200,00	0,00	523
12	Kecamatan Bunguran Batubi	562.410.000,00	562.410.000,00	0,00	62
13	Kecamatan Bunguran Selatan	590.568.184,00	590.568.184,00	0,00	91
14	Kecamatan Pulau Tiga	1.008.870.468,00	1.008.870.468,00	0,00	77
15	Kecamatan Serasan Timur	160.596.024,00	160.596.024,00	0,00	30
16	Kecamatan Suak Midai	133.416.000,00	133.416.000,00	0,00	19
17	Kecamatan Subi	1.118.030.850,00	1.118.030.850,00	0,00	12
18	Sekretariat DPRD	8.421.326.659,50	8.421.326.659,50	0,00	708
TOTAL		230.123.090.737,68	230.123.090.737,68	0,00	19.321

7.5.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.546.029.313.555,45 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.521.866.412.603,00
Penambahan tahun 2025	Rp	65.188.655.459,81
Jumlah	Rp	1.587.055.068.062,81
Pengurangan tahun 2025	Rp	41.025.754.507,36
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	1.546.029.313.555,45

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp65.188.655.459,81 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	39.599.766.399,64
Koreksi Saldo Awal	Rp	3.091.564.970,00
Utang Tahun 2025	Rp	3.298.844.960,48
Pendapatan Hibah	Rp	11.890.060.839,36
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	129.845.449,81
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	714.592.210,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	245.845.142,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	6.218.135.488,52
Jumlah	Rp	65.188.655.459,81

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp39.599.766.399,64 terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	17.361.939.668,00
Dinas Kesehatan	Rp	6.803.784.740,95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	4.388.065.546,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	5.753.474.822,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	185.732.414,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	99.345.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	795.083.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	144.266.041,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.197.499.838,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	506.303.006,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	587.696.650,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	11.500.000,00
Dinas Pariwisata	Rp	1.083.734.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	239.059.092,00
Sekretariat DPRD	Rp	223.263.397,07
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp	29.807.760,00
Kecamatan Bunguran Timur Laut	Rp	189.210.724,62

Utang Tahun 2025 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.298.844.960,48 terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.326.499.076,00
Dinas Kesehatan	Rp	55.684.260,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	906.661.624,48
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	10.000.000,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 selain berasal dari realisasi belanja modal dan penambahan utang belanja modal diatas, juga terdapat koreksi Saldo Awal sebesar Rp3.091.564.970,00 berupa Bangunan Puskesmas Pulau Tiga Barat, Pendapatan Hibah sebesar Rp11.890.060.839,36 dengan rincian sebesar

Rp1.017.545.000,00 berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diperuntukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rp2.113.180.550,00 merupakan Hibah dari Provinsi Kepulauan Riau berupa dermaga ponton sesuai SK No. 100.3.2-76 Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas batuan Revitalisasi sebesar Rp8.759.335.289,36.

Kemudian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi antara lain berasal dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp129.845.449,81 di Dinas Pemuda Olah Raga, dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp714.592.210,00 dengan rincian sebesar Rp19.030.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang besumber dari BOSP-BOS Reguler Sekolah Dasar dan Sebesar Rp695.562.210,00 di Dinas Kesehatan Khususnya Puskesmas Kelarik untuk Bangunan kesehatan. Dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp245.845.142,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selanjutnya dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp6.218.135.488,52 dengan rincian sebesar Rp3.148.429.956,53 gedung Bangunan Kantor Kecamatan Pulau Panjang dan sebesar Rp3.069.705.531,99 gedung Bangunan Kantor Kecamatan Seluan yang penganggarnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.025.754.507,36 terdiri dari:

Koreksi Tahun Sebelumnya	Rp	89.165.750,03
Pelunasan Utang	Rp	20.690.257.255,69
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	399.002.858,48
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.200.687.500,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	263.189.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	893.189.016,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	17.188.583.298,00
Koreksi Utang Belanja atas Temuan Pemeriksaan BPK	Rp	39.383.097,58
Tagihan Jangka Panjang Temuan Pemeriksaan BPK	Rp	253.796.731,58
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan		8.500.000,00
Ekstrakomtabel		
Jumlah	Rp	41.025.754.507,36

Pengurangan koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp2.765.750,03 berasal dari lebih catat Aset Tetap di beberapa SKPD antara lain di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.590.000,00 untuk Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp200.000,00, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp1.940.000,00 Pagar sebesar Rp450.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp175.750,00 atas Bangunan Gedung Kantor dan sebesar Rp0,03 atas Bangunan Gedung Tempat Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Adapun pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pelunas Utang dengan rincian sebagai Berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	8.993.226.950,00
Dinas Kesehatan	Rp	2.383.587.822,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	4.261.150.854,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	369.629.007,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	185.732.414,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	99.345.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	196.744.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	144.266.041,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.197.499.838,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	506.303.006,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	587.696.650,00
Dinas Pariwisata	Rp	1.083.734.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	239.059.092,00
Sekretariat DPRD	Rp	223.263.397,07
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp	29.807.760,00
Kecamatan Bunguran Timur Laut	Rp	189.210.724,62
Jumlah		20.690.257.255,69

Pengurangan Atas Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antara lain berupa Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp399.002.858,48 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Aset Tetap Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal yang mana pada pencatatan awalnya di anggarkan pada Bangunan Gedung Kantor. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp988.187.500,00 berasal dari Dinas kesehatan sebesar Rp643.037.500,00 berupa Aset Tetap Kendaraan Bermotor Khusus di Puskesmas Tanjung, sebesar Rp10.000.000,00 berupa Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp335.150.000,00. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Aset Tetap Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp1.500.000,00 dan Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp261.689.000,00 berasal dari Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp893.189.016,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp634.573.458,00 berupa Aset Tetap Taman sebesar Rp634.573.458,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp258.615.558,00 berupa Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp226.812.948,00 serta sebesar Rp31.802.610,00 untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pagar.

Reklasifikasi Aset Lain-lain berdasarkan SK Nomor 100.3.3.2-222 Tahun 2025 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Natuna Sebesar Rp10.971.415.000,00 berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp880.657.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.534.748.000,00 dan Kecamatan Serasan sebesar Rp556.010.000,00 berupa Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Sebesar Rp10.416.864.500,00 dan Pagar sebesar Rp554.550.500,00.

Kemudian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp199.832.723,00 berupa Aset Tetap Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar pada Pasar lama Ranai yang sudah direlokasikan ke pasar baru. Reklasifikasi Aset Lain-lain Atas Inventarisasi sebesar Rp474.000.000,00 berasal dari Dinas Perhubungan. Sebesar Rp103.855,45 atas Bangunan Fasilitas Umum di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.439.480.125,00 berupa Aset Tetap Flat/Rumah Susun. Koreksi Utang Belanja atas Temuan Pemeriksaan BPK sebesar Rp39.383.097,58 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp13.973.606,67, Bangunan Parkir Sebesar Rp21.909.490,91, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp3.500.000,00, dan Tagihan Jangka Panjang atas Temuan Pemeriksaan BPK sebesar 253.796.731,58 berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp92.837.088,49, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.650.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp56.322.738,78,

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp46.269.416,15, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp2.115.000,00 Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp11.020.038,89 dan Pagar sebesar Rp43.582.449,27. Ekstrakomtabel sebesar Rp8.500.000,00 Berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari BOSP-BOS Reguler Sekolah Dasar.

Selanjutnya reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.546.029.313.555,45 yang berada pada:

Tabel 7.5.148 Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	473.485.646.398,53
2	Dinas Kesehatan	175.359.206.873,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	168.566.806.859,45
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	270.629.410.803,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.943.196,00
6	Dinas Sosial	8.877.146.907,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.471.437.219,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.447.047.060,09
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.830.241.811,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	20.520.794.597,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.117.489.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.163.066.041,00
13	Dinas Perhubungan	64.146.003.985,37
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.412.993.109,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.306.238.545,88
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	42.416.185.063,79
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.054.145.655,93
18	Dinas Perikanan	10.351.603.829,00
19	Dinas Pariwisata	9.830.414.859,63
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	38.376.855.605,07
21	Sekretariat Daerah	93.150.345.263,00
22	Sekretariat DPRD	37.192.319.702,19
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.504.402.127,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
26	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.328.075.000,00
27	Inspektorat Daerah	7.028.650.112,00
28	Kecamatan Bunguran Timur	2.815.681.650,00
29	Kecamatan Bunguran Barat	5.396.477.654,00
30	Kecamatan Bunguran Utara	3.443.004.000,00
31	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
32	Kecamatan Midai	3.177.793.000,00
33	Kecamatan Serasan	1.332.867.000,00
34	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
35	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
36	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
37	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.503.860.724,62
38	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
39	Kecamatan Serasan Timur	5.070.304.981,00
40	Kecamatan Suak Midai	3.432.671.130,00
41	Kecamatan Bunguran Batubi	3.261.040.000,00
42	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.638.215.301,00
43	Kecamatan Pulau Seluan	3.069.705.531,99
44	Kecamatan Pulau Panjang	3.148.429.956,53
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.675.102.858,00
Jumlah		1.546.029.313.555,45

7.5.3.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebesar Rp2.453.891.112.892,43 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 2.271.555.664.184,03
Penambahan Tahun 2025	Rp 230.337.601.422,32
Jumlah	Rp 2.501.893.265.606,35
Pengurangan Tahun 2025	Rp 48.002.152.713,92
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp 2.453.891.112.892,43

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.149 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						PENGURANGAN											SALDO AKHIR	
			REALISASI BELANJA MODAL JIJ	UTANG TAHUN 2025	PENDAPATAN HIBAH (LO)	REKLAS DARI		REKLAS ANTAR SRO	PELUNASAN UTANG TA. 2024	KOREKSI SALDO AWAL	ASET TETAP PERALATAN MESIN	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLAS KE			KOREKSI UTANG BELANJA (TEMUAN PEMERIKSAAN BPK)	TAGIHAN JANGKA PANJANG (TEMUAN PEMERIKSAAN BPK)	PENGHAPUSAN	REKLAS ANTAR SRO		
						ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN						ASET TETAP KDP	ASET LAINNYA- ATB	ASET LAIN- LAIN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	17	20	21	
1	Jalan Provinsi	3.879.368.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.368.668,00	
2	Jalan Kabupaten	1.123.826.281.806,31	14.536.811.939,87	27.893.467,00	169.696.722.403,00	0,00	0,00	0,00	13.372.716.760,87	4.972.683,51	0,00	0,00	0,55	992.423.308,00	890.380.000,00	36.787.151,45	5.020.000,00	0,00	199.565.338,00	1.292.585.844.373,80	
3	Jalan Desa	385.199.320.123,27	236.173.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.499.460,00	236.173.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200.326,00	0,00	99.446.241,86	0,00	0,00	386.448.173.015,41	
4	Jalan Khusus	2.160.133.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.133.839,76	
5	Jalan Lainnya	43.406.344.883,11	17.839.930.305,53	263.624.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.572.790,53	22.086.927,03	0,00	0,00	203.734.276,00	99.135.489,00	0,00	0,00	10.891.697,07	0,00	1.355.934.122,00	46.467.544.213,01	
6	Jembatan pada Jalan Nasional	3.679.273.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.273.815,00	
7	Jembatan pada Jalan Kabupaten	26.712.627.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712.627.699,46	
8	Jembatan pada Jalan Desa	5.219.860.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.860.484,82	
9	Jembatan Penyeberangan	194.214.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.214.755,00	
10	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	137.185.071.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.590.000,00	0,00	136.962.336.955,35	
11	Jembatan Lainnya	97.995.581.146,21	684.373.486,10	0,00	5.479.513.134,00	0,00	0,00	0,00	684.373.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.475.094.280,21	
12	Bangunan Pengambilan Irigasi	131.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.401.800,00	
13	Bangunan Pembawa Irigasi	26.614.601.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.614.601.371,00	
14	Bangunan Pembuang Irigasi	199.661.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.661.600,00	0,00	
15	Bangunan Sawah Irigasi	2.680.886.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.886.187,00	
16	Saluran Pembuang Pasang Surut	198.575.377,00	4.638.160.479,00	345.471.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.254.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.068.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.308.534,00	198.575.377,00	
17	Bangunan Pengaman Pasang Surut	221.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.340.000,00	
18	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	697.867.745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.867.745,26	
19	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	509.702.616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.702.616,29	
20	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	82.744.603.970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.308.534,00	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	82.918.857.504,76	
21	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	28.586.645.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586.645.695,08	
22	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	30.146.373.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148.673.711,00	
23	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	341.863.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.863.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	3.569.664.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.664.560,00	
25	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	11.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484.000,00	
26	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
27	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	6.456.458.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	6.456.458.990,00	
28	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00	
29	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	4.971.046.391,00	116.192.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.192.580,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.935.391,00	
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	99.790.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.790.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Bangunan Pembawa Air Kotor	859.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.999.000,00	
32	Bangunan Pembuang Air Kotor	11.438.048.808,00	2.923.828.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.970.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036.907.128,00	
33	Bangunan Pengaman Air Kotor	149.570.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.570.865,21	

(dalam rupiah)

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						PENGURANGAN											SALDO AKHIR
			REALISASI BELANJA MODAL JUJ	UTANG TAHUN 2025	PENDAPATAN HIBAH (LO)	REKLAS DARI		REKLAS ANTAR SRO	PELUNASAN UTANG TA. 2024	KOREKSI SALDO AWAL	ASET TETAP PERALATAN MESIN	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLAS KE			KOREKSI UTANG BELANJA (TEMUAN PEMERIKSAAN BPK)	TAGIHAN JANGKA PANJANG (TEMUAN PEMERIKSAAN BPK)	PENGHAPUSAN	REKLAS ANTAR SRO	
						ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN						ASET TETAP KDP	ASET LAINNYA- ATB	ASET LAIN- LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	17	20	21
34	Bangunan Pelengkap Air Kotor	3.478.626.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.626.276,00
35	Bangunan Air Kotor Lainnya	60.253.377.590,24	340.455.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.661.600,00	340.455.297,00	13.110.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.277,78	0,00	2.300.000,00	60.232.324.479,13
36	Instalasi Air Permukaan	2.131.784.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.784.724,00
37	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	102.909.771.232,00	469.996.200,00	0,00	0,00	9.982.431,00	1.500.000,00	22.877.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.510.000,00	0,00	103.214.617.702,00
38	Instalasi Air Buangan Domestik	1.682.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.226.000,00	0,00	1.126.071.500,00
39	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	114.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.550.000,00
40	Bangunan Penampung Sampah	409.260.000,00	344.124.486,55	960.692.575,27	0,00	0,00	261.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042.118,91	0,00	0,00	1.961.723.942,91
41	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	5.447.826.648,34	0,00	0,00	0,00	965.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412.826.648,34
42	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	298.298.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.298.994,00
43	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	3.686.479.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.479.920,00
44	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	15.163.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.619.000,00
45	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	59.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369.200,00
46	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	317.904.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.904.999,56
47	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	88.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.987.000,00	0,00	0,00
48	Instalasi Pengaman Lainnya	5.797.003.339,00	6.610.314.856,00	273.571.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925.511.997,00	15.538.507,04	0,00	245.845.142,00	15.096.000,00	0,00	0,00	17.658.532,78	4.738.611,11	0,00	0,00	6.456.501.237,07
49	Instalasi Lain	214.833.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.820.827,00
50	Jaringan Pembawa	1.010.656.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.656.515,00
51	Jaringan Induk Distribusi	1.808.297.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.297.109,00
52	Jaringan Cabang Distribusi	1.122.400.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.400.671,00
53	Jaringan Sambungan ke Rumah	1.134.327.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.327.568,00
54	Jaringan Air Minum Lainnya	22.877.839,00	114.344.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.344.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877.839,00	0,00
55	Jaringan Transmisi	5.283.504.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.504.945,00
56	Jaringan Distribusi	471.708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.708.900,00
57	Jaringan Listrik Lainnya	3.161.912.054,72	2.142.424.450,00	613.155.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.424.450,00	0,00	0,00	0,00	49.333.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.733.224,72
58	Jaringan Telepon di atas Tanah	94.435.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.435.594,00
59	Jaringan Telepon Lainnya	87.563.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.563.448,28
60	Jaringan Pipa Distribusi	25.646.403.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646.403.426,00
JUMLAH		2.271.555.664.184,03	51.438.785.930,05	2.484.408.524,27	175.176.235.537,00	974.982.431,00	263.189.000,00	2.047.634.433,00	43.673.645.290,50	59.754.450,91	12.056.000,00	245.845.142,00	449.232.976,55	1.091.558.797,00	1.296.994.426,00	54.445.684,23	140.293.946,73	978.326.000,00	2.047.634.433,00	2.453.891.112.892,43

Penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp230.337.601.422,32 yang terdiri dari:

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	51.438.785.930,05
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	2.484.408.524,27
Pendapatan Hibah - LO	Rp	175.176.235.537,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	974.982.431,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	263.189.000,00
Jumlah	Rp	230.337.601.422,32

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 sebesar Rp51.438.785.930,05 berasal dari beberapa SKPD antara lain sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.720.755.017,00
Dinas Kesehatan	Rp	894.268.932,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	35.195.561.985,58
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	10.860.021.105,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	376.958.724,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	344.124.486,55
Dinas Perhubungan	Rp	1.823.924.450,00
Sekretariat DPRD	Rp	223.171.229,92
Jumlah	Rp	51.438.785.930,05

Kemudian, Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.484.408.524,27 tercatat di beberapa SKPD terdiri dari:

Dinas Lingkungan Hidup	Rp	960.692.575,27
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	427.792.493,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	374.066.036,00
Dinas Perhubungan	Rp	49.333.950,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Rp	672.523.470,00
Jumlah	Rp	2.484.408.524,27

Terdapat penambahan aset jalan, jaringan dan irigasi selain dari belanja modal dan penambahan utang belanja. Penambahan tersebut berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp974.982.431,00 pada Dinas Kesehatan berupa gedung fasilitas kesehatan, dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp263.189.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Tempat Pembuangan Sampah.

Pendapatan Hibah Rp175.176.235.537,00 berasal dari Hibah Kementerian PUPR Rp5.479.513.134,00, Hibah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAST No. 97.1/BA/Dc/2024 dan 00.2.3.2./BPKPD-UP.4/BAST/12/II/2024 sebesar Rp1.156.272.220,00 dan Hibah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAST No. 115/BAST/Bb24/2025 dan 600.1.9/34/PUPR-UP2/II/2025 sebesar Rp168.540.450.183,00

Reklasifikasi antar sub rincian objek Rp2.047.634.442,00 pada kolom penambahan dan pengurangan merupakan pembetulan atas pencatatan akibat kesalahan antara penggunaan belanja modal aset dengan capaian keluaran aset.

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp48.002.152.713,92 terdiri dari:

Pelunasan Utang TA. 2024	Rp	43.673.645.290,50
Koreksi Saldo Awal	Rp	59.754.451,46
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp	12.056.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	245.845.142,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP	Rp	449.232.976,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya-ATB	Rp	1.091.558.797,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah	Rp	1.296.994.426,00
Koreksi Utang Belanja atas Temuan Pemeriksaan BPK	Rp	54.445.684,23
Tagihan Jangka Panjang Temuan Pemeriksaan BPK	Rp	140.293.946,73
Penghapusan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	978.326.000,00
Jumlah	Rp	48.002.152.713,92

Jumlah Pelunasan utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi selama tahun 2025 sebesar Rp48.002.152.713,92 yang terdiri dari :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.670.667.377,00
Dinas Kesehatan	Rp	424.272.732,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	32.576.397.195,58
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	6.578.253.582,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	376.958.724,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.823.924.450,00
Sekretariat DPRD	Rp	223.171.229,92
Jumlah	Rp	43.673.645.290,50

Koreksi Saldo Awal Jalan Irigasi dan Jaringan Rp59.754.451,46 merupakan koreksi atas temuan BPK tahun 2024 atas pekerjaan kelebihan pembayaran jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang belum mengurangi harga perolehan dari aset jalan, jaringan dan irigasi yang berada pada :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	33.732.524,43
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	26.021.927,03
Jumlah	Rp	59.754.451,46

Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Rp12.056.000,00 berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp245.845.142,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan reklasifikasi ke Aset Tetap KDP Rp449.232.976,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp399.899.026,00 dan Dinas Perhubungan Rp49.333.950,00. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-ATB Rp1.091.558.797,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan kajian DED atas pekerjaan jalan yang saling terintegrasi dan belum bisa diatribusikan secara langsung ke aset induknya. Reklasifikasi ke Beban Hibah Rp1.296.994.426,00 merupakan aset yang dihibahkan kepada Pemerintah desa yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 296 Tahun 2025 Tentang Hibah ke Pemerintah Desa. Selain itu juga, pada tahun 2025 telah dilakukan penghapusan aset jalan, jaringan dan

irigasi sebesar Rp978.326.000,00 dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-373 Tahun 2025 dan 100.3.3.2-373 Tahun 2025 yang berada pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp199.510.000,00, Dinas Kesehatan Rp556.226.000,00, dan Dinas Perikanan Rp222.590.000,00.

Koreksi Utang Belanja atas Temuan Pemeriksaan BPK Rp54.445.684,23 terdiri dari Jalan Kabupaten Rp36.787.151,45 dan Instalasi Pengaman Lainnya Rp17.658.532,78 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Tagihan Jangka Panjang Temuan Pemeriksaan BPK Rp140.293.946,73 terdiri dari Jalan Kabupaten Rp5.020.000,00, Jalan Desa Rp99.446.241,86, Bangunan Air Kotor Lainnya Rp5.890.277,78 dan Instalasi Pengaman Lainnya Rp4.738.611,11 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jalan Lainnya Rp10.891.697,07 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp265.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bangunan Penampung Sampah Rp14.042.118,91 di Dinas Lingkungan Hidup.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.453.891.112.892,43 yang berada pada:

Tabel 7.5.150 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

		(dalam rupiah)
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.062.461.725,24
2	Dinas Kesehatan	17.126.582.603,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.114.902.979.634,18
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	217.120.467.383,60
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.779.060.045,36
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.683.312.326,91
7	Dinas Perhubungan	54.301.879.918,82
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	274.739.439,00
9	Dinas Perikanan	11.504.549.015,00
10	Sekretariat DPRD	1.128.708.845,13
11	Dinas Sosial	1.253.831,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.504.200,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	614.312.120,00
15	Dinas Pariwisata	12.171.374.488,85
16	Sekretariat Daerah	1.185.361.100,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35.174.000,00
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.584.269.000,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
20	Kecamatan Midai	185.000.000,00
21	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
22	Kecamatan Pulau Tiga	330.645.016,00
Jumlah		2.453.891.112.892,43

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp74.439.577.990,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 72.246.390.690,12
Penambahan Tahun 2025	Rp 2.937.770.500,00
Jumlah	Rp 75.184.161.190,12
Pengurangan Tahun 2025	Rp 744.583.200,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	Rp 74.439.577.990,12

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.151 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Penambahan					Pengurangan					Saldo Akhir 2025
			Realisasi Belanja	Utang 2025	Reklasifikasi Dari Persediaan	Reklasifikasi Dari Beban Barang Dan Jasa	Reklasifikasi Dari Peralatan Dan Mesin	Utang 2024	Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa	Reklasifikasi Ke Peralatan Dan Mesin	Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan BPK)	Penghapusan	
1	Buku Umum	36.839.702.090,32	801.869.200,00	6.401.000,00	0,00	9.121.800,00	31.830.300,00	9.115.000,00	5.040.000,00	87.032.000,00	11.335.700,00	0,00	37.576.401.690,32
2	Buku Filsafat	16.562.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.258,00
3	Buku Agama	271.388.367,00	244.849.700,00	0,00	0,00	249.200,00	8.521.000,00	0,00	0,00	0,00	9.713.900,00	0,00	515.294.367,00
4	Buku Ilmu Sosial	282.376.232,00	33.477.000,00	0,00	0,00	2.461.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.314.632,00
5	Buku Ilmu Bahasa	427.335.080,00	415.947.300,00	0,00	0,00	4.488.200,00	26.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.346.580,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	174.121.702,00	315.750.000,00	0,00	0,00	4.765.400,00	18.050.500,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00	0,00	512.230.002,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	496.007.897,00	938.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.945.997,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.154.072.509,00	174.189.200,00	0,00	0,00	0,00	7.999.000,00	0,00	0,00	29.920.000,00	0,00	1.485.000,00	1.304.855.709,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	48.422.334,00	1.876.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.299.034,00
10	Buku Laporan	5.340.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.275,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	48.683.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683.755,00
12	Bentuk Mikro (Microform)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	Bahan Kartografi	30.031.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031.360,00
14	Karya Grafika (Graphic Material)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15	Alat Musik	3.316.231.500,00	87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.831.500,00
16	Lukisan	7.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.500,00
17	Alat Peraga Kesenian	602.495.000,00	108.218.900,00	0,00	3.700.000,00	2.800.000,00	93.450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.664.500,00
18	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	532.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
19	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	160.764.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.764.778,00
20	Barang Kerajinan	19.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076.000,00
21	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.222.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.469,80
22	Ternak Potong	89.727.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.273,00
23	Ikan Budidaya	41.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	40.778.000,00
24	Tanaman	5.409.993.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.993.625,00
25	Tanaman Koleksi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
26	Aset Tetap Dalam Renovasi	22.790.513.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790.513.685,00
JUMLAH		72.246.390.690,12	2.717.356.100,00	6.401.000,00	3.700.000,00	23.886.000,00	186.427.400,00	598.755.000,00	5.040.000,00	116.952.000,00	21.507.200,00	2.329.000,00	74.439.577.990,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp2.937.770.500,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	2.717.356.100,00
Utang Tahun 2025	Rp	6.401.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	3.700.000,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	23.886.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	186.427.400,00
Jumlah	Rp	2.937.770.500,00

Realisasi Belanja Modal pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp2.717.356.100,00 termasuk didalamnya bersumber dari Belanja BOSP dan BOP Aset Tetap Lainnya yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.605.241.100,00, kemudian pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp80.000.000,00 dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp32.115.000,00.

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari utang belanja tahun 2025 sebesar Rp6.401.000,00. Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp3.700.000,00 berasal dari Reklasifikasi Aset Perlengkapan Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp23.886.000,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp186.427.400,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp744.583.200,00 terdiri dari:

Pelunasan Utang 2024	Rp 598.755.000,00
Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa	Rp 5.040.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 116.952.000,00
Tagihan Jangka Panjang atas Temuan Pemeriksaan BPK	Rp 21.507.200,00
Penghapusan	Rp 2.329.000,00
Jumlah	Rp 744.583.200,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp744.583.200,00 berasal dari pelunasan Utang 2024, Reklasifikasi, Tagihan Jangka Panjang atas Temuan Pemeriksaan BPK dan Penghapusan. Pelunasan utang 2024 pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp598.755.000,00. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.040.000,00. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp116.952.000,00.

Tagihan Jangka Panjang atas Temuan Pemeriksaan BPK Rp21.507.200,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Penghapusan Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp2.329.000,00 berupa Ikan Budidaya Rp844.000,00 di Dinas Perikanan dan Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Rp1.485.000,00 di Dinas Pariwisata

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp74.439.577.990,12 berada pada :

Tabel 7.5.152 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.152.439.877,12
2	Dinas Kesehatan	72.137.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.560.539.885,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	35.750.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	644.499.898,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.862.836.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.758.793.630,00
8	Dinas Perikanan	238.148.000,00
9	Sekretariat Daerah	59.565.000,00
10	Sekretariat DPRD	49.999.000,00
11	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
Jumlah		74.439.577.990,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.057.119.023,22 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 61.912.395.559,74
Penambahan tahun 2025	Rp 1.468.344.642,00
Jumlah	Rp 63.380.740.201,74
Pengurangan tahun 2025	Rp 6.323.621.178,52
Nilai Aset Tetap Tahun 2025	Rp 57.057.119.023,22

Jumlah Aset tersebut merupakan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari:

Tabel 7.5.153 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo awal	Penambah				Pengurang			Saldo akhir
			Reklasifikasi dari Beban Jasa	Aset tetap tanah	Aset tetap gedung dan bangunan	Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	Persediaan	Aset tetap gedung dan bangunan	Tagihan Jangka Panjang atas Temuan BPK	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	49.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.839.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	226.812.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.812.948,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.933.088.204,92	76.083.650,00	0,00	0,00	0,00	99.765.690,00	6.218.135.488,52	0,00	26.691.270.676,40
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.477.823.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.823.662,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	615.086.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.086.713,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.698.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698.845,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	20.504.180.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504.180.031,00
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	491.325.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.325.734,00
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	633.273.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.273.059,00
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	470.037.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.037.720,00
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	634.573.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.573.458,00
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	21.589.825,00	0,00	0,00	31.802.610,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	47.672.435,00
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	467.568.673,00	0,00	0,00	0,00	203.734.276,00	0,00	0,00	0,00	671.302.949,00
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	2.829.545.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.545.352,82
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	170.218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218.400,00
16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Lainnya	71.318.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00
17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	226.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.399.750,00
18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	17.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017.000,00
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	972.223.980,00	0,00	0,00	0,00	196.164.750,00	0,00	0,00	0,00	1.168.388.730,00
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	49.333.950,00	0,00	0,00	0,00	49.333.950,00
JUMLAH		61.912.395.559,74	76.083.650,00	49.839.000,00	893.189.016,00	449.232.976,00	99.765.690,00	6.218.135.488,52	5.720.000,00	57.057.119.023,22

Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.468.344.642,00 antara lain :

Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	76.083.650,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	49.839.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	893.189.016,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	449.232.976,00
Jumlah	Rp	1.468.344.642,00

Reklasifikasi dari Beban Jasa Perencanaan dan DED Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp76.083.650,00.Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah Sebesar Rp49.839.000,00 merupakan jasa penilaian atas Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp893.189.016,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp634.573.458,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp258.615.558,00. Kemudian Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp449.232.976,00 berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp49.333.950,00 dan Rp399.899.026,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp6.323.621.178,52 dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi Ke Persediaan	Rp	99.765.690,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	6.218.135.488,52
Tagihan Jangka Panjang atas Temuan BPK	Rp	5.720.000,00
Jumlah	Rp	6.323.621.178,52

Reklasifikasi Ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp99.765.690,00 merupakan Perencanaan Pembangunan Gedung Bhayangkari. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp6.218.135.488,52 berasal dari di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan akan dimutasikan ke Kecamatan Seluan Sebesar Rp3.069.705.531,99 serta Kecamatan Pulau Panjang Sebesar Rp3.148.429.956,53. Tagihan Jangka Panjang atas Temuan BPK sebesar Rp5.720.000,00 berupa Belanja Jasa Konsultansi pada Dinas Pendidikan

Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp57.057.119.023,22 terdiri dari:

Tabel 7.5.154 Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
NO.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.594.355.980,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.057.821.348,22
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.589.825,00
4	Dinas Perhubungan	540.659.684,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.345.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.698.845,00
7	Dinas Pariwisata	227.468.310,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	20.504.180.031,00
JUMLAH		57.057.119.023,22

Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun ini dan tahun berikutnya menunggu kemampuan Keuangan Daerah, dan ada beberapa pekerjaan yang masih menunggu penyelesaian di tahun berjalan. Secara rinci diungkapkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.155 Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut	114.485.400,00	31-Dec-24	17.2/SPK-PR/DISDIKBUD-UP2/X/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan TK Negeri 2 Bunguran Barat	169.322.085,00	31-Dec-24	74/SPK/02.12/REN/DISDIKBUD/XI/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan TK Negeri 1 Bunguran Timur Laut	161.484.748,00	31-Dec-24	20.2/SPK-PR/DISDIKBUD-UP2/X/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan SMP Negeri 2 Bunguran Utara	169.794.480,00	31-Dec-24	75/SPK/02.12/REN/DISDIKBUD/XI/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Tanah	Lapangan Lainnya	Pematangan Lahan SKB Natuna	226.812.948,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Detail Engineering Desing (DED) Pembangunan Gedung/Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Disdikbud Kab.Natuna	76.083.650,00	17-Dec-25	28/SPK/09.09/REN/DISDIKBUD/XI/2025	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Panggung	Perencanaan Pembangunan Panggung Seni SMPN.001 Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.875.000,00	31-Dec-20	10/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru SDN 003 Desa Setumuk	30.041.000,00	31-Dec-20	02/SPK/16.04-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Panggung Kesenian/Atraksi	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan WC SDN 002 Tanjung Pala Kec. Pulau Laut Pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Natuna	2.387.000,00	31-Dec-19	05/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Pagar SD 004 Pian Tengah Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	10.483.000,00	31-Dec-21	01/SPK/15.01-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Serasan	4.807.000,00	31-Dec-20	02/SPK/16.11-04/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Revitalisasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Tengah	33.891.000,00	31-Dec-20	13/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan UGB TK Negeri 002 Kec. Bunguran Timur Laut (1 Ruang Guru + 2 Ruang Kelas + WC + UKS + Ruang Dapur).	49.736.500,00	31-Dec-20	42/SPK/16.09-42/Ren/DISDIKPORA/2019	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Ruang Majlis Guru TK N Alamat RT.007 RW.002 Desa Batubi Jaya	21.087.000,00	31-Dec-20	01/SPK/16.83-01/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	Pembayaran 100% Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SMPN 1 Serasan Timur Pada Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	14.938.000,00	31-Dec-20	01/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Panggung Kesenian/Atraksi	Perencanaan Pembangunan Panggung Seni Mts. Miftahunnajah Desa Mekar Jaya	10.301.500,00	31-Dec-20		-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	Perencanaan Pembangunan Musholla SDN 003 Kecamatan Midai	37.038.100,00	31-Dec-20	12/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	Pematangan Lahan SDN 006 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Bulan Agustus	228.814.059,00	30-Aug-24	01/SPK/16.01-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Rehabilitasi Pagar SMPN 2 Bunguran Timur	15.922.950,00	31-Dec-25			Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan pagar dan batu miring SD Negeri 001 Harapan Jaya	10.159.660,00	31-Dec-25	400.3.1.3/002/SPK/01.03/REN/DISDIKBUD/VII/2025		Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Revitalisasi Pagar SMPN1 Kelarik	15.323.000,00	31-Dec-20	03/SPK/16.08-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar TK Negeri Kec. Bung Utara	7.784.700,00	31-Dec-20	01/SPK/16.08-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Plafon Sekolah TK Negeri 002 Kelurahan Sedanaue Kec. Bunguran Barat	2.640.000,00	31-Dec-20	08/SPK/01.06-21/Ren/DISDIK/2021	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Halaman Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Paving Block Halaman SDN 006 Desa Selemam Pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan	11.489.500,00	31-Dec-20	01/SPK/16.04-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 009 Bandarsyah	10.307.000,00	31-Dec-20	01/SPK/15.45-01/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru SMPN 2 Bunguran Utara	37.125.000,00	31-Dec-20	01/SPK/16.01-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bertingkat (RKB) SMPN 1 Suak Midai Kec. Midai Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	86.715.200,00	31-Dec-20	07/SPK/15.09-12/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN Kec. Serasan Timur	11.489.500,00	31-Dec-20	01/SPK/15.04-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	

(dalam rupiah)

Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Listrik	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Intalasi Listrik Mts Bakti Natuna Pulau Tiga Barat	5.758.500,00	31-Dec-20	02/SPK/16.13-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan REVITALISASI DRAINASE SD NEGRI 001 TANJUNG KEC.BUNGURAN TIMUT LAUT	5.500.000,00	31-Dec-20	04/SPK/16.19-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Listrik	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaanc Mts Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapannya Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.	5.758.500,00	31-Dec-20	01/SPK/16.13-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor	Belanja Jasa Penilaian	49.839.000,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Taman	DED Peningkatan Penataan Pantai Piwang	634.573.458,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pengerasan jalan Lingkungan Gang Jais Desa Sungai Ulu	17.501.370,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Optimalisasi Pembangunan jalan Tok Atu RT.03/RW.05 Kelurahan Ranai	15.948.480,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan jalan dan penimbunan sirtu dari perkebunan menuju Jalan Tok Bedung Desa Selemam	18.535.057,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Penimbunan Sirtu Jalan Batu Asah Menuju Kebun Masyarakat Desa Sebadai Ulu	18.535.057,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan beton bertulang jalan batu manik Desa Binjai	31.665.807,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Lanjutan pembangunan jalan Sp. SD IT - Air Raya Kelurahan Bandarsyah	23.661.182,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Pembangunan jalan beton betulang Gang Bujang Hasan Jalan Air Terjun Kelurahan Ranai Darat	15.860.046,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Semenisasi Jalan Kartini RT.01/RW.02 Desa Batubi Jaya	15.912.904,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Lanjutan Pembangunan jalan beton bertulang jalan Tok Juned menuju Jalan Muhammad Bees Kelurahan Ranai	14.294.524,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembukaan Jalan dari Palak Gelam menuju Air Endan Subi Besar	31.819.849,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan drainase RT.01 RW.01 Dusun 1 Bukit Senja Desa Selemam	13.558.650,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan drainase RT.02/RW.02 Desa Harapan Jaya	16.977.450,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Drainase Jalan Kebun Sayur RT.08/RW.04 Desa Tapau	14.751.900,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Lanjutan pembangunan drainase air batu Lemis RT. 003/RW.003 Kelurahan Sedanau	15.817.500,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan drainase Jalan Imam Hasanuddin RT. 01 RW.01 Desa Semedang	15.889.650,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan Drainase dari Arung Tegor Besi sampai depan Gedung PKK, Desa Kampung Hilir	15.911.850,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan Abdi Karya RT.01 RW.06 Desa Harapan Jaya	13.714.050,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan drainase Jalan Padang Pasir RT 04 RW 02, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut	15.850.800,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan Drainase Gang Nurtimah RT.003/RW.006 Padang Tok Kurma Kelurahan Ranai	15.884.100,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 004/RW. 003 Kampung Air Peluntas Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur	15.889.650,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Pembangunan drainase RT.05 RW.03 Desa Tanjung	15.956.250,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bangunan Drainase Jalan/Lingkungan	Perencanaan Lanjutan Drainase RT.003/RW.002 Dusun I Desa Jermalik	10.866.900,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring jalan Depan Surau Al-Hidayah RT.01/RW.01 Desa Semedang	15.096.000,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Halam Gedung Kantor	Semenisasi Halaman Kantor Camat Bunguran Utara	13.728.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan+Pengawasan Gedung LAM Kabupaten Natuna	1.564.740.373,40	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Batu Hitam	99.394.950,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri

(dalam rupiah)

Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Pulau Tiga Barat Kapitalisasi Fisik Nilai 1.484.795.882	1.544.611.562,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	DED Pembangunan TPST Dan TPS 3R Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat	79.545.930,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Gapura Kecamatan Bunguran Selatan	8.888.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Pembangunan Teras Kantor Camat B. Tengah Bagian Timur	9.394.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Halaman Gedung Kantor	Seminisasi Hal Kantor Desa Pengadah	13.717.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Konstruksi Dalam Pengerjaan (48,027%)	3.303.160.376,00	31-Dec-16	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termyn 33,516% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Natuna (Tahun Jamak) (1 Paket)	21.111.264.952,00	31-Dec-15	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	DED Pembangunan TPST Kecamatan Midai	69.641.400,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Pembayaran Termyn 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pada Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Atap Kantor, Desa Terayak, Kecamatan Subi. + Pengawasan	23.905.848,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Parit Batas Wilayah Air Tawak Hilir RT 05 RW 01 Dengan Air Keruh RT 01 RW 01 Kel. Ranai Darat	9.883.500,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	DED Pembangunan Gedung Kantor UKPBJ Kabupaten Natuna	99.400.500,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	DED Pembangunan TPST Kecamatan Serasan	79.529.280,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Penimbunan Kantor Desa Sungai Ulu	13.706.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Menuju Pemakaman Tanjung Sulai Desa Sepempang	13.717.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Halaman Pakir	Perencanaan Pembangunan Tangga Naik Dan Tempat Parkir Halaman Depan Kantor Camat Bung. Tengah (1 Paket)	10.484.100,00	31-Dec-20	12/BA-STHP/PERC-PKSPP/XII/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Parkir	Lanjutan Parkir Depan PDAM Desa Ceruk	13.706.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Di Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Kabupaten Natuna	13.852.800,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Camat Bunguran Selatan (1 Paket)	10.484.100,00	31-Dec-20	13/BA-STHP/PERC-PKSPP/XII/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	DED Revitalisasi Kantor Desa Kampung Hilir Kecamatan Serasan	59.773.500,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Astaka	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Astaka Knock Down Di Kecamatan Pulau Tiga	55.847.000,00	9-Dec-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Gedung Dan Bangunan	Instalasi Pengaman Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Relokasi Air Mancur Di Gedung Daerah.	13.858.927,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Simpang Limau Manis Ceruk (1 Paket)	99.858.000,00	18-Nov-20	97/BA-PERC/PJPHP/HOTMIX/XI/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-WC) Jl. Imam H Ismail - Puak	99.715.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Batu Bayan Tengah Desa Cemaga Kec, Bunguran Selatan	12.966.800,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	DED Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Sedanau	99.611.400,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pelebaran Pembangunan Jalan Payak RT.004 Ke RT.006 RW 002 Dusun II Desa Payak.	79.841.190,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Hotmix Jalan Empu Karya Bunguran Tengah	89.473.271,82	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jl. Temadu Kel . Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	57.013.000,00	31-Dec-15	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Poros Tengah - Gunung Putri Kec. Bunguran Batubi (1 Paket)	49.960.000,00	31-Dec-17	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Jalan Kelarik-Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara/Lanjutan, Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.800.000,00	31-Dec-16	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jalan Sengiap - Pulau Kambing Kec. Bunguran Timur Laut	49.950.000,00	31-Dec-17	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri

(dalam rupiah)									
Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Simpang Limau Manis- Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut	49.930.000,00	31-Dec-18	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayara Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Air Kumbik Ranai Darat Kec. Bunguran Timur (1 Paket).	49.900.000,00	31-Dec-15	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Perencanaan Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Bukit Leman Ke SP 3 Kec. Bunguran Tengah (1 Paket)	46.400.000,00	31-Dec-15	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Riview Perencanaan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Serantas-Teluk Melam Kec. Pulau Tiga (1 Paket)	49.960.000,00	31-Dec-17	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jl. Imam Ismail - Jl. Agus Salim Puak	49.950.000,00	31-Dec-18	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembukaan Jalan Sual Depan Kantor Lurah Ke RSUD Kec. Bung. Timur	49.258.000,00	31-Dec-15	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lajutan Jalan Kantor Camat Menuju Setungkuk.	49.561.500,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pembukaan Jalan Dua Jalur Batu Hitam-Batu Kapal (Tahap II).	467.568.673,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Dibayarkan Belanja Modal Jalan Kabupaten Perencanaan Rehabilitasi Jalan Air Buluh-SMA Cemaga Kec. Bunguran Selatan Pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Kepada ADRIGRA KARYA	25.530.000,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Ceruk-Selemam.	50.649.300,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jembatan Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pelantar Rakyat Air Raya Kel. Serasan Kec. Serasan	71.318.610,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Kontruksi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Puak-Kompi C Kec. Bunguran Timur	49.960.000,00	31-Dec-18	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembukaan Jalan TPA - Air Lengit (TMMD) (1 Paket)	49.665.000,00	4-Nov-20	103/BA-PERC/PjPHP/PEMB.JALAN TANAH/XI/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Setungkuk Kecamatan Bunguran Batubi.	70.613.400,00	31-Dec-21	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan UPL/UKL Kegiatan Peningkatan Jalan Beton	99.880.000,00	23-Oct-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Samping Rumah Hamidi RT, 009 RW, 005 Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur	13.090.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Lingkungan	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pantai Ria Sedanau	18.381.600,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Beton Bertulang Jalan Tegul Pelawan RT,002/RW,009 Sual Kecamatan Bunguran Timur	13.711.500,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur	15.477.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pembukaan Dan Pengerasan Jalan Perani Ke Sekukup.	31.923.600,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Kec. Serasan	15.560.600,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan 2 Jalur Sungai Ulu-Ranai (SP. LANTAMAL)	99.715.000,00	31-Dec-21	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Perencanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Di Kabupaten Natuna	14.893.980,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Ruas Jalan Simpang Sungai Hulu - Harapan Jaya.	49.506.000,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Hotmix Jalan Masuk Kantor Camat Harapan Jaya.	49.759.080,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Binjai - Tanjung Bayan Kec. Bunguran Barat	59.785.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Trans Batubi - Sebangkar SP 1 Kec. Bunguran Batubi	99.709.500,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	DED Rekonstruksi Jalan Pelantar Sudirman Sedanau Kec. Bunguran Barat	99.611.400,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Rabat Beton Tukung RT 012/RW 006 Kp, Tukung Sungai Baru Dusun III Desa Arung Ayam	8.234.732,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Penimbunan Jalan Lingkar RT.06/ RW.03 Desa Tapau	15.950.700,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jln, Cendrawasih RT, 014 Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi	13.206.600,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri	

(dalam rupiah)

Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Kelarik-Trans Batubi	99.715.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Dibayarkan Belanja Modal Jalan Desa Review Design Perencanaan Pembangunan Jalan Seminte - Segeram Kec. Bunguran Barat Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Kepada BRAWIJAYA TEKNIK KONSULTAN	48.285.000,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jln, Kihajar Dewantara RT, 011 Desa Batubi Jaya Kec, Bunguran Batubi	15.103.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan SPAM Sebayar Dan SPAM Sedanau.	793.650.000,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Gang Rajawali, Desa Pengadah	7.950.375,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Lingkar Kecamatan Subi	23.963.500,00	31-Dec-21	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Review Design Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Review Design Perencanaan Lanjutan Peningkatan J	57.664.500,00	31-Dec-23	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Sedarat Baru Kec, Bunguran Batubi	13.871.000,00	12-Jun-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Air Mali - Pelabuhan Kelarik	99.715.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan LANJUTAN DRAINASE BELAKANG RUMAH BASUNI ARNI	11.960.250,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Irigasi Tehnis	Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Payak Kec. Serasan Timur	47.850.000,00	17-Jul-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jln, Kantil RT, 004 Desa Batubi Jaya	15.389.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Menuju Perikanan Pulau 3	83.026.454,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Tanjung Balau Kec, Serasan	14.751.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembangunan Jalan Lapis Hotmix Komplek Gor Indoor Kec. Bunguran Timur	49.830.000,00	21-Nov-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Air Sekati Desa Hilir Kec, Serasan	14.960.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Beton Bertulang Lingkari Sabang Mawang	99.880.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Dari MTS Ke Sebadai Hilir RT. 02 Desa Kelanga	35.975.500,00	25-Nov-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Jalan Beton Kristanto Bandarsyah	9.581.000,00	31-Dec-21	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Beton Bertulang, Jl. Tok Lot, Kecamatan Bunguran Utara	69.889.000,00	30-Dec-22	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Intalasi Air Bersih / Air Baku Liannya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan SPAM Di Pulau Tiga (Selat Lampa)	163.680.000,00	17-Oct-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Keramat Ceruk	74.855.000,00	31-Dec-20	100/BA-STHP/PERC/Pening. Beton/XII/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Semenisasi Bahu Jalan Dari Pertigaan Padang Kurak Sual Menuju Ke Sual	13.958.250,00	31-Dec-24	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Pembangunan Parit Jalan Lorong Makde Sari Rt, 03 Rw, 01 Air Kolek Kec, Bunguran Timur	13.728.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Batubi-Kelarik	99.605.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Kelarik Hulu - Segeram	99.770.000,00	21-Nov-19	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Pulau Panjang Kec, Subi	15.229.500,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Perbaikan Parit Belakang Rumah H. CHALID RT.01 / RW.01 Ranai Darat Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur	6.985.000,00	31-Dec-21	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan	Perencanaan Peningkatan Jembatan Sei Semala Kec, Bunguran Batubi	99.605.000,00	31-Dec-20	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di telusuri
GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar BPP Pulau Laut	21.589.825,00	31-Dec-22	05/SPK/DKPP-DAK-PEREN-BPP-PULAU LAUT/IV/2022	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengeriaan	Jaringan Listrik Lainnya	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dari Air Payang ke Pelabuhan Perintis Kec. Pulau Laut	12.354.300,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	

(dalam rupiah)

Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jaringan Listrik Lainnya	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum jalan Urai Asfar RT.001 RW.005 Cemaka Kelurahan Ranai	9.873.450,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jaringan Listrik Lainnya	Perencanaan Lanjutan Pengadaan Lampu Jalan Poros Desa Gunung Putri	8.652.450,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jaringan Listrik Lainnya	Perencanaan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Padang Tengah Kelurahan Ranai Kota	18.453.750,00	31-Dec-25	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Perencanaan Perbaikan Pelabuhan Selaut Kecamatan Bunguran Barat	95.150.310,00	12-Dec-24	15/SPK/PRC/Perb-Pibn.Selaut/DISHUB/2.12.03/XI/2024	6-Nov-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Perencanaan Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Batu Pulau Laut	69.734.577,00	12-Dec-24	14/SPK/PRC/REV.TANJUNGBATU/DISHUB/2.12.0003/DISHUB/XI/2024	6-Nov-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Desa Teluk Buton	79.398.300,00	12-Dec-24	14/SPK/PRC/PEL.TELUKBUTON/DISHUB/2.12.0002/DISHUB/X/2024	15-Oct-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Gedung Terminal	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Terminal Pelabuhan Kelarik	69.542.547,00	12-Dec-24	16/SPK/PRC/Rehab-Pibn.Kelarik/DISHUB/2.12.03/XI/2024	6-Nov-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Besar Selat Lampa, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga	177.500.000,00	31-Dec-19	07/SP/PDP-PRC-PEMB PLBH SBSL/DISHUB/IX/2019	26-Sep-19	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
GEDUNG DAN BANGUNAN	Bangunan Gedung Kantor	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG UPTD PPA, BATU HITAM.	99.345.000,00	25-Nov-24	600.1.15.2/SPK/PERC-PPPA/01/XI/2024	24-Nov-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ded Pengembangan Kawasan Wisata Batu Kapal (Geopark) Hutang Desember	99.877.800,00	31-Dec-24	500.13.2.2/02/P.DED-UP.3/VII/2024	26-Jul-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Pembangunan Pondok Informasi Koreksi Pencatatan 2023	2.289.577,00	31-Jan-24	02/SPK/PKSK-DISPAR/XI/2022	15-Nov-22	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Batu Kapal (Geopark)	99.877.800,00	31-Dec-24	500.13.2.2/02/RMBK-UP.3/V/2024	20-May-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Pembangunan Home Stay 2 Unit Koreksi Pencatatan 2023	16.878.680,00	31-Jan-24	02/SPK/PKSK-DISPAR/XI/2022	15-Nov-22	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Pembangunan Outlet / Kios Koreksi Pencatatan 2023	4.620.883,00	31-Jan-24	02/SPK/PKSK-DISPAR/XI/2022	15-Nov-22	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Umum Lain	Pembangunan Selfie Point 2 Unit Koreksi Pencatatan 2023	3.923.570,00	25-Jan-24	02/SPK/PKSK-DISPAR/XI/2022	15-Nov-22	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen	Konstruksi Dalam Pengerjaan (48,034%), Pemberhentian	2.499.807.168,00	31-Dec-16	644/PU-CK/KTR-INDUK/FISIK/165/IX/2014	4-Sep-14	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembayaran Termyn 35,69% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Pada Pembangunan Pasar Modern (1 Paket)	18.004.372.863,00	31-Dec-15	644/PU-CK/KTR-INDUK/FISIK/165/IX/2014	4-Sep-14	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
Gedung Dan Bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	*Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ranai Kota "	11.698.845,00	31-Mar-24	01/SPMK-PLBK/DISPORA/II/2024	23-Feb-24	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
			57.057.119.023,22					

Secara garis besar, Konstruksi yang dicatat oleh Pemerintah akan dilaksanakan penyelesaian pekerjaannya, tetapi memperhatikan kemampuan fiskal kemampuan keuangan daerah, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan melihat prioritas pembangunan daerah.

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total nilai penyusutan aset tetap sejak aset tersebut pertama kali digunakan hingga periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan per bulan. Akumulasi mulai dihitung sejak barang telah diserahkan dari penyedia ke Pemerintah Daerah. Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.296.219.980.184,51 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.120.114.230.748,59
Penambahan Tahun 2025	Rp	192.791.106.247,55
Jumlah	Rp	2.312.905.336.996,14
Pengurangan Tahun 2025	Rp	16.685.356.811,63
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.296.219.980.184,51

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.156 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	2.120.114.230.748,59	595.005.132,99	3.052.217.644,86	3.029.727,69	3.717.267,16	249.333,33	63.643.002,75	189.136.887.141,52	546.758.696,77	954.600.000,00	3.717.267,16	13.518.262.910,97	63.643.002,75	714.241,79	1.661.303.694,94	2.296.219.980.184,51
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	400.978.913.141,77	204.338.354,95	5.503.220,27	0,00	3.717.267,16	249.333,33	19.734.928,59	51.178.011.311,14	14.325.548,41	954.600.000,00	0,00	9.284.919.995,94	19.734.928,59	0,00	1.371.473.711,62	440.745.413.372,65
1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	453.528.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.854,96	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.277.099,22
1.3.07.01.01.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	10.833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833.333,29
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	1.327.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.167,50
1.3.07.01.01.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	559.244.208,34	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.091.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.335.208,50
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	369.742.617,04	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.225,64	0,12	0,00	0,00	2.590.714,29	0,00	0,00	0,00	378.752.128,99
1.3.07.01.01.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	3.168.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.428,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.142,75
1.3.07.01.01.0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	194.812.380,96	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.289.523,92
1.3.07.01.01.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	30.891.538,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313.087,37	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.204.625,47
1.3.07.01.01.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	205.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.004.000,00
1.3.07.01.01.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	725.714,29	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.285,82
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.583.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.173.000,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.384.989.056,95	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.379.161,62	0,81	0,00	0,00	446.497.000,00	11.221.428,57	0,00	0,00	19.889.649.790,27
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.046.689.007,66	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.428,57	393.643.642,84	0,10	0,00	0,00	994.642.000,00	0,00	0,00	0,00	13.456.912.079,11
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.933.107.795,05	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.202.935,00	454.644,96	0,00	0,00	571.032.815,48	0,00	0,00	0,00	11.976.823.274,74
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	591.808.285,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.492.332,96	2,02	0,00	0,00	30.610.357,13	0,00	0,00	0,00	726.690.259,53
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.510.315.971,70	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.895.168,31	0,87	888.000.000,00	0,00	294.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.049.411.139,65
1.3.07.01.02.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereja Rel	1.114.404,76	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.833,45
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	522.703.624,61	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.822.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.525.786,01
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,33
1.3.07.01.02.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	7.996.740.216,67	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.222.799,96	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.963.016,33
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	27.031.063.363,89	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.265.183,92	0,18	0,00	0,00	800.415.000,00	0,00	0,00	0,00	30.652.913.548,15
1.3.07.01.02.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	238.833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.066.666,75	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900.000,00
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.153.396.478,33	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616.706,60	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.013.184,48
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	70.466.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.694,56	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.587.309,28
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	35.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.833,33	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	12.730.333,33
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00

(dalam rupiah)																		
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	KOREKSI SALDO AWAL		BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	8.155.505,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.940,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.445,16
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	63.436.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.999,52	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.616.995,88
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	2.184.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.999,96	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.583,13
1.3.07.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	34.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913.000,00
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	11.419.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825.450,00
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	88.917.966,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.909.366,39
1.3.07.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	3.877.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.100,00
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	3.946.666,67	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.666,83
1.3.07.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladani	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	289.587.771,67	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892.313,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.480.086,19
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	39.557.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999,96	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.107.833,17
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	640.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.063.000,00
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biaya	414.786.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981.666,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.768.031,18
1.3.07.01.03.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biaya	124.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.960.000,00
1.3.07.01.03.0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.035.662.711,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.350.211,73
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.022.467.770,84	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270.812,71	145.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.592.749,97
1.3.07.01.04.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	9.275.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,36	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025.501,11
1.3.07.01.04.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	131.876.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.643.279,64
1.3.07.01.04.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	355.297.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.297.900,00
1.3.07.01.04.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	1.162.398.116,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.815.528,42
1.3.07.01.04.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	146.137.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.137.445,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	32.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665.600,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	12.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260.500,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.871.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.871.296,71
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan/Pengelolaan Kantor	8.120.526.219,20	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.230.938,23	810.008,89	0,00	0,00	0,00	31.865.000,00	0,00	0,00	13.532.000,00	8.749.550.157,29
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.445.844.367,24	9.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.869.862,73	366.328,29	0,00	0,00	0,00	284.140.100,00	0,00	0,00	23.374.000,00	10.810.842.915,84
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	24.196.991.579,51	10.120.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.801.274,78	23,25	0,00	0,00	0,00	10.960.000,00	0,00	0,00	125.014.983,33	26.009.938.783,23
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	52.315.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.666,71	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011.000,00	42.691.499,45
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.096.602.789,88	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.969.555,45	38.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.590.012,56
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.948.445.765,02	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.366.714,51	58.349,17	0,00	0,00	0,00	41.285.666,75	0,00	0,00	40.813.666,67	9.363.654.803,05
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	678.734.111,71	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.961.107,82	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.043.424,00	748.651.798,40
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.508.282.841,52	3.899.699,92	0,00	0,00	0,00	3.717.267,16	0,00	2.777.031.783,46	68.638,98	66.600.000,00	0,00	327.322.772,50	0,00	0,00	0,00	226.501.836,69	19.672.438.343,89

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	KOREKSI SALDO AWAL		BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	369.307.134,96	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.219.555,65	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.526.690,20	
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	5.843.836.044,49	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.995.583,05	213.337,31	0,00	0,00	3.830.200,00	0,00	0,00	15.584.700,00	6.395.203.400,98	
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	531.621.451,76	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.871.640,95	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.493.091,60	
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	4.783.207.869,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.068.547,07	7,74	0,00	0,00	47.200.277,32	0,00	0,00	24.168.700,00	5.190.907.454,59	
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	355.367.533,33	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.429.775,57	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.797.309,54	
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	49.285.833,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700.835,50	
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	496.796.310,01	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.543.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.339.977,06	
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.687.407.021,04	53.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.408.110,86	2,36	0,00	0,00	18.440.000,00	0,00	0,00	5.958.000,00	2.866.470.462,81	
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.149.784.790,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.426.122,20	48.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	1.453.262.776,83	
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.300.527.672,22	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.521.634,77	3.000,55	0,00	0,00	41.768.144,00	0,00	0,00	71.956.500,13	4.262.321.664,42	
1.3.07.01.06.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	30.288.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288.550,00	
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	77.767.758,34	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.204.900,04	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.972.658,17	
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.618.655.808,33	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.424.941,83	0,26	0,00	0,00	4.148.338.000,00	0,00	0,00	0,00	556.742.750,11	
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	672.265.264,94	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.350.497,66	0,12	0,00	0,00	134.792.500,00	0,00	0,00	0,00	671.823.267,80	
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	206.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.045.000,00	
1.3.07.01.06.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	199.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.145.000,00	
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	186.483.636,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.679.636,25	
1.3.07.01.06.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	91.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.666,84	
1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	3.933.333,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833.333,34	
1.3.07.01.06.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	3.336.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.333,68	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	
1.3.07.01.06.0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	291.666,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.666,73	
1.3.07.01.06.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	421.666,67	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.666,86	
1.3.07.01.06.0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.07.01.06.0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	2.000.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.750,00	
1.3.07.01.06.0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	1.775.800,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.000,30	
1.3.07.01.06.0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	711.666,67	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.666,91	
1.3.07.01.06.0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	2.500.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
1.3.07.01.06.0051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	304.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.937,96	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.329,39	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	KOREKSI SALDO AWAL		BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.07.01.06.0059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	151.666,67	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.666,75	
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	4.259.244.653,32	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.659.102,15	1,35	0,00	0,00	154.889.479,17	0,00	0,00	0,00	4.362.014.276,90	
1.3.07.01.06.0065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774.000,00	
1.3.07.01.06.0071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	35.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136.000,00	
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	66.201.975.867,46	38,46	5.503.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.929.188,54	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.112.408.313,43	
1.3.07.01.07.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.300.577.445,19	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.138.910,60	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.716.359,48	
1.3.07.01.07.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	290.083.688,82	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212.348,91	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.296.039,99	
1.3.07.01.07.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	4.629.103.217,67	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.619.366,97	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829.722.585,19	
1.3.07.01.07.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.653.883.812,07	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.640.043,41	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.523.853,70	
1.3.07.01.07.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	1.051.522.805,39	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.584.759,92	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.107.565,35	
1.3.07.01.07.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	2.543.905.349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.797.263,82	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.702.612,56	
1.3.07.01.07.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5.129.976.945,33	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.309.415,74	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519.286.361,23	
1.3.07.01.07.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	299.634.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.926.811,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.560.864,00	
1.3.07.01.07.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	1.662.892.994,62	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.890.269,40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.783.264,04	
1.3.07.01.07.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	316.144.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.547.199,96	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.691.453,16	
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	202.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.306.000,00	
1.3.07.01.07.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	2.824.371.661,11	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.637.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.009.400,72	
1.3.07.01.07.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	2.687.394.272,45	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.521.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.916.264,72	
1.3.07.01.07.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.710.369.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.884.983,92	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.254.539,38	
1.3.07.01.07.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	74.956.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531.734,20	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.488.000,00	
1.3.07.01.07.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	87.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100.000,00	
1.3.07.01.07.0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	132.034.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.653.841,58	
1.3.07.01.07.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.225.333.277,66	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.788.458,57	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.121.737,37	
1.3.07.01.07.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	87.413.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.259.999,76	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.673.333,03	
1.3.07.01.07.0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	3.787.446.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.591.499,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137.038.333,28	
1.3.07.01.07.0026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	8.930.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.909,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898.954,77	
1.3.07.01.07.0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	740.991.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.676.128,56	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.668.063,06	
1.3.07.01.07.0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	126.533.376,67	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.359.326,80	
1.3.07.01.07.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	766.666,67	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.666,86	

(dalam rupiah)																	
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO		KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07.01.07.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.434.406.029,27	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.534.570,62	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322.940.571,85
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	139.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.650.000,00
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	20.502.832,88	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.704,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214.537,70
1.3.07.01.08.0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	105.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920.000,00
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	106.924.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.924.776,00
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	202.654.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.938.788,64	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.592.797,56
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.137.175.256,31	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.641.392,82	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.816.647,69
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.954.427.405,81	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913.068,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.340.474,40
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	176.457.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.879.791,66
1.3.07.01.08.0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	94.928.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.442.084,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370.562,24
1.3.07.01.08.0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	587.236.998,33	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.431.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.668.776,95
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	131.546.515,65	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.886,52	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.841.402,38
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	10.469.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.749,96	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812.835,63
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	74.620.039,92	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923.631,04	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.543.673,84
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	22.829.859,38	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.993,92	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660.653,02
1.3.07.01.08.0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	466.755.054,30	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.467.406,56
1.3.07.01.08.0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	1.569.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.499,92	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.291,26
1.3.07.01.08.0031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.500,00
1.3.07.01.08.0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	693.671,88	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.634,56
1.3.07.01.08.0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	10.887.526,05	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068.038,81
1.3.07.01.08.0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	6.418.229,17	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549.479,39
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	262.938.909,26	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.166.988,05	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411.171,92	297.694.728,30
1.3.07.01.08.0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	15.088.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088.150,00
1.3.07.01.08.0043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635,42
1.3.07.01.08.0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	13.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672.500,00
1.3.07.01.08.0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8.120.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.249,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401.562,45
1.3.07.01.08.0047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	9.166.666,67	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07.01.08.0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	561.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.499,96	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.958,13
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	50.165.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.760,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.488.773,69
1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	719.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.585,08	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.689,58
1.3.07.01.08.0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	2.669.237.414,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.718.508,64	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.955.922,21
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	183.035.080,88	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.107.670,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.142.751,26
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	42.189.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.353,28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.382.006,33
1.3.07.01.08.0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Bahasa Indonesia	96.280.833,33	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520.833,56
1.3.07.01.08.0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Matematika	4.439.281.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.999,84	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.534.119,98
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/IPA Dasar	705.896.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.046.280,00
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/IPA Lanjutan	55.452.944,32	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275.034,46	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.727.980,04
1.3.07.01.08.0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/IPA Menengah	330.833.703,35	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.177.440,87
1.3.07.01.08.0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/IPA Atas	15.373.791,53	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.757,21	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990.548,64
1.3.07.01.08.0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Agama	154.631.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791.153,25
1.3.07.01.08.0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Keterampilan	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00
1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Kesenian	282.662.861,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.518.831,03	193.243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.988.449,49
1.3.07.01.08.0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/Olahraga	140.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.833,25
1.3.07.01.08.0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi/PKN	428.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.750,00
1.3.07.01.08.0085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	24.923.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.954.621,25
1.3.07.01.08.0086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.359.195.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.910,92	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.183.238,51
1.3.07.01.08.0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	23.817.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839.410,04	108.332,97	0,00	0,00	0,00	8.513.500,02	0,00	0,00	23.035.498,46
1.3.07.01.08.0092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	4.100.555,58	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.333,36	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.889,00
1.3.07.01.08.0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.999,96	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.999,91
1.3.07.01.08.0103	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment	94.260.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.260.166,00
1.3.07.01.08.0105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.3.07.01.08.0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	389.300.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.300.000,01

(dalam rupiah)																		
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIaan	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	KOREKSI SALDO AWAL		BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.07.01.08.0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	48.914.491,16	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.537.015,16	
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	196.943.523,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674.864,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.618.387,39	
1.3.07.01.08.0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,68	
1.3.07.01.08.0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	6.618.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.708,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165.850,52	
1.3.07.01.08.0127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	443.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.333,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.888,64	
1.3.07.01.08.0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
1.3.07.01.08.0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
1.3.07.01.08.0133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.963.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.636,00	
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.370.416,67	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.666,88	
1.3.07.01.08.0138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	27.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.691.000,00	
1.3.07.01.09.0014	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.999.425.633,64	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325.333,68	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.750.967,24	
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	36.957.857.103,07	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.563.938,17	11.817.236,06	0,00	0,00	765.492.767,21	0,00	0,00	634.812.612,70	42.871.298.436,56	
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	127.643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.643.400,00	
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	312.567.275,81	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998.749,56	0,51	0,00	0,00	21.361.000,00	0,00	0,00	14.729.000,00	295.476.024,98	
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.220.631.591,75	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.381.771,32	0,24	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1.237.113.363,71	
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.343.543.491,77	9.288.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.500,02	1.439.916.055,10	9,94	0,00	0,00	72.296.202,09	0,00	0,00	67.818.116,18	6.661.146.779,57	
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.043.663.812,46	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.690.825,39	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.354.638,41	
1.3.07.01.11.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151.856,00	
1.3.07.01.13.0002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	4.396.763,34	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.293,13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449.056,58	
1.3.07.01.15.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	6.840.833,34	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610.833,50	
1.3.07.01.15.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	2.390.666,63	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.267,29	
1.3.07.01.15.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
1.3.07.01.15.0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pencolong	70.254.166,69	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,28	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754.167,65	
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	83.090.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.730.000,12	
1.3.07.01.16.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	110.812.857,94	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549.033,71	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.361.891,65	

(dalam rupiah)																	
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINYA	REKLAS ANTAR SRO		KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07.01.16.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	35.087.796,84	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.467.623,16
1.3.07.01.16.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	198.552.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618.999,88	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.171.748,97
1.3.07.01.17.0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	2.101.505.952,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.142.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.648.809,60
1.3.07.01.18.0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	6.642.589.391,46	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.266.286,08	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927.855.678,30
1.3.07.01.18.0003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.307.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.022,50
1.3.07.01.18.0011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	326.805.618,08	1.067.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.653.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.526.641,46
1.3.07.01.19.0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	103.208.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.255.939,04
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	404.656.517,90	171.500.000,00	0,00	0,00	0,00	249.333,33	0,00	95.085.490,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.491.340,86
1.3.07.01.19.0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	20.977.277,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339.333,89	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316.611,39
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	118.630.772,14	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287.238,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.918.010,83
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	308.481.066.233,46	386.869.359,24	1.063.417.317,39	3.029.727,69	0,00	0,00	43.908.074,16	30.453.523.703,98	410.930.869,44	0,00	0,00	3.299.380.734,41	43.908.074,16	192.414,66	0,00	336.677.402.323,25
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	33.320.593.062,22	8,20	510.468.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.562.579,38	29.520.295,83	0,00	0,00	3.034.947.914,31	43.908.074,16	23.289,34	0,00	34.262.224.483,49
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.964.356.580,81	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.880.439,96	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.237.019,33
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	2.441.114,17	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.849,09
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	856.000.771,51	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.819.318,28	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.820.092,91
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	25.499.653.816,51	376.306.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.203.836,69	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185,39	0,00	28.564.144.258,30
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	47.161.634.285,84	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.770.759,03	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.396.405.051,67
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.244.707.489,35	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.390.732,40	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	16.438.095.475,70
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	58.727.351.223,17	2.019.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526.076.910,34	1.463.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	0,00	65.253.978.525,80
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.039.252.121,40	0,98	0,00	3.029.727,69	0,00	0,00	0,00	779.491.739,41	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,70	0,00	5.821.696.473,61
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.580.628.422,76	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.512.511,08	0,52	0,00	0,00	20.316.326,84	0,00	0,00	0,00	2.831.824.607,51
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	583.667.950,91	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.649.087,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.317.036,65
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	1.826.592.220,71	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.632.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.224.753,04
1.3.07.02.01.0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	1.307.443.018,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.572.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.015.667,01
1.3.07.02.01.0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.415.982.610,88	1,39	552.948.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	398.874.503,04	0,00	0,00	0,00	122.646.000,00	0,00	9.358,34	0,00	2.245.150.667,03
1.3.07.02.01.0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	142.119.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.217.346,68	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.336.818,93
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	871.731.167,24	8.543.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908.074,16	73.377.508,68	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.560.061,19
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.491,46
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	35.601.417.119,54	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.373.612,78	357.701.249,05	0,00	0,00	20.944.182,42	0,00	18.366,74	0,00	38.096.126.935,63

(dalam rupiah)																	
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO		KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	23.912.141,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398.724,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,82	0,00	42.274.349,89
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.522.715.916,02	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.437.994,08	17.000.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.153.909,98
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.069.039.277,41	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.125.100,84	3.167.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.996.911,27
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	15.544.080.992,35	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.046.856,68	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076.127.860,39
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	11.512.505.462,91	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.194.350,64	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311.699.815,18
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	265.198.956,60	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.699.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.898.613,60
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.594.746.970,55	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.038.824,36	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.785.796,78
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	15.489.648.460,48	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.822.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.696.470.526,06
1.3.07.02.01.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07.02.01.0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.148.600.598,52	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.027.222,32	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.627.821,36
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	74.862.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524.657,24	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.387.083,33
1.3.07.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peringatan	518.109.756,81	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.847.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.957.722,95
1.3.07.02.02.0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00
1.3.07.02.03.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	2.786.655.954,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.166.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.822.782,84
1.3.07.02.03.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	7.879.770.329,66	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.992.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.762.750,91
1.3.07.02.04.0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	749.233.460,76	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.146.263,56	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.379.725,43
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	6.134.330.080,93	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.396.486,56	2.077.880,90	0,00	0,00	100.193.310,84	0,00	0,00	0,00	6.862.455.384,93
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.410.654.251.373,36	3.797.418,80	1.983.297.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.505.352.126,40	121.502.278,92	0,00	3.717.267,16	933.962.180,62	0,00	521.827,13	289.829.983,32	1.518.797.164.488,61
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	3.136.187.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.447.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.635.456,10
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	887.543.630.444,62	3.782.735,77	1.645.393.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.008.856.178,62	0,00	0,00	0,00	890.380.000,00	0,00	390.226,26	0,00	949.310.892.930,02
1.3.07.03.01.0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	268.330.659.813,69	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429.395.757,21	0,00	0,00	0,00	43.166.734,58	0,00	0,00	0,00	290.716.888.865,63
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	711.494.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.619.256,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.113.913,93
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	23.281.099.318,69	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.230.100,23	88.943.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,28	0,00	25.439.374.058,00
1.3.07.03.01.0011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	226.888.551,92	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.585.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.474.028,47
1.3.07.03.01.0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.351.880.315,88	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.252.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.132.870,01
1.3.07.03.01.0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	256.363.178,78	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.760.388,80
1.3.07.03.01.0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	16.184.562,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068.858,12
1.3.07.03.01.0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	33.498.431.357,84	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.246.740,16	1.005.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.888.983,33	36.191.783.638,52

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO	KOREKSI SALDO AWAL		BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.07.03.01.0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya	28.724.981.131,19	3,83	337.903.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.501.886,12	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.132.386.330,23	
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	31.755.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.383.471,00	
1.3.07.03.02.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.642.838,42	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.292.027,52	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.934.867,35	
1.3.07.03.02.0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	156.348.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.617.723,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.966.056,72	
1.3.07.03.02.0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	4.302.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.507,52	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273.974,00	
1.3.07.03.02.0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	44.636.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.063.700,00	
1.3.07.03.02.0026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	354.749.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.786.774,48	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.536.211,42	
1.3.07.03.02.0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	219.532.195,36	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.970.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.502.457,51	
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	47.210.663.588,72	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.656.029,26	31.405.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,34	0,00	52.444.911.536,41	
1.3.07.03.02.0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	19.748.137.945,40	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.210.646,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127.348.593,94	
1.3.07.03.02.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	29.795.569.268,47	14.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.842.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850.426.009,56	
1.3.07.03.02.0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	366.882.190,88	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.988.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.871.009,61	
1.3.07.03.02.0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2.456.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.799,88	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.099,11	
1.3.07.03.02.0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	1.004.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.999,96	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.166,51	
1.3.07.03.02.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.660.221.634,48	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.411.474,76	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.633.109,31	
1.3.07.03.02.0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	12.991,66	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.941,76	
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.174.368.317,65	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.273.384,68	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.641.467,70	
1.3.07.03.02.0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	346.541.239,59	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.041.215,99	
1.3.07.03.02.0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.371.229.302,68	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.831.519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.060.829,89	
1.3.07.03.02.0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	7.790.149,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529.420,89	
1.3.07.03.02.0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	408.448.916,11	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.965.657,08	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.414.574,01	
1.3.07.03.02.0051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	4.944.883.959,22	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.808.113,16	82.080,29	0,00	0,00	415.446,04	0,00	24.542,82	0,00	6.450.170.003,92	
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukiman	426.639.296,46	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.059.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.698.787,78	
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	34.218.729.464,03	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.565.373,42	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.609.861,11	37.533.684.969,99	

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN						BEBAN PENYUSUTAN	PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN HIBAH-LO	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA	REKLAS ANTAR SRO		KOREKSI SALDO AWAL	BEBAN HIBAH	REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN	ASET LAIN-LAIN	REKLAS ANTAR SRO	TEMUAN PEMERIKSAAN	PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.07.03.03.0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	318.375.798,61	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.535.716,68	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.331.138,88	224.580.376,43
1.3.07.03.03.0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	96.866.850,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.417,03	0,36	0,00	3.717.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102.550.000,00
1.3.07.03.03.0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	392.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.739.424,54
1.3.07.03.03.0013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.614.197.288,89	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.590.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.788.135,96
1.3.07.03.03.0017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	32.315.724,36	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145.624,00
1.3.07.03.03.0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.363.595.136,60	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.161.999,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.757.151,32
1.3.07.03.03.0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.699.722.227,72	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.090.475,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.812.709,78
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	14.965.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.229,96	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450.215,39
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	85.833.354,08	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947.624,96	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.780.978,94
1.3.07.03.03.0043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	25.109.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.430.678,14	64.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.321,43	0,00	329.382.569,41
1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	41.805.727,52	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938.020,68	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743.748,11
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	178.326.131,71	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688.550,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014.682,61
1.3.07.03.04.0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	341.567.231,70	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.276.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.843.802,40
1.3.07.03.04.0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	212.009.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413.355,68	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.422.371,20
1.3.07.03.04.0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	369.494.363,35	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810.918,92	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.305.281,31
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1.896.208.091,95	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.295.716,78
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	113.338.964,38	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792.722,56	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.131.687,04
1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	489.172.290,48	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577.371,12	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.749.662,27
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	47.611.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.779,68	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.333.058,12
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	42.804.054,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.172,40	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182.226,70
1.3.07.03.04.0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	4.232.457.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.880.113,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.337.254,09

Penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp192.791.106.247,55 terdiri dari:

1.	Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2025	Rp	189.136.887.141,52
2.	Kekurangan Pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	204.338.354,95
3.	Kekurangan Pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	386.869.359,24
4.	Kekurangan Pencatatan Akumulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	3.797.418,80
5.	Pendapatan Hibah atas aset tetap perolehan tahun sebelumnya	Rp	3.052.217.644,86
6.	Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	3.717.267,16
7.	Penambahan Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	3.029.727,69
8.	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	249.333,33
Jumlah Penambahan		Rp	192.791.106.247,55

Pengurangan Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp16.685.356.811,63 terdiri dari:

1.	Kelebihan Pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	14.325.548,41
2.	Kelebihan Pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	410.930.869,44
3.	Kelebihan Pencatatan Akumulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	121.502.278,92
4.	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	954.600.000,00
5.	Penghapusan Aset Tetap	Rp	1.661.303.694,94
6.	Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	Rp	3.717.267,16
7.	Koreksi atas Temuan BPK	Rp	714.241,79
8.	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Rp	13.518.262.910,97
Jumlah Pengurangan		Rp	16.685.356.811,63

Reklasifikasi antar sub rincian objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Aset Ekstrakomptabel

Aset-aset yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaanya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset Ekstrakomptabel. Aset Ekstrakomptabel tetap disajikan dalam dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di Neraca Pemerintah. Aset Ekstrakomptabel untuk Peralatan dan Mesin adalah dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00.

Nilai Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp126.045.168.770,24 sebagai berikut:

Tabel 7.5.157 Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Koreksi Saldo Awal	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	Reklas ke aset lain2	Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.470.845.541,00	0,00	1.536.232.367,00	0,00	5.490.000,00	0,00	77.001.587.908,00
2	Dinas Kesehatan	7.029.527.007,95	0,00	253.917.683,00	0,00	0,00	427.059.919,25	6.856.384.771,70
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.798.580,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	155.984.580,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	58.548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.548.700,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	89.137.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.726.966,69	60.410.900,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	162.320.850,00	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	168.314.850,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.624.200,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	36.424.200,00
8	Dinas Sosial	30.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	377.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.076.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	131.945.500,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	162.945.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	303.230.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.230.666,01
12	Dinas Lingkungan Hidup	51.844.100,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	61.194.100,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654.800,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.735.726,00
15	Dinas Perhubungan	144.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.374.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.894.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.140.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.140.701,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	56.544.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.544.535,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	229.820.217,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	229.138.217,00
20	Dinas Perikanan	557.351.000,00	0,00	1.660.000,00	468.100,00	0,00	180.502.225,00	378.040.675,00
21	Dinas Pariwisata	130.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.731.700,00	90.341.500,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	502.998.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.998.664,00
23	Sekretariat Daerah	36.257.760.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.257.760.807,50
24	Sekretariat DPRD	1.254.945.961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	552.572.118,00	702.373.843,03
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.925.100,00	0,00	0,00	24.447.000,00	0,00	0,00	86.478.100,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	101.865.866,00	0,00	6.776.000,00	0,00	0,00	39.902.500,00	68.739.366,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726.000,00
29	Inspektorat	32.928.050,00	0,00	0,00	11.854.050,00	0,00	0,00	21.074.000,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	285.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.107.000,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	150.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.600.000,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	279.336.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.336.960,00
33	Kecamatan Pulau Laut	295.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.980.500,00	72.516.000,00
34	Kecamatan Serasan	101.604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.604.500,00
35	Kecamatan Subi	50.759.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.759.100,00
36	Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.053.250,00
37	Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934.500,00
38	Kecamatan Bunguran Timur Laut	96.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.240.000,00
39	Kecamatan Bunguran Selatan	101.374.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.374.450,00
40	Kecamatan Serasan Timur	70.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.030.000,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir
			Koreksi Saldo Awal	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	Reklas ke aset lain2	Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Kecamatan Suak Midai	49.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595.500,00	35.339.500,00
42	Kecamatan Bunguran Batubi	56.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.720.000,00
43	Kecamatan Pulau Tiga Barat	118.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430.500,00	66.782.500,00
44	Kecamatan Pulau Panjang	166.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.740.000,00
45	Kecamatan Pulau Seluan	14.900.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	73.286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.286.900,00
Total		125.828.185.799,18	1.020.000,00	1.844.930.055,00	40.465.150,00	5.490.000,00	1.557.501.928,94	126.070.678.779,24

Koreksi yang menambah Aset Ekstrakomtabel untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.020.000,00 merupakan koreksi kurang catat aset perolehan tahun sebelumnya di Kecamatan Subi.

Nilai Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp7.093.311.895,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.158 Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo awal 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	331.539.043,00	8.500.000,00	340.039.043,00
2	Dinas Kesehatan	191.806.400,00	0,00	191.806.400,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.990.750,00	0,00	9.990.750,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.975.000,00	0,00	18.975.000,00
5	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	5.612.714.222,07
6	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	87.649.880,00
7	Dinas Pariwisata	13.475.000,00	0,00	13.475.000,00
8	Sekretariat Daerah	316.300.200,00	0,00	316.300.200,00
9	Sekretariat DPRD	220.315.900,00	0,00	220.315.900,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	251.795.500,00	0,00	251.795.500,00
11	Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
12	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	23.850.000,00
Total		7.084.811.895,07	8.500.000,00	7.093.311.895,07

7.5.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	51.991.642.831,76	43.834.912.844,05

Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebesar Rp51.991.642.831,76 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	63.718.309.898,52
Penambahan Tahun 2025	Rp	94.624.307.219,81
Jumlah	Rp	158.342.617.118,33
Pengurangan Tahun 2025	Rp	18.074.194.015,81
Saldo Aset Lainnya	Rp	140.268.423.102,52
Akumulasi per 31 Desember 2025	Rp	(88.276.780.270,76)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	51.991.642.831,76

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.991.642.831,76. Aset Lainnya pada tahun 2025 bertambah sebesar Rp94.624.307.219,81 dan berkurang sebesar Rp18.074.194.015,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Rekapitulasi Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo per31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo per31 Desember 2025
Tagihan Jangka Panjang	8.306.289.291,06	1.479.646.687,03	2.353.157.672,48	7.432.778.305,61
Aset Tidak Berwujud	12.125.667.224,00	1.505.428.797,00	284.000.000,00	13.347.096.021,00
Aset Lain-Lain	37.193.189.383,46	91.639.231.735,78	9.343.872.343,33	119.488.548.775,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	6.093.164.000,00	0,00	6.093.164.000,00	0,00
Saldo Aset Lainnya	63.718.309.898,52	94.624.307.219,81	18.074.194.015,81	140.268.423.102,52
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(10.901.976.486,24)	(74.511.144.443,75)	(6.190.762.359,01)	(79.222.358.570,98)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.756.301.182,40)	(298.120.517,39)	(0,01)	(9.054.421.699,78)
Jumlah	44.060.032.229,88	19.815.042.258,67	11.883.431.656,79	51.991.642.831,76

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

	Tahun 2025	Tahun 2024
Tagihan Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	5.953.131.618,58	8.306.289.291,06

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Rekapitulasi Mutasi Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan 2025		Pengurangan		Saldo Akhir
		Penambahan	Koreksi Pencatatan	Koreksi Pencatatan	Pelunasan	
Tuntutan Perbendaharaan	2.195.695.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.695.936,00
Tuntutan Ganti Rugi	6.110.593.355,06	1.479.646.687,03	0,00	1.959.440.000,00	393.717.672,48	5.237.082.369,61
Jumlah	8.306.289.291,06	1.479.646.687,03	0,00	1.959.440.000,00	393.717.672,48	7.432.778.305,61

Selama tahun 2025 terdapat penambahan Tagihan Jangka Panjang Rp1.479.646.687,03 yang merupakan hasil temuan Pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan yang terpasang. Pengurangan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.959.440.000,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan temuan tahun 2006 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban yang belum ada penetapan kerugiannya. Pelunasan tagihan jangka panjang selama tahun 2025 sebesar Rp393.717.672,48. Rincian pembayaran selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Daftar Pembayaran Tagihan Jangka Panjang Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah Pembayaran
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.862.904,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	825.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.900.000,00

No	Nama SKPD	Jumlah Pembayaran
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.520.501,48
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.888.535,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.250.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.911.196,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.931.424,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.367.816,00
10	Dinas Perhubungan	10.300.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	32.500.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.181.644,00
13	Dinas Sosial	5.920.000,00
14	Kecamatan Bunguran Timur	16.790.180,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2.631.420,00
17	Sekretariat Daerah	3.945.760,00
18	Sekretariat Dprd	71.991.292,00
Jumlah		393.717.672,48

7.5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	13.347.096.021,00	12.125.667.224,00

Perhitungan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	12.125.667.224,00
Jumlah Penambahan	Rp	1.505.428.797,00
Jumlah Pengurangan	Rp	284.000.000,00
Saldo Akhir	Rp	13.347.096.021,00

Adapun Peningkatan nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.162 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tidak Terwujud
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal	Penambahan		Pengurangan		Saldo akhir
			Realisasi tahun berjalan	Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pelunasan Utang TA. 2024	Reklasifikasi Beban barang dan jasa	
1	Lisensi dan Franchise	200.000.000,00	312.870.000,00	0,00	170.000.000,00	13.000.000,00	329.870.000,00
2	Software	1.261.134.151,00	101.000.000,00	0,00	97.000.000,00	4.000.000,00	1.261.134.151,00
3	Kajian	10.664.533.073,00	0,00	1.091.558.797,00	0,00	0,00	11.756.091.870,00
JUMLAH		12.125.667.224,00	413.870.000,00	1.091.558.797,00	267.000.000,00	17.000.000,00	13.347.096.021,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.505.428.797,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	413.870.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.091.558.797,00
Jumlah	Rp	1.505.428.797,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp413.870.000,00 berupa Lisensi dan Franchise sebesar Rp312.870.000,00 dan Software sebesar Rp101.000.000,00. Realisasi Lisensi dan Franchise Dinas Komunikasi dan Informatika Rp299.870.000,00 dan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp13.000.000,00. Sedangkan realisasi *software* Rp101.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp1.091.558.797,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan kajian DED atas pekerjaan jalan yang saling terintegrasi dan belum bisa diatribusikan secara langsung ke aset induknya.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp284.000.000,00 terdiri dari pelunasan utang tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp170.000.000,00 dan Dinas Kesehatan Rp97.000.000,00, dan reklasifikasi ke beban barang jasa Dinas Kesehatan Rp4.000.000,00, dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp13.000.000,00 berupa Lisensi Zoom Meeting.

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp13.347.096.021,00 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.497.408.717,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	299.870.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	418.120.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	329.575.000,00
5	Dinas Kesehatan	930.423.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.691.509.560,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330.952.218,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.305.855.000,00
10	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	479.080.000,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00
14	Dinas Pariwisata	856.602.500,00
15	Sekretariat Daerah	185.466.651,00
Jumlah		13.347.096.021,00

7.5.3.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	119.488.548.775,91	37.193.189.383,46

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah karena kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Aset lain-lain yang dicatat oleh Pemerintah Daerah sebesar harga perolehan. Perhitungan Aset Lain-lain sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	37.193.189.383,46
Penambahan tahun 2025	Rp	91.639.231.735,78
Jumlah	Rp	128.832.421.119,24
Pengurangan tahun 2025	Rp	9.343.872.343,33

Aset Tetap per 31 Desember 2025**Rp 119.488.548.775,91**

Penambahan aset lain-lain sebesar 91.639.231.735,78 terdiri dari:

Koreksi karena Perubahan BAS	Rp	60.992.881.532,78
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	2.640.007.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	9.520.765.479,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	17.188.583.298,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.296.994.426,00
Jumlah	Rp	91.639.231.735,78

Penambahan sebesar Rp60.992.881.532,78 merupakan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain karena adanya pemutakhiran kode rekening berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya tidak terdapat kodefikasi akumulasi penyusutan aset lain-lain, sehingga aset lain-lain hanya dicatat sebesar nilai buku. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.640.007.000,00 pada Sekretariat Daerah merupakan aset Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Lapangan Olahraga, dan Tanah untuk Makam yang telah dihibahkan berdasarkan SK nomor : 100/3.3.2.222 Tahun 2025 menunggu proses penghapusan sehingga dicatat di Aset Lain-lain.

Penambahan dari reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat sebesar Rp9.520.765.479,00. Penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.188.583.298,00 termasuk aset tetap gedung dan bangunan yang akan dihibahkan namun belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga dicatat di Aset Lain-lain yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.296.994.426,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara rinci mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset lain-lain pada tabel berikut:

Tabel 7.5.164 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lain-Lain*(dalam rupiah)*

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan					Pengurangan	Saldo Akhir
			Koreksi karena Perubahan BAS	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.272.672.100,00	3.927.641.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248.480.505,00	4.951.832.900,00
2	Dinas Kesehatan	5.492.230.503,46	32.271.374.490,53	0,00	682.632.520,00	0,00	0,00	0,00	38.446.237.513,99
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	918.701.159,00	621.666.907,00	0,00	477.025.028,00	9.534.748.000,00	1.296.994.426,00	1.296.994.426,00	11.552.141.094,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8.373.324.057,00	4.070.734.346,00	0,00	0,00	6.320.137.125,00	0,00	0,00	18.764.195.528,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	0,00	28.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	38.980.000,00	0,00	0,00	0,00	38.980.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	43.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.234.000,00
8	Dinas Sosial	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.550.000,00	405.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.598.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	16.508.825,00	0,00	532.720.200,00	0,00	0,00	0,00	549.229.025,00

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan					Pengurangan	Saldo Akhir
			Koreksi karena Perubahan BAS	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Penghapusan	
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	46.398.000,00	0,00	301.400.000,00	0,00	0,00	0,00	347.798.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	380.942.600,00	1.348.408.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.350.720,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	13.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365.000,00
14	Dinas Perhubungan	408.170.800,00	9.558.635.167,00	0,00	5.711.917.850,00	474.000.000,00	0,00	0,00	16.152.723.817,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.800.000,00	37.821.200,00	0,00	150.915.448,00	0,00	0,00	0,00	219.536.648,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	113.450.000,00	0,00	0,00	0,00	103.855.450,00	0,00	0,00	217.305.450,00
18	Dinas Perikanan	2.245.124.461,00	915.986.341,67	0,00	29.800.000,00	0,00	0,00	1.836.920.275,00	1.353.990.527,67
19	Dinas Pariwisata	233.205.000,00	549.028.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.233.425,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	240.098.000,00	225.872.500,25	0,00	0,00	199.832.723,00	0,00	0,00	665.803.223,25
21	Sekretariat Daerah	0,00	2.780.799.200,00	2.640.007.000,00	0,00	0,00	0,00	246.750.000,00	5.174.056.200,00
22	Sekretariat DPRD	0,00	197.647.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.647.750,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	555.306.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	555.306.587,33	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.791.587.810,00	91.341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.509.550,00	7.845.419.810,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	41.585.583,00	0,00	0,00	0,00	41.585.583,00
26	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.533.002.000,00	0,00	0,00	168.938.500,00	0,00	0,00	0,00	1.701.940.500,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	33.270.700,00	0,00	29.670.000,00	0,00	0,00	0,00	62.940.700,00
28	Kecamatan Bunguran Timur	0,00	125.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.598.000,00
29	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	67.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.799.000,00
30	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	428.744.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.744.800,00
31	Kecamatan Pulau Laut	0,00	378.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.901.200,00
32	Kecamatan Midai	408.952.500,00	242.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.431.000,00
33	Kecamatan Serasan	129.140.000,00	838.637.250,00	0,00	0,00	556.010.000,00	0,00	0,00	1.523.787.250,00
34	Kecamatan Subi	2.361.294.393,00	568.525.868,00	0,00	853.230.750,00	0,00	0,00	0,00	3.783.051.011,00
35	Kecamatan Pulau Tiga	89.760.000,00	31.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.159.500,00
36	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	47.564.000,00	0,00	27.775.000,00	0,00	0,00	0,00	75.339.000,00
37	Kecamatan Bunguran Timur Laut	0,00	31.399.500,00	0,00	37.587.000,00	0,00	0,00	0,00	68.986.500,00
38	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00	12.742.000,00	0,00	16.164.500,00	0,00	0,00	0,00	31.906.500,00
39	Kecamatan Serasan Timur	8.950.000,00	321.698.600,00	0,00	415.924.100,00	0,00	0,00	0,00	746.572.700,00
40	Kecamatan Suak Midai	48.000.000,00	177.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.236.000,00	105.617.500,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	22.190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190.400,00
Jumlah		37.193.189.383,46	60.992.881.532,78	2.640.007.000,00	9.520.765.479,00	17.188.583.298,00	1.296.994.426,00	9.343.872.343,33	119.488.548.775,91

Pengurangan Aset Lain-lain tahun 2025 yang berasal dari penghapusan Aset Lain-lain berdasarkan SK Nomor 100.3.3.2-73 Tahun 2025 sebesar Rp1.675.000,00 Dinas Sosial dan Dinas Perikanan 501.603.775,00. Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.335.316.500,00 di Dinas Perikanan yang telah dihibahkan berdasarkan BAST Nomor: 032/37/BAST/DISKAN-BMD/I/2024 dan B/032/50/BAST-DKP/2024. Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan SK nomor 336 Tahun 2025 sebesar Rp5.248.480.505,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp37.509.550,00. Kemudian penghapusan karena perubahan status kepemilikan dari Hibah Mobil kepada Kepolisian Resor Natuna Sesuai SK Nomor 100.3.3.2-357 Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp246.750.000,00, dan Penghapusan berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-373 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Rusak Berat Dan Kedaluwarsa Milik Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebesar Rp555.306.587,33. Selain itu, terdapat penghapusan aset lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.296.994.426,00 yang

telah dihibahkan berdasarkan SK No. 100.3.3.2-324 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Jalan dan Bangunan Drainase yang dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sungai Ulu. Penghapusan aset rusak berat/usang pada Kecamatan Suak Midai Rp120.236.000,00 berdasarkan SK No. 100.3.3.2-73 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Rusak Berat Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7.5.3.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.054.421.699,78. Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) Tahun 2025 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	8.756.301.182,40
Penambahan		
Penambahan Beban Amortisasi Tahun 2025	Rp	298.120.517,39
Jumlah Penambahan	Rp	298.120.517,39
Pengurangan		
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	0,01
Jumlah Pengurangan	Rp	0,01
Saldo Akhir	Rp	9.054.421.699,78

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.054.421.699,78 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Rekapitulasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD

(dalam rupiah)		
No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	137.896.757,50
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.213.855.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.831.166,62
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
5	Sekretariat Daerah	81.537.767,99
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	223.757.916,67
7	Dinas Kesehatan	833.422.999,99
8	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	1.616.666,67
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.706.358.554,33
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	648.468.970,00
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00
12	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	320.985.333,33
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	124.916.666,67
15	Dinas Pariwisata	506.589.525,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	340.851.000,01
Jumlah		9.054.421.699,78

7.5.3.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.633.419.896,6. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2025 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	10.901.976.486,24
Penambahan		
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Rp	60.992.881.532,78
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	9.284.919.995,94
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	3.299.380.734,41
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	933.962.180,62
Jumlah	Rp	74.511.144.443,75
Pengurangan		
Penghapusan Aset Lain-lain	Rp	6.190.762.359,01
Jumlah Pengurangan	Rp	6.190.762.359,01
Saldo Akhir	Rp	79.222.358.570,98

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.222.358.570,98. Terdapat Penambahan dari Koreksi Pencatatan Saldo Awal Aset Lainnya dan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp74.511.144.443,75 dan pengurangan sebesar Rp6.190.762.359,01 yang disebabkan oleh penghapusan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan				Pengurangan - Penghapusan	Saldo Akhir
			Koreksi saldo awal	Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	Reklas Dari Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi		
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Beral/Usang	10.016.964.810,71	60.992.881.532,78	8.542.637.924,53	143.590.182,42	0,00	5.944.215.201,51	73.751.859.248,93
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	885.011.675,53	0,00	742.282.071,41	3.155.790.551,99	933.962.180,62	246.547.157,50	5.470.499.322,05
Jumlah		10.901.976.486,24	60.992.881.532,78	9.284.919.995,94	3.299.380.734,41	933.962.180,62	6.190.762.359,01	79.222.358.570,98

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya antara lain dari koreksi pencatatan saldo awal sebesar Rp60.992.881.532,78 sebagai tindak lanjut atas pemutakhiran kode rekening berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, penambahan juga berasal dari reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke kelompok Aset Lainnya, yaitu reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.284.919.995,94 reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.299.380.734,41 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp933.962.180,62. Reklasifikasi tersebut dilakukan sebagai penyesuaian berdasarkan hasil inventarisasi dan penatausahaan aset.

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berasal dari penghapusan. Diantaranya penghapusan berdasarkan surat keputusan No. 100.3.3.2.73 Tahun 2025 pada Dinas Perikanan dan Dinas Sosial sebesar Rp503.278.775,00. Berdasarkan BAST No. 032/37/BAST/DISKAN-BMD/I/2024, B/032/50/BAST-DKP/2024 terdapat penghapusan pada Dinas perikanan sebesar Rp246.547.157,50 atas penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan yang telah dihibahkan dan masih tercatat di aset lain-lain. Penghapusan sebesar

Rp3.586.869.158,56 berasal dari penghapusan Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Terdapat pengurangan senilai Rp246.750.000,00 yang berasal dari penghapusan berdasarkan SK Nomor 100.3.3.2-357 Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah atas Hibah Barang Milik Daerah berupa mobil minibus dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Kepolisian Resor Natuna. Penghapusan berdasarkan berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-373 Tahun 2025 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp555.306.587,33 atas penghapusan barang rusak berat dan kedaluwarsa milik pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat penghapusan aset lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan akumulasi penyusutan Rp933.962.180,62 yang telah dihibahkan berdasarkan SK No. 100.3.3.2-324 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Jalan dan Bangunan Drainase yang dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sungai Ulu. Penghapusan aset rusak berat/usang pada Kecamatan Suak Midai dengan akumulasi penyusutan Rp118.048.500,00 berdasarkan SK No. 100.3.3.2-73 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Rusak Berat Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.222.358.570,98 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.184.515.596,66
2	Dinas Kesehatan	34.852.160.506,19
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.509.301.583,88
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.896.883.136,27
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	28.820.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.813.333,34
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.789.666,67
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	549.229.025,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	347.798.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.608.149.020,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.365.000,00
13	Dinas Perhubungan	15.388.955.996,17
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.499.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	454.992.093,76
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	217.611.648,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	46.092.265,75
18	Dinas Perikanan	732.447.264,99
19	Dinas Pariwisata	576.863.080,56
20	Sekretariat Daerah	2.534.049.200,00
21	Sekretariat DPRD	197.647.750,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.692.056.274,44
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.783.584,05
25	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	305.067.818,33
26	Inspektorat Daerah	54.252.533,32
27	Kecamatan Bunguran Timur	125.598.000,00
28	Kecamatan Bunguran Barat	67.799.000,00
29	Kecamatan Bunguran Utara	428.744.800,00
30	Kecamatan Pulau Laut	378.901.200,00
31	Kecamatan Midai	558.130.374,99
32	Kecamatan Serasan	1.299.389.350,00
33	Kecamatan Subi	2.566.141.564,44
34	Kecamatan Pulau Tiga	54.026.500,00
35	Kecamatan Bunguran Tengah	75.189.000,00
36	Kecamatan Bunguran Timur Laut	68.986.500,00
37	Kecamatan Bunguran Selatan	28.906.500,00
38	Kecamatan Serasan Timur	739.982.137,50
39	Kecamatan Suak Midai	86.867.500,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.190.400,00
41	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.362.366,67
Jumlah		79.222.358.570,98

7.5.3.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	6.093.164.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Tata cara pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*. Rincian TDF sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Rincian Mutasi *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Awal	Penambahan TDF Tahun 2025	Pencairan TDF 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	217.153.000,00	0,00	217.153.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPH Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.799.833.000,00	0,00	5.799.833.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	64.021.000,00	0,00	64.021.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.153.000,00	0,00	12.153.000,00	0,00
Jumlah		6.093.164.000,00	00,00	6.093.164.000,00	0,00

Pada tahun 2025 tidak ada penambahan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Kabupaten Natuna. Semua Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 berdasarkan penetapan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 telah disalurkan pada tahun 2025.

7.5.3.4 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	70.261.692.189,35	187.228.674.485,12

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp70.261.692.189,35 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024	Rp	187.228.674.485,12
Penambahan Kewajiban	Rp	35.962.215.342,40
Jumlah	Rp	223.190.889.827,52
Pengurangan Kewajiban	Rp	152.929.197.638,17
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	70.261.692.189,35

Saldo Kewajiban sebesar Rp70.261.692.189,35 merupakan Pendapatan diterima dimuka dan utang Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.117.606.825,84 dengan perhitungan:

Tabel 7.5.169 Rekapitulasi Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Penambahan Kewajiban		Pengurangan Kewajiban			Saldo Akhir per 31 Desember 2025
			Penambahan	Reklasifikasi	Pelunasan	Reklasifikasi	Koreksi Pencatatan	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.208.857,00	45.481.977,00	0,00	3.208.857,00	0,00	0,00	45.481.977,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	111.136.861,32	113.069.951,13	0,00	111.136.861,32	0,00	0,00	113.069.951,13
3	Utang Belanja	187.114.328.766,80	32.822.744.427,93	3.094.627.590,00	148.544.040.234,09	3.094.627.590,00	1.433.978.062,93	69.959.054.897,71
Jumlah		187.228.674.485,12	32.981.296.356,06	3.094.627.590,00	148.658.385.952,41	3.094.627.590,00	1.433.978.062,93	70.117.606.825,84

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.117.606.825,84, di antaranya merupakan saldo Utang Belanja sebesar Rp69.959.054.897,71 atau 99,77% dari total Kewajiban Jangka Pendek. Utang belanja tersebut terdiri dari sisa Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp37.136.310.469,78 dan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp32.822.744.427,93 yang hingga akhir Tahun 2025 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Natuna. Utang belanja tersebut direncanakan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Penjelasan lebih rinci terkait Utang Belanja diungkapkan pada catatan 7.5.3.5.1.3 tentang Utang Belanja.

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	45.481.977,00	3.208.857,00

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebesar Rp45.481.977,00. Adapun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	508.502.806,00	508.502.806,00	0,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	335.597,00	335.597,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	2.951.714,00	2.951.714,00	0,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	47.779.227,00	47.779.227,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	5.617.868,00	5.617.868,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
6	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	432.721,00	432.721,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	407.084.118,00	407.084.118,00	0,00
8	Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.221.478.840,00	1.221.478.840,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	0,00	15.211.786.616,00	15.211.786.616,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	0,00	9.777.529,00	9.777.529,00	0,00
11	Iuran Jaminan Kesehatan 1% (IWP 1%)	0,00	3.234.451.942,00	3.234.451.942,00	0,00
12	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	12.485.283.427,00	12.485.283.427,00	0,00
13	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	0,00	459.253.999,00	459.253.999,00	0,00
14	PPN	2.265.406,00	15.727.182.105,88	15.688.173.628,88	41.273.883,00
15	PPH21	30.000,00	8.512.731.595,00	8.512.545.595,00	216.000,00
16	PPH22	0,00	688.560.941,03	688.560.941,03	0,00
17	PPH23	913.451,00	530.324.053,45	527.245.410,45	3.992.094,00
18	PPH Ayat 4 ayat 2	0,00	1.757.645.802,00	1.757.645.802,00	0,00
19	PPH pasal 25	0,00	112.465.860,00	112.465.860,00	0,00
Jumlah		3.208.857,00	60.923.646.761,36	60.881.373.641,36	45.481.977,00

Utang PFK diatas merupakan utang PFK atas pengelolaan Dana BOS tingkat dasar pada sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengelolaan Dana BOS per Sekolah

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Nama Sekolah	PPH 21	PPH 23	PPN	Jumlah
1	Bunguran Barat	SD Negeri 001 Sedanau	39.000,00	175.500,00	3.495.967,00	3.710.467,00
		SD Negeri 003 Sedanau	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		SD Negeri 005 Sedanau	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
		SD Negeri 006 Sedanau	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Bunguran Batubi	SD Negeri 001 Sedanau Timur	0,00	40.620,00	0,00	40.620,00
		SD Negeri 002 Batubi Jaya	0,00	0,00	172.280,00	172.280,00
3	Bunguran Tengah	SD Negeri 002 Tapau	0,00	11.900,00	409.279,00	421.179,00
		SD Negeri 001 Ranai	0,00	897.160,00	3.686.974,00	4.584.134,00
4	Bunguran Timur	SD Negeri 002 Ranai	0,00	402.200,00	3.843.456,00	4.245.656,00
		SD Negeri 011 Ranai	15.000,00	160.400,00	814.702,00	990.102,00
		SD Negeri 012 Ranai	24.000,00	231.200,00	12.465.372,00	12.720.572,00
		SMP Negeri 1 Bunguran Timur	0,00	162.800,00	2.680.629,00	2.843.429,00
5	Bunguran Timur Laut	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
6	Bunguran Utara	SD Negeri 003 Kelarik Utara	24.000,00	235.000,00	855.869,00	1.114.869,00
7	Midai	SD Negeri 002 Air Putih	0,00	0,00	395.009,00	395.009,00
8	Pulau Laut	SD Negeri 002 Tanjung Pala	45.000,00	529.726,00	6.276.066,00	6.850.792,00
		SD Negeri 003 Kadur	0,00	154.480,00	594.593,00	749.073,00
9	Pulau Seluan	SMP Negeri 1 Pulau Seluan	24.000,00	121.000,00	237.837,00	382.837,00
10	Pulau Tiga	SD Negeri 001 Tanjung Batang	0,00	173.960,00	0,00	173.960,00
		SD Negeri 006 Batu Berian	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00
11	Serasan	SD Negeri 003 Tanjung Balau	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		SMP Negeri 2 Serasan	0,00	59.928,00	0,00	59.928,00
12	Serasan Timur	SD Negeri 001 Arung Ayam	0,00	306.720,00	1.975.142,00	2.281.862,00
		SD Negeri 004 Air Ringau	45.000,00	189.540,00	3.370.654,00	3.605.194,00
13	Subi	SD Negeri 002 Meliah	0,00	0,00	54,00	54,00
Jumlah			216.000,00	3.992.094,00	41.273.883,00	45.481.977,00

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	113.069.951,13	111.136.861,32

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025 sebesar Rp113.069.951,13 merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna namun secara akuntansi akrual belum merupakan hak Pemerintah Kabupaten Natuna yang merupakan Sewa ruangan ATM dan Sewa Kantin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	No. Surat Perjanjian	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Selesai Sewa	Biaya Sewa	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025
1	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	1041/RSUD-NATUNA/IX/2024 17/MOU/2024	1/10/2024	1/10/2027	60.600.000,00	5.031.569,34	20.200.000,00	35.368.430,66
2	BPKPD (Sekretariat Daerah)	000.2.3.2/276/UM-SET/X/2024 18/MOU/2024	1/10/2024	1/10/2027	60.600.000,00	5.031.569,34	20.200.000,00	35.368.430,66
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	150/RSUD-NATUNA/X/2024 R01.Br.Ntn/582/2024	10/10/2024	10/10/2026	40.400.000,00	4.538.082,19	20.200.000,00	15.661.917,81
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	340/RSUD-Natuna/PKS/XII/2025	10/12/2025	10/12/2030	26.996.250,00	0,00	325.078,00	26.671.172,00
Jumlah					188.596.250,00	14.601.220,87	60.925.078,00	113.069.951,13

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	69.959.054.897,71	187.114.328.766,80

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp69.959.054.897,71 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	Rp 1.522.775.042,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 24.143.096.983,30
Utang Belanja Hibah	Rp 4.343.347.257,62
Utang Belanja Modal Tanah	Rp 103.850.100,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 8.180.225.077,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 16.091.219.907,53
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 15.568.139.530,26
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 6.401.000,00
Jumlah	Rp 69.959.054.897,71

Adapun saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.959.054.897,71 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.173 Rekapitulasi Mutasi Perhitungan Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal (Per 31 Des 2024)	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2025
			Utang Belanja 2025	Reklasifikasi antar Utang Belanja	Pelunasan Utang 2024	Reklasifikasi antar Utang Belanja	Koreksi	
1	Utang Belanja Pegawai	18.052.064.021,00	1.522.775.042,00	0,00	15.212.784.897,00	2.823.054.894,00	16.224.230,00	1.522.775.042,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	45.870.723.999,89	20.295.939.768,20	2.963.060.494,00	43.802.597.175,79	164.212.850,00	1.019.817.253,00	24.143.096.983,30
3	Utang Belanja Hibah	9.734.488.173,00	988.084.771,98	9.938.140,00	6.293.336.030,00	0,00	95.827.797,36	4.343.347.257,62
4	Utang Belanja Modal Tanah	1.678.368.632,68	0,00	0,00	1.574.518.532,65	0,00	0,03	103.850.100,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.095.077.672,59	4.226.290.361,00	87.860.000,00	15.943.222.956,59	77.500.000,00	208.280.000,00	8.180.225.077,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.516.178.323,99	3.298.844.960,48	0,00	20.690.257.255,69	0,00	33.546.121,25	16.091.219.907,53
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.813.749.847,78	2.484.408.524,27	33.768.956,00	43.673.645.290,50	29.859.846,00	60.282.661,29	15.568.139.530,26
8	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	598.755.000,00	6.401.000,00	0,00	598.755.000,00	0,00	0,00	6.401.000,00
9	Utang Belanja Tidak Terduga	487.923.095,87	0,00	0,00	487.923.095,87	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal (Per 31 Des 2024)	Penambahan		Pengurangan			Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2025
			Utang Belanja 2025	Reklasifikasi antar Utang Belanja	Pelunasan Utang 2024	Reklasifikasi antar Utang Belanja	Koreksi	
10	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	267.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	187.114.328.766,80	32.822.744.427,93	3.094.627.590,00	148.544.040.234,09	3.094.627.590,00	1.433.978.062,93	69.959.054.897,71

Saldo awal utang belanja Rp187.114.328.766,80. Selama tahun 2025 telah dilakukan pembayaran utang belanja Rp148.544.040.234,09. Kemudian terdapat koreksi kesalahan pencatatan utang belanja Rp1.244.410.721,76 dan Rp189.567.341,17 koreksi atas kekurangan volume pekerjaan yang terpasang berdasarkan audit oleh BPK. Reklasifikasi antar utang belanja merupakan reklasifikasi antar kode rekening utang belanja akibat perubahan bagan akun standar, dan kesalahan penganggaran kode rekening utang. Pembayaran utang selama tahun 2025 menggunakan anggaran hasil penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang berasal dari pendapatan tahun berjalan dan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam tahun sebelumnya oleh pemerintah Pusat. Sisa utang belanja tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp37.136.310.469,78.

Pada tahun 2025 terdapat penambahan utang belanja sebesar Rp32.822.744.427,93. Penambahan utang belanja timbul akibat pemerintah daerah gagal membayar tagihan belanja yang ada karena keterbatasan kas. Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah utang belanja Rp69.959.054.897,71

Penyebab belum terbayar utang tahun 2024 dan timbulnya utang baru tahun 2025 tersebut dikarenakan keterbatasan ketersediaan kas serta pendanaan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna masih menunggu disalurkannya sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam tahun 2023 untuk membayar utang tersebut Rp45.210.438.000 sesuai dengan PMK Nomor 89 Tahun 2024.

Rencana pembayaran utang belanja selama tahun 2026 akan berasal dari penghematan anggaran hasil penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026 dan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam tahun sebelumnya oleh pemerintah Pusat sebagaimana telah ditetapkan dengan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025, di mana alokasi kurang bayar Kabupaten Natuna ditetapkan Rp69.959.054.897,71.

Rincian utang belanja Per SKPD sebesar Rp69.959.054.897,71 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.174 Daftar Utang Belanja Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.469.882.711,02
2	Dinas Kesehatan	15.954.782.026,30
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.080.539.781,94
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.781.917.243,18
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	14.203.836,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.317.179.127,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.010.200,00
8	Dinas Sosial	56.825.564,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.270.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.601.569,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.550.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.312.286.205,27

No	SKPD	Jumlah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.798.397,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	111.018.585,00
15	Dinas Perhubungan	3.673.484.804,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.302.605.956,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	234.884.682,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.060.614,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	138.604.516,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	167.514.488,00
21	Dinas Perikanan	18.816.263,00
22	Dinas Pariwisata	15.050.000,00
23	Sekretariat Daerah	1.334.509.935,00
24	Sekretariat DPRD	1.898.906.693,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.623.081,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	140.534.727,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.200.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	11.432.646,00
29	Inspektorat Daerah	17.082.328,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	18.737.912,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	67.544.652,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	14.704.305,00
33	Kecamatan Pulau Laut	15.500.000,00
34	Kecamatan Midai	38.800.000,00
35	Kecamatan Serasan	69.649.846,00
36	Kecamatan Subi	24.800.000,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	22.100.000,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	3.600.000,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	18.518.000,00
40	Kecamatan Bunguran Selatan	14.400.000,00
41	Kecamatan Serasan Timur	16.800.000,00
42	Kecamatan Suak Midai	13.200.000,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	22.650.000,00
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	14.400.000,00
45	Kecamatan Pulau Seluan	9.060.000,00
46	Kecamatan Pulau Panjang	2.400.000,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.014.204,00
Jumlah		69.959.054.897,71

Sesuai rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, utang belanja akan diselesaikan pembayarannya secara keseluruhan pada tahun 2026.

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	2.875.963.790.720,30	2.741.115.230.870,65

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.875.963.790.720,30 dengan perhitungan:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2024)	Rp	2.741.115.230.870,65
Penambahan Selama Tahun 2025	Rp	1.058.854.557.637,47
Jumlah	Rp	3.799.969.788.508,12
Pengurangan Selama Tahun 2025	Rp	924.005.997.787,82
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.875.963.790.720,30

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.058.854.557.637,47	927.480.702.987,15

Pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp1.058.854.557.637,47 atau terjadi kenaikan sebesar 14,16% dibanding tahun 2024. Rincian Pendapatan-LO tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.175 Rekapitulasi Pendapatan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	95.654.809.483,71	82.908.917.614,24	15,37
2	Pendapatan Transfer – LO	762.601.171.030,00	833.573.927.023,00	(8,51)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	200.598.577.123,76	10.997.858.349,91	1.723,98
Jumlah		1.058.854.557.637,47	927.480.702.987,15	14,16

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp95.654.809.483,71 terjadi kenaikan 15,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.176 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Daerah-LO	53.826.777.253,75	38.619.009.516,74	39,38
2	Retribusi Daerah-LO	32.496.903.944,00	32.778.155.802,21	(0,86)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.601.371.891,00	5.387.416.960,00	22,53
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.729.756.394,96	6.124.335.335,29	(55,43)
Jumlah		95.654.809.483,71	82.908.917.614,24	15,37

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp53.826.777.253,75, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.177 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	0,00	812.018.382,00	(100,00)
2	Pajak Restoran-LO	0,00	2.646.281.145,36	(100,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	44.439.700,00	(100,00)
4	Pajak Reklame-LO	120.902.000,00	137.077.750,00	(11,80)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	6.887.728.615,00	(100,00)
6	Pajak Air Tanah-LO	0,00	200.000,00	(100,00)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	32.906.409.334,00	23.835.757.984,00	38,05
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	3.891.858.550,00	3.863.052.294,38	0,75
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	707.739.565,75	392.453.646,00	80,34
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	14.416.706.633,00	0,00	100,00
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.294.988.171,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	488.173.000,00	0,00	100,00
Jumlah		53.826.777.253,75	38.619.009.516,74	39,38

Kenaikan Pendapatan Pajak ini dikarenakan naiknya penerimaan pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO, sehingga Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Natuna mengalami kenaikan sebesar 39,38% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pajak Hotel-LO tahun 2025 dicatat dan dianggarkan di rekening PBJT-Hotel-LO pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

b) Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pajak Restoran-LO tahun 2025 dicatat dan dianggarkan di rekening PBJT-Restoran-LO pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

c) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pajak Restoran-LO tahun 2025 dicatat dan dianggarkan di rekening PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO.

d) Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO tahun 2025 sebesar Rp120.902.000,00 mengalami penurunan sebesar (11,80)% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp137.077.750,00. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak reklame kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha dan kurang insentifnya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.178 Rincian Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	95.647.000,00	102.033.000,00	(6,26)
2	Pajak Reklame Kain-LO	23.977.500,00	31.884.250,00	(24,80)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	1.277.500,00	1.277.500,00	0,00
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	0,00	1.883.000,00	100,00
Jumlah		120.902.000,00	137.077.750,00	(11,80)

e) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2025 dicatat dan dianggarkan di rekening PBJT-Tenaga Listrik-LO pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

f) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2024.

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2025 sebesar Rp32.906.409.334,00 mengalami kenaikan sebesar 38,05% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp23.835.757.984,00. Penambahan ini disebabkan karena adanya Pajak Granit/Andesit-LO sehingga terjadi peningkatan pada rekening Pajak Pasir Kuarsa-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.179 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Granit/Andesit-LO	70.036.960,00	0,00	100,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	20.517.872,00	40.750.580,00	(49,65)
3	Pajak Pasir Kuarsa-LO	32.703.640.000,00	23.378.300.000,00	39,89
4	Pajak Tanah Liat-LO	218.400,00	38.375.538,00	(99,43)
5	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	111.996.102,00	378.331.866,00	(70,40)
Jumlah		32.906.409.334,00	23.835.757.984,00	38,05

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2025 sebesar Rp3.891.858.550,00 mengalami kenaikan sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.863.052.294,38. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Natuna sudah optimalnya dalam penagihan pajak daerah.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Tabel 7.5.180 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	440.499.482,00	317.925.875,00	38,55
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	267.240.083,75	74.527.771,00	258,58
Jumlah		707.739.565,75	392.453.646,00	80,34

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2025 sebesar Rp707.739.565,75 mengalami kenaikan sebesar 80,34% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp392.453.646,00.

j) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Tabel 7.5.181 Rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	1.700.704.518,00	0,00	100,00
2	PBJT-Tenaga Listrik-LO	12.169.665.403,00	0,00	100,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	504.369.712,00	0,00	100,00
4	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	41.967.000,00	0,00	100,00
Jumlah		14.416.706.633,00	0,00	100,00

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO tahun 2025 sebesar Rp14.416.706.633,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 dicatat dalam komponen Pendapatan Pajak Daerah-LO.

- k) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp1.294.988.171,00 terjadi kenaikan sebesar 100,00% dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp488.173.000,00 terjadi kenaikan sebesar 100,00% dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan antara Pajak daerah – LO dan Pajak Daerah LRA sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	53.826.777.253,75	59.975.027.423,00	(6.148.250.169,25)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 sebesar Rp(6.148.250.169,25) merupakan selisih antara pendapatan Pajak Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.182 Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Piutang Pajak Reklame	1.264.000,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.957.706.319,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.716.424,00
5	Kekurangan Setoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Hasil Pemeriksaan BPK RI	283.450.976
6	Jumlah penambahan (2 s.d 5)	3.248.137.719,00
7	Pengurangan	
8	Piutang Pajak Reklame	833.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.098.125.000,00
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	292.170.490,00
11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.259.398,25
12	Jumlah Pengurangan (7 s.d 11)	9.396.387.888,25
13	Jumlah (6-12)	(6.148.250.169,25)

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp32.496.903.944,00 terjadi penurunan sebesar (0,86)% dari tahun sebelumnya Rp32.778.155.802,21, dengan rincian:

Tabel 7.5.183 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	32.039.959.944,00	32.566.455.313,67	(1,62)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	456.944.000,00	94.736.387,54	382,33
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	116.964.101,00	(100,00)
Jumlah		32.496.903.944,00	32.778.155.802,21	(0,86)

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a) **Retribusi Jasa Umum-LO**

Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2025 sebesar Rp32.039.959.944,00 terjadi penurunan sebesar (1,62)% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 7.5.184 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	31.855.663.944,00	32.183.829.639,67	(1,02)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	169.046.000,00	126.439.500,00	33,70
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	238.786.174,00	100,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	15.250.000,00	17.400.000,00	(12,36)
Jumlah		32.039.959.944,00	32.566.455.313,67	(1,62)

b) **Retribusi Jasa Usaha-LO**

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2025 sebesar Rp456.944.000,00 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 382,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO.

Tabel 7.5.185 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	308.462.000,00	0,00	100,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	20.350.000,00	7.260.000,00	180,30
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	32.800.000,00	23.500.000,00	39,57
4	Retribusi Penyeberangan di Air-LO	34.732.000,00	33.264.000,00	4,41
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	60.600.000,00	30.712.387,54	97,31
Jumlah		456.944.000,00	94.736.387,54	382,33

c) **Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan (100,00)% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp116.964.101,00 dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan antara Retribusi – LO dan Retribusi LRA sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	<u>LO (Rp)</u>	<u>LRA (Rp)</u>	<u>Selisih (Rp)</u>
	32.496.903.944,00	34.641.594.142,00	(2.144.690.198,00)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA Tahun 2025 sebesar Rp(2.144.690.198,00) merupakan selisih antara pendapatan Retribusi Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.186 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah LO- LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.237.173.956,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya yang menjadi Pendapatan retribusi Sewa ATM BRK Tahun 2024	55.568.430,66
4	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TA. 2024 setelah hasil verifikasi BPJS	82.908.400,00
5	Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Sesuai Ketentuan sesuai hasil pemeriksaan BPK	16.158.000,00
6	Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	55.568.430,66
7	Jumlah penambahan (2 s.d 6)	6.447.377.217,32
8	Pengurangan	
9	Pengurangan	
10	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.415.672.154,00
11	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.550.000,00
12	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.538.082,19
13	Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	82.908.400,00
14	Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Tahun Berjalan yang direklas ke Pendapatan diterima dimuka	86.398.779,13
15	Jumlah Pengurangan (10 s.d 14)	8.592.067.415,32
16	Jumlah (7-15)	(2.144.690.198,00)

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar tahun 2025 sebesar Rp6.601.371.891,00 merupakan dividen hasil dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) /NK.57/KPS.OPS/DIVIDEN PT BRKS THN BUKU 2024, terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 22,53% dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.387.416.960,00.

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

7.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp2.729.756.394,96 terdiri dari:

Tabel 7.5.187 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	1.079.316.280,00	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	346.706.000,00	45.399.500,00	663,68

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
3	Jasa Giro-LO	476.092.143,67	1.431.168.107,26	(66,73)
4	Pendapatan Bunga-LO	29.926.990,54	1.306.195.871,41	(97,71)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	165.284.326,67	356.279.625,60	(53,61)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.000.000,00	0,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	45.810.551,29	1.668.043.384,00	(97,25)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	158.220.577,00	52.648.954,00	200,52
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.470.570.319,90	153.538.290,00	857,79
10	Pendapatan dari BLUD-LO	35.145.485,89	31.745.323,02	10,71
Jumlah		2.729.756.394,96	6.124.335.335,29	(55,43)

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar (100,00)% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.079.316.280,00, hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak terjadi penjualan atas Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang.
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp346.706.000,00, yang berasal dari Pengelolaan Sewa Barang Milik Daerah (kantin sekolah) dan Pendapatan Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah di puak tahun 2024 dan 2025 yang belum ditetapkan dan dipungut. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 663,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp45.399.500,00.
- Jasa Giro-LO
Penerimaan Jasa Giro-LO tahun 2025 sebesar Rp476.092.143,67 terjadi penurunan sebesar (66,73)% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.431.168.107,26 terdiri dari:

Tabel 7.5.188 Rincian Penerimaan Jasa Giro-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	413.053.843,00	988.144.586,00	100,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	37.104.778,67	67.892.950,67	(45,35)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	308,00	357.662.472,59	100,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	25.933.214,00	17.468.098,00	48,46
Jumlah		476.092.143,67	1.431.168.107,26	(66,73)

- Pendapatan Bunga-LO
Penerimaan Pendapatan Bunga-LO tahun 2025 sebesar Rp29.926.990,54 yang berasal bagi hasil deposito atas Penempatan Uang di Lembaga Keuangan. Namun terjadi penurunan yang cukup besar senilai (66,73)% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.306.195.871,41.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp165.284.326,67, terjadi penurunan sebesar (53,61)% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp356.279.625,60

- f) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2025 sebesar Rp2.000.00,00 terjadi kenaikan sebesar 100,00% dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp45.810.551,29 terjadi penurunan sebesar (97,25)% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.668.043.384,00
- h) Pendapatan Denda Pajak-LO
Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp158.220.577,00 terjadi kenaikan sebesar 200,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Denda Pajak-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.189 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	462.607,00	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	5.334.636,00	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	76.731,00	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	186.190,00	109.535,00	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	125.683.300,00	56.635,00	221.818,07
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	22.780.297,00	45.934.395,00	(50,41)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.262.256,00	674.415,00	87,16
8	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	6.542.934,00	0,00	100,00
9	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.765.600,00	0,00	100,00
Jumlah		158.220.577,00	52.648.954,00	200,52

- i) Pendapatan Dari Pengembalian-LO
Pendapatan Dari Pengembalian-LO sebesar Rp1.470.570.319,90 terjadi kenaikan sebesar 857,79% terdiri dari:

Tabel 7.5.190 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.507.371,52	14,00	10.766.839,43
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	161.718,84	5.236.777,00	(96,91)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO	294.000,50	0,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	776.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	929.800,00	138.808.812,00	(99,33)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	291.000,00	0,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	1.394.187.982,00	0,00	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	12.334.500,00	4.851,00	254.167,16
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO	0,00	9.487.836,00	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-LO	521.441,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	375.750,00	0,00	100,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	450.000,00	0,00	100,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	22.193.606,00	0,00	100,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	22.468.000,00	0,00	100,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-LO	10.569.150,04	0,00	100,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO	3.510.000,00	0,00	100,00
Jumlah		1.470.570.319,90	153.538.290,00	857,79

- j) Pendapatan BLUD-LO
Pendapatan BLUD-LO tahun 2025 sebesar Rp35.145.485,89 terjadi kenaikan sebesar 10,71%, dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp31.745.323,02, terdiri dari :

Tabel 7.5.191 Rincian Pendapatan BLUD-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	325.078,00	0,00	100,00
2	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	34.820.407,89	31.745.323,02	9,69
Jumlah		35.145.485,89	31.745.323,02	10,71

Terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang Sah – LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	2.729.756.394,96	8.594.497.573,13	(5.864.741.178,17)

Selisih sebesar Rp(5.864.741.178,17) antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.192 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Tahun Berjalan yang direklas ke Pendapatan diterima dimuka	86.398.779,13
3	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan LO Tahun 2025	111.136.861,32
4	Potongan Penyelesaian Dana Bergulir melalui KPKNL yang langsung dipotong Oleh KPKN sebagai PNBP	2.467.262,00
5	Pendapatan Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah di puak tahun 2024 dan 2025 yang belum ditetapkan dan dipungut	306.600.000,00
6	Jumlah penambahan (2 s.d 5)	506.602.902,45
7	Pengurangan	
8	Piutang Hasil Sewa BMD	11.603.000,00
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	5.500.000,00
10	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	79.151.822,00

No	Uraian	Jumlah
11	Pelunasan TGR	393.717.672,48
12	Pelunasan Bagian Lancar TGR	5.657.164.773,69
13	Reklasifikasi dari Pendapatan LO Tahun 2025 menjadi Pendapatan diterima dimuka	113.069.951,13
14	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya yang menjadi Pendapatan retribusi Sewa ATM BRK Tahun 2025	55.568.430,66
15	Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	55.568.430,66
16	Jumlah Pengurangan (8 s.d 15)	6.371.344.080,62
17	Jumlah (6-16)	(5.864.741.178,17)

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2025 sebesar Rp762.601.171.030,00 mengalami penurunan sebesar (8,51)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp833.573.927.023,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.193 Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	718.955.672.782,00	769.508.147.239,00	(6,57)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	43.645.498.248,00	64.065.779.784,00	(31,87)
Jumlah		762.601.171.030,00	833.573.927.023,00	(8,51)

Rincian masing-masing jenis Penerimaan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat -LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada tahun 2025 sebesar Rp705.045.779.782,00 atau terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar (7,69)% terdiri dari:

Tabel 7.5.194 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	116.736.592.200,00	78.131.692.910,00	49,41
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	92.869.372.000,00	124.947.917.000,00	(25,67)
3	Dana Alokasi Umum	406.043.734.973,00	427.577.646.211,00	(5,04)
4	Dana Alokasi Khusus	89.396.080.609,00	133.151.042.118,00	(32,86)
Jumlah		705.045.779.782,00	763.808.298.239,00	(7,69)

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp116.736.592.200,00 terjadi kenaikan sebesar 49,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp78.131.692.910,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.195 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	96.480.089.700,00	65.848.881.000,00	46,52
2	DBH PPh Pasal 21-LO	19.295.029.300,00	11.573.260.000,00	66,72
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	939.982.200,00	699.229.000,00	34,43
4	DBH CHT-LO	21.491.000,00	10.322.910,00	108,19
Jumlah		116.736.592.200,00	78.131.692.910,00	49,41

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp92.869.372.000,00, mengalami penurunan sebesar (25,67)% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp124.947.917.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.196 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	10.565.146.000,00	32.167.733.000,00	(67,16)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	75.720.618.000,00	85.076.819.000,00	(11,00)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	468.417.000,00	78.599.000,00	495,96
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	660.381.000,00	339.946.000,00	94,26
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	52.003.000,00	24.372.000,00	113,37
6	DBH SDA Perikanan-LO	5.402.807.000,00	7.260.448.000,00	(25,59)
Jumlah		92.869.372.000,00	124.947.917.000,00	(25,67)

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO tahun 2025 sebesar Rp406.043.734.973,00 mengalami kenaikan sebesar 4,94% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp427.577.646.211,00. Rincian Dana Alokasi Umum-LO dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.197 Rincian Dana Alokasi Umum-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Alokasi Umum – Block Grant	331.634.580.469,00	328.763.204.000,00	0,87
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	11.992.223.504,00	6.265.809.211,00	91,39
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	39.948.786.000,00	28.514.202.000,00	40,10
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	21.068.145.000,00	26.444.493.000,00	(20,33)
6	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	36.189.938.000,00	(100,00)
Jumlah		406.043.734.973,00	427.577.646.211,00	(5,04)

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2025 sebesar Rp89.396.080.609,00 dengan rincian :

Tabel 7.5.198 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	18.847.792.362,00	73.848.309.559,00	(74,48)
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	70.548.288.247,00	59.302.732.559,00	18,96
Jumlah		89.396.080.609,00	133.151.042.118,00	(32,86)

Dibanding dengan tahun 2024 terdapat penurunan dari Dana Alokasi Khusus-LO sebesar (32,86)% Dana Alokasi Khusus-LO terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.199 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	899.467.488,00	563.797.250,00	59,54
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	311.834.250,00	3.143.237.709,00	(90,08)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	2.344.098.943,00	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	3.956.418.000,00	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	4.733.322.465,00	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	1.047.276.321,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	30.202.110.858,00	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.477.790.000,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	0,00	2.243.749.999,00	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	0,00	1.657.542.093,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	10.093.283.571,00	20.108.717.354,00	(49,81)
12	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	0,00	2.370.248.567,00	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	417.422.622,00	0,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	1.140.386.199,00	0,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	5.985.398.232,00	0,00	100,00
Jumlah		18.847.792.362,00	73.848.309.559,00	(74,48)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.200 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	14.991.326.772,00	15.188.441.810,00	(1,30)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	663.750.000,00	685.000.000,00	(3,10)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	36.775.926.200,00	20.685.055.000,00	77,79
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	455.000.000,00	1.717.500.000,00	(73,51)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.611.996.600,00	1.558.896.000,00	3,41
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	2.264.801.090,00	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	0,00	310.110.000,00	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB-LO	6.425.037.588,00	2.642.453.189,00	143,15
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	0,00	996.911.300,00	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	459.438.750,00	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.226.905,00	413.866.900,00	(1,36)
12	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.305.722.481,00	(100,00)
13	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	314.365.080,00	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	0,00	2.373.230.890,00	(100,00)
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	4.277.064.360,00	8.386.940.069,00	(49,00)
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	2.353.387.200,00	0,00	100,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.120.502.622,00	0,00	100,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	30.000.000,00	0,00	100,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	299.480.000,00	0,00	100,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	81.870.000,00	0,00	100,00
21	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	54.720.000,00	0,00	100,00
Jumlah		70.548.288.247,00	59.302.732.559,00	18,96

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	705.045.779.782,00	711.138.943.782,00	(6.093.164.000,00)

Selisih sebesar Rp(6.093.164.000,00) antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.201 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan TDF Berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 yang diakui sebagai pendapatan Tahun 2025	6.093.164.000,00
3	Jumlah Penambahan	6.093.164.000,00

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Dana transfer dari Pemerintah Pusat selain Dana Perimbangan yang merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

7.5.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal atas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp13.909.893.000,00, mengalami kenaikan sebesar 144,04% .

Tidak terdapat selisih Dana Insentif Fiskal-LO dengan Insentif Fiskal -LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Dana Insentif Fiskal-LO dengan Insentif Fiskal -LRA.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2025 sebesar Rp43.645.498.248,00, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.202 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	43.307.498.248,00	63.505.779.784,00	(31,81)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	338.000.000,00	560.000.000,00	(39,64)
	Jumlah	43.645.498.248,00	64.065.779.784,00	(31,87)

7.5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp43.645.498.248,00 terdiri dari:

**Tabel 7.5.203 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer
Pemerintah Provinsi-LO**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	2.214.217.760,00	13.436.883.493,00	(83,52)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	1.080.137.357,00	11.601.112.575,00	(90,69)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	27.702.867.173,00	27.751.232.254,00	(0,17)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.186.325.786,00	50.854.038,00	2.232,81
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	11.123.950.172,00	10.665.697.424,00	4,30
Jumlah		43.307.498.248,00	63.505.779.784,00	(31,81)

7.5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp338.000.000,00, mengalami penurunan sebesar (39,64)% dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp560.000.000,00.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	43.645.498.248,00	56.549.110.525,00	(12.903.612.277,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp(12.903.612.278,00). Selisih tersebut merupakan pengurangan antara piutang transfer 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp17.546.888.639,00 dengan penambahan piutang transfer tahun 2025 sebesar Rp4.643.276.362,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp200.598.577.123,76 terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar 1.723,98% yang merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.204 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	193.771.907.486,76	4.106.956.110,91	4.618,14
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.826.669.637,00	6.890.902.239,00	(0,93)
Jumlah		200.598.577.123,76	10.997.858.349,91	1.723,98

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut :

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp193.771.907.486,76 terdiri dari:

Tabel 7.5.205 Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	190.048.617.292,55	102.757.200,00	184.849,20
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	3.723.290.194,21	2.200.934.932,59	69,17
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	1.803.263.978,32	(100,00)
Jumlah		193.771.907.486,76	4.106.956.110,91	4.618,14

Pendapatan Hibah -LO pada tahun 2025 sebesar Rp193.771.907.486,76 terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar 4.618,14%. Hal ini disebabkan karena besarnya pendapatan hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan koreksi kurang catat aset tetap jalan, jaringan dan irigasi-jalan kabupaten yang berasal dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel 7.5.206 Rincian Pendapatan Hibah-LO Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Sumber Hibah	Barang Hibah	Nilai
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO				
1	Badan Penanggulangan Bencana daerah	Kementerian PUPR	Geobag Mini	24.690.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana daerah	BPPD Provinsi Kepulauan Riau	Paket Sembako	17.846.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	319.899.999,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tanah dan Bangunan	2.469.990.592,67
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian PUPR	Jembatan Lainnya	5.141.609.824,07
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEMENDIKDASMEN	Bangunan gedung dan peralatan mesin (Revitalisasi)	9.302.990.915,35
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEMENDIKDASMEN	peralatan dan mesin	3.643.304.000,00
8	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Kendaraan Bermotor Penumpang	692.089.600,00
9	Dinas Kesehatan	kementerian Kesehatan	Alat Kedokteran Umum	324.938.955,73
10	Dinas Kesehatan	kementerian Kesehatan	Obat-Obatan	59.928.800,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian PUPR	Jalan Kabupaten	168.051.328.605,73
Jumlah				190.048.617.292,55
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO				
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kepri	Bahan Cetak	111.772.000,00
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kepri	Obat-obatan	1.926.137.484,27
3	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kepri	Bahan Cetak	740.000,00
4	Dinas Perhubungan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.560.231.639,94
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPKB	BKKBN Perwakilan Prov. Kepri	Obat-Obatan Lainnya	84.242.210,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Obat-Obatan Lainnya	40.166.860,00
Jumlah				3.723.290.194,21

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Hibah LRA sebagai berikut:

Pendapatan Hibah	<u>LO (Rp)</u>	<u>LRA (Rp)</u>	<u>Selisih (Rp)</u>
	193.771.907.486,76	0,00	193.771.907.486,76

Selisih sebesar Rp193.771.907.486,76 antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA merupakan pendapatan hibah Aset Tetap dan Barang Pakai Habis yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.207 Selisih Pendapatan Hibah LO-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penerimaan Hibah Barang Persediaan dari Dirjen Sumber Daya Air BWSS IV Batam-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24.690.000,00
3	Penerimaan hibah tanah dan bangunan dari badan Riset dan Inovasi Nasional	2.469.990.592,67
4	Penerimaan Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Kepulauan Riau berupa barang persediaan logistik bantuan korban bencana	17.846.000,00
5	Penerimaan Hibah dari BNPB dengan BAST NO. 292/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025 TA.2025	319.899.999,00
6	Penerimaan Hibah Persediaan Obat-obatan lainnya DARI Perwakilan BKKBN KEPRI dengan Nomor Bast: 0797./SP.03.06/J30/2025	84.242.210,00
7	Penerimaan pendapatan hibah blangko KTP dan Ribbon dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025	111.772.000,00
8	Penerimaan Pendapatan Hibah Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dari Provinsi Kepulauan Riau	1.560.231.639,94
9	Penerimaan Hibah Bahan Cetak Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	740.000,00
10	Penerimaan Hibah Alat kedokteran umum dari KEMENKES RI SK NOMOR: 100.3.3.2- TAHUN 2025	324.938.955,73
11	Penerimaan Hibah Bantuan Revitalisasi TA. 2025	9.302.990.915,35
12	Penerimaan Hibah Bantuan KEMENDIKDASMAN TA. 2025	3.643.304.000,00
13	Penerimaan Hibah Obat dari Kementerian Kesehatan Periode Tahun 2025	59.928.800,00
14	Penerimaan Hibah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2025	1.926.137.484,27
15	Penerimaan Hibah BMN dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berdasarkan perjanjian hibah	692.089.600,00
16	Penerimaan Hibah BMN dari Kementerian PUPR	5.141.609.824,07
17	Koreksi Kurang Catat Penerimaan Hibah BMN Jalan Kabupaten dari Kementerian PUPR	168.051.328.605,73
18	Koreksi kurang catat persediaan obat-obatan lainnya yang berasal dari hibah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	40.166.860,00
19	Jumlah penambahan (2 s.d 16)	193.771.907.486,76
20	Jumlah Perbedaan	193.771.907.486,76

7.5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2025 sebesar Rp6.826.669.637,00. Dibanding dengan tahun 2024, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO turun sebesar 0,93%. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2025 hanya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO, dengan rincian per puskesmas sebagai berikut :

Tidak terdapat perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA sebagai berikut:

**Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan**

LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
6.826.669.637,00	6.826.669.637,00	0,00

7.5.4.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	925.267.490.069,91	1.140.191.320.781,91

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebesar Rp925.267.490.069,91 terjadi penurunan sebesar (18,85)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.140.191.320.781,91. Rincian beban tahun 2025 merupakan pengakuan Beban Operasi tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.208 Rekapitulasi Beban-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	436.138.452.361,00	498.272.803.594,62	(12,47)
2	Beban Barang dan Jasa	228.732.442.308,23	364.578.574.725,11	(37,26)
3	Beban Subsidi	29.375.000,00	0,00	100,00
4	Beban Hibah	4.701.850.681,38	34.575.910.749,00	(86,40)
5	Beban Bantuan Sosial	1.614.530.668,00	7.874.796.106,65	(79,50)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	189.435.007.658,91	165.532.926.064,52	14,44
7	Beban Transfer	62.643.684.997,00	65.620.961.400,00	(4,54)
8	Beban Penyisihan Piutang	1.972.146.395,39	3.735.348.142,01	(47,20)
Jumlah		925.267.490.069,91	1.140.191.320.781,91	(18,85)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp436.138.452.361,00 mengalami penurunan sebesar (12,47)% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.209 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	261.095.318.045,00	248.414.682.205,00	5,10
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	165.822.761.383,00	195.299.301.386,00	(15,09)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	45.717.128.647,62	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.291.693.426,00	7.509.937.692,00	(2,91)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.293.959.507,00	402.771.664,00	221,26
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.200.000,00	554.000.000,00	8,52
7	Beban Pegawai BLUD	33.520.000,00	374.982.000,00	(91,06)
Jumlah		436.138.452.361,00	498.272.803.594,62	(12,47)

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp436.138.452.361,00 terdiri dari:

a) **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 sebesar Rp261.095.318.045,00 naik 5,10% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.210 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	192.480.638.057,00	179.907.585.238,00	6,99
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.338.380.955,00	16.441.792.144,00	5,45
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.882.390.000,00	5.239.283.000,00	(6,81)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	9.573.887.000,00	9.223.353.000,00	3,80
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.014.553.030,00	4.298.160.000,00	16,67
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.982.444.720,00	10.380.557.399,00	5,80
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.014.556.784,00	7.219.260.193,00	(30,54)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.826.416,00	2.757.547,00	2,50
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.209.690.733,00	14.221.070.308,00	(0,08)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	398.816.792,00	370.216.183,00	7,73
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.197.133.558,00	1.110.647.193,00	7,79
Jumlah		261.095.318.045,00	248.414.682.205,00	5,10

b) **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 sebesar Rp165.822.761.383,00 terjadi penurunan sebesar (15,09)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.211 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.502.522.258,00	61.102.064.705,00	(36,99)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.251.472.286,00	5.173.151.706,00	(37,15)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.165.996.350,00	6.613.837.884,00	(37,01)
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.374.375.962,00	3.136.157.685,00	(24,29)
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	74.691.683.964,00	119.274.089.406,00	(37,38)
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.836.710.563,00	0,00	100,00
Jumlah		165.822.761.383,00	195.299.301.386,00	(15,09)

c) **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dari tahun sebelumnya Rp45.717.128.647,62, dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

d) **Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 sebesar Rp7.291.693.426,00 mengalami penurunan sebesar (2,91)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.212 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	449.820.000,00	0,33
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	54.521.600,00	58.514.000,00	(6,82)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	76.851.600,00	75.475.800,00	1,82
4	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.535.000,00	0,38
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.486,00	652.238.998,00	0,33

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	64.127.700,00	51.734.550,00	23,96
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.293.450,00	5.572.350,00	(22,95)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	109.926.226,00	57.464.526,00	91,29
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	143.630.364,00	135.297.468,00	6,16
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000,00	2.875.500.000,00	(4,23)
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	169.785.000,00	(100,00)
Jumlah		7.291.693.426,00	7.509.937.692,00	(2,91)

- e) **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**
 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tahun 2025 sebesar Rp1.293.959.507,00 terjadi kenaikan sebesar 221,26% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.213 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	54.600.000,00	(7,14)
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.844.000,00	7.644.000,00	(23,55)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	98.280.000,00	(7,14)
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.141.820,00	7.531.680,00	(31,73)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	897.051,00	210.149,00	326,86
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.060,00	1.000,00	6,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.458.080,00	5.503.680,00	(0,83)
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.134.208.216,00	228.551.875,00	396,26
Jumlah		1.293.959.507,00	402.771.664,00	221,26

- f) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**
 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2025 sebesar Rp601.200.000,00 terjadi kenaikan sebesar 8,52% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.214 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	180.600.000,00	11,63
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	399.600.000,00	373.400.000,00	7,02
Jumlah		601.200.000,00	554.000.000,00	8,52

- g) **Beban Pegawai BLUD**
 Beban Pegawai BLUD tahun 2025 sebesar Rp33.520.000,00 terjadi penurunan sebesar 91,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp374.982.000,00.

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai – LO dan Belanja Pegawai LRA sebagai berikut:

Beban Pegawai- Belanja Pegawai	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	436.138.452.361,00	449.927.819.282,00	(13.789.366.921,00)

Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA tahun 2025 sebesar Rp(13.789.366.921,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.215 Selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	1.522.775.042,00
3	Jumlah Penambahan	1.522.775.042,00
4	Pengurangan	
5	Pelunasan Utang Tahun 2024 melalui Belanja Tahun Berjalan	15.212.784.897,00
6	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	99.357.066,00
7	Jumlah Pengurangan	15.312.141.963,00
8	Jumlah Perbedaan (3-7)	(13.789.366.921,00)

7.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Pengakuan Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp228.732.442.308,23 terjadi penurunan (37,26) % dari tahun sebelumnya Rp364.578.574.725,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.216 Rekapitulasi Beban Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Barang	60.466.014.358,70	107.898.959.455,84	(43,96)
2	Beban Jasa	109.462.966.094,63	142.816.405.133,71	(23,35)
3	Beban Pemeliharaan	4.621.370.492,15	17.795.426.792,81	(74,03)
4	Beban Perjalanan Dinas	19.328.233.683,00	66.343.024.923,00	(70,87)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.232.376.691,00	6.271.922.292,00	(16,57)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	5.602.707.561,00	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	4.800.414.163,00	64.100.000,00	7.388,95
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	24.821.066.825,75	17.786.028.566,75	39,55
	Jumlah	228.732.442.308,23	364.578.574.725,11	(37,26)

a) Beban Barang

Beban Barang tahun 2025 sebesar Rp60.466.014.358,70 mengalami penurunan sebesar (43,96)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.217 Rincian Beban Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	624.218.000,00	1.505.626.613,00	(58,54)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	192.541.360,00	521.045.000,00	(63,05)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.598.687.175,00	6.724.035.323,00	(31,61)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	159.583.000,00	286.699.420,00	(44,34)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.085.000,00	62.278.800,00	(69,36)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	80.976.000,00	91.857.000,00	(11,85)
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	555.460,00	0,00	100,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.733.670.746,36	2.731.653.116,12	(36,53)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	820.653.781,00	1.898.017.035,00	(56,76)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	1.215.000,00	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	18.675.000,00	12.310.000,00	51,71
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	97.984.850,00	345.422.010,00	(71,63)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.688.653.289,70	5.455.786.257,00	(32,39)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	832.961.664,00	1.247.840.218,00	(33,25)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.662.745.523,03	8.797.913.733,05	(58,37)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	321.073.130,00	1.127.551.600,00	(71,52)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	19.490.800,00	(100,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	316.407.594,00	427.283.814,00	(25,95)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	721.446.130,00	1.047.791.604,00	(31,15)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	795.638.355,00	1.155.470.010,00	(31,14)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	159.702.000,00	630.904.930,00	(74,69)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	300.755.450,00	350.187.408,00	(14,12)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	392.340.200,00	587.926.800,00	(33,27)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	95.564.770,00	284.946.440,00	(66,46)
25	Beban Obat-Obatan-Obat	18.592.474.615,61	22.481.924.717,72	(17,30)
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	529.191.795,63	676.544.724,17	(21,78)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.056.887.173,56	13.457.692.013,78	(54,99)
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.073.574.604,87	1.292.743.350,00	137,76
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	157.168.119,94	144.291.900,00	8,92
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	814.507.750,00	1.006.623.225,00	(19,09)
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	8.330.000,00	49.857.000,00	(83,29)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	25.474.000,00	8.448.000,00	201,54
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.051.648.830,00	5.335.184.500,00	(61,54)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.918.665.391,00	11.238.238.220,00	(65,13)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.568.000,00	389.842.873,00	(98,32)
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	304.970.000,00	403.580.500,00	(24,43)
37	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.030.134.060,00	6.320.303.378,00	(52,06)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	22.461.405,00	(100,00)
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	39.120.000,00	83.974.000,00	(53,41)
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.624.000,00	94.000.000,00	(90,83)
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.500.000,00	217.606.000,00	(88,74)
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.657.000,00	1.180.987.800,00	(97,83)
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	56.800.000,00	(100,00)
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.624.000,00	550.000,00	1.468,00
45	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	271.816.000,00	(100,00)
46	Beban Pakaian Adat Daerah	46.333.980,00	1.358.469.000,00	(96,59)
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	27.290.500,00	88.182.860,00	(69,05)
48	Beban Pakaian Olahraga	63.293.000,00	912.708.000,00	(93,07)
49	Beban Pakaian Paskibraka	171.119.010,00	821.728.000,00	(79,18)
50	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	37.760.000,00	(100,00)
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.450.000,00	0,00	100,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	1.170.000,00	11.150.050,00	(89,51)
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8.010.000,00	6.223.000,00	28,72

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.400.000,00	1.250.000,00	12,00
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.540.000,00	3.387.000,00	(25,01)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	1.470.000,00	0,00	100,00
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	700.000,00	0,00	100,00
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	250.000,00	(100,00)
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	1.850.000,00	(100,00)
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	819.000,00	(100,00)
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	0,00	245.000,00	(100,00)
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	314.000,00	0,00	100,00
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	500.000,00	0,00	100,00
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	0,00	1.986.000,00	(100,00)
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	316.500,00	500.000,00	(36,70)
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.800.000,00	954.800,00	88,52
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	300.000,00	(100,00)
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	2.100.000,00	(100,00)
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	600.000,00	2.834.080,00	(78,83)
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.570.000,00	11.430.000,00	(68,77)
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	74.093.800,00	120.152.576,00	(38,33)
72	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	731.932.426,00	2.592.619.810,00	(71,77)
73	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	30.013.960,00	18.765.760,00	59,94
74	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	300.000,00	(100,00)
75	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	100.290.490,00	164.376.120,00	(38,99)
76	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	9.847.450,00	34.562.250,00	(71,51)
77	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	287.045.820,00	792.280.850,00	(63,77)
78	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.276.000,00	16.215.000,00	(36,63)
79	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	14.000.000,00	0,00	100,00
80	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	25.850.000,00	82.000.000,00	(68,48)
81	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	354.490.000,00	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
82	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	7.800.000,00	(100,00)
83	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	8.750.000,00	(100,00)
84	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7.923.100,00	10.750.000,00	(26,30)
85	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.880.000,00	6.680.000,00	(56,89)
86	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	255.000,00	(100,00)
87	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.303.800,00	11.266.200,00	(35,17)
88	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	450.000,00	0,00	100,00
89	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	200.000,00	(100,00)
90	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	1.350.000,00	0,00	100,00
91	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	72.032.488,00	70.093.612,00	2,77
92	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	21.479.420,00	0,00	100,00
93	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	4.723.144,00	0,00	100,00
94	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	700.744,00	1.875.000,00	(62,63)
95	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	105.000,00	0,00	100,00
96	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	20.746.855,00	1.003.000,00	1.968,48
97	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.775.200,00	6.388.290,00	(25,25)
98	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	567.500,00	(100,00)
99	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	198.000,00	(100,00)
100	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	0,00	1.250.000,00	(100,00)
101	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	199.417,00	0,00	100,00
102	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	40.000,00	(100,00)
103	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	300.000,00	(100,00)
104	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	930.000,00	(100,00)
105	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	0,00	480.000,00	(100,00)
106	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	0,00	5.250.000,00	(100,00)
107	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	875.000,00	(100,00)
108	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	430.000,00	400.000,00	7,50

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
109	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.632.400,00	6.186.000,00	(73,61)
110	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	650.000,00	780.000,00	(16,67)
111	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	700.000,00	820.000,00	(14,63)
112	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	56.000,00	0,00	100,00
113	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	2.650.000,00	65.062.500,00	(95,93)
114	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	14.190.000,00	5.430.000,00	161,33
115	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	268.576.266,00	0,00	100,00
116	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	200.000,00	(100,00)
117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.476.215,00	0,00	100,00
118	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	650.000,00	(100,00)
119	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	577.755,00	0,00	100,00
120	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	330.000,00	(100,00)
121	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.322.000,00	22.465.000,00	101,74
122	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.226.800,00	7.348.650,00	25,56
123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	8.750.000,00	0,00	100,00
124	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	2.442.000,00	(100,00)
125	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	29.930.000,00	(100,00)
126	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	4.362.090,52	(100,00)
127	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	26.200.000,00	129.972.271,48	(79,84)
128	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.143.000,00	1.017.648,00	503,65
129	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	8.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah		60.466.014.358,70	107.898.959.455,84	(43,96)

Terdapat perbedaan antara Beban Barang – LO dan Belanja Barang LRA sebagai berikut:

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang - Belanja Barang	60.466.014.358,70	43.691.290.918,80	16.774.723.439,90

Selisih antara Beban Barang dengan Belanja Barang Tahun 2025 adalah senilai Rp16.774.723.439,90 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.218 Selisih Beban Barang LO dan Belanja yang menjadi Belanja Persediaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	42.412.500,00
3	Penambahan dari timbulnya Utang	9.280.846.212,00
4	Pendapatan Hibah LO	2.265.523.354,27
5	Reklasifikasi dari Beban Hibah	3.425.922.950,98
6	Reklasifikasi dari Jasa	305.271.292,00
7	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	5.423.484.090,00
8	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD	4.798.127.428,00
9	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	210.000.000,00
10	Penambahan dari Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1.844.930.050,00
11	Penambahan dari Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	35.626.050,00
12	Penambahan dari Gedung dan Bangunan Ekstrakomtabel	8.500.000,00
13	Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.765.690,00
14	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang menjadi Beban dengan Saldo Akhir Persediaan Tahun 2025	2.635.252.149,42
15	Jumlah Penambahan (2 s.d 14)	30.375.661.766,67
17	Pengurangan	
16	Pelunasan Utang Tahun 2024	12.396.443.861,80
18	Reklasifikasi ke Beban Jasa	20.749.592,00
19	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	24.762.494,00
20	Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas	75.000,00
21	Reklasifikasi ke Beban Hibah	240.482.950,00
22	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	268.503.670,00
23	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	129.845.449,81
24	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	3.700.000,00
25	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	516.375.309,16
29	Jumlah Pengurangan (16 s.d 27)	13.600.938.326,77
30	Jumlah Perbedaan (16-28)	16.774.723.439,90

b) Beban Jasa

Pengkuan Beban Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp109.462.966.094,63 terjadi penurunan sebesar (23,35)% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp142,816,405,133.71, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.219 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	492.145.750,00	0,00	100,00
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.776.377,00	0,00	100,00
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.387.547.510,00	4.419.166.637,00	(68,60)
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.057.821.000,00	3.694.610.000,00	(71,37)
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.800.000,00	5.400.000,00	(48,15)
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.298.665.339,12	1.672.600.000,00	(22,36)
7	Beban Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	3.800.000,00	(47,37)
8	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00	11.600.000,00	(82,76)
9	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	16.400.000,00	(100,00)
10	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	110.700.000,00	(96,39)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
11	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	596.400.000,00	596.400.000,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.819.250.000,00	4.115.583.000,00	(31,50)
13	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.761.067.819,00	12.799.653.152,00	(8,11)
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	820.400.000,00	1.176.100.000,00	(30,24)
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	50.000.000,00	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	364.000.000,00	494.500.000,00	(26,39)
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	54.720.000,00	25.100.000,00	118,01
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	192.370.000,00	462.880.000,00	(58,44)
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.981.150.221,00	28.811.786.267,00	(16,77)
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.000.000,00	12.000.000,00	(66,67)
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.303.391.498,00	18.625.900.000,00	(28,58)
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	870.691.000,00	1.274.176.250,00	(31,67)
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.559.981.000,00	3.052.650.000,00	16,62
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	692.248.200,00	654.850.000,00	5,71
25	Beban Jasa Tenaga Supir	829.573.200,00	921.600.000,00	(9,99)
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	69.485.850,00	108.000.000,00	(35,66)
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	109.400.000,00	140.100.000,00	(21,91)
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	43.600.000,00	140.520.000,00	(68,97)
29	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	620.300.000,00	1.411.300.000,00	(56,05)
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.514.768,00	250.908.374,00	(97,80)
31	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	23.060.000,00	38.825.800,00	(40,61)
32	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	13.000.000,00	(100,00)
33	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	259.220.208,00	502.782.000,00	(48,44)
34	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	268.643.000,00	1.788.805.000,00	(84,98)
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.440.370,00	38.020.000,00	(25,20)
36	Beban Jasa Kalibrasi	168.295.987,00	159.379.000,00	5,59
37	Beban Jasa Pengolahan Sampah	706.121.000,00	1.116.900.000,00	(36,78)
38	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	1.080.000,00	(100,00)
39	Beban Jasa Pengukuran Tanah	13.110.000,00	13.089.112,00	0,16
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.002.165.900,00	11.220.520.000,00	(91,07)
41	Beban Jasa Operator Kapal	944.100.000,00	874.800.000,00	7,92
42	Beban Tagihan Telepon	136.385.548,00	143.063.560,00	(4,67)
43	Beban Tagihan Air	809.593.918,00	758.902.850,00	6,68
44	Beban Tagihan Listrik	6.504.190.547,00	7.060.709.157,00	(7,88)
45	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.985.000,00	47.140.000,00	(63,97)
46	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.644.378.953,00	3.796.656.481,00	(4,01)
47	Beban Paket/Pengiriman	101.346.500,00	682.686.060,00	(85,15)
48	Beban Penambahan Daya	2.136.800,00	2.043.921,00	4,54
49	Beban Registrasi/Keanggotaan	5.000.000,00	0,00	100,00
50	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	307.739.043,00	519.386.763,00	(40,75)
51	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	913.450.144,00	1.331.626.435,57	(31,40)
52	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6.803.502.249,00	0,00	100,00
53	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.481.750,00	0,00	100,00
54	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	37.000.000,00	0,00	100,00
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.357.560.960,00	1.274.789.296,00	6,49
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.814.138.800,00	12.283.655.700,00	4,32
57	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	947.685.300,00	919.802.800,00	3,03
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.817.828.112,00	2.130.723.793,00	(14,68)
59	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	174.310.794,74	161.260.829,76	8,09
60	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	185.554.375,73	154.358.851,00	20,21
61	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	43.393.736,00	49.460.000,00	(12,26)
62	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	18.810.000,00	0,00	100,00
63	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	12.698.400,00	0,00	100,00
64	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	104.000.000,00	(100,00)
65	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	49.400.000,00	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
66	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.500.000,00	0,00	100,00
67	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	194.895.000,00	(100,00)
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	97.437.200,00	305.910.000,00	(68,15)
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.700.000,00	25.550.000,00	(42,47)
70	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.100.000,00	(100,00)
71	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	22.778.680,00	208.675.000,00	(89,08)
72	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	2.000.000,00	(100,00)
73	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	13.500.000,00	54.000.000,00	(75,00)
74	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.061.320.000,00	1.169.024.000,00	(9,21)
75	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	1.500.000,00	(100,00)
76	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	0,00	22.000.000,00	(100,00)
77	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	0,00	2.260.000,00	(100,00)
78	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	25.625.308,00	0,00	100,00
79	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	124.917.500,00	170.750.000,00	(26,84)
80	Beban Sewa Mebel	345.000,00	0,00	100,00
81	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	85.140.000,00	(85,91)
82	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	144.000.000,00	(97,57)
83	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.171.878,00	53.203.411,00	(90,28)
84	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	180.000,00	(100,00)
85	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	4.500.000,00	(100,00)
86	Beban Sewa Peralatan Jaringan	236.404.109,59	0,00	100,00
87	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	512.700.329,63	656.289.989,86	(21,88)
88	Beban Sewa Bangunan Gudang	286.685.792,35	261.593.745,79	9,59
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	67.212.000,00	325.340.000,00	(79,34)
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	6.000.000,00	0,00	100,00
91	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	5.000.000,00	(100,00)
92	Beban Sewa Bangunan Parkir	0,00	7.500.000,00	(100,00)
93	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	89.916.666,67	(100,00)
94	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II	25.000.000,00	0,00	100,00
95	Beban Sewa Asrama	530.753.726,78	517.578.483,60	2,55
96	Beban Sewa Hotel	136.139.560,00	468.327.000,00	(70,93)
97	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	3.000.000,00	(100,00)
98	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	412.460.169,40	360.689.032,79	14,35
99	Beban Sewa Audio Visual	10.000.000,00	44.500.000,00	(77,53)
100	Beban Sewa Alat Musik	0,00	110.300.000,00	(100,00)
101	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	42.862.825,29	31.382.102,67	36,58
102	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	1.250.540,00	(100,00)
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	34.706.370,00	(100,00)
104	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	123.500.000,00	50.000.000,00	147,00
105	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	99.742.380,00	205.522.050,00	(51,47)
106	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	171.197.400,00	(100,00)
107	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	24.947.250,00	(100,00)
108	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	221.109.780,00	(100,00)
109	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	114.492.750,00	(100,00)
110	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.139.650,00	991.982.358,00	(90,01)
111	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	626.010.000,00	(100,00)
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	18.000.000,00	150.000.000,00	(88,00)
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	105.000.000,00	0,00	100,00
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	199.403.000,00	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
115	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	277.760.000,00	1.339.128.000,00	(79,26)
116	Beban Sosialisasi	0,00	175.779.807,00	(100,00)
117	Beban Bimbingan Teknis	6.968.058,00	874.120.307,00	(99,20)
118	Beban Diklat Kepemimpinan	4.715.000,00	5.500.000,00	(14,27)
119	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	34.500.000,00	9.000.000,00	283,33
Jumlah		109.462.966.094,63	142.816.405.133,71	(23,35)

Terdapat perbedaan antara Beban Jasa – LO dan Belanja Jasa LRA sebagai berikut:

	LO	LRA	Selisih
Beban Jasa-	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Jasa	109.462.966.094,63	119.422.253.210,27	(9.959.287.115,64)

Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2025 adalah senilai Rp(9.959.287.115,64) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.220 Selisih Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Beban dibayar dimuka	788.240.563,71
3	Reklasifikasi dari Persediaan	20.749.592,00
4	Reklasifikasi dari Aset Lainnya-ATB	17.000.000,00
5	Penambahan Beban Jasa dari timbulnya Utang	5.914.963.292,20
6	Jumlah Penambahan (2 s.d 5)	6.740.953.447,91
7	Pengurangan	
8	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	716.876.632,67
9	Reklasifikasi ke Persediaan	305.271.292,00
10	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.083.650,00
11	Pelunasan Utang Tahun 2024	15.415.967.838,00
12	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	186.041.150,88
13	Jumlah Pengurangan (8 s.d 12)	16.700.240.563,55
14	Jumlah Perbedaan (6-13)	(9.959.287.115,64)

c) Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp4.621.370.492,15 terjadi penurunan (74,03)% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp17.795.426.792,81, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.221 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	219.322.569,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	11.137.500,00	10.500.000,00	6,07
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	43.736.292,00	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	35.300.000,00	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	15.592.000,00	13.496.000,00	15,53
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	592.024.389,00	1.213.754.451,00	(51,22)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	232.452.300,00	677.994.600,00	(65,71)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.498.000,00	56.512.342,00	(93,81)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.920.000,00	25.532.800,00	(57,23)
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	18.530.000,00	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	70.279.000,00	902.342.407,00	(92,21)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	33.987.000,00	10.140.000,00	235,18
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	7.120.000,00	0,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	16.800.000,00	12.000.000,00	40,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	14.881.000,00	26.685.000,00	(44,23)
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	81.125.000,00	0,00	100,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.932.000,00	151.352.000,00	(74,94)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	459.956.282,00	1.746.916.860,00	(73,67)
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	16.500.000,00	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	9.592.000,00	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	371.091.000,00	352.572.740,00	5,25
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	110.583.206,00	(99,28)
23	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	64.620.000,00	20.000.000,00	223,10
25	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	684.463.034,00	667.617.375,00	2,52
26	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	52.879.481,00	40.793.000,00	29,63
27	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	15.921.000,00	(100,00)
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.420.000,00	101.886.530,00	(67,20)
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.275.000,00	0,00	100,00
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.557.700,00	89.145.000,00	(47,77)
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.910.000,00	199.916.000,00	(90,04)
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.574.250,00	60.924.000,00	(71,15)
33	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	53.165.450,00	(100,00)
34	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	0,00	4.500.000,00	(100,00)
35	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	703.161.175,00	995.104.780,20	(29,34)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
36	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	48.980.000,00	(100,00)
37	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	1.400.000,00	(100,00)
38	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	428.531.406,00	3.860.310.611,42	(88,90)
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	106.573.000,00	423.868.000,00	(74,86)
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	65.376.000,00	982.692.875,00	(93,35)
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	932.269.517,00	(100,00)
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	265.196.222,00	(100,00)
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	27.730.270,00	92.037.489,00	(69,87)
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	67.000.000,00	20.000.000,00	235,00
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	14.950.000,00	14.850.000,00	0,67
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	45.234.134,00	(100,00)
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	0,00	100.661.700,00	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.493.693,00	0,00	100,00
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	4.577.000,00	0,00	100,00
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.623.703,00	3.670.000,00	80,48
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	382.928.268,84	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	504.425.174,35	(100,00)
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	27.216.090,00	133.714.647,00	(79,65)
54	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	28.980.000,00	(100,00)
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Perambuan Pantai	36.223.000,00	64.992.000,00	(44,27)
56	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	28.800.000,00	(100,00)
57	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	118.837.170,15	650.880.858,00	(81,74)
58	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	318.638.500,00	(100,00)
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	170.172.000,00	(100,00)
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.609.800,00	439.290.000,00	(92,12)
61	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	3.157.000,00	(100,00)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
62	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	3.602.500,00	38.000.000,00	(90,52)
63	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	3.024.749,00	0,00	100,00
64	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	68.046.000,00	326.543.594,00	(79,16)
65	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	10.497.800,00	(100,00)
66	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	0,00	900.000,00	(100,00)
Jumlah		4.621.370.492,15	17.795.426.792,81	(74,03)

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan LRA sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan-Belanja Pemeliharaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	4.621.370.492,15	10.163.093.160,14	(5.541.722.667,99)

Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 adalah senilai Rp(5.541.722.667,99) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.222 Selisih Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Beban Pemeliharaan dari timbulnya Utang	1.273.105.793,00
3	Reklasifikasi dari Persediaan	24.762.494,00
4	Jumlah Penambahan (2 s.d 3)	1.297.868.287,00
5	Pengurangan	
6	Pelunasan Utang Tahun 2024	6.839.590.954,99
7	Jumlah Pengurangan	6.839.590.954,99
8	Jumlah Perbedaan (4-7)	(5.541.722.667,99)

d) Beban Perjalanan Dinas

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2025 sebesar Rp19.328.233.683,00 terjadi penurunan sebesar (70,87)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp66.343.024.923,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.223 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.112.323.698,00	39.587.618.310,00	(76,98)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.193.307.985,00	25.391.626.613,00	(59,86)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.602.000,00	1.295.030.000,00	(98,25)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	68.750.000,00	(100,00)
Jumlah		19.328.233.683,00	66.343.024.923,00	(70,87)

Terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas – LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	19.328.233.683,00	24.429.651.053,00	(5.101.417.370,00)

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah senilai Rp(5.101.417.370,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.224 Selisih Beban Perjalanan Dinas LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Penambahan dari timbulnya utang	643.698.605,00
3.	Reklasifikasi dari Beban Barang	75.000,00
4.	Jumlah Penambahan (2 s.d 3)	643.773.605,00
5.	Pengurangan	
6.	Pelunasan Utang Tahun 2024	5.601.216.612,00
7.	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	143.974.363,00
8.	Jumlah Pengurangan (6 s.d 7)	5.745.190.975,00
9.	Jumlah Perbedaan (4-8)	(5.101.417.370,00)

- e) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 Pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 sebesar Rp5,232,376,691.00 terjadi penurunan sebesar (16,57)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,271,922,292.00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.225 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	163.550.000,00	1.505.993.018,00	(89,14)
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	3.000.000,00	(100,00)
3	Beban Beasiswa	187.715.432,00	339.100.000,00	(44,64)
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.815.400.000,00	1.677.600.000,00	8,21
5	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	835.000.000,00	783.300.000,00	6,60
6	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	21.000.000,00	35.000.000,00	(40,00)
7	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	69.825.000,00	135.000.000,00	(48,28)
8	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.602.886.259,00	1.280.229.148,00	25,20
9	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	537.000.000,00	512.700.126,00	4,74
	Jumlah	5.232.376.691,00	6.271.922.292,00	(16,57)

Terdapat perbedaan antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA sebagai berikut:

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	5.232.376.691,00	5.625.556.691,00	(393.180.000,00)

Selisih antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 adalah senilai Rp(393.180.000,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.226 Selisih Beban Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Penambahan dari timbulnya utang	135.600.000,00
3.	Jumlah Penambahan	135.600.000,00
4.	Pengurangan	
5.	Pelunasan Utang Tahun 2024	528.780.000,00
6.	Jumlah Pengurangan	528.780.000,00
7.	Jumlah Perbedaan (3-6)	(393.180.000,00)

f) Beban Barang dan Jasa BOS

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar (100,00)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.602.707.561,00, dikarenakan ada perubahan pencatatan terbaru berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

g) Beban Barang dan Jasa BOSP

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 sebesar Rp4.800.414.163,00 terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar 7.388,95% dari tahun sebelumnya sebesar Rp64.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.227 Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	3.686.403.863,00	0,00	100,00
2	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	480.814.000,00	0,00	100,00
3	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	422.068.300,00	0,00	100,00
4	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	29.500.000,00	1,69
5	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	181.128.000,00	0,00	100,00
6	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	34.600.000,00	100,00
Jumlah		4.800.414.163,00	64.100.000,00	7.388,95

Terdapat perbedaan antara Beban Beban Barang dan Jasa BOSP – LO dan Belanja Barang dan Jasa BOSP LRA sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa BOSP	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	4.800.414.163,00	10.245.963.275,00	(5.445.549.112,00)

Selisih antara Beban Barang dan Jasa BOSP dengan Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 adalah senilai Rp(5.445.549.112,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.228 Selisih Beban Barang dan Jasa BOSP dan Belanja Barang dan Jasa BOSP LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	5.040.000,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	18.680.000,00
4.	Jumlah Penambahan	23.720.000,00
5.	Pengurangan	
6.	Reklasifikasi ke Persediaan	5.423.484.090,00
7.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.750.000,00
8.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	23.886.000,00
9.	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	18.149.022,00
10.	Jumlah Pengurangan	5.469.269.112,00
11.	Jumlah Perbedaan (4-10)	(5.445.549.112,00)

h) Beban Barang dan Jasa BLUD

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2025 sebesar Rp24.821.066.825,75 terjadi kenaikan sebesar 39,55% dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.786.028.566,75.

Terdapat perbedaan antara Beban Beban Barang dan Jasa BLUD – LO dan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa BLUD	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	24.821.066.825,75	29.592.066.296,75	(4.770.999.471,00)

Selisih antara Beban Barang dan Jasa BLUD dengan Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 adalah senilai Rp(4.770.999.471,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.229 Selisih Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Penambahan dari timbulnya utang	3.047.725.866,00
3.	Jumlah Penambahan	3.047.725.866,00
4.	Pengurangan	
5.	Reklasifikasi dari Persediaan	4.798.127.428,00
6.	Pelunasan Utang Tahun 2024	3.020.597.909,00
7.	Jumlah Pengurangan	7.818.725.337,00
8.	Jumlah Perbedaan (3-7)	(4.770.999.471,00)

7.5.4.2.3 Beban Subsidi

Pengakuan Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp29.375.000,00 terjadi kenaikan sebesar (100,00)% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada penambahan beban subsidi berupa Pembayaran Subsidi Margin Pembiayaan Usaha Mikro pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

7.5.4.2.4 Beban Hibah

Pengakuan Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp4.701.850.681,38 terjadi penurunan sebesar (86,40)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp34.575.910.749,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.230 Rincian Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	18.570.000.000,00	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	436.079.149,00	3.217.250.000,00	(86,45)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	587.604.945,38	0,00	100,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	0,00	100,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	373.938.714,00	5.726.931.782,00	(93,47)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.320.763.240,00	4.625.218.394,00	(71,44)
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.910.250,00	16.470.808,00	(3,40)
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	269.513.502,00	943.139.500,00	(71,42)
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.058.602.000,00	494.100.000,00	114,25
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	454.032.076,00	(100,00)
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	539.438.881,00	528.768.189,00	2,02
Jumlah		4.701.850.681,38	34.575.910.749,00	(86,40)

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah – LO dan Belanja Hibah LRA sebagai berikut:

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Hibah	4.701.850.681,38	12.699.809.695,00	(7.997.959.013,62)

Selisih antara Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah LRA senilai Rp(7.997.959.013,62) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.231 Selisih Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	133.200.000,00
3	Penambahan Beban Hibah yang berasal dari Utang Tahun 2024	988.084.771,98
4	Reklasifikasi dari Persediaan	15.910.250,00
5	Jumlah Penambahan	1.137.195.021,98
6	Pengurangan	
7	Pelunasan Utang Tahun 2024	6.293.336.030,00
8	Reklasifikasi ke Persediaan	2.838.318.005,60
9	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	3.500.000,00
10	Jumlah Pengurangan	9.135.154.035,60
11	Jumlah Perbedaan (5-10)	(7.997.959.013,62)

7.5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp1.614.530.668,00 mengalami penurunan sebesar (79,50)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.874.796.106,65, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.232 Rincian Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	449.890.668,00	775.270.517,00	(41,97)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	556.100.000,00	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.164.640.000,00	1.154.400.000,00	0,89
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	5.389.025.589,65	(100,00)
Jumlah		1.614.530.668,00	7.874.796.106,65	(79,50)

Terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial – LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	1.614.530.668,00	1.359.240.000,00	255.290.668,00

Selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp255.290.668,00 merupakan pelaksanaan Bantuan Sosial tidak terencana yang berasal dari Belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.233 Selisih Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD Pelaksana	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	126.497.668,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	128.793.000,00
Jumlah		255.290.668,00

7.5.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp189.435.007.658,91 mengalami kenaikan sebesar 14,44% dari tahun sebelumnya sebesar Rp165.532.926.064,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.234 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.178.011.311,14	47.447.219.599,11	7,86
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.453.523.703,98	29.407.001.789,65	3,56
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.505.352.126,40	87.389.922.297,63	23,02
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	298.120.517,39	1.288.782.378,13	(76,87)
Jumlah		189.435.007.658,91	165.532.926.064,52	14,44

Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan LO dan LRA sebagai berikut:

Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Penyusutan	189.435.007.658,91	0,00	189.435.007.658,91

Selisih antara Beban Penyusutan LO dengan LRA sebesar Rp189.435.007.658,91. Ini disebabkan karena Beban Penyusutan adalah akun LO yang merupakan Belanja Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

7.5.4.2.7 Beban Transfer

Pengakuan Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp62.643.684.997,00 mengalami penurunan (4,54)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.235 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.317.830.800,00	2.353.880.000,00	83,43
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	144.720.100,00	362.568.500,00	(60,08)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	58.181.134.097,00	62.904.512.900,00	(7,51)
Jumlah		62.643.684.997,00	65.620.961.400,00	(4,54)

Terdapat perbedaan antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebagai berikut:

Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Transfer dan Belanja Transfer	62.643.684.997,00	114.203.474.591,00	(51.559.789.594,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp(51.559.789.594,00) merupakan pengurangan beban Transfer Dana Desa yang dicatat sebagai utang dan pelunasan utang pada saat disalurkan ke rekening desa sebesar Rp(51.559.789.594,00).

7.5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp1.972.146.395,39 terjadi penurunan sebesar (47,20)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.735.348.142,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.236 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.534.655,00	4.363.130,00	(64,83)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir Kuarsa	0,00	45.490.625,00	(100,00)
3	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	1.860.426.789,55	1.722.578.111,31	8,00
4	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.613.635,96	19.680.085,70	(46,07)
5	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	48.859,43	0,00	100,00
6	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	1.368.395,45	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)	0,00	1.860.658.919,45	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	5.529.810,00	0,00	100,00
9	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	12.750,00	(100,00)
10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	1.134.520,55	(100,00)
11	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	92.624.250,00	81.430.000,00	13,75
Jumlah		1.972.146.395,39	3.735.348.142,01	(47,20)

Terdapat perbedaan antara Beban Penyisihan Piutang LO dan LRA sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	1.972.146.395,39	0,00	1.972.146.395,39

Selisih antara Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.888.549.330,51, disebabkan karena Beban Penyisihan Piutang yang merupakan akun dari LO dan bukan merupakan akun LRA.

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2025 sebesar Rp133.587.067.567,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.237 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan	1.058.854.557.637,47	927.480.702.987,15	14,16
2	Beban	925.267.490.069,91	1.140.191.320.781,91	(18,85)
SURPLUS/DEFISIT		133.587.067.567,56	(212.710.617.794,76)	(162,80)

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2025 Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(5.609.754.975,50) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.238 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	94.284.832,00	(100,00)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	585.460,00	(100,00)
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	(3.648.794.942,50)	(67.050.666,17)	5.341,85
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.963.147.533,00)	(1.823.373.466,00)	7,67
Jumlah		(5.611.942.475,50)	(1.795.553.840,17)	212,55

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp(5.611.942.475,50) terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar 212,55% dibanding tahun 2024 sebesar Rp(1.795.553.840,17).

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp(3.646.607.442,50) terjadi atas penghapusan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat dan Pelunasan Dana Bergulir pada tahun 2025.

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.963.147.533,00) adalah pencatatan kerugian yang terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar biasa per 31 Desember 2025 adalah Rp111.000.000,00. Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari:

Tabel 7.5.239 Rincian Pos Luar Biasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian atas Bantuan keuangan yang bersifat khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan	1.500.000,00
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (BTT DPRKPP)	109.500.000,00
Jumlah		111.000.000,00

Terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa LO dan LRA sebagai berikut:

Beban Luar Biasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	<u>111.000.000,00</u>	<u>854.213.763,87</u>	<u>(743.213.763,87)</u>

Selisih antara Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga LRA senilai Rp(743.213.763,87) terdiri dari :

Tabel 7.5.240 Selisih Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Tidak Terduga LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pelunasan Utang Tahun 2024	487.923.095,87
2	Reklasifikasi ke Beban Bantuan Sosial	255.290.668,00
Jumlah		(743.213.763,87)

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>127.864.125.092,06</u>	<u>(215.339.544.730,80)</u>

Surplus-LO tahun 2025 sebesar Rp127.864.125.092,06 terjadi kenaikan sebesar (159,66)% dibanding tahun 2024 Surplus-LO sebesar Rp(215.339.544.730,80), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.241 Rincian Surplus/Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	133.587.067.567,56	(212.710.617.794,76)	(162,80)
2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(5.611.942.475,50)	(1.795.553.840,17)	212,55
3	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(111.000.000,00)	(833.373.095,87)	(86,68)
Jumlah		127.864.125.092,06	(215.339.544.730,80)	(159,38)

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	949.796.897.567,13	971.829.919.795,86
Arus Kas Keluar	822.243.806.936,83	954.746.656.424,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	127.553.090.630,30	17.083.263.371,84

Pada tahun 2025, terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp127.553.090.630,30 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp949.796.897.567,13 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp822.243.806.936,83. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.242 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	59.975.027.423,00	27.007.756.522,38
Penerimaan Retribusi Daerah	34.641.594.142,00	26.305.988.873,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.601.371.891,00	5.387.416.960,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	8.594.497.573,13	7.946.430.318,48
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	116.953.745.200,00	88.080.772.910,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	98.745.383.000,00	124.038.209.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	406.043.734.973,00	427.577.646.211,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	89.396.080.609,00	133.151.042.118,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	13.909.893.000,00	5.699.849.000,00
Penerimaan Dana Desa	51.559.789.594,00	54.367.721.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.211.110.525,00	64.180.184.644,00
Penerimaan Hibah	0,00	636.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	338.000.000,00	560.000.000,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.826.669.637,00	6.890.902.239,00
Jumlah Arus Kas Masuk	949.796.897.567,13	971.829.919.795,86
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	449.927.819.282,00	480.835.325.471,00
Pembayaran Barang dan Jasa	243.169.874.604,96	308.495.704.962,37
Pembayaran Subsidi	29.375.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	12.699.809.695,00	37.206.697.484,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.359.240.000,00	7.555.114.589,65
Pembayaran Tak Terduga	854.213.763,87	665.131.517,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.317.830.800,00	2.353.880.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	144.720.100,00	362.568.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	109.740.923.691,00	117.272.233.900,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah Arus Kas Keluar	822.243.806.936,83	954.746.656.424,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	127.553.090.630,30	17.083.263.371,84

Tidak terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA.

Pendapatan LRA	Rp 949.796.897.567,13
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	<u>Rp 949.796.897.567,13</u>
Selisih	Rp 0,00

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus Kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	1.079.316.280,00
Arus Kas Keluar	125.945.572.742,93	178.028.354.654,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(125.945.572.742,93)	(176.949.038.374,56)

Penurunan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(125.945.572.742,93) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp125.945.572.742,93. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.243 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.079.316.280,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	1.079.316.280,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	1.574.518.532,65	1.449.980.299,18
Perolehan Peralatan dan Mesin	30.201.275.780,59	54.296.918.498,52
Perolehan Gedung dan Bangunan	39.599.766.399,64	36.218.407.340,13
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.438.785.930,05	84.811.150.755,73
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.717.356.100,00	1.117.419.129,00
Belanja Modal Aset Lainnya	413.870.000,00	134.478.632,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	125.945.572.742,93	178.028.354.654,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(125.945.572.742,93)	(176.949.038.374,56)

Tidak ada perbedaan antara Belanja Modal LRA dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Kas Masuk	60.878.164.784,36	71.270.212.664,00
Arus Kas Keluar	60.881.373.641,36	71.267.003.807,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(3.208.857,00)	3.208.857,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(3.208.857,00) Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.244 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.923.646.761,36	71.270.212.664,00
Jumlah Arus Kas Masuk	60.923.646.761,36	71.270.212.664,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.881.373.641,36	71.267.003.807,00
Jumlah Arus Kas Keluar	60.881.373.641,36	71.267.003.807,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	42.273.120,00	3.208.857,00

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.245 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	508.502.806,00	508.502.806,00	0,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	335.597,00	335.597,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	2.951.714,00	2.951.714,00	0,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	47.779.227,00	47.779.227,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	5.617.868,00	5.617.868,00	0,00
6	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	432.721,00	432.721,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	407.084.118,00	407.084.118,00	0,00
8	Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.221.478.840,00	1.221.478.840,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	0,00	15.211.786.616,00	15.211.786.616,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	0,00	9.777.529,00	9.777.529,00	0,00
11	Iuran Jaminan Kesehatan 1% (IWP 1%)	0,00	3.234.451.942,00	3.234.451.942,00	0,00
12	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	12.485.283.427,00	12.485.283.427,00	0,00
13	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	0,00	459.253.999,00	459.253.999,00	0,00
14	PPN	2.265.406,00	15.727.182.105,88	15.688.173.628,88	41.273.883,00
15	PPh21	30.000,00	8.512.731.595,00	8.512.545.595,00	216.000,00
16	PPh22	0,00	688.560.941,03	688.560.941,03	0,00
17	PPh23	913.451,00	530.324.053,45	527.245.410,45	3.992.094,00
18	PPh Ayat 4 ayat 2	0,00	1.757.645.802,00	1.757.645.802,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
19	PPH pasal 25	0,00	112.465.860,00	112.465.860,00	0,00
Jumlah		3.208.857,00	60.923.646.761,36	60.881.373.641,36	45.481.977,00

7.5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(Rp)	(Rp)
	1.649.791.007,37	(159.862.566.145,72)

Kenaikan Kas selama periode tahun 2025 sebesar Rp1.649.791.007,37 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD tahun 2025 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan Kenaikan Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.246 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	127.553.090.630,30	17.083.263.371,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(125.945.572.742,93)	(176.949.038.374,56)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	42.273.120,00	3.208.857,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	1.649.791.007,37	(159.862.566.145,72)

7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD,BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	4.110.100.555,67	163.972.666.701,39

Saldo Awal Kas sebesar Rp4.110.100.555,67 yang merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.247 Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	305.302.268,40
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	72.514.764,79
3	Saldo Kas Bendahara Penerimaan	8.640.688,00
4	Saldo Kas Dana BOS	255.712.503,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	265.175.582,81
6	Kas Dana BOK Puskesmas	3.123.707.640,00
7	Kas Lainnya	79.047.108,67
Jumlah Kas Akhir		4.110.100.555,67

Tidak terdapat perbedaan saldo awal kas tahun 2025 dengan Saldo akhir tahun 2024.

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	5.759.891.563,04	4.110.100.555,67

Saldo Kas Akhir sebesar Rp5.759.891.563,04 yang merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.248 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	1.533.034.626,30
2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.746.258,00
3	Kas di BLUD	1.640.097.292,93
4	Kas Dana BOSP	254.098.419,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	292.830.123,81
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.864.950.175,00
7	Kas Lainnya	165.134.668,00
Jumlah Kas Akhir		5.759.891.563,04

Tidak terdapat selisih perbedaan antara saldo kas Laporan Arus Kas dengan Kas dan Setara Kas pada Neraca.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp2.741.115.230.870,65 yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024.

7.5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp127.864.113.326,69 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selisih sebesar Rp6.984.446.522,96 merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian disajikan dalam koreksi ekuitas lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.249 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Saldo Awal Persediaan	42.412.500,00
3	Koreksi Aset Tanah Tahun Sebelumnya	7.976.682.999,99
4	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Hibah Tahun Sebelumnya	89.238,00
5	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Sebelumnya	1.019.817.253,00
6	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Sebelumnya	0,73
7	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	208.280.000,00
8	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Modal Tanah Tahun Sebelumnya	0,03
9	Koreksi Kelebihan Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Sebelumnya	16.224.230,00
10	Koreksi Penyisihan lain-lain PAD yang Sah	79.179.322,00
11	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak	45.490.625,00
12	Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi	705.925.576,12
13	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	350.652.186,79
14	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	117.704.860,12
15	Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,01
16	Koreksi Penambahan TGR dari Beban Pemeliharaan Tahun sebelumnya Temuan BPK	45.467.397,68
17	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Temuan BPK	17.192.414,82
18	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Temuan BPK	521.827,13
19	Koreksi Utang Belanja Atas Kekurangan Volume Pekerjaan yang terpasang Temuan BPK atas Hibah yang telah diserahkan	95.738.559,36
20	Koreksi Pencatatan Piutang Sewa Rumah Dinas Pemda Temuan BPK	306.600.000,00
21	Koreksi Aset Tanah Tahun Sebelumnya Temuan BPK	14.810.000,00
22	Koreksi Aset Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya Temuan BPK	2.715.424.565,56
23	Jumlah penambahan (2 s.d 22)	13.758.213.556,34
24	Pengurangan	

No	Uraian	Jumlah
25	Koreksi Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya Temuan BPK	300.000.000,00
26	Koreksi Aset tetap Tanah tahun sebelumnya Temuan BPK	56.880.000,00
27	Koreksi Keurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya hasil Reviu Inspektorat	181.500.000,00
28	Koreksi Keurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Sebelumnya hasil Reviu Inspektorat	3.717.266,16
29	Koreksi Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD Temuan BPK	1.533.000,00
30	Koreksi Aset tetap lainnya tahun sebelumnya	1.485.000,00
31	Koreksi Aset Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya	2.765.750,03
32	Koreksi Aset Jalan, jaringan dan irigasi tahun sebelumnya	59.754.451,46
33	Koreksi Aset Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	208.280.000,02
34	Koreksi Kelebihan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah	1.959.440.000,00
35	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.044.873,71
36	Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang	2.963.362.599,00
37	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak	947.095.693,00
38	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi	82.908.400,00
39	Jumlah pengurangan (25 s.d 38)	6.773.767.033,38
40	Jumlah Selisih (23 - 39)	6.984.446.522,96

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.875.963.790.720,30.

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016' - 7019' Lintang Utara dan 1050 00' - 110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padsolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 Meter dari permukaan air laut ini ber ibu kota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjung Pinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Lingkungan Hidup
11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perhubungan
14. Komunikasi dan Informatika
15. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepemudaan dan Olahraga

17. Perpustakaan dan Kearsipan
18. Pemadam Kebakaran dan Keselamatan

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Perindustrian
- b. Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pengelolaan Perbatasan
 7. Inspektorat daerah
 8. Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Penanggulangan Bencana
- c. Urusan Kewilayahan
 1. Kecamatan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025 yang pendapatannya tidak diterima melalui Kasda dan langsung digunakan langsung oleh entitas yang tidak bertindak sebagai BLUD, yaitu:

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas)
- c. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) yang terdiri dari:

1. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat SD dan SMP
2. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini)
3. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan)

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2025 dari 15 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Natuna sebesar Rp6.826.669.637,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp6.799.015.096,00 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp292.830.123,81 dicatat Kas Dana kapitasi JKN dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.1 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	Saldo awal	Pendapatan	Total Belanja	Saldo Akhir 2025
1	Puskesmas Ranai	2.346,00	1.929.415.516,00	1.916.286.522,00	13.131.340,00
2	Puskesmas Bunguran Timur Laut	67.155.650,00	377.135.783,00	378.832.734,00	65.458.699,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	3.280.487,00	350.600.068,00	329.056.751,00	24.823.804,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	13.895.763,00	243.927.659,00	255.882.042,00	1.941.380,00
5	Puskesmas Kelarik	20.979.673,00	423.825.527,00	432.470.817,00	12.334.383,00
6	Puskesmas Sedanau	38.502.394,57	676.732.805,00	677.560.544,00	37.674.655,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	49.020.316,00	363.504.884,00	399.483.554,00	13.041.646,00
8	Puskesmas Pulau Laut	693.188,00	253.231.722,00	246.709.698,00	7.215.212,00
9	Puskesmas Midai	44.153.609,00	469.253.851,00	468.782.250,00	44.625.210,00
10	Puskesmas Serasan	10.725,03	570.104.475,00	560.587.996,00	9.527.204,03
11	Puskesmas Serasan Timur	6.756.973,00	370.162.773,00	362.259.318,00	14.660.428,00
12	Puskesmas Subi	3.848.529,00	308.500.671,00	307.489.639,00	4.859.561,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	16.765.092,21	242.217.279,00	239.713.705,00	19.268.666,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	36.571,00	186.232.729,00	170.909.724,00	15.359.576,00
15	Puskesmas Suak Midai	74.266,00	61.823.895,00	52.989.802,00	8.908.359,00
Total		265.175.582,81	6.826.669.637,00	6.799.015.096,00	292.830.123,81

b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

BOK Puskesmas merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan. Total Realisasi Pendapatan dan Belanja BOK Kesehatan per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 7.6.2 Daftar Pendapatan dan Belanja BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Total Penerimaan	Realisasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Batubi Jaya	237.724.659,00	184.866.341,00	370.599.862,00	51.991.138,00
2	Puskesmas Bunguran Selatan	151.291.285,00	264.031.715,00	367.158.586,00	48.164.414,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	160.983.052,00	230.065.948,00	335.545.027,00	55.503.973,00
4	Puskesmas Kelarik	322.112.079,00	179.911.921,00	315.605.826,00	186.418.174,00
5	Puskesmas Midai	293.110.874,00	51.773.126,00	290.197.326,00	54.686.674,00
6	Puskesmas Pulau Laut	165.617.524,00	135.017.476,00	228.121.058,00	72.513.942,00
7	Puskesmas Pulau Tiga Barat	219.828.763,00	82.317.237,00	227.689.805,00	74.456.195,00
8	Puskesmas Pulau Tiga	182.633.433,00	234.098.567,00	376.447.672,00	40.284.328,00

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Total Penerimaan	Realisasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
9	Puskesmas Ranai	380.260.112,00	1.245.165.888,00	1.023.526.234,00	601.899.766,00
10	Puskesmas Sedanau	211.872.289,00	397.086.711,00	402.184.161,00	206.774.839,00
11	Puskesmas Serasan	319.301.265,00	183.648.735,00	368.223.547,00	134.726.453,00
12	Puskesmas Serasan Timur	217.638.510,00	147.677.490,00	247.234.729,00	118.081.271,00
13	Puskesmas Subi	162.535.702,00	244.842.298,00	347.551.294,00	59.826.706,00
14	Puskesmas Tanjung	98.798.093,00	461.608.907,00	480.039.698,00	80.367.302,00
15	Puskesmas Suak Midai	0,00	234.952.000,00	155.697.000,00	79.255.000,00
Total		3.123.707.640,00	4.277.064.360,00	5.535.821.825,00	1.864.950.175,00

c. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOSP mengikuti Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOSP, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS, dan belanja lainnya yang relevan.

Total Dana BOSP yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp18.105.059.394,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp18.090.957.064,00 sehingga Saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 sebesar Rp254.098.419,00 disajikan dalam kas dana BOS. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.3 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOSP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pendapatan 2025	Pengurangan		Saldo 31 Desember 2025
				Belanja 2025	Mutasi Kas ke Kas Daerah	
1	Dana BOS SD & SMP	246.730.471,00	15.655.076.772,00	15.648.259.824,00	0,00	253.547.419,00
2	Dana BOP PAUD	8.682.032,00	2.150.502.622,00	2.142.917.240,00	15.716.414,00	551.000,00
3	Dana BOP Kesetaraan	300.000,00	299.480.000,00	299.780.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		255.712.503,00	18.105.059.394,00	18.090.957.064,00	15.716.414,00	254.098.419,00

1. Dana BOS Tingkat SD & SMP

Total Dana BOS Tingkat SD & SMP yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp15.655.076.772,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp15.648.259.824,00 sehingga Saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 sebesar Rp253.547.419,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Tingkat SD & SMP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.4 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Tingkat SD dan SMP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo akhir
1	Dana BOS SD	99.259.754,00	10.027.835.489,00	10.048.893.341,00	78.201.902,00
2	Dana BOS SMP	147.470.717,00	4.568.639.283,00	4.540.764.483,00	175.345.517,00
3	SD/SMP Swasta	0,00	1.058.602.000,00	1.058.602.000,00	0,00
Jumlah		246.730.471,00	15.655.076.772,00	15.648.259.824,00	253.547.419,00

2. Dana BOP PAUD

Total Dana BOP PAUD yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp2.150.502.622,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp2.142.917.240,00. sehingga Saldo kas Dana BOP PAUD Per 31 Desember 2025 Rp551.000,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.5 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOP PAUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pendapatan 2025	Pengurangan		Saldo Akhir
				Belanja 2025	Mutasi Kas ke Kas Daerah	
1	Dana BOP PAUD Negeri	8.682.032,00	816.518.082,00	822.154.000,00	2.495.114,00	551.000,00
2	Dana BOP PAUD Swasta	0,00	1.333.984.540,00	1.320.763.240,00	13.221.300,00	0,00
Jumlah		8.682.032,00	2.150.502.622,00	2.142.917.240,00	15.716.414,00	551.000,00

3. Dana BOP Kesetaraan

Total Dana BOP Kesetaraan yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp299.480.000,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp299.780.000,00. sehingga Saldo kas Dana BOP kesetaraan Per 31 Desember 2025 Rp0,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOP Kesetaraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.6 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOP Kesetaraan

(dalam Rupiah)

NO	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	SKB NATUNA (Tahap 1)	P9970341	Bunguran Timur	300.000,00	299.480.000,00	299.780.000,00	0,00

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2025 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.

